



L K P J

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.



Segala puja dan puji dipersembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan tuntunan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

LKPJ Wali kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 sebagai laporan Wali kota Dumai kepada DPRD Kota Dumai, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kita merasakan bersama bahwa pembangunan Kota Dumai yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2020 terdapat kemajuan dan keberhasilan dalam rangka memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kita terus berharap dan berdoa kepada Allah SWT, pelaksanaan program pembangunan selanjutnya pada masa tahun 2016 – 2021 semakin lebih baik dan lebih menyejahterakan menuju masyarakat yang makmur dan madani.

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dumai, Maret 2021

WALI KOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	4
1.3 DATA UMUM DAERAH	18
1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH	18
2. JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	20
3. JUMLAH PNS	20
4. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN	21
5. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA	22
6. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	24
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020	25
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN BELANJA, DAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN	25
2.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN	26
2.3 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30
A. PAJAK DAERAH	30
B. RETRIBUSI DAERAH	32
C. PENDAPATAN HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	37

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	38
2.4 DANA PERIMBANGAN	38
2.5 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	47
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	47
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	49
A.1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN, OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49
A.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN, OLEH DINAS KESEHATAN DAN RSUD	89
A.2.1 URUSAN WAJIB KESEHATAN, OLEH DINAS KESEHATAN	89
A.2.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN, OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	146
A.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158
A.4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	197
A.5 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	211
A.5.1 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OLEH	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	211
A.5 .2 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ..	216
A.5 .3 URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	237
A.6 URUSAN WAJIB SOSIAL, OLEH DINAS SOSIAL	247
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	260
B.1 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	260
B.2 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA, OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	291
B.3 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP, OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	307
B.4 URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, OLEH DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	332
B.5 URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	353
B.6 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN, OLEH DINAS PERHUBUNGAN	373
B.7 URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, OLEH DINAS PERINDUSTRIAN,	

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	388
B.8 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL, OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	412
B.9 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	434
B.10 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN, OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	467
B.11 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	489
C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN	510
C.1 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, OLEH DINAS PERIKANAN	510
C.2 URUSAN PILIHAN PERTANIAN, OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	523
C.3 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN, OLEH DINAS PERDAGANGAN	559
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	569
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH SEKRETARIAT DAERAH	569
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH SEKRETARIAT DPRD	609
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN DUMAI TIMUR	622
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN DUMAI SELATAN	640
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN DUMAI KOTA	662
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN	

DUMAI BARAT	679
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN MEDANG KAMPAI	707
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN BUKIT KAPUR	729
D.1 URUSAN PEMERINTAHAN, OLEH KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	739
D.2 URUSAN PENGAWASAN, OLEH INSPEKTORAT	754
D.3 URUSAN PERENCANAAN, OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	761
D.4 URUSAN KEUANGAN, OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ..	773
D.4 URUSAN KEUANGAN, OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH	793
D.5 URUSAN KEPEGAWAIAN, OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	810
E. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI	820
F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ KOTA DUMAI	822
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	873
BAB V PENUTUP	876

DAFTAR TABEL

BAB 1	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2015-2019	I-20
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018-2019	I-21
Tabel 1.3	Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020	I-22
Tabel 1.4	Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2020	I-23
BAB 2	PENJABARAN APBD TAHUN 2020	
Tabel 2.1	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2020 dan Perwako No 80 Tahun 2020	II-26
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020	II-27
Tabel 2.3	Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020	II-42
Tabel 2.4	Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020	II-43
BAB 3	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020	III-49
Tabel 3.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Dumai Tahun 2020	III-50
Tabel 3.3	Angka Harapan Lama Sekolah	III-51
Tabel 3.A.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	III-75
Tabel 3.4	Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	III-83
Tabel 3.5	Realisasi Program dan Kegiatan	III-83
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas kesehatan Kota Dumai Tahun 2020	III-89
Tabel 3.7	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru di Indonesia Provinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2014 sampai	III-95

	dengan 2020	
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Standar Pelayanan Kesehatan	III-118
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan	III-119
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	III-119
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	III-120
Tabel 3.A.2.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Dumai	III-125
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	III-146
Tabel 3.A.2.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	III-152
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	III-158
Tabel 3.A.3	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	III-175
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-197
Tabel 3.A.4	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai	III-209
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020	III-211
Tabel 3.16	Realisasi Program, Kegiatan Rutin, Anggaran dan Realisasi Berdasarkan DPA OPD Satpol PP Kota Dumai	III-213
Tabel 3.A.5.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	III-215
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2020	III-216

Tabel 3.A.5.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2020	III-224
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2020	III-237
Tabel 3.A.5.3	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2020	III-245
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2020	III-247
Tabel 3.A.6	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2020	III-257
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020	III-260
Tabel 3.B.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020	III-281
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020	III-291
Tabel 3.22	Kasus Pertahun	III-296
Tabel 3.23	Jumlah Besar UMK Kota Dumai	III-299
Tabel 3.B.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020	III-306
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020	III-307
Tabel 3.B.3	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2020	III-322
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020	III-332
Tabel 3.26	Nilai Persepsi, Nilai IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	III-334
Tabel 3.B.4	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020	III-346
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2020	III-353

Tabel 3.B.5	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2020	III-370
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020	III-373
Tabel 3.B.6	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020	III-384
Tabel 3.29	Indikator Kinerja sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai tahun 2020	III-388
Tabel 3.30	Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai tahun 2020	III-389
Tabel 3.31	Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Dumai Tahun 2020	III-395
Tabel 3.B.7	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2020	III-398
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2020	III-412
Tabel 3.B.8	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2020	III-425
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020	III-434
Tabel 3.B.9	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020	III-445
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020	III-467
Tabel 3.35	Ratio Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan pada Program dan Kegiatan Urusan Rutin	III-475
Tabel 3.36	Ratio Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan pada Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan	III-479
Tabel 3.37	Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Umum Kota Dumai	III-479
Tabel 3.38	Data Pengunjung Tahun 2020	III-480
Tabel 3.39	Daftar Nama-nama Perpustakaan Kelurahan/masyarakat yang Menjadi Binaan Perpustakaan Daerah Kota Dumai	III-480

Tabel 3.40	Ratio Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan pada Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan	III-483
Tabel 3.41	PD/Kantor/Instansi Pemerintah yang di Lakukan Pengumpulan Data (Akuisis) pada Tahun 2009-2020 Sesuai Peraturan Kearsipan	III-484
Tabel 3.B.10	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020	III-486
Tabel 3.42	Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2020	III-489
Tabel 3.43	Predikat Indeks SPBE	III-490
Tabel 3.44	Hasil Perolehan Nilai Indeks SPBE Kota Dumai Tahun 2019	III-490
Tabel 3.45	Alokasi Bandwith Internet Tahun 2020	III-492
Tabel 3.46	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Dumai yang Dibina	III-494
Tabel 3.47	Realisasi Keuangan	III-496
Tabel 3.B.11	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2020	III-506
Tabel 3.48	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan	III-510
Tabel 3.C.1	Pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2020	III-520
Tabel 3.49	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran DKPP 2018-2019	III-523
Tabel 3.C.2	Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2020	III-540
Tabel 3.50	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Dinas Perdagangan Kota Dumai	III-559
Tabel 3.C.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2020	III-567
Tabel 3.51	Indikator Kinerja Perubahan Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Dumai	III-569
Tabel 3.52	Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2020	III-573
Tabel 3.D.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020	III-603
Tabel 3.53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2020	III-609
Tabel 3.54	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Timur	III-622

Tabel 3.55	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2020	III-640
Tabel 3.56	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Kota Tahun 2020	III-662
Tabel 3.57	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penerima Keluarga Harapan (PKH)	III-665
Tabel 3.58	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat Tahun 2020	III-679
Tabel 3.59	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2020	III-707
Tabel 3.60	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2020	III-729
Tabel 3.61	Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2020	III-739
Tabel 3.62	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2020	III-754
Tabel 3.63	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan perbandingan dengan Realisasi Tahun 2019	III-761
Tabel 3.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020	III-773
Tabel 3.65	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2020	III-793
Tabel 3.66	Indikator Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2020	III-810
Tabel 3.67	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan Pemerintah Kota Dumai	III-820
Tabel 3.68	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	III-822
Tabel 3.69	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Kesehatan Kota Dumai	III-823
Tabel 3.70	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Sosial Kota Dumai	III-825
Tabel 3.71	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai	III-826
Tabel 3.72	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai	III-829
Tabel 3.73	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	III-831
Tabel 3.74	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ	III-833

	Walikota Dumai terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	
Tabel 3.75	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai	III-835
Tabel 3.76	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	III-836
Tabel 3.77	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai	III-837
Tabel 3.78	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	III-839
Tabel 3.79	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perdagangan Kota Dumai	III-842
Tabel 3.80	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai	III-845
Tabel 3.81	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perikanan Kota Dumai	III-847
Tabel 3.82	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai	III-855
Tabel 3.83	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai	III-860
Tabel 3.84	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perhubungan Kota Dumai	III-863
Tabel 3.85	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai	III-865
Tabel 3.86	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	III-866
Tabel 3.87	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	III-868

Tabel 3.88	Kota Dumai Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Dumai Terhadap LKPJ Walikota Dumai terkait Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	III-870
------------	--	---------

DAFTAR GRAFIK

BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
Grafik 3.1	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2015 sampai dengan 2020	III-90
Grafik 3.2	Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	III-90
Grafik 3.3	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2015 Sampai Dengan 2020	III-91
Grafik 3.4	Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	III-92
Grafik 3.5	Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai dari Tahun 2015 Sampai Dengan 2020	III-93
Grafik 3.6	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	III-93
Grafik 3.7	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umum di Kota Dumai Tahun 2020	III-94
Grafik 3.8	Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai Tahun 2019 sd 2020	III-95
Grafik 3.9	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2020	III-96
Grafik 3.10	Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	III-96
Grafik 3.11	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020	III-97
Grafik 3.12	Pravalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020	III-97
Grafik 3.13	Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai dari Tahun 2015 s/d 2020	III-98
Grafik 3.14	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue	III-99

	Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020	
Grafik 3.15	Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	III-99
Grafik 3.16	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	III-101
Grafik 3.17	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2020	III-102
Grafik 3.18	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai Tahun 2018-2020	III-262
Grafik 3.19	Angka Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2017 s/d Tahun 2019	III-263
Grafik 3.20	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020	III-264
Grafik 3.21	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Dumai Tahun 2020	III-265
Grafik 3.22	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar di Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020	III-265
Grafik 3.23	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk tppo di Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020	III-267
Grafik 3.24	Capaian Kota Layak Anak Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020	III-268
Grafik 3.25	Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Dumai	III-293
Grafik 3.26	Jumlah Lowongan Pekerjaan	III-294
Grafik 3.27	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	III-296
Grafik 3.28	Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota Dumai dalam 1 Tahun 2017-2020	III-299
Grafik 3.29	Penanganan Sampah	III-309
Grafik 3.30	Jumlah Titik Pemantauan Udara	III-309
Grafik 3.31	Besaran Debit Air	III-310



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Kepala Daerah merupakan suatu laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ akhir tahun anggaran Kepala Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada saat ini adalah LKPJ Wali kota Akhir Tahun Anggaran 2020.

1.1 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan LKPJ Wali kota Dumai Akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

- j. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
- l. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- m. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
- o. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
- p. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 28 Seri E);
- q. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);

- r. Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Mempedomani Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota Dumai, maka perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin

Arti kata :

- a) Layak : wajar; pantas; patut ; mulia; terhormat
- b) Lahir : keduniaan; jasmani
- c) Bathin : sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya)

2. Masyarakat Dumai yang madani : Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban

Arti kata:

- a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya;
- b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
- c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

- d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa.
3. Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan;
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah;
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan dan mendorong tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Dumai secara merata dan terjangkau sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan hajat hidup (biologis) utama masyarakat. Penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Dumai merupakan harapan masyarakat Dumai sampai saat ini, dimana diharapkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Dumai dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota yang akan dilakukan secara bertahap. Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Dumai. Penyediaan air

bersih dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota Dumai. Peningkatan infrastruktur air bersih tersebut meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan air baku, pemeliharaan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaan maupun non perpipaan untuk distribusi air bersih kepada masyarakat kota Dumai.

Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan (*Amenity*) dan membuka akses yang dapat menghubungkan antar daerah maupun antar wilayah sehingga menjamin kelancaran arus mobilitas orang maupun barang dan jasa khususnya pada sektor perdagangan, Usaha Kecil Menengah, perkebunan, pertanian khususnya bagi investor untuk berinvestasi di kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri. Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; drainase; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan diseluruh kelurahan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal yang sangat penting lainnya adalah adanya kesesuaian fungsi ruang dengan peruntukkannya sehingga diharapkan prinsip *sustainable development* akan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kota Dumai kedepannya. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas *public space* yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting;
 - b) Peningkatan Koordinasi lintas *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase;
 - c) Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga;
 - d) Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan *hydrant* umum;
 - e) Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
 - f) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan;
 - g) Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota;
 - h) Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman;
 - i) Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase;
 - j) Peningkatan luas daerah resapan air;
 - k) Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an.
2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) Pengembangan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman;
 - b) Pengembangan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - c) Peningkatan Sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah / SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN.
3. Urusan Lingkungan Hidup
 - a) Peningkatan cakupan pelayanan persampahan dan air limbah domestik;

- b) Pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang;
 - c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
4. Urusan Perhubungan
- a) Pengembangan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi;
 - b) Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi;
 - c) Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL).
5. Urusan Pemerintahan Umum
- Pengalokasian Anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan pada setiap Kecamatan.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi, sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Mulai berlakunya kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara mitra terkait kawasan perdagangan bebas, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan kesepakatan lainnya, mengharuskan kita mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing secara global dan mengharuskan masyarakat Kota Dumai yang mampu menjadi pelaku utama di daerah sendiri.

Oleh sebab itu misi ini ditempuh melalui meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan meningkatkan kualitas derajat

kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan pelatihan yang merata dan terjangkau serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Dumai, sehingga dapat bersaing dalam menghadapi dinamika kompetisi global sebagai akibat kemajuan IPTEK dan perekonomian dunia. Misi ini mengupayakan kualitas pembangunan kesehatan manusia dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga ditempuh untuk mempersiapkan masyarakat Dumai memiliki kemampuan keterampilan khusus guna mengisi kesempatan dan peluang kerja yang tersedia sebagai basis dan pintu gerbang arus berkembang sektor industri, perdagangan dan kemaritiman.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan, agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kinerja sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pendidikan
 - a) Penyediaan TK pembina untuk setiap kecamatan;
 - b) Pengembangan sekolah yang terakreditasi dan berstandar nasional;
 - c) Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk tingkat SD dan SMP khususnya sekolah negeri dan penyediaan beasiswa bagi siswa miskin;
 - d) Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya;
 - e) Peningkatan sarana Pendidikan yang modern.
2. Urusan Kesehatan
 - a) Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - b) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - c) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran obat-obatan terlarang dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan;
 - e) Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan;
 - f) Peningkatan pola hidup sehat masyarakat dan memelihara mutu institusi pelayanan kesehatan pemerintah melalui paradigma sehat dengan promotif, preventif dan rehabilitatif;
 - g) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar;
 - h) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan RSUD yang tidak diskriminatif.
3. Urusan Tenaga Kerja
Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah.
 4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
 - b) Peningkatan pembinaan kreatifitas dan kemandirian bagi pemuda;
 - c) Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi dan bibit olahragawan;
 - d) Pembangunan GOR;
 - e) Revitalisasi sarana olahraga;
 - f) Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan.
 5. Urusan Perpustakaan
Pengembangan layanan perpustakaan sampai ke tingkat kelurahan, serta melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus.

Misi 3: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Misi ini akan memaksimalkan sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan diharapkan mampu menjadi alternatif

membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat.

Disamping hal tersebut, Koperasi dan UMKM diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan.

Selanjutnya dalam pengentasan kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik, serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu diperlukan upaya yang serius dan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan seperti: memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Urusan Sosial
 - a) Peningkatan kualitas data jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral;
 - b) Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan;
 - c) Peningkatan akses dan bantuan usaha bagi keluarga miskin;
 - d) Pemberdayaan kelompok usaha keluarga miskin;
 - e) Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat miskin;
 - f) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap pelayanan dasar;
 - g) Peningkatan lifeskill keluarga miskin;

- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan / jaminan sosial;
 - j) Peningkatan sosialisasi manfaat keluarga berencana.
2. Urusan Tenaga Kerja
- a) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global;
 - b) Pengintegrasian Hubungan Harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah;
 - c) Peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d) Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- a) Peningkatan kinerja koperasi aktif sebagai sumber pendanaan UMKM;
 - b) Pengembangan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan;
 - c) Pengembangan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan;
 - d) Pengembangan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar;
 - e) Pemanfaatan dan pengembangan potensi subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai.

Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga akan ditopang dengan peningkatan partisipasi elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam wujud partisipasi dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sebagai pihak yang

melakukan sosial kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.

Misi ini untuk mencapai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang ditandai dengan tercapainya beberapa kondisi berikut:

1. Terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan;
2. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Disinilah parameter objektif dari sejauh mana aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik;
4. Mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui transparansi dalam pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten, serta yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan;
5. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

1. Urusan Pemerintahan (Penunjang Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan)
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik;
 - b) Penyelesaian tapal batas administrasi kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai serta perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokanhilir;
 - c) Penyaluran aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal;
 - d) Peningkatan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya;
 - e) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - f) Penyediaan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah;

- g) Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
 - h) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - i) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi dan kinerja;
 - j) Peningkatan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel;
 - k) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - l) Peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel;
 - m) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya aparatur Sekretariat DPRD;
 - n) Peningkatan partisipasi *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, *applicable* dan *accountable*;
 - o) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai *feedback* perencanaan pembangunan daerah;
 - p) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan;
 - q) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak daerah;
 - r) Peningkatan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.
2. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a) Peningkatan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - c) Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Kota Dumai.
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tidak kekerasan;
 - b) Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak;

- c) Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak.
- 4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan kualitas administrasi kependudukan.
- 5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan;
 - b) Peningkatan peran dan kualitas Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 6. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a) Peningkatan kualitas penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan konektivitas jaringan teknologi informasi dalam layanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 7. Urusan Kearsipan
Penerapan tata kelola arsip daerah sesuai Peraturan/Undang-undang kearsipan.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produktifitas serta keunggulan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani, pembudidaya ikan, nelayan dan peternak.

Terkait dengan hal tersebut, misi ini juga untuk meningkatkan swasembada dan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Urusan Pertanian
 - a) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan;
 - b) Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi, meningkatkan mutu produk dan jumlah keragaman;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian;
 - d) Penguatan/Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet, pelayanan, pembinaan, pengawasan pangan dan suveylance penyakit zoonosis.
2. Urusan Pangan
Peningkatan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
Ekstensifikasi / intensifikasi pertanian dan sektor perikanan.

Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa, Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah.

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip *cooperative* (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan citra kota dari *investability* (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), *visitability* (kota yang selalu dikunjungi karena kesan akan situasi dan pelayananannya) dan aspek *liveability* (menjadi tempat tinggal yang nyaman), sehingga menjadikan kota Dumai sebagai kota tujuan bagi masyarakat lokal maupun regional. Misi ini akan dicapai melalui peningkatan citra kota secara keseluruhan baik dari segi fisik kota, pelayanan publik dan *amenity*.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Urusan Perdagangan
 - a) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani pasar lokal dan regional;
 - b) Penyediaan dan peningkatkan fasilitas pergudangan;
 - c) Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha bagi pelaku usaha perdagangan dan jasa;
 - d) Perluasan *networking* pelaku usaha perdagangan dan jasa.
2. Urusan Perindustrian
 - a) Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri;
 - b) Penataan kawasan industri;
 - c) Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah;
 - d) Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah.
3. Urusan Penanaman Modal
 - a) Pemantapan kualitas pelayanan perizinan.
 - b) Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor.

Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis Serta Berbasis Budaya Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan sebuah kota tidak lepas dari adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur (fisik) dan pembangunan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Misi ini ditempuh sebagai upaya untuk sumberdaya manusia masyarakat dumai agar memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik guna mengisi peluang kerja.

Budaya Melayu akan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar. Dengan demikian budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini adalah:

1. Urusan Pendidikan
 - a) Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur;
 - b) Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan;
 - c) Meningkatkan pembinaan kualitas pembangunan sosial keagamaan.
2. Urusan Kebudayaan
 - a) Pengembangan seni dan tradisi budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b) Meningkatkan pembinaan sanggar-sanggar tradisional untuk dikelola secara profesional dan berkelanjutan;
 - c) Mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara objek-objek yang memiliki nilai sejarah, budaya dan tujuan wisata.
3. Urusan Pariwisata
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau, sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Dalam perkembangannya, Kota Dumai berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Kota Dumai memiliki luas daratan 204.674 (*dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat*) hektar dan wilayah perairan seluas 71.393 (*tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga*) hektar. Secara geografis terletak pada posisi antara 101° 0' 38" - 101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50" - 02° 15' 40" Lintang Utara. Batas daerah Kota Dumai yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa dan Selat Malaka.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa - rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 - 0,5 m dan ketinggian rata - rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh kedaerah hulu sungai. Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2015-2019 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2015-2019 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,35%. Tabel 1.1 Berikut ini menampilkan data jumlah dan pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata Kota Dumai selama tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 1. 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2015-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Luas Km2	Rata-rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019		
Bukit Kapur	43.403	44.447	45.479	46.522	47.565	200	2,35%
Medang Kampai	11.470	11.701	11.923	12.140	12.351	373	1,94%
Sungai Sembilan	31.158	31.860	32.546	33.231	33.909	975	2,19%
Dumai Barat	40.572	41.479	42.364	43.247	44.119	45	2,17%
Dumai Selatan	51.616	52.645	53.629	54.592	55.523	74	1,92%
Dumai Timur	61.685	62.932	64.127	65.299	66.435	48	1,95%
Dumai Kota	46.063	46.844	47.570	48.261	48.910	13	1,62%
	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	1.727	2,01%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

3. Jumlah PNS

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 sebanyak 4.087 orang PNS, yang terdiri dari 1.403 orang PNS Laki-laki dan 2.684 orang PNS Perempuan. Jumlah PNS pada tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 79 orang dibandingkan pada tahun 2018. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2019 dirangkum dalam bentuk tabel 1.2 berikut ini

Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018-2019

Jabatan	2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	294	1.562	1.856	291	1.595	1.886
Fungsional Umum	636	749	1.385	625	767	1.392
Struktural						
Eselon V	-	-	-	-	-	-
Eselon IV	354	281	635	348	283	631
Eselon III	111	33	144	111	38	149
Eselon II	20	1	21	28	1	29
Eselon I	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.396	2.612	4.008	1.403	2.684	4.087

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp 1.409.500.306.496,49,- realisasi sebesar Rp 1.423.583.635.370,02,- tingkat capaian 101,00%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 335.378.618.821,49,- dengan realisasi sebesar Rp. 377.548.107.531,02,-
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 907.606.331.311,-
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 166.515.356.364,-

Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1. 3. Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.409.500.306.496,49	1.423.583.635.370,02	101,00%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.378.618.821,49	377.548.107.531,02	112,57%
A	HASIL PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.259.804.847,00	104,76%
B	HASIL RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94%
A	PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.305.499.127,00	104,79%
B	RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94
C	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77%
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.147.960.900,49	178.373.012.356,02	131,98%
II.	DANA PERIMBANGAN	907.606.331.311,00	917.175.087.631,00	101,05%
A.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	232.251.703.539,00	243.996.573.029,00	105,06%
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	100,00%
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94%
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166.515.356.364,00	128.860.440.208,00	77,39%
A.	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	-	0,00%
B.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	89.666.856.364,00	88.124.940.208,00	98,28%
C.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.811.500.000,00	40.735.500.000,00	99,81%
	Total Pendapatan	1.409.500.306.496,49	1.423.583.635.370,02	101,00%

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.519.982.943.001,88 dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.703.116.633,85 atau 93,73%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2020 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1. 4. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.519.982.943.001,88	1.424.703.116.633,85	(95.279.826.368,03)	93,73%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	753.362.323.907,88	674.248.842.787,00	(79.113.481.121)	89,50%
5.1.1	Belanja Pegawai	581.180.142.207,88	516.333.082.152,00	(64.847.060.056)	88,84%
5.1.4	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	(525.937.200)	98,55%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	0,00	100,00%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	118.364.085.135,00	(13.740.483.865)	89,60%
5.2	BELANJA LANGSUNG	766.620.619.094,00	750.456.543.246,85	(16.164.075.847,15)	97,89%
5.2.1	Belanja Pegawai	71.746.475.328,00	79.700.014.854,00	7.953.539.526,00	111,09%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.865.628.243,00	426.049.898.518,52	(16.815.729.724,48)	96,20%
5.2.3	Belanja Modal	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	(7.301.885.648,67)	97,10%

Sumber : Data (per tanggal 10/02/2021), BPKAD Kota Dumai.

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Adapun anggaran belanja tidak langsung kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 753.362.323.907,88 dengan realisasi sebesar Rp. 674.248.842.787,00 atau 89,50% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 581.180.142.207,88 dengan realisasi sebesar Rp. 516.333.082.152,00 atau 88,84%.
- b) Belanja Hibah sebesar Rp 36.232.812.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.706.875.500,00 atau 98,55%.
- c) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.844.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.844.800.000,00 atau 100%.

d) Belanja Tidak Terduga Rp. 132.104.569.000,00 dengan realisasi sebesar 118.364.085.135,00 atau 89,60%.

2) Belanja Langsung

Adapun anggaran Belanja Langsung Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 766.620.619.094,00 dengan realisasi sebesar Rp. 750.456.543.246,85 atau 97,89% yang dialokasikan melalui :

a) Belanja Pegawai Rp. 71.746.475.328,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.700.014.854,00 atau 111,09%

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 442.865.628.243,00 dengan realisasi sebesar Rp. 426.049.898.518,52 atau 96,20%.

c) Belanja Modal Rp. 252.008.515.523,00 dengan realisasi sebesar Rp. 244.706.629.874,33 atau 97,10%.

6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 pada pasal 1 yaitu :

PEMBIAYAAN	ANGGARAN
PEMBIAYAAN SEMULA	87.075.488.748,00
PEMBIAYAAN BERTAMBAH	64.119.682.977,69
JUMLAH PENDAPATAN SETELAH PERUBAHAN	151.195.171.725,69



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB II
PENJABARAN APBD TAHUN 2020

2.1 Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Dan Pengelolaan Pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor : 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 dinyatakan bahwa:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.396.018.821.279,00
b. Bertambah/	<u>Rp.</u>	<u>13.481.485.217,49</u>
(Berkurang)		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.409.500.306.496,49

2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.434.271.092.996,00
b. Bertambah/	<u>Rp.</u>	<u>85.711.850.005,88</u>
(Berkurang)		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.519.982.943.001,88</u>
Surplus/	<u>Rp.</u>	<u>(110.482.636.505,39)</u>
(Devisit) Setelah		
Perubahan		

3. Pembiayaan

a. Semula	Rp.	87.075.488.748,00
b. Bertambah/	<u>Rp.</u>	<u>64.119.682.977,69</u>
(Berkurang)		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	151.195.171.725,69

4. Pengeluaran

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
(Berkurang)		

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	<u>151.195.171.725,69</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	<u>40.712.535.220,30</u>

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah 2020

2.2 Target Dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp 1.409.500.306.496,49,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.335.378.618.821,49,-
- Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 907.606.331.311,-
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 166.515.356.364,-

Tabel 2.1. Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020 Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2020 dan Perwako No. 80 Tahun 2020

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	335.378.618.821,49
	Pajak Daerah	157.754.501.000,00
	Retribusi Daerah	39.875.325.960,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.830.961,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.147.960.900,49
B.	Dana Perimbangan	907.606.331.311,00
	Bagi Hasil Pajak	56.309.743.109,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak	175.941.960.430,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.544.622.772,00

	Dana Insentif Daerah (DID)	45.719.565.000,00
C.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	166.515.356.364,00
	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahanlainnya	89.666.856.364,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.811.500.000,00
	Jumlah	1.409.500.306.496,49

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah 2020

Adapun rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2020

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.409.500.306.496,49	1.423.583.635.370,02	101,00%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.378.618.821,49	377.548.107.531,02	112,57%
A	HASIL PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.259.804.847,00	104,76%
B	HASIL RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94%
A	PAJAK DAERAH	157.754.501.000,00	165.305.499.127,00	104,79%
-	Pajak Hotel	2.600.000.000,00	3.760.131.872,00	144,62%
-	Pajak Restoran	6.100.000.000,00	7.247.204.044,00	118,81%
-	Pajak Hiburan	800.000.000,00	840.675.189,00	105,08%
-	Pajak Reklame	1.850.000.000,00	2.335.416.443,00	126,24%
-	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.999.986.000,00	8.595.310.760,00	107,44%
-	Pajak Penerangan Jalan PLN	30.259.315.000,00	31.075.579.768,00	102,70%
-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000.000,00	2.550.555.480,00	114,63%
-	Pajak Parkir	500.000.000,00	556.831.948,00	111,37%
-	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.187.986.946,00	118,80%
-	Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	69.851.660,00	60,64%
-	PBB	90.000.000.000,00	91.404.616.934,00	101,56%
-	BPHTB	14.305.000.000,00	15.635.643.803,00	109,30%
B	RETRIBUSI DAERAH	39.875.325.960,00	32.672.832.980,00	81,94
-	Retribusi Pelayanan Pasar	429.500.000,00	436.133.000,00	101,54%
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	175.000.000,00	187.377.000,00	107,07%
-	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	130.000.000,00	131.250.000,00	100,96%
-	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%
	~ Sewa Mess (Kamar Standar AC)	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40%

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.100.000,00	666.100.000,00	133,19%
-	Retribusi Jasa Umum	2.412.195.960,00	377.016.650,00	15,63%
	- Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.656.771.360,00	130.220.000,00	7,86%
	- Retribusi Uji Emisi gas Buang (Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Mobil Pribadi)	200.000.000,00	-	0,00%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang- Umum)	27.000.000,00	1.740.100,00	6,44%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Barang dan Bus)	523.144.600,00	237.582.200,00	45,41%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kereta Gandengan/Tempelan)	3.080.000,00	1.474.350,00	47,87%
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Kendaraan Khusus)	2.200.000,00	-	0,00%
	- Kantin PKB		6.000.000,00	
-	Retribusi Jasa Usaha	24.439.600.000,00	18.412.672.050,00	75,34%
-	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	23.789.600.000,00	18.327.305.000,00	77,04%
	- Terminal Barang	23.735.600.000,00	18.245.643.000,00	76,87%
	- Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang	54.000.000,00	81.662.000,00	151,23%
-	Ret. Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	450.000.000,00	26.658.000,00	5,92%
	- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	350.000.000,00	8.000.000,00	2,29%
	- Ramayana	50.000.000,00	16.126.000,00	32,25%
	- Bukit Gelanggang (Dumai Ekspo, Konser, dll)	50.000.000,00	2.532.000,00	5,06%
-	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
	- Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran)	200.000.000,00	58.709.050,00	29,35%
-	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
	- Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	2.000.000,00	40.000,00	2,00%
-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
	- Bibit Ikan, Benih Ikan	25.000.000,00	23.904.000,00	95,62%
-	Ret. Perizinan Tertentu	11.509.950.000,00	11.824.726.000,00	102,73%
	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11.500.000.000,00	11.819.726.000,00	102,78%
	- Ret. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	5.000.000,00	50,25%
-	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.	24.480.000,00	18.420.000,00	75,25%
-	Retribusi Menara Telekomunikasi	177.500.000,00	501.800.000,00	282,70%

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
			-	
C	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.830.961,00	1.242.457.348,00	47,77%
1.	PT. Bank Riau	1.347.426.187,00	895.097.348,00	66,43%
2.	PT. Pembangunan Dumai	750.000.000,00	-	0,00%
3.	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	503.404.774,00	347.360.000,00	69,00%
			-	
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135.147.960.900,49	178.373.012.356,02	131,98%
			-	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan		1.442.130.715,00	
2	Penerimaan Jasa Giro	3.100.000.000,00	4.687.858.414,27	151,22%
3	Pendapatan Bunga	3.400.000.000,00	3.969.771.072,33	116,76%
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	31.126.156,51	0,00%
5	Pendapatan Denda Pajak	4.142.120.052,00	4.447.818.122,00	107,38%
6	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	0,00%
7	Pendapatan dari Pengembalian dari Temuan	1.086.613.882,49	1.590.497.970,65	146,37%
8	Pendapatan BLUD RSUD	108.000.000.000,00	147.106.410.270,30	136,21%
9	Pendapatan BLUD Puskesmas	14.264.882.466,00	13.204.905.329,96	92,57%
10	BLUD UPT. Lab Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A			
	~ Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	141.600.000,00	177.695.151,00	125,49%
11	Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Pelayanan Bandar Udara)	1.000.000.000,00	749.999.997,00	75,00%
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		941.888.723,00	
13	Fasilitas Sosial dan fasilitas Umum	-	3.024.000,00	
14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.744.500,00	19.886.434,00	156,04%
II.	DANA PERIMBANGAN	907.606.331.311,00	917.175.087.631,00	101,05%
A.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	232.251.703.539,00	243.996.573.029,00	105,06%
-	Bagi Hasil Pajak	56.309.743.109,00	46.882.319.340,00	83,26%
-	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	175.941.960.430,00	197.114.253.689,00	112,03%
B.	Dana Alokasi Umum (DAU)	424.090.440.000,00	424.090.440.000,00	100,00%
C.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	205.544.622.772,00	203.368.509.602,00	98,94%

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
-	DAK FISIK	135.572.881.772,00	132.414.298.524,00	97,67%
-	DAK NON FISIK	69.971.741.000,00	70.954.211.078,00	101,40%
-	Dana Insentif Daerah (DID)	45.719.565.000,00	45.719.565.000,00	100,00%
			-	
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	166.515.356.364,00	128.860.440.208,00	77,39%
A.	Pendapatan Hibah	36.037.000.000,00	-	0,00%
	Pendapatan Hibah Dari Dana BOS	36.037.000.000,00		0,00%
B.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya	89.666.856.364,00	88.124.940.208,00	98,28%
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	89.666.856.364,00	88.124.940.208,00	98,28%
C.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.811.500.000,00	40.735.500.000,00	99,81%
	Total Pendapatan	1.409.500.306.496,49	1.423.583.635.370,02	101,00%

Sumber: Data Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Un Audited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, rinciannya adalah sebagai berikut :

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 Perubahan ditargetkan sebesar Rp 335.378.618.821,49,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 377.548.107.531,02,- atau 112,57% dari target semula. Adapun rincian PAD adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 157.754.501.000,- terealisasi sebesar Rp 165.259.804.847,- atau 104,76% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 2.600.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 3.760.131.872,00,- atau 144,62% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah adanya penambahan objek Pajak Hotel yang

baru dan tingkat penerimaan omset hotel meningkat.

2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 6.100.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 7.247.204.044,00,- atau 118,81% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset restoran meningkat.
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 800.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 840.675.189,00,- atau 105,08% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini karena naiknya penerimaan omset Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 1.850.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.335.416.443,00,- atau 126,24% dari target semula, hal ini disebabkan meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.
5. Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 30.259.315.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 31.075.579.768,00,- atau 102,70% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN.
6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp 7.999.986.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 8.595.310.760,00,- atau 107,44% dari target semula. Faktor pendukung tercapainya target penerimaan ini karena meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik Non PLN oleh Perusahaan.
7. Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.187.986.946,- atau 118,80% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan air tanah ini disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 2.225.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp

2.550.555.480,00,- atau 114,63% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya penerimaan ini karena meningkatnya data subjek pajak dan objek pajak mineral buka logam dan batuan.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 90.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 91.404.616.934,00,- atau 101,56% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 14.305.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 15.635.643.803,00,- atau 109,30% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena peningkatan transaksi jual beli tanah di Tahun 2020 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak.
11. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp 500.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 556.831.948,00,- atau 111,37% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak parkir, karena terlaksananya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir secara optimal.
12. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 115.200.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 69.851.660,00,- atau 60,64% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena kendala izin usaha, sehingga tidak bisa melakukan pungutan pajak sarang burung walet.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 39.875.325.960,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 32.672.832.980,00,- atau 81,94% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 2.412.195.960,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 377.016.650,00,- atau 15,63%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapai target adalah sebagai berikut:
 - a) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 1.656.771.360,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 130.220.000,- atau 7,86% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:
 - Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 755.424.600,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 240.796.650,- atau 31,88% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan adalah disebabkan:
 - Masyarakat luas belum memiliki kesadaran untuk melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.
 - Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
 - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit, seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.
 - Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
 - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik, sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
 - c) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp. 500.100.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp.

666.100.000,- atau 133,19% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan disebabkan terlaksananya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

d) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi ditargetkan sebesar Rp 175.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 187.377.000,- atau 107,07% dari target semula.

2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp. 25.585.680.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 19.485.028.148,- atau 76,16%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.321.600.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 1.106.645.148,- atau 83,74%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:

- Tercapainya target Retribusi Sewa Alat Laboratorium ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 5.850.000,- atau 117,00% dari target semula.
- Tercapainya target Retribusi Sewa Alat-Alat Berat ditargetkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 125.400.000,- atau 100,32% dari target semula.
- Tidak tercapainya target Sewa Mess (Kamar Standar AC) yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 47.700.000,- atau 95,40% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target dikarenakan wabah pandemi covid-19.
- Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Bandar Udara ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 749.999.997,- atau 75,00% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target dikarenakan wabah pandemi covid-19.

- Tidak tercapainya target Retribusi Workshop Konveksi. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan retribusi tersebut adalah belum adanya peminat masyarakat untuk menyewa alat dari klinik pelayanan koperasi, yaitu sewa mesin jahit, mesin las dan tenun, sehingga untuk retribusi workshop konveksi tidak ditargetkan.
 - Tercapainya target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air ditargetkan sebesar Rp 141.600.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 177.695.151,- atau 125,49% dari target semula.
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Kantin Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi pencapaian tahun 2020 sebesar Rp 6.000.000,-
- b) Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp 23.789.600.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.327.305.000,- atau 77.04% dari target semula. Retribusi Terminal ini meliputi:
- Terminal Barang target sebesar Rp 23.735.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 18.245.643.000,- atau 76,87%.
 - Pemakaian Tempat Usaha Terminal Barang target sebesar Rp 54.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 81.662.000,- atau 151,23%.
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 450.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 26.658.000,- atau 5,92% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena :
- Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, karena tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, belum mencapai target. Faktor penghambat tidak tercapainya target dikarenakan wabah pandemi Covid-19.
- d) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 24.480.000,-

dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.420.000,- atau 75,25% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini karena fasilitas kurang memadai dan perlunya pendanaan dari Provinsi yang akan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

e) Retribusi Jasa Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 200.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 58.709.050,- atau 29,35% dari target semula. Retribusi Jasa Kepelabuhan ini meliputi :

a) Jasa Tiket Penumpang (Perusahaan Pelayaran) target sebesar Rp 200.000.000,- realisasi sebesar Rp 58.709.050,- atau 29,35%

Faktor pendorong tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:

- Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat menggunakan transportasi penyebrangan (roro).

f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 23.904.000,- atau 95,62% dari target semula.

- Retribusi Bibit Ikan, Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 23.904.000,- atau 95,62% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah akibat perubahan musim, sehingga pembibitan/ benih ikan tidak berhasil dan Pengadaan Pakan Ikan untuk induk ikan masih belum memenuhi standar yang baik untuk menghasilkan bibit ikan yang baik dan berkualitas.

3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 11.511.950.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 11.870.460.280,- atau 103,11%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan sebesar Rp 11.500.000.000,- dan realisasi

pencapaian sebesar Rp 11.819.726.000,- atau 102,78% dari target semula.

- b. Tidak tercapainya target Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditargetkan sebesar Rp 9.950.000,- realisasi pencapaiannya Rp 5.000.000,- atau sebesar 50,25%.
- c. Retribusi Izin Gangguan tidak ditargetkan pada tahun 2020, namun ada realisasi pencapaiannya sebesar Rp 45.694.280,- dari target semula. Karena adanya pembayaran tunggakan oleh wajib retribusi izin gangguan yang belum melunasi kewajibannya di tahun-tahun sebelumnya
- d. Tidak tercapainya target Retribusi Izin Trayek yang ditargetkan sebesar Rp 2.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 40.000.00,- atau 2,00% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah menurunnya tingkat pengurusan izin angkutan kota.

c. Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.600.830.961,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.242.457.348,- atau 47,77% dari target semula. Rincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :

1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank Riau ditargetkan sebesar Rp. 1.347.426,187,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 895.097.348,- atau 66,43% dari target semula.
2. PT. Pembangunan Dumai ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar 0,- atau 0% dari target semula.
3. PT. Pelabuhan Dumai Berseri ditargetkan sebesar Rp. 503.404.774,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 347.360.000,- atau 69,00% dari target semula

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 135.147.960.900,49,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 178.373.012.356,02,- atau 131,98% dari target semula.

2.4 DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 907.606.331.311,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 917.175.087.631,- atau 101,05% pada Pendapatan Daerah tahun 2020. Penerimaan ini terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 232.251.703.539,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 243.996.573.029,- atau 105,06% dari target semula. Dana ini terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp 56.309.743.109,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 46.882.319.340,- atau 83,26% dari target semula.
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp. 175.941.960.430,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 197.114.253.689,- atau 112,03% dari target semula.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp. 424.090.440.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 424.090.440.000,- atau 100,00% dari target semula.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp. 205.544.622.772,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 203.368.509.602,- atau 98,94% dari target semula.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp. 45.719.565.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 45.719.565.000,- atau 100% dari target semula.

2.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 166.515.356.364,- terealisasi sebesar Rp. 128.860.440.208,- atau 77,39%. Adapun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 36.037.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0,00%.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintahan lainnya

Dana ini ditargetkan sebesar Rp 89.666.856.364,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 88.124.940,208,- atau 98,28%. Adapun realisasi tersebut terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp 21.882.352.398,- dan realisasi sebesar Rp 17.942.520.921,- atau 82,00%.

Dan Kurang Bayar PKB Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.250.775.101,- dan realisasi sebesar Rp. 2.833.921.126,- atau 226,57%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp 13.414.860.372,- dan realisasi sebesar Rp 11.128.526.775,- atau 82,96%.

Dan Kurang Bayar BBNKB Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.550.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.524.723.458,- atau 98,37%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp 32.674.347.737,- dan realisasi sebesar Rp 29.906.865.389,- atau 91,53%. Dan Kurang Bayar PBBKB Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 91.059.155,- dan realisasi sebesar Rp. 3.309.889.136,- atau 3634,88%.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditargetkan sebesar Rp 734.968.487,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 844.220.718,- atau 114,86%.

Dan Kurang Bayar AP Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 5.023.119.467,- dan realisasi sebesar Rp. 86776.592,- atau 1,73%.

5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp 8.000.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 15.502.122.446,- atau 193,78%. Dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 5.045.373.647,- dan realisasi sebesar Rp. 5.045.373.647,- atau 100%.

C. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Bantuan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp 40.811.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 40.735.500,000,- atau 99,81%

D. Permasalahan Dan Solusi

Situasi perekonomian saat ini masih dalam kondisi yang kurang menguntungkan, dimana berbagai krisis masih tetap berlangsung dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan dampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Di sisi lain perekonomian yang menurun menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun **permasalahan** yang ada, antara lain :

- a. Belum semua Objek Pajak terdata dan terdaftar secara baik.
- b. Wajib Pajak belum melaporkan omzet sesuai dengan hasil transaksi atau kondisi sebenarnya
- c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum optimal

Adapun **solusi** yang diusulkan yaitu :

- A. Melakukan pendataan dan pendaftaran secara intensif dan *continue* (terus-menerus) terhadap Wajib Pajak.
- B. Melakukan pemeriksaan Wajib Pajak serta memonitoring alat perekam data transaksi (*tapping box*).
- C. Melakukan pengawasan dan penertiban objek pajak.
- D. Melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah kepada wajib pajak.

E. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Disamping itu juga untuk menerapkan kesepakatan antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap prioritas yang perlu dicapai dan ditingkatkan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 yang kemudian dibahas kembali dengan penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang, kemudian untuk dapat menjadi kegiatan dengan urutan prioritas, maka harus ditetapkan Strategis dan Prioritas Belanja Daerah. Strategis dan Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam mencapai arah dan Kebijakan Umum APBD. Mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sehingga diperlukan adanya penentuan strategi dan pemilihan prioritas dalam upaya pencapaian arah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja

1. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.519.982.943.001,88 dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.703.116.633,85 atau 93,73%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2020 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Tabel 2.3.
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1.519.982.943.001,88	1.424.703.116.633,85	(95.279.826.368,03)	93,73%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	753.362.323.907,88	674.246.573.387,00	(79.115.750.520,88)	89,50%
5.1.1	Belanja Pegawai	581.180.142.207,88	516.330.812.752,00	(64.849.329.455,88)	88,84%
5.1.4	Belanja Hibah	36.232.812.700,00	35.706.875.500,00	(525.937.200)	98,55%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.844.800.000,00	3.844.800.000,00	0,00	100,00%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	132.104.569.000,00	118.364.085.135,00	(13.740.483.865)	89,60%
5.2	BELANJA LANGSUNG	766.620.619.094,00	750.456.543.246,85	(16.164.075.847,15)	97,89%
5.2.1	Belanja Pegawai	71.746.475.328,00	79.700.014.854,00	7.953.539.526,00	111,09%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.865.628.243,00	426.049.898.518,52	(16.815.729.724,48)	96,20%
5.2.3	Belanja Modal	252.008.515.523,00	244.706.629.874,33	(7.301.885.648,67)	97,10%

Sumber : Data Un Audit (per tanggal 01/03/2019) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, BPKAD Kota Dumai

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 tersebut terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Adapun anggaran belanja tidak langsung kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 753.362.323.907,88 dengan realisasi sebesar Rp. 674.246.573.387,00 atau 89,50% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 581.180.142.207,88 dengan realisasi sebesar Rp. 516.330.812.752,00 atau 88,84%.
- b) Belanja Hibah sebesar Rp 36.232.812.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.706.875.500,00 atau 98,55%.
- c) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.844.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.844.800.000,00 atau 100%.

d) Belanja Tidak Terduga Rp. 132.104.569.000,00 dengan realisasi sebesar 118.364.085.135,00 atau 89,60%

2) Belanja Langsung

Adapun anggaran Belanja Langsung Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar Rp. 766.620.619.094,00 dengan realisasi sebesar Rp. 750.456.543.246,85 atau 97,89% yang dialokasikan melalui:

a) Belanja Pegawai Rp. 71.746.475.328,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.700.014.854,00 atau 111,09%

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 442.865.628.243,00 dengan realisasi sebesar Rp. 426.049.898.518,52 atau 96,20%.

c) Belanja Modal Rp. 252.008.515.523,00 dengan realisasi sebesar Rp. 244.706.629.874,33 atau 97,10%.

2. Realisasi Belanja Menurut OPD Pemerintah Kota Dumai.

Adapun realisasi belanja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020, baik jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dapat terlihat pada **Tabel 2.4** berikut ini.

Tabel 2.4.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	- Belanja Tidak Langsung	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	90,06%
	- Belanja Langsung	114.759.784.404,00	76.829.935.061,34	66,95%
2	Dinas Kesehatan			
	- Belanja Tidak Langsung	42.376.506.700,00	39.470.301.456,00	93,14%
	- Belanja Langsung	79.831.294.060,00	72.468.448.613,00	90,78%
3	Rumah Sakit Umum Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	34.227.329.900,00	31.853.465.250,00	93,06%
	- Belanja Langsung	177.016.194.566,00	194.114.632.574,52	109,66%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	- Belanja Tidak Langsung	8.778.558.500,00	7.766.150.559,00	88,47%
	- Belanja Langsung	133.836.317.883,00	124.046.482.171,37	92,69%
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	- Belanja Tidak Langsung	3.373.914.200,00	2.872.191.152,00	85,13%

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
	- Belanja Langsung	20.443.767.046,00	17.603.337.035,00	86,11%
6	Satuan Polisi Pamong Praja			
	- Belanja Tidak Langsung	6.650.974.240,00	5.934.838.686,00	89,23%
	- Belanja Langsung	2.314.512.700,00	2.234.974.441,00	96,56%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	3.947.513.300,00	3.380.670.917,00	85,64%
	- Belanja Langsung	15.077.412.400,00	12.313.220.770,00	81,67%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	- Belanja Tidak Langsung	3.431.022.160,00	3.044.724.200,00	88,74%
	- Belanja Langsung	1.843.646.250,00	1.712.641.679,00	92,89%
9	Dinas Sosial			
	- Belanja Tidak Langsung	3.023.805.740,00	2.618.528.268,00	86,60%
	- Belanja Langsung	3.927.147.878,00	3.636.354.550,00	92,60%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	- Belanja Tidak Langsung	3.879.733.800,00	3.312.444.995,00	85,38%
	- Belanja Langsung	1.441.350.000,00	1.391.154.238,00	96,52%
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	- Belanja Tidak Langsung	4.526.286.700,00	4.212.210.431,00	93,06%
	- Belanja Langsung	2.112.579.019,00	2.046.648.189,00	96,88%
12	Dinas Lingkungan Hidup			
	- Belanja Tidak Langsung	5.542.581.140,00	5.167.853.019,00	93,24%
	- Belanja Langsung	15.571.690.649,00	15.301.529.902,00	98,27%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	- Belanja Tidak Langsung	4.132.794.380,00	3.827.711.489,00	92,62%
	- Belanja Langsung	3.141.936.380,00	3.099.636.320,00	98,65%
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	- Belanja Tidak Langsung	3.537.648.540,00	3.220.985.190,00	91,05%
	- Belanja Langsung	4.425.720.700,00	4.283.993.481,00	96,80%
15	Dinas Perhubungan			
	- Belanja Tidak Langsung	9.477.673.598,00	7.918.285.992,00	83,55%
	- Belanja Langsung	22.210.755.492,00	21.762.852.339,66	97,98%
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	- Belanja Tidak Langsung	4.791.920.740,00	4.262.764.841,00	88,96%
	- Belanja Langsung	2.008.458.900,00	1.546.177.311,00	76,98%

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN (%)
		ANGGARAN	REALISASI	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	- Belanja Tidak Langsung	7.241.895.000,00	6.437.077.595,00	88,89%
	- Belanja Langsung	2.047.213.080,00	1.936.952.542,00	94,61%
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
	- Belanja Tidak Langsung	4.148.029.560,00	3.544.106.857,00	85,44%
	- Belanja Langsung	7.254.157.046,00	6.619.735.960,48	91,25%
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	- Belanja Tidak Langsung	3.446.097.620,00	3.106.970.594,00	90,16%
	- Belanja Langsung	2.071.438.500,00	1.986.614.129,00	95,91%
20	Dinas Perikanan			
	- Belanja Tidak Langsung	3.970.411.640,00	3.506.669.539,00	88,32%
	- Belanja Langsung	2.561.016.261,00	2.501.385.806,00	97,67%
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	- Belanja Tidak Langsung	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	92,24%
	- Belanja Langsung	16.762.000.000,00	15.889.254.214,00	94,79%
22	Dinas Perdagangan			
	- Belanja Tidak Langsung	8.879.825.840,00	8.190.926.652,00	92,24%
	- Belanja Langsung	16.762.000.000,00	15.889.254.214,00	94,79%
23	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	1.907.513.000,00	638.527.756,00	33,47%
	- Belanja Langsung	-	-	0,00
24	Sekretariat Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	17.170.260.500,00	15.329.022.828,00	89,28%
	- Belanja Langsung	29.611.489.107,00	26.602.669.609,00	89,84%
25	Sekretariat DPRD			
	- Belanja Tidak Langsung	31.559.954.610,00	18.898.975.348,00	59,88%
	- Belanja Langsung	21.358.100.362,00	19.530.411.290,00	91,44%
26	Kecamatan Dumai Barat			
	- Belanja Tidak Langsung	5.296.058.540,00	4.760.594.548,00	89,89%
	- Belanja Langsung	3.753.659.500,00	3.479.085.324,00	92,69%
27	Kecamatan Dumai Timur			
	- Belanja Tidak Langsung	5.397.130.040,00	4.884.282.225,00	90,50%
	- Belanja Langsung	4.465.091.425,00	3.796.408.576,00	85,02%
28	Kecamatan Bukit Kapur			
	- Belanja Tidak Langsung	6.264.629.720,00	5.754.082.845,00	91,85%

NO	NAMA OPD KOTA DUMAI	BELANJA		CAPAIAN
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
	- Belanja Langsung	3.728.697.370,00	3.370.908.239,00	90,40%
29	Kecamatan Medang Kampai			
	- Belanja Tidak Langsung	5.353.151.920,00	4.826.059.084,00	90,15%
	- Belanja Langsung	3.109.445.000,00	2.749.150.347,00	88,41%
30	Kecamatan Dumai Kota			
	- Belanja Tidak Langsung	6.190.811.360,00	5.319.775.886,00	85,93%
	- Belanja Langsung	4.323.026.250,00	4.042.914.661,00	93,52%
31	Kecamatan Sungai Sembilan			
	- Belanja Tidak Langsung	6.004.985.180,00	5.444.263.874,00	90,66%
	- Belanja Langsung	3.742.430.400,00	3.535.743.334,00	94,48%
32	Kecamatan Dumai Selatan			
	- Belanja Tidak Langsung	5.934.819.960,00	5.389.580.646,00	90,81%
	- Belanja Langsung	4.817.113.345,00	4.497.675.575,48	93,37%
33	Inspektorat Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	10.999.365.230,00	10.243.127.670,00	93,12%
	- Belanja Langsung	4.635.783.469,00	4.154.430.700,00	89,62%
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	5.887.157.650,00	5.212.421.060,00	88,54%
	- Belanja Langsung	6.351.064.764,00	5.814.386.917,00	91,55%
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	29.501.169.387,00	28.758.644.171,00	97,48%
	- Belanja Langsung	10.068.683.509,00	9.441.075.653,00	93,77%
36	Badan Pendapatan Daerah			
	- Belanja Tidak Langsung	15.594.527.540,00	14.338.903.776,00	91,95%
	- Belanja Langsung	8.178.384.064,00	7.511.357.163,00	91,84%
37	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	- Belanja Tidak Langsung	3.862.823.280,00	3.476.673.107,00	90,00%
	- Belanja Langsung	3.305.379.500,00	2.638.868.120,00	79,84%
38	Dinas Komunikasi dan Informasi			
	- Belanja Tidak Langsung	4.296.263.618,00	3.700.821.744,00	86,14%
	- Belanja Langsung	7.808.294.804,00	7.708.478.858,00	98,72%

Keterangan **Tabel 2.4** diatas : Data Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung SKPD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 posisi **Un Audit**.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

BAB III
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintah.

Adapun Urusan Wajib beserta organisasi yang melaksanakannya adalah sebagai berikut

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

- A.1 Urusan Wajib Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- A.2 Urusan Wajib Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
- A.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- A.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- A.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- A.6 Urusan Wajib Sosial oleh, Dinas Sosial.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- B.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- B.2 Urusan Wajib Tenaga Kerja oleh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- B.3 Urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- B.4 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil oleh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- B.5 Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- B.6 Urusan Wajib Perhubungan oleh Dinas Perhubungan;
- B.7 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- B.8 Urusan Wajib Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- B.9 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- B.10 Urusan Wajib Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- B.11 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Urusan Pilihan beserta Organisasi yang Melaksanakannya sebagai berikut:

- C.1 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai;
- C.2 Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
- C.3 Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan Kota Dumai.

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang beserta organisasi yang melaksanakannya sebagai berikut :

- D.1 Urusan Pemerintah oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai dan 7 Kecamatan se-Kota Dumai;

- D.2 Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai;
- D.3 Urusan Perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;
- D.4 Urusan Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;
- D.5 Urusan Kepegawaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A.1 Urusan Wajib Pendidikan, Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Pendidikan dan Kebudayaan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Capaian Tahun 2020	2020		Capaian dalam (%)
		Target	Realisasi	
Rata – Rata Lama Sekolah	10,04	9,73	10,07	103,5
Harapan Lama Sekolah	12,40	13,45	13,12	97,5
Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100
Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal Budaya Melayu	100%	95%	95%	100%
Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	83,8%	97%	97%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Rata – Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Dumai.

**Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (rls)
Kota Dumai Tahun 2020**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				Keterangan
Jumlah Penduduk	Tamatan Terakhir	Konversi Tamatan	Jumlah Tahun	
	TAMAT SD	6	279,018	Rata Rata Lama Sekolah = 10,04 Tahun
34,202	SLTP	9	307,818	
66,743	SLTA	12	800,916	
1,698	DIP II	14	23,772	
5,407	DIP III	15	81,105	
9,535	STR I	16	152,560	
389	STR II	17	6,613	
9	STR III	18	162	
164,486			1,651,964	
Rata-rata lama sekolah			10.04	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-rata lama sekolah Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 10,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Dumai dapat menyelesaikan sekolah sampai kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas/SMA. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun sudah terpenuhi. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai masih akan melakukan upaya agar penduduk kota Dumai dimasa yang akan datang dapat menyelesaikan Pendidikan sampai dengan SMA.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program BOS. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan rata-rata lama sekolah.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak, seperti tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 3.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS)				Keterangan	
Umur (th)	Jumlah Penduduk (Pi)	Jumlah Penduduk yang bersekolah (Ei)	Rasio (Ei/Pi)		
7	5393	6379	1.18	Harapan Lama Sekolah = 12,40 tahun	
8	5373	6251	1.16		
9	5298	6384	1.21		
10	5174	6565	1.27		
11	5011	6033	1.20		
12	4856	5064	1.04		
13	4734	4651	0.98		
14	4643	4540	0.98		
15	4534	4586	1.01		
16	4399	4548	1.03		
17	4368	3898	0.89		
18	4496	1561	0.35		
19	4721	404	0.09		
20	4895		0.00		
21	5006		0.00		
22	5156		0.00		
23	5366		0.00		
24	5566		0.00		
25	5744		0.00		
Harapan lama sekolah			12.40		

Target indikator harapan lama sekolah pada tahun 2020 adalah 12,40 tahun, sementara realisasi pada tahun ini adalah 13,12 tahun dengan tingkat capaian 97,5%.

Belum tercapainya target angka HLS Kota Dumai terjadi karena dua faktor diantaranya adalah permasalahan ekonomi dan motivasi

keluarga. Masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah cenderung memiliki minat terhadap pendidikan yang rendah. Biaya transportasi dan biaya peralatan sekolah dianggap masih terlalu tinggi untuk diwujudkan. Selain itu tingkat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan juga mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dua hal tersebut berkolaborasi menjadi sebuah siklus, perekonomian yang masih rendah ditambah dengan kurangnya motivasi belajar dari keluarga sehingga orang tua menginginkan anaknya bekerja lebih dini, inilah yang mengakibatkan menurunnya angka HLS.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program Pendidikan anak usia dini, Program BOS dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program tersebut harus lebih dioptimalkan lagi. Untuk mencapai target angka harapan lama sekolah perlu dilakukan sosialisasi dan motivasi pendidikan serta aktifitas pemberdayaan masyarakat sehingga harapan lama sekolah di Kota Dumai meningkat.

c. Angka Kelulusan Pendidikan

Indikator sasaran Angka kelulusan Pendidikan menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar yang lulus pada tahun ajaran 2019/2020. Capaian indikator ini pada tahun 2019 adalah 100%, target tahun 2020 adalah sebesar 100% adapun realisasi tahun 2020 sebesar 100% yang berarti capaian sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian untuk tingkat SD dan SMP pada tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 10.360 orang dengan tingkat kelulusan mencapai 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik.

Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

d. Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal Budaya Melayu

Muatan Lokal Budaya Melayu Riau adalah mata pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, realisasi implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 95% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar sudah mengimplementasikan budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar. Pada tahun 2020 realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 95%, hal ini dapat dikatakan baik karena persentasi capaian melebihi target yang ditetapkan.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya, serta dengan keluarnya Peraturan Walikota Dumai nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai.

e. Sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Pada tahun 2019 realisasi penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar adalah sebesar

83,8% sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 97% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar menerapkan nilai-nilai agama. Realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 83,8% yang dapat dikatakan baik walaupun belum mencapai target pada tahun 2019, tetapi capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, untuk indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya adalah pada urusan kebudayaan. Untuk selanjutnya diharapkan indikator-indikator ini dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kegiatan :

a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 185.300.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%. Adapun tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran bertambahnya ruang kelas yang dibangun.

b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 292.471.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 292.371.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 99,97%. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya ruang kelas yang direhabilitasi.

c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 75.990.900,- (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 61.615.849,- (enam puluh satu juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sebesar 81,08%. Kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik dengan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator keluaran peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui PTK.

d. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.76.830.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 76.788.876,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 99,95%. Kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tersusunnya kurikulum dan bahan ajar dan model pembelajaran paud.

e. Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 780.374.450,- (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 752.132.376 (tujuh ratus lima puluh dua juta serratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 96,39%. Kegiatan penyelenggaraan dukungan operasional TK Negeri tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran penyediaan dukungan operasional tk negeri.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah.

b. Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.185.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.184.686.026,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh enam rupiah) atau sebesar 99,99%. Kegiatan pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa.

c. Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 247.437.600,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 246.356.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,56%. Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai

d. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 86.097.750,- (delapan puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 85.972.800,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 99,85%. Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai

e. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 325.955.500,- (tiga ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 318.409.840,- (tiga ratus delapan belas juta empat ratus Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 97,69%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

f. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 315.927.300,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 302.057.400,- (tiga ratus dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 95,61%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

g. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 296.821.500,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 239.739.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 80,77%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

h. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 339.954.950,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 333.520.870,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 98,11%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

i. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 336.390.160,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 309.152.155,- (tiga ratus Sembilan juta seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 91,90%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

j. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 254.040.000,- (dua ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 239.014.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat belas ribu rupiah) atau sebesar 94,09%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

k. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 320.257.000,- (tiga ratus dua puluh dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 313.316.785,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus

delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 97,83%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.532.615,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 183.410.300,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,86%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

m. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 278.572.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 278.572.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

n. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 300.242.500,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 300.242.500,- (tiga ratus juta dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

o. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 293.864.800,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 293.858.800,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapa ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

p. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 411.124.000,- (empat ratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 390.664.934,- (tiga ratus Sembilan puluh jiuta enam ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 95,02%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

q. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 607.416.000,- (enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 606.292.730,- (enam ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 99,82%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

r. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 228.736.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 228.736.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga

puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

s. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Negeri Binsus

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 252.110.500,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 229.918.800,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 91,20%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Negeri Binsus tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

t. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 263.945.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 263.921.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,99%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

u. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 287.486.650,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 287.486.650,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien

- v. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 204.812.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp204.812.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- w. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 330.684.300,- (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 330.503.800,- (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 99,95%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien
- x. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 308.778.900,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 308.778.900,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya pelayanan pendidikan
- y. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 348.700.800,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 348.604.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah) atau sebesar 99,97%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21 tingkat capaian sebesar 100%

dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya pelayanan pendidikan

z. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 342.976.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 328.576.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 95,80%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya pelayanan pendidikan

aa. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.634.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta) dengan realisasi sebesar Rp. 1.627.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 99,60%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah SD yang dibangun

bb. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 380.523.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 380.523.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran

terpenuhinya jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah SMP yang dibangun

cc. Penambahan ruang guru sekolah tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.025.000.000,00,- (satu milyar dua puluh lima juta) dengan realisasi sebesar Rp. 1.025.000.000,00,- (satu milyar dua puluh lima juta) atau sebesar 100%. Kegiatan penambahan ruang guru sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran bertambahnya ruang guru sekolah tingkat SD.

dd. Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta) dengan realisasi sebesar Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta) atau sebesar 100%. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya jumlah ruang kelas sekolah tingkat SD yang dibangun.

ee. Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 193.960.800,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 193.960.800,- (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya jumlah ruang kelas sekolah tingkat SMP yang dibangun.

ff. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.718.375.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.718.375.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah laboratorium dan pratikum tingkat SMP yang dibangun.

gg. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. .1.786.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.779.190.300,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta serratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99,62%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SD.

hh. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.739.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.736.666.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,84%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SMP

ii. Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 244.632.500,- (dua ratus empat puluh empat empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 174.260.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) atau sebesar 71,23%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% walaupun ujian nasional tidak diselenggarakan karena Pandemi Covid 19. Realisasi anggaran tetap digunakan untuk biaya operasional Ujian Nasional Tingkat SD seperti biaya cetak ijazah dan cetak SKHUN Tingkat SD.

jj. Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 83.662.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 81.822.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 97,80%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% walaupun ujian nasional tidak diselenggarakan karena Pandemi Covid 19. Realisasi anggaran tetap digunakan untuk biaya operasional Ujian Nasional Tingkat SMP seperti biaya cetak ijazah dan cetak SKHUN Tingkat SMP

kk. Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran jumlah gedung sekolah tingkat SD yang dibangun

ll. Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.249.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.246.159.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh

Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,77%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran jumlah gedung sekolah tingkat SMP yang dibangun

mm. Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitary Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.950.924.250,- (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.948.195.000,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,93%. Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi tingkat SD

nn. Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitary Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 905.823.200,0,- (Sembilan ratus lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 849.827.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 93,82% Kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitary tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi tingkat SMP

oo. Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah perpustakaan SD yang dibangun.

- pp. **Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tingkat SD**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.326.902.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.307.381.750,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99.16%. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Ruang kelas sekolah tingkat SD dalam kondisi baik.
- qq. **Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tingkat SMP**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 833.000.000,- (delapan juta tiga puluh tiga juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 833.000.000,- (delapan juta tiga puluh tiga juta rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Ruang kelas sekolah tingkat SMP dalam kondisi baik.
- rr. **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SD**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 137.721.700,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 98.627.700,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 71,61%. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa tingkat SD
- ss. **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SMP**
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 86.840.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 51.090.000,- (lima puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 58,83%. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa tingkat SMP.

tt. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.010.250.000,- (dua belas milyar sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.472.550.153,87,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus lima puluh tiga koma delapan puluh tujuh) atau sebesar 95,52%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tingkat SD.

uu. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.987.490.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.939.015.251,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 97,56%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tingkat SMP

vv. Rehabilitasi Bangunan Sekolah Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.500.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.751.218.483,47,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,44%. Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terbangunan bangunan sekolah tingkat SD dalam kondisi baik.

ww. Rehabilitasi Bangunan Sekolah Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.420.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.418.154.900,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta seratus lima puluh empat Sembilan ratus rupiah) atau sebesar 99,83%. Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terbangunan bangunan sekolah tingkat SMP dalam kondisi baik

xx. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar tingkat capaian sebesar 0% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan sekolah dasar.

yy. Penyelenggaran Ujian Kesetaraan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 36.361.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 31.001.500,- (tiga puluh satu juta seribu lima ratus rupiah) atau sebesar 85,26%. Kegiatan penyelenggaraan ujian kesetaraan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terselenggaranya ujian kesetaraan di Kota Dumai.

3. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

a. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 317.407.500,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 272.021.700,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 85,70%. Kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standard kompetensi tingkat

capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhi kompetensi guru untuk kurikulum

- b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 15.576.000.000,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.257.600.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 97,96%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional dan Meningkatnya kesejahteraan PTK tingkat SD

- c. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.195.200.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) atau sebesar 99,48%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya pengetahuan guru tentang jabatan fungsional dan Meningkatnya kesejahteraan PTK tingkat SMP

- d. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 137.360.000,- (seratus tiga puluh tuju juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 132.081.365,- (seratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 96,16%. Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran

Adanya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP

- e. Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 517.176.600,- (lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 512.466.600,- (lima ratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,09%. Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD.

- f. Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 602.596.260,- (enam ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 593.470.208,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan rupiah) atau sebesar 98,49%. Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Meningkatnya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP.

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 442.541.750,- (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 433.858.443,- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 98,04%. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan tingkat capaian sebesar 100%

dengan indikator kinerja keluaran Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan.

- b. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 623.800.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 609.315.240,- (enam ratus Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 97,68%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Peserta yang mengikuti kegiatan.

- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 170.724.880,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 165.985.630,- (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 97,22%. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat pencapaiannya 100%, dengan capaian program adalah terdatanya sarana dan prasarana sekolah se Kota Dumai. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaporan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah.

5. Program Pengembangan Nilai Budaya

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.330.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 170.925.514,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) atau sebesar 92,23%. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah tingkat

capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Dilestarikannya adat budaya daerah.

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 366.744.500,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 341.555.849,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 93,13%. Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terjaganya seni dan budaya daerah.

7. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terselenggaranya kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan.

Lampiran 3.A.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI		Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	90%	90%			
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	90%	90%			
				Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	85%	85%			
				Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	90%	90%			
				Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	12 bulan	12 bulan			
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
				Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	90%	90%			
				Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa	90%	90%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	90%	90%			
				Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	90%	90%			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	12 bulan	12 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN Binsus	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	12 bulan	12 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	12 bulan	12 bulan			
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	100%	100%			
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	100%	100%			
				Penambahan ruang guru sekolah tingkat SD	100%	100%			
				Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	100%	100%			
				Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	100%	100%			
				Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat SMP	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tingkat SD	100%	100%			
				Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Tingkat SMP	100%	100%			
				Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	100%	100%			
				Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	100%	100%			
				Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SD	100%	100%			
				Pembangunan Gedung Sekolah Tingkat SMP	100%	100%			
				Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitary Tingkat SD	100%	100%			
				Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitary Tingkat SMP	100%	100%			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	100%	100%			
				Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tingkat SD	100%	100%			
				Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tingkat	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				SMP					
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SD	100%	100%			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SMP	100%	100%			
				Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	90%	90%			
				Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	100%	100%			
				Rehabilitasi Bangunan Sekolah Tingkat SD	90%	90%			
				Rehabilitasi Bangunan Sekolah Tingkat SMP	90%	90%			
				Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	12 bulan	12 bulan			
				Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	90%	90%			
				Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan					
				Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	90%	90%			
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan	90%	90%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD					
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	90%	90%			
				Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	90%	90%			
				Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	90%	90%			
				Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	90%	90%			
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					
				Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	90%	90%			
				Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan	90%	90%			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	90%	90%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program BOS					
				BOS SD	90%	90%			
				BOS SMP	90%	90%			
				Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah					
				Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	100%	100%			
2	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI		Program Pengembangan Nilai Budaya					
				Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	80%	80%			
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
				Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	90%	90%			

Anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun anggaran 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 359.919.852.098,88 Anggaran tersebut dibagi dalam dua anggaran belanja yakni Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Belanja tidak langsung dikhususkan untuk belanja pegawai, yakni gaji dan tunjangan-tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Data realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	245.160.067.694,88	220.786.669.340,00	90,06
2	Belanja Langsung	114.759.784.404,00	76.866.935.061,34	66,94
Jumlah		359.919.852.098,88	297.616.604.401,34	82,69

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2020

Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Realisasi Program dan Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.905.623.539,00	2.831.838.183,00	97,46%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	17.300.000,00	12.580.900,00	72,72%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	405.380.000,00	356.362.248,00	87,91%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	167.000.000,00	164.310.000,00	98,39%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	170.640.000,00	164.640.000,00	96,48%
5	Penyediaan alat tulis kantor	397.870.000,00	395.395.000,00	99,38%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	146.313.500,00	146.286.050,00	99,98%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.758.000,00	23.216.000,00	90,13%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	724.512.039,00	721.057.845,00	99,52%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00%

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
10	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	567.350.000,00	564.490.140,00	99,50%
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan	815.458.000,00	810.266.320,00	99,36%
1	Pembangunan gedung kantor	690.610.000,00	689.895.100,00	99,90%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	124.848.000,00	120.371.220,00	96,41%
	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	0,00	0,00%
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :	0,00	0,00	0,00%
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	196.524.750,00	195.720.280,00	99,59%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	68.428.000,00	67.628.000,00	98,83%
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	128.096.750,00	128.092.280,00	100,00%
	Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan	1.410.966.350,00	1.368.208.101,00	96,97%
1	Penambahan ruang kelas sekolah	185.300.000,00	185.300.000,00	100,00%
2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	292.471.000,00	292.371.000,00	99,97%
3	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	75.990.900,00	61.615.849,00	81,08%
4	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	76.830.000,00	76.788.876,00	99,95%
5	Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri	780.374.450,00	752.132.376,00	96,38%
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan	53.248.830.275,00	50.949.162.728,34	95,68%
1	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD	1.634.000.000,00	1.627.500.000,00	99,60%
3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP	380.523.000,00	380.523.000,00	100,00%
4	Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	100,00%
5	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00	100,00%
6	Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP	193.960.800,00	193.960.800,00	100,00%
7	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP	1.718.375.000,00	1.718.375.000,00	100,00%
8	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD	1.786.000.000,00	1.779.190.300,00	99,62%
9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP	1.739.500.000,00	1.736.666.000,00	99,84%
10	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD	244.632.500,00	174.260.000,00	71,23%
11	Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP	83.662.000,00	81.822.000,00	97,80%
12	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00%
13	Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP	1.249.000.000,00	1.246.159.000,00	99,77%
14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD	3.950.924.250,00	3.948.195.000,00	99,93%
15	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP	905.823.200,00	849.827.000,00	93,82%
16	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD	585.000.000,00	585.000.000,00	100,00%
17	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD	2.326.902.000,00	2.307.381.750,00	99,16%
18	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP	833.000.000,00	833.000.000,00	100,00%
19	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD	137.721.700,00	98.627.700,00	71,61%
20	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP	86.840.000,00	51.090.000,00	58,83%
21	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD	12.010.250.000,00	11.472.550.153,87	95,52%
22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP	1.987.490.000,00	1.939.015.251,00	97,56%

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
23	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD	7.000.500.000,00	6.751.218.483,47	96,44%
24	Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP	1.420.500.000,00	1.418.154.900,00	99,83%
25	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000,00	0,00	0,00%
26	Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	36.361.500,00	31.001.500,00	85,26%
27	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	2.185.000.000,00	2.184.686.026,00	99,99%
28	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	247.437.600,00	246.356.000,00	99,56%
29	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	86.097.750,00	85.972.800,00	99,85%
30	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1	325.955.500,00	318.409.840,00	97,69%
31	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 2	315.927.300,00	302.057.400,00	95,61%
32	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 3	296.821.500,00	239.739.000,00	80,77%
33	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 4	339.954.950,00	333.520.870,00	98,11%
34	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 5	336.390.160,00	309.152.155,00	91,90%
35	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 6	254.040.000,00	239.014.000,00	94,09%
36	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 7	320.257.000,00	313.316.785,00	97,83%
37	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 8	185.532.615,00	183.410.300,00	98,86%
38	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 9	278.572.000,00	278.572.000,00	100,00%
39	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 11	300.242.500,00	300.242.500,00	100,00%
40	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 12	293.864.800,00	293.858.800,00	100,00%
41	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 13	411.124.000,00	390.664.934,00	95,02%
42	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 14	607.416.000,00	606.292.730,00	99,82%

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
43	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 15	228.736.000,00	228.736.000,00	100,00%
44	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMP Negeri Binsus	252.110.500,00	229.918.800,00	91,20%
45	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 16	263.945.500,00	263.921.500,00	99,99%
46	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 17	287.486.650,00	287.486.650,00	100,00%
47	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 18	204.812.000,00	204.812.000,00	100,00%
48	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 19	330.684.300,00	330.503.800,00	99,95%
49	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 20	308.778.900,00	308.778.900,00	100,00%
50	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 21	348.700.800,00	348.604.000,00	99,97%
51	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 22	342.976.000,00	328.576.000,00	95,80%
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.345.740.360,00	17.956.639.873,00	97,88%
1	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD	317.407.500,00	272.021.700,00	85,70%
2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD	15.576.000.000,00	15.257.600.000,00	97,96%
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP	1.195.200.000,00	1.189.000.000,00	99,48%
4	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP	137.360.000,00	132.081.365,00	96,16%
5	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD	517.176.600,00	512.466.600,00	99,09%
6	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP	602.596.260,00	593.470.208,00	98,49%
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.237.066.630,00	1.209.159.313,00	97,74%
1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	442.541.750,00	433.858.443,00	98,04%
2	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	623.800.000,00	609.315.240,00	97,68%
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	170.724.880,00	165.985.630,00	97,22%

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kegiatan	36.037.000.000,00	36.037.000.000,00	100%
1	BOS SD	26.244.000.000,00	26.244.000.000,00	100%
2	BOS SMP	9.793.000.000,00	9.793.000.000,00	100%
	Program Pengembangan Nilai Budaya	185.330.000,00	170.925.514,00	92,23%
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	185.330.000,00	170.925.514,00	92,23%
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan	366.744.500,00	341.555.849,00	93,13%
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	366.744.500,00	341.555.849,00	93,13%
	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%
	JUMLAH	114.759.784.404,00	112.866.935.061,34	98,35%

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai, 2020

A.2 Urusan Wajib Kesehatan, Oleh Dinas Kesehatan dan RSUD

A.2.1 Urusan Wajib Kesehatan, Oleh Dinas Kesehatan

Pelaksanaan program di bidang kesehatan selama tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian dalam (%)
1.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 19	7,35	100%
2.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	≤ 26	8.81	100%
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	per 100.000 Kelahiran Hidup	102	36.73	100%
4.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,04	70,93	99,85%
5.	Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	1	0,01	100%
6.	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	66.57	100%
7.	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	2.03	-3.00%
8.	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	56	114.27	-4.05%
9.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	< 2	0.01	100%
10.	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	< 5	0,41	100%
11.	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan Nasional (JKN)	orang	90	85.52	95.02%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2020

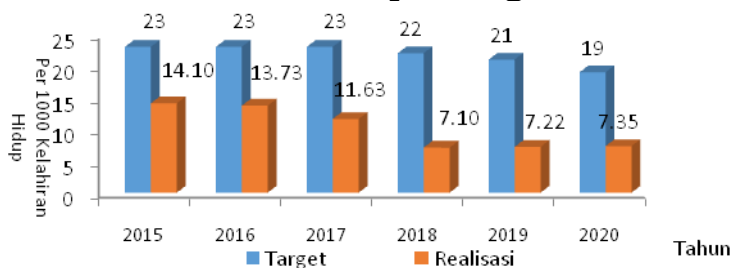
Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Terkendalinya Kejadian Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2020 adalah sebesar 99,96%, Terkendalinya Kejadian Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2020 adalah sebesar 48,24%, meningkatnya status gizi pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dan Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 95.02%.

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 60 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota

Dumai sebesar 7,35 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana angka kematian bayi sebesar 7,22 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 19 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2015 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.1 berikut ini :

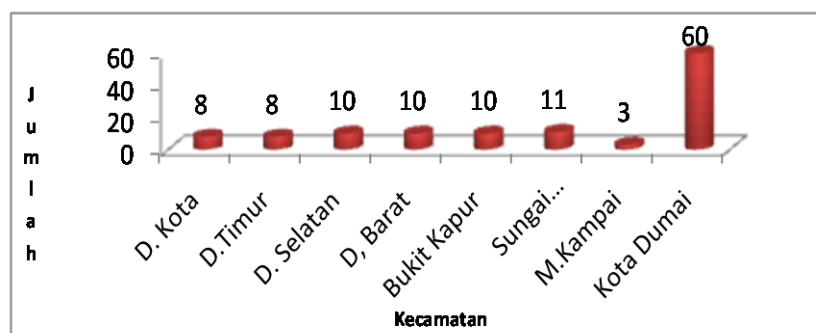
Grafik 3.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Sungai Sembilan yakni sebanyak 11 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan, Dumai Barat dan Bukit Kapur sebanyak 10 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3.2
Pencapaian Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai tahun 2020



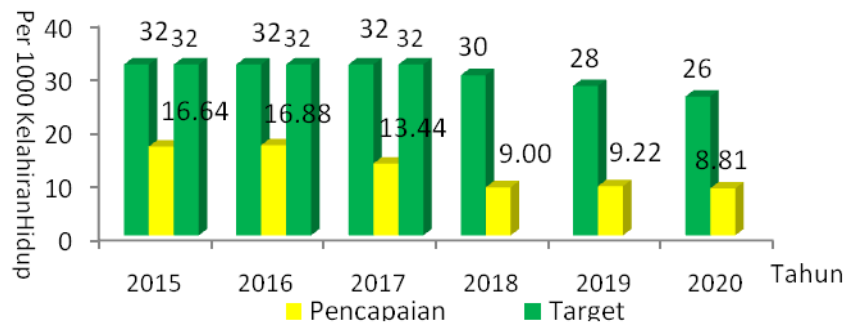
Sumber :Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia dan Penyebab Lain.

b. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 72 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana angka kematian bayi sebesar 9,22 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya penurunan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 26 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2015 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.3 berikut ini :

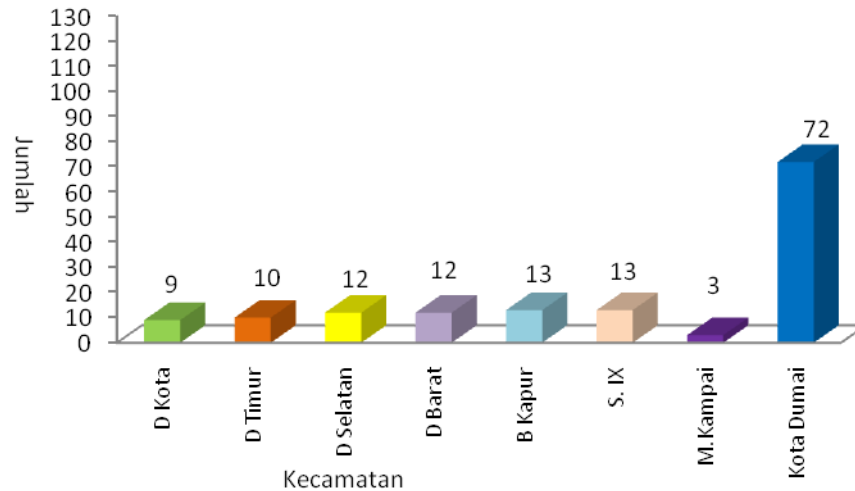
Grafik 3.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur dan Sungai Sembilan yakni sebanyak 13 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan sebanyak 12 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2020



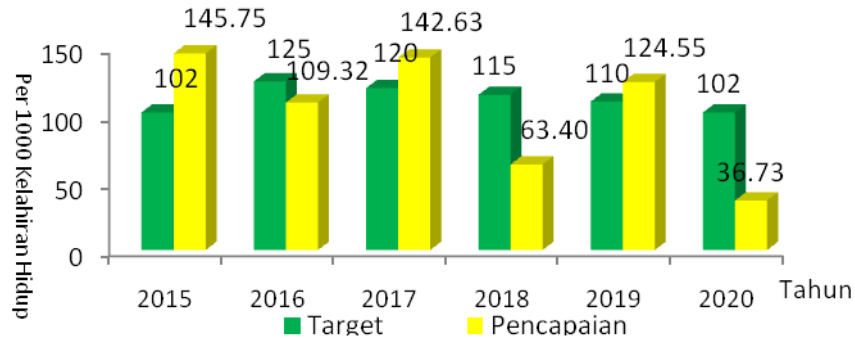
Sumber :Dinas Kesehatan, 2020

Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan Penyebab lain.

c. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 3 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 36,73 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019, di mana angka kematian ibu sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada penurunan angka kematian ibu pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini dibawah target. Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.5 berikut ini:

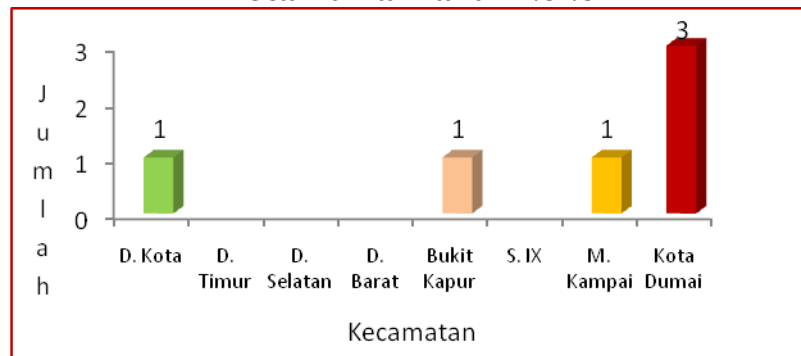
Grafik 3.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terdapat di Kecamatan Dumai Kota, Bukit Kapur dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 1 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.6 berikut ini :

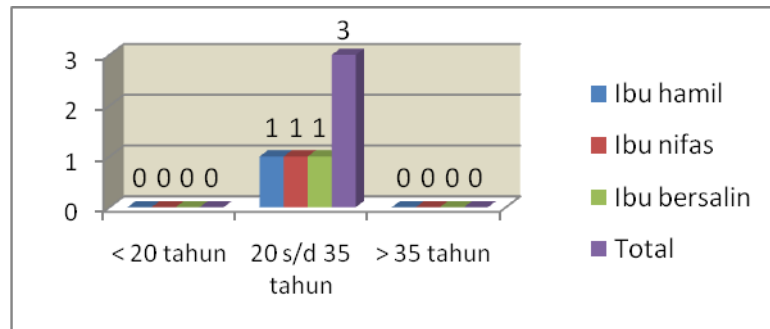
Grafik 3.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena Hipertensi sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun yakni sebanyak 3 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terdapat pada kelompok ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masing-masing sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 3.7 berikut ini:

Grafik 3.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu
Dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2020



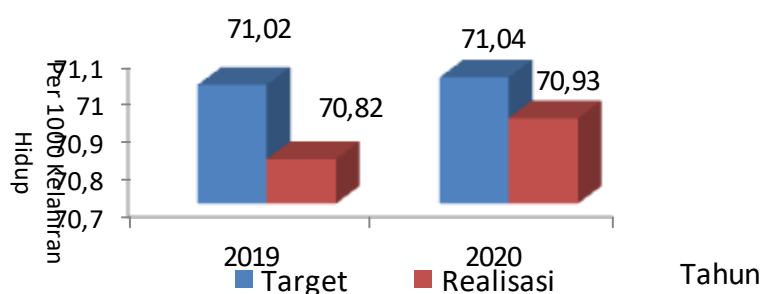
Sumber :Dinas Kesehatan

d. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir

Mulai tahun 2018 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2020 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,93 tahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yakni sebesar 70,82 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2020 dapat di lihat pada grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Pencapaian Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kota Dumai
Tahun 2019 s.d 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Tabel 3.7 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru
Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
Dari Tahun 2014 sampai dengan 2020

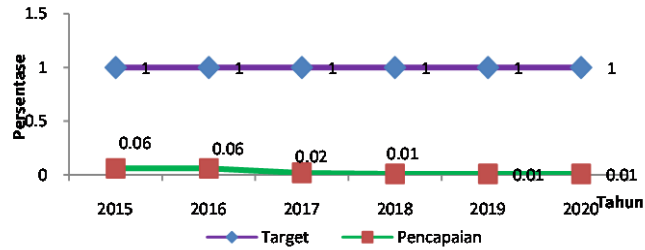
No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2014	70,59	70,76	70,05
2.	2015	70,78	70,93	70,25
3.	2016	70,90	70,97	70,31
4.	2017	71,06	70,99	70,37
5.	2018	71,20	71,19	70,55
6.	2019	71.38	71.48	70,82
7.	2020	71.47	71.60	70.93

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2020
(AHH," Life Expectancy of Population")

e. Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 202 kasus malaria klinis. Dari 202 kasus yang ada terdapat 3 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 di mana *Annual Parasite Incidence*(API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk, terlihat pencapaiannya statis. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 3.9 dibawah ini :

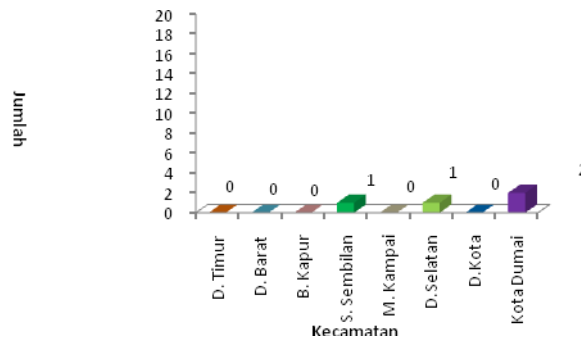
Grafik 3.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terdapat pada puskesmas Bukit Timah dan Sungai Sembilan masing-masing 1 kasus seperti terlihat pada grafik 3.10 berikut ini :

Grafik 3.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2020



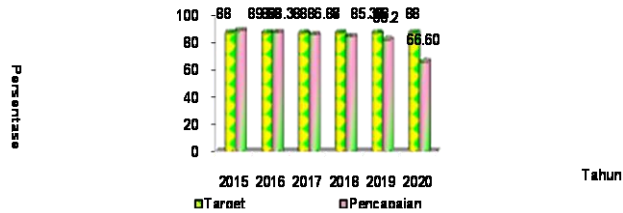
Sumber :Dinas Kesehatan

f. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2020 dari total 338 penderita TB Paru BTA + yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 225 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 66,60%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 83,20%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + tahun 2020 belum mencapai target. Pencapaian

angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari grafik 3.11 berikut ini :

Grafik 3.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020

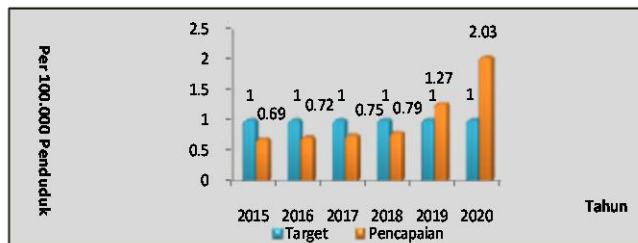


Sumber :Dinas Kesehatan

g. Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 481 kasus yang terdiri dari 459 kasus lama dan 22 kasus baru yang ditemukan tahun 2020. Dari 481 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 161 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 320 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2019 adalah sebesar 2,03% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 15.764 orang).

Grafik 3.12
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020

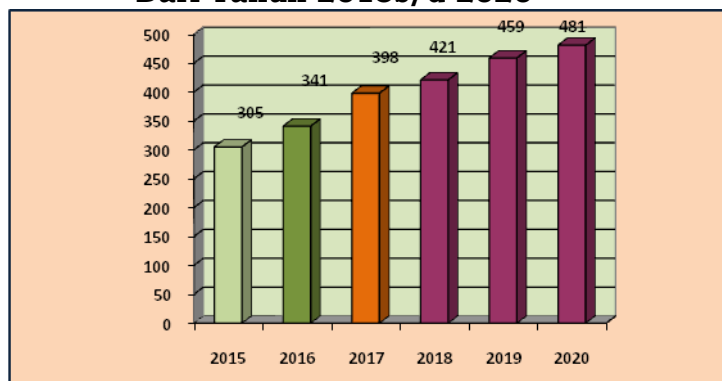


Sumber :Dinas Kesehatan

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 1.27%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2020 sebesar < 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu

gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

**Grafik 3.13 Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2015s/d 2020**



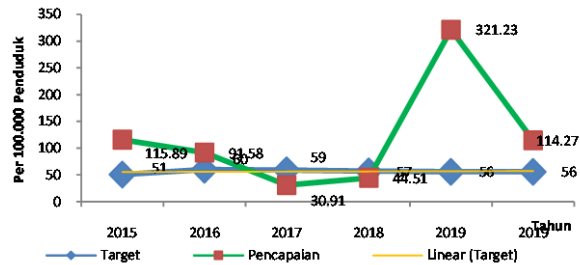
Sumber :Dinas Kesehatan

h. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2020 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 359 kasus atau IR = 114.27 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 2 orang atau CFR = 0,56%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 992 kasus atau IR= 321.23 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 3 kasus atau CFR = 0.3%, maka ada penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 55 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut dibawah target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya buruk). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ± 80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di

banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

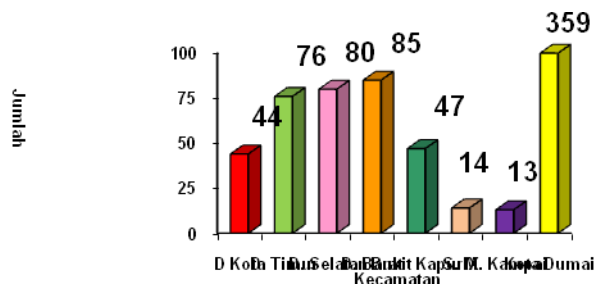
Grafik 3.14
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat yakni sebanyak 85 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 80 dan Dumai Timur 76 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini :

Grafik 3.15
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

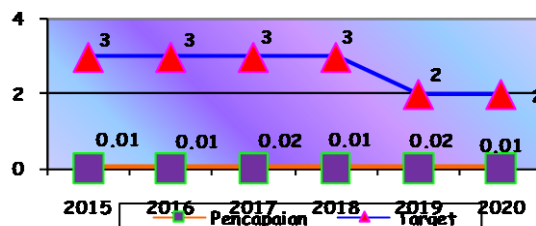
Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas

daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

i. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2020 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2020 adalah 0,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 7 kasus, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2020 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 3.16
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019



Sumber :Dinas Kesehatan

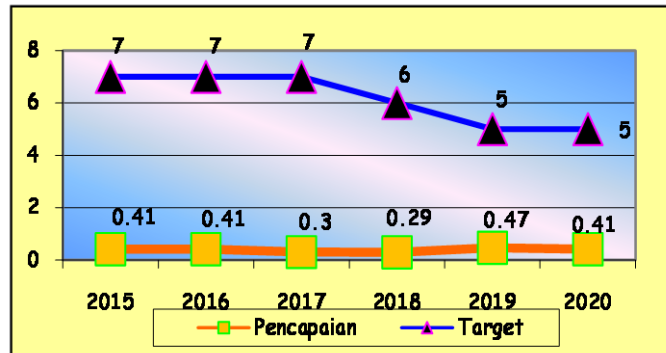
Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya

j. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Kasus balita dengan gizi kurang di Kota Dumai masih sering ditemukan dan jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai, dimana warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Selama tahun 2020 kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 106 kasus dari 26.005 balita yang ditimbang, sehingga persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 0,41%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 182 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0,47%, terlihat ada penurunan kasus balita dengan gizi

kurang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2019 yakni sebesar 5%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Grafik 3.17
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang
Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2020



Sumber :Dinas Kesehatan

Melalui pelaksanaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yakni pelacakan kasus balita dengan gizi kurang selama tahun 2020 ditemukan 106 kasus balita gizi kurang dan balita BGM. Setelah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu yaitu sebanyak 80 gram selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pada akhir tahun 2020 jumlah kasus balita gizi kurang dan balita BGM berkurang menjadi 51 kasus balita gizi kurang. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi kurang pada balita diharapkan dapat segera diantisipasi

k. Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Akses Pelayanan Kesehatan Gratis

Program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak Tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan dikelas III selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi Masyarakat Kota Dumai Tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan kurang mampu.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.136.464.408.226,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 42.376.506.700,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 94.087.901.526,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 39.470.993.013,- atau terserap 93,14 % dan belanja langsung terserap Rp. 85.273.130.689,- atau 90,63 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.130.151.950,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 2.052.871.420,- atau sebesar 96,37 % untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan dana sebesar Rp. 408.470.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 365.852.673,- atau sebesar 89,57%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian listrik dalam 1 tahun, jumlah pemakaian wifi dalam 1 tahun, jumlah pemakaian air dalam 1 tahun dan jumlah pemakaian telepon dalam satu tahun dengan realisasi sebesar 100%.

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 22.550.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 16.642.000,- atau sebesar 73,80%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 Tahun dengan realisasi 100%.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 168.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 158.200.000,- atau sebesar 94,17%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dinas kesehatan dan puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 349.115.550,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 349.115.550,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun sebesar 100%.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 30.890.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 26.800.000,- atau sebesar 86,76%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam satu tahun dengan realisasi sebesar 100%.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 8.440.400,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 8.393.800,- atau sebesar 99,45%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

g) Penyediaan peralatan rumah tangga

Pada kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dialokasikan dana sebesar Rp. 8.186.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.436.000,- atau sebesar 90,84%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah peralatan kebersihan dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 31.200.000,- dengan realisasi

penyerapan sebesar Rp. 30.880.000,- atau sebesar 98,97%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

i) Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman dialokasikan dana sebesar Rp. 36.400.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 29.200.000,- atau sebesar 80,22%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman rapat selama 1 tahun, jumlah penyediaan air minum gallon untuk Dinas Kesehatan selama 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan dana sebesar Rp.730.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.729.001.397,- atau sebesar 99,86 %. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

k) Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Pada kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor dialokasikan dana sebesar Rp.336.900.000,-dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.331.350.000,- atau sebesar 98,35%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor dinas kesehatan dan puskesmas dengan realisasi sebesar 100%

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.612.976.435,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.532.540.352,- atau sebesar 95,01 % untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 309.626.435,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 299.011.000,- atau sebesar 96,57%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi sebesar 100%.

b. Pengadaan Mebeleur

Pada kegiatan pengadaan mebeleur dialokasikan dana sebesar Rp.205.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.204.460.000,-

atau sebesar 99,74%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pengadaan mebeleur kantor dengan realisasi sebesar 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 459.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 455.176.000,- atau sebesar 99,06%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan realisasi sebesar 100%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp.508.900.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.460.155.352,- atau sebesar 90,42%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp.30.350.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.28.150.000,- atau sebesar 92,75%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%.

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp.99.600.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.85.588.000,- atau sebesar 85,93%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah jumlah Printer yang terpelihara dalam 1 tahun dengan realisasi sebesar 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.96.556.000,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.88.300.000,- atau sebesar 91,45% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dialokasikan dana sebesar Rp.9.250.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar

Rp.9.000.000,- atau sebesar 97,30%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/diklat dengan realisasi 100%.

b. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Pada kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur dialokasikan dana sebesar Rp.87.306.000,- dengan realisasi sebesar Rp.79.300.000,- atau sebesar 90,83%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas dengan realisasi 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.48.875.000. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.48.575.000,- atau sebesar 99,39% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp.48.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.575.000,- atau sebesar 99,39%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan dengan realisasi 100%

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pada anggaran untuk program ini sebesar Rp.10.571.820.995,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.10.299.214.025,- atau sebesar 97,42% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp.10.571.820.995,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.299.214.025,- atau sebesar 97,42%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.38.144.662.280,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.32.524.526.278,- atau sebesar 85,27% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.16.552.138.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.16.335.061.252,- atau sebesar 98,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan dengan realisasi sebesar 100%.
- b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.7.480.845.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.7.101.008.324,- atau sebesar 94,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%
- c. Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.15.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.800.000,- atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pertemuan diseminasi TPG Puskesmas, bidan koordinator dan lintas program dan pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk dengan realisasi semuanya 100%.
- d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.304.094.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.158.176.752,- atau sebesar 52,02% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah tata laksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi dan jumlah supervise fasilitatif kesehatan ibu dengan realisasi semuanya 100%.
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator

kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah sekolah yang dilakukan penjangkauan kesehatan dengan realisasi semuanya 0%.

f. Peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.686.061.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.069.266.900,- atau sebesar 92,90% dari anggaran. Adapun indikator keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas dengan realisasi 100%, jumlah pelaksanaan pembinaan perkesmas kewilayahan dengan realisasi 0 %, jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas dengan realisasi 0% dan Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas dengan realisasi 100%.

g. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30.150.000,- atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS,Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas, dan pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit kota dumai semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

h. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.700.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.258.419.050,- atau sebesar 36.92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan

kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

i. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.325.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.733.000,- atau sebesar 8.53% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

j. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.440.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.73.907.000,- atau sebesar 16.80% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

k. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.623.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.132.300.000,- atau sebesar 21.24% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.6.650.000,- atau sebesar 1.90% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

m. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.620.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.31.420.000,- atau sebesar 5.07% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan

pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosi, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

n. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.91.325.000,- atau sebesar 26.09% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosi, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

o. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.810.574.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.82.100.000,- atau sebesar 10.13% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosi, dan jumlah pelayanan kesehatan

orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

p. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39.576.500,- atau sebesar 9.89% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

q. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.455.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.632.500,- atau sebesar 15.30% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.265.062.500 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.238.565.000

atau sebesar 90,00% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 265.062.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238.565.000 atau sebesar 90,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah apotik yang diawasi dan di bina 30 sarana, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 30 sarana, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 50 sarana, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina 30 sarana dan jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina 10 puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.45.700.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.45.700.000 atau sebesar 100,00% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.700.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.700.000 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengamanan barang milik daerah, jumlah inventaris barang milik daerah dan jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.009.131.950,- Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.957.060.950,- atau sebesar 94,84% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.269.588.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.237.208.000,- atau sebesar 87,99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif 10 kelurahan dan orientasi/refresing dalam peningkatan kapasitas kader posyandu semuanya mencapai cakupan 0% dari realisasi target

kinerja.

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.668.943.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.649.252.950,- atau sebesar 97,06% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lomba posyandu teladan dan jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok semuanya mencapai cakupan 0% dari realisasi target kinerja

c. Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.70.600.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.70.600.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya 20 orang, jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 20 tempat, jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK 10 puskesmas, dan jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 9 orang dengan realisasi sebesar 100%.

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.758.239.500,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.662.075.620,- atau sebesar 87,32% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.709.019.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.617.943.120,- atau sebesar 87,15% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran PMT pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk 30 balita, jumlah PMT KLB Gizi Buruk 6 kasus dan jumlah PMT pemulihan bumil KEK 60 orang semuanya dengan realisasi 100%

b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.49.220.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.44.132.500,- atau sebesar 89,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pemantauan garam beryodium 33 kelurahan, jumlah pertemuan peningkatan kinerja program gizi 55 orang dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, semuanya 0% dari realisasi target kinerja

11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.492.694.500,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.466.236.325,- atau sebesar 94,63% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.492.694.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.466.236.325,- atau sebesar 94,63% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan 2 dokumen dan jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos ukk yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.053.615.000,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.491.938.122,- atau sebesar 46,69% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.418.895.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.203.200.000,- atau sebesar 48,51% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan fogging fokus sebanyak 224 semuanya mencapai cakupan 34,82% dari realisasi target kinerja.

b. Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.166.080.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.159.834.000 atau sebesar 96,24% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD 50 liter dan jumlah ketersediaan swing fog 3 unit semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.

c. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.81.490.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.24.004.122 atau sebesar 29,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan catch up campaign campak SD di 117 SD dan pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah dengan realisasi semuanya sebesar 0%.

d. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.211.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.600.000,- atau sebesar 33,89% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaannya larvasidasi massal 2 kali dengan realisasi 0%, jumlah pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru 10 puskesmas dengan realisasi 100% dan, pelaksanaan penanggulangan penyakit IMS dan HIV/AIDS 10 puskesmas dengan realisasi 100% dari realisasi target kinerja.

e. Kegiatan peningkatan imunisasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.88.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.26.700.000,- atau sebesar 30,03% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin 12 bulan dengan realisasi 100%,

f. Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.87.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.6.600.000,- atau sebesar 7,59% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB 200 kasus dengan capaian 12%

13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.14.674.932.466,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.13.160.546.511,- atau sebesar 89,68% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.41.775.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.100.000,- atau sebesar 84.02% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

**Tabel 3. 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020
Standar Pelayanan Kesehatan**

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%
Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan	Dokumen	2	1	50%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan	Dokumen	2	2	100%
Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen rencana aksi yang dihasilkan	Dokumen	2	1	50%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan 100%, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan 50%, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan 100% dan jumlah dokumen rencana aksi 2 dokumen dengan realisasi 50% dari target kinerja.

b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.21.800.000,- atau sebesar 78.00% dari anggaran. Adapun indikator

kinerja keluaran adalah:

Tabel 3. 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan pertahun	Dokumen	1	1	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- c. Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.317.075.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.277.926.935,- atau sebesar 87.65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 3. 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100%
Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	bulan	12	12	100%

Sumber :Dinas Kesehatan

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.31.525.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.21.037.000,- atau 66.73% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah :

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator dan tolak ukur kinerja keluaran	Satuan	Target Kinerja		Cakupan
		Rencana	Realisasi	
Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan	Dokumen	4	3	75%
Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100%
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dapat dilihat dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.864.718.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.601.575.703,- atau sebesar 85.89% dari anggaran. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.949.006.599,- atau sebesar 86.27% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja

g. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.330.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.126.798.817,- atau sebesar 84.72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

h. Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.230.431.960,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.064.640.828,- atau sebesar 92.57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

i. Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.922.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.873.833.941,- atau sebesar 94.72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

j. Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.105.404.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.010.521.711,- atau sebesar 91.42% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

k. Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.551.536.356,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.532.123.952,- atau sebesar 96.48% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

1. Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.327.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.196.276.617,- atau sebesar 94.38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

m. Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.140.928.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.050.898.743,- atau sebesar 92.11% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

n. Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.684.088.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.399.005.165,- atau sebesar 83.07% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.22.899.691.950,- dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.22.507.051.086,- atau sebesar 98,29% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pembangunan puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.18.601.554.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.305.426.086,- atau sebesar 98,41% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah puskesmas yang dibangun 2 unit dengan realisasi 100%.

b. Kegiatan pembangunan puskesmas pembantu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp.2.630.635.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.626.733.000,- atau sebesar 99,85% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pustu/poskeskel yang dibangun sebanyak 4 unit dengan realisasi 100%.

c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.172.002.450 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.166.800.000 atau sebesar 96,98% dari anggaran.

d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.450.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.362.592.000,- atau sebesar 93,97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengadaan puskesmas keliling double garden 2 unit dan jumlah pengadaan puskesmas keliling roda dua 6 unit dengan realisasi 100%.

e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.45.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.45.500.000,- atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pembinaan puskesmas sebanyak 4 kali dengan realisasi sebesar 100%.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.62.236.000,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.60.935.000,- atau sebesar 97,91% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.081.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- atau sebesar 97,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak 10 puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

b. Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.59.155.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.57.935.000,- atau sebesar 97.94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali dengan realisasi 100%.

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.46.535.000,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.29.335.000,- atau sebesar 63,04% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.46.535.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.29.335.000,- atau sebesar 63,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program lansia dengan realisasi semuanya sebesar 100% dan jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia dengan realisasi 0%.

17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.175.020.000,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.107.660.000,- atau sebesar 61,51% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.175.020.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.107.660.000,- atau sebesar 61,51% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jemaah calon haji 2 kali, jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan jiwa 10 puskesmas vaksinasi meningitis Jemaah calon haji 1 kali dengan realisasi semuanya sebesar 100% dan jumlah pelaksanaan deteksi dini factor resiko PTM di posyandu dengan realisasi 25%.

Lampiran 3.A.2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Dinas Kesehatan Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan		Program	: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Kegiatan	: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
				keluaran	: Jumlah pemakaian listrik dalam setahun	12 bulan	12 bulan			
					: Jumlah pemakaian wi-fi dalam setahun	12 bulan	12 bulan			
					: Jumlah pemakaian air dalam setahun	12 bulan	12 bulan			
					: Jumlah pemakaian telepon dalam setahun	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
				keluaran	: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	10 unit	10 unit			
				Kegiatan	: Penyediaan jasa kebersihan kantor					
				keluaran	: Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan kantor dinas kesehatan dan puskesmas	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Penyediaan alat tulis kantor					
				keluaran	: Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
				keluaran	: Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan dalam satu tahun	12 bulan	12 bulan			

			Kegiatan	:	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
			keluaran	:	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektrinik dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan			
			Kegiatan	:	Penyediaan peralatan rumah tangga					
			keluaran	:	Jumlah peralatan kebersihan dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan			
			Kegiatan	:	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
			keluaran	:	Jumlah pemakaian surat kabar dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan			
			Kegiatan	:	Penyediaan makanan dan minuman					
			keluaran	:	Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun	11 bulan	11 bulan			
					Jumlah penyediaan air mineral galon untuk dinas kesehatan selama 1 tahun	400 galon	400 galon			
			Kegiatan	:	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
			keluaran	:	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan			
			Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor					
			keluaran	:	Jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor dinas kesehatan dan puskesmas	12 bulan	12 bulan			
			Program	:	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Kegiatan	:	Pengadaan peralatan gedung kantor					
			Keluaran	:	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 item	4 item			
			Kegiatan	:	pengadaan Mebeluer					
			keluaran	:	Jumlah pengadaan Mebeluer	2 item	2 item			
			Kegiatan	:	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					
			keluaran	:	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit			
			Kegiatan	:	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					

			keluaran	:	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun	10 unit	10 unit			
			Kegiatan	:	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
			keluaran	:	Jumlah AC yang terpelihara dalam satu tahun	111 kali	111 kali			
			Kegiatan	:	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					
			keluaran	:	Jumlah komputer yang terpelihara dalam 1 tahun	80 kali	69 kali			
				:	Jumlah printer yang terpelihara dalam 1 tahun	219 kali	199 kali			
			Program	:	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
			Kegiatan	:	Pendidikan dan pelatihan formal					
			Keluaran	:	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan/diklat	1 paket	1 paket			
			Kegiatan	:	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur					
			keluaran	:	Tausiah bulanan	2 bulan	2 bulan			
				:	pelaksanaan pembinaan kepegawaian ke puskesmas	2 kali	2 kali			
			Program	:	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
			Kegiatan	:	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
			Keluaran	:	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
			Program	:	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
			Kegiatan	:	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan					
			Keluaran	:	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	12 bulan	12 bulan			
			Program	:	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					

				Kegiatan	:	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya					
				Keluaran	:	Pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas	12 bulan	12 bulan			
						Pembinaan Pelayanan Jaminan Kesehatan	2 kali	2 kali			
				Kegiatan	:	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya					
				Keluaran	:	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya	10 puskesmas	10 puskesmas			
				Kegiatan	:	Peningkatan kesehatan masyarakat					
				Keluaran	:	Pertemuan Diseminasi TPG Puskesmas, Bidan Koordinator dan lintas program	40 orang	40 orang			
						Pelacakan kasus balita BGM, Gizi Kurang dan Gizi Buruk	150 kasus	150 kasus			
				Kegiatan	:	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan					
				Keluaran	:	Jumlah Tata Laksana Ibu Hamil Resiko Tinggi/Komplikasi	1 kali	1 kali			
						Jumlah Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu	1 kali	1 kali			
						Jumlah Pelacakan kasus kematian Ibu dan Bayi	130 kasus	48 kasus			
						Penyediaan rumah tunggu Kelahiran (RTK)	1 RTK	1 RTK			
				Kegiatan	:	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus					
				Keluaran	:	Jumlah sekolah yang dilakukan penjarangan kesehatan	280 sekolah	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
				Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
				Keluaran	:	Jumlah Pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas	3 kali	3 kali			

					Jumlah pelaksanaan pembinaan Perkesmas kewilayahan	10 puskesmas	10 puskesmas			
					Jumlah puskesmas yang mendapatkan penilaian akreditasi puskesmas	2 puskesmas	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
					jumlah pelaksanaan kegiatan puskesmas	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit					
				Keluaran	: Jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS, Rad, Lab yang di bina	14 sarana	14 sarana			
					Pelaksanaan Sistem Pelaporan SIMRS	4 triwulan	4 triwulan			
					Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas	1 kali	1 kali			
					Pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit	2 kali	2 kali			
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota					
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan			

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota					
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan			

				Kegiatan	:	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	:	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	:	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	:	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota					
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan			
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan			

					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Kegiatan	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	: Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberculosis	12 bulan	12 bulan				
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12 bulan	12 bulan				
				Program	: Program Pengawasan Obat dan Makanan						

				Kegiatan	:	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya						
				Keluaran	:	Jumlah apotik yang diawasi dan di bina	30 sarana	30 sarana				
						Jumlah toko obat yang di awasi dan di bina	30 sarana	30 sarana				
						Jumlah IRTP yang di awasi dan di bina	50 sarana	50 sarana				
						Jumlah Puskesmas yang diawasi dan dibina	10 puskesmas	10 puskesmas				
				Program	:	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah						
				Kegiatan	:	Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah						
				Keluaran	:	Jumlah pengamanan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen				
						Jumlah inventaris barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen				
						Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah tahunan	1 dokumen	1 dokumen				
				Program	:	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat						
				Kegiatan	:	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat						
				Keluaran	:	Jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif	10 kelurahan	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19			

					Orientasi/refresing dalam peningkatan kapasitas kader posyandu	120 orang	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
				Kegiatan	: Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat					
				Keluaran	: Pelaksanaan lomba posyandu teladan	10 posyandu	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
					Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan napza dan penyakit menular lainnya	30 sekolah	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
				Kegiatan	: Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan					
				Keluaran	: Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya	20 orang	20 orang			
					: Jumlah Tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	20 tempat	20 tempat			
					Jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK	10 Puskesmas	10 Puskesmas			
					Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan	9 orang	9 orang			
				Program	: Program Perbaikan Gizi Masyarakat					

				Kegiatan	:	Pemberian tambahan makanan dan vitamin						
				Keluaran	:	Jumlah PMT pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk	30 balita	30 balita				
						Jumlah PMT KLB Gizi Buruk	6 kasus	6 kasus				
						Jumlah PMT Pemulihan Bumil KEK	60 orang	60 orang				
				Kegiatan	:	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY)						
				Keluaran	:	Pemantauan garam Beryodium	33 kelurahan	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19			
						Jumlah pertemuan peningkatan kinerja program gizi	55 orang	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19			
						pemantauan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri	10 puskesmas	10 puskesmas				
				Program	:	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
				Kegiatan	:	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat						
				Keluaran	:	Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen				
						Dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen				
						Stimulasi Jamban	50 unit	50 unit				

					Jumlah dokumen kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen				
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen				
				Program	:	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
				Kegiatan	:	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk					
				Keluaran	:	Jumlah pelaksanaan fogging fokus	224 fokus	78 fokus	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
				Kegiatan	:	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging					
				Keluaran	:	Jumlah ketersediaan insektisida DBD	50 liter	50 liter			
						Jumlah ketersediaan swing fog	3 unit	3 unit			
				Kegiatan	:	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah					
				Keluaran	:	Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak SD	117 SD	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19		
						Pelaksanaan Pelayanan bulan Imunisasi anak sekolah	117 SD	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid		

								19		
				Kegiatan	:	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular				
				Keluaran	:	Pelaksanaan lavarsida massal	2 kali	0	kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena covid 19	
						Pelaksanaan penemuan BTA (+) TB paru	10 puskesmas	10 puskesmas		
						pelaksanaan pengendalian penyakit IMS dan HIV/AIDS	10 puskesmas	10 puskesmas		
				Kegiatan	:	Kegiatan: Peningkatan surveilliance epideminologi dan penanggulangan wabah				
				Keluaran	:	Jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB	200 kasus	24 kasus		
				Kegiatan	:	Peningkatan Imunisasi				
				Keluaran	:	Pelaksanaan Pengelola rantai penyimpanan Vaksin	12 bulan	12 bulan		
				Program	:	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				
				Kegiatan	:	Penyusunan standar kesehatan				
				Keluaran	:	Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan	2 dokumen	1 dokumen		
						Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan	2 dokumen	1 dokumen		

					Jumlah dokumen Rencana Kerja dinas Kesehatan yang dihasilkan	2 dokume n	2 dokume n			
					Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah dokumen rencana aksi yang dihasilkan	2 dokume n	1 dokume n			
				Kegiatan	: Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan					
				Keluaran	: Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
				Kegiatan	: Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan					
				Keluaran	: Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan	: Monitoring, evaluasi dan pelaporan					
				Keluaran	: Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan minimal yang dihasilkan	4 dokume n	3 dokume n			
					Jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			

					Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan	1 dokume n	1 dokume n			
					Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ dinas kesehatan yang dihasilkan	2 dokume n	2 dokume n			
				Program	: Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya					
				Kegiatan	: Pembangunan puskesmas					
				Keluaran	: Terlaksananya kegiatan pembangunan puskesmas	3 unit	2 unit			
				Kegiatan	: Pembangunan puskesmas Pembantu					
				Keluaran	: Jumlah pustu/poskeskel yang terbangun	4 unit	4 unit			
				Kegiatan	: pengadaan sarana dan prasarana puskesmas					
				Keluaran	: pengadaan peralatan non kesehatan di puskesmas	1 item	1 item			
				Kegiatan	: pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling					
				Keluaran	: Jumlah pengadaan puskesmas keliling double gardan	2 unit	2 unit			
					jumlah pengadaan puskesmas keliling roda dua	6 unit	6 unit			
				Kegiatan	: Monitoring, evaluasi dan pelaporan					
				Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Puskesmas	4 kali	4 kali			
				Program	: Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					
				Kegiatan	: Penyuluhan kesehatan anak balita					
				Keluaran	: Pelaksanaan Supervisi Fasilitatif Kesehatan Anak	10 puskes mas	10 puskes mas			
				Kegiatan	: Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita					

				Keluaran	:	Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Kapasitas Petugas Program Anak	1 kali	1 kali				
				Program	:	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia						
				Kegiatan	:	Pelayanan kesehatan						
				Keluaran	:	Pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan lansia	1 kali	1 kali				
					:	Jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia	1 kali	1 kali				
				Program	:	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular						
				Kegiatan	:	pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular						
				Keluaran	:	pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji	2 kali	2 kali				
					:	jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	10 puskesmas	10 puskesmas				
					:	pelaksanaan vaksinasi manginitis jemaah calon haji	1 kali	1 kali				
					:	jumlah pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM di posbindu	12 bulan	3 bulan				
		BLUD			:							
				Program	:	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Dumai Kota						
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan				
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Dumai Barat						
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan				
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Bukit Kapur						
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan				
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan						

				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Medang Kampai					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Bumi Ayu					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Bukit Timah					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Jaya Mukti					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Purnama					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan	:	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur					
				Keluaran	:	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	12 Bulan	12 Bulan			

A.2.2 Urusan Wajib Kesehatan, Oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Kesehatan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Urusan Kesehatan				
Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)	%	80	63	78,75
ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	Hari	3	5,02	167,33
TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	Hari	1,5	3,12	208,00
BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	65	43,69	67,22
GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	31	44,68	144,71
NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	0/00	18	27,35	151,94

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah, 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

a. Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD (BOR)

BOR (*Bed Occupancy Ratio*) Menurut Huffma (1994) adalah : The ratio of Patient Service days to inpatient bed count days in a period under consideration "Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Angka persentasi tempat tidur yang digunakan di RSUD Kota Dumai selama tahun 2020 yaitu 63,00 dibawah dari target satuan yang telah di rencanakan di dalam RPJMD dengan nilai realisasi sebesar 78,75% namun demikian angka tersebut masih

memenuhi standar Indikator DEPKRS 2005 .Adapun standar ideal BOR menurut depkes 2005 adalah 60 – 85%. Dan perlunya pengembangan rumah sakit untuk pelayanan lebih baik.

b. AVLOS/ALOS Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai

AVLOS menurut Huffman (1994) adalah “ The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Dengan demikian Rata rata lamanya seorang pasien dirawat di rumah sakit adalah 3,12 hari dengan capaian 167,33% selama tahun 2020 dengan target Indikator 3 Hari. Hal demikian yang mengakibatkan banyaknya antrian pasien melakukan rujukan di RSUD Kota Dumai dari dalam dan luar Kota Dumai. Adapun standar ideal AVLOS menurut depkes 2005 adalah 6-9 hari.

c. TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai.

Menurut DEPKES 2005 TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak di tempati dari dan telah diisi ke saat terisi berikutnya. Dengan demikian jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu antara waktu sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien, sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya yaitu 3,12Hari dengan target 1.5 Hari, jumlah realisasi 208%. Hal ini terjadi karena adanya status RSUD Kota Dumai sebagai Rumah Sakit Rujukan yang mengakibatkan banyaknya antrian pasien melakukan rujukan di RSUD Kota Dumai dari dalam dan luar Kota Dumai . Adapun standar ideal TOI menurut depkes 2005 adalah 1-3 hari.

d. BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur

BTO menurut Huffman (1994) *..the net effect of changed in accupancy rate and length of stay*, BTO menurut DEPKES 2005 adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 65 kali dengan realisasi sebesar 67,22% atau 44,86 kali dari indikator ini terlihat ketidak efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit umum daerah kota Dumai. sedangkan batas ideal BTO adalah 40 -- 50 kali/ pasien.

e. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderitakeluar. Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya

jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 44,86 0/00 dengan capaian 144,71% dari indeks perencanaan sebesar 31 0/00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien melebihi ambang batas yg RSUD tetapkan. Tapi apabila dilihat dari ketentuna DEPKES 2005 kasus tersebut masi dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

f. NDR (Nate Death Rate), Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Indikator ini mempunyai target 180/00 dengan realisasi sebesar 151,94% angka ini lebih besar dikarenakan tingginya angka kematian kasus Covid-19, berdasarkan standar yang telah ditetapkan dengan pridikat mutu pelayanan yang semakain ber mutu dengan artian 25 orang dari setiap 1000 penderita

Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 34.227329.900,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 69.016.194.566,- Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp.31.675.817.150,-atau terserap 93% dan belanja langsung terserap Rp. 66.097.428.566,-. atau 96%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Pada kegiatan PelayananPenyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di alokasikan anggaran sebesar Rp. 2.723.331.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.646.299.673,- atau 97,00%, untuk Listrik 12 bulan, telepon dan air 12 Bulan.
- 2) Pada kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.656.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.645.498.400,- atau 100 %.

- 3) Pada kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 696.996.500-atau 100%, -.
 - 4) Pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.651.000,- atau 100%.
 - 5) Pada kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 524.898.558,- dengan realisasi sebesar Rp. 524.482.747,- atau 100 %.
 - 6) Pada kegiatan Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.145.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.004.719.800,- atau 93,00 %.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Jumlah program di anggarkan sebesar Rp. 334.184.525,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.304.718.414,- atau 91,18% yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan dibawah ini :
- 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan/berkala kedaraan dinas/operasional dialokasikan anggran sebesar Rp. 334.184.525,-dengan realisasi sebesar Rp. 304.718.414,- atau 91,18%
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1) Pada Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 392.399,200,- dengan realisasi sebesar Rp. 174.719.357,- atau 45%.
- d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 1) Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.599.147.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.473.899.979,- atau 98,00%.
- e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 1) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 356.361.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.500.000,-10,00%. Adapun kecilnya realisasi anggaran di akibatkan oleh pandemic covid 19 yang tidak memungkinkan mengadakan kegiatan survey akreditasi di RSUD Kota Dumai.

- f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru.
- 1) Pada kegiatan Pembangunan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.816.083.559,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.485.997.000,- atau 91,00%,.
 - 2) Pada kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.676.131.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.635.270.122,- atau 100%,
 - 3) Pada kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.693.730.810,- dengan realisasi sebesar Rp.12.630.449.603,- atau 100%.
 - 4) Pada kegiatan pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- dengan realisasi Rp. 471.000.000,- atau 30%.
 - 5) Pada kegiatan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.520.850,- atau 100%;
 - 6) Pada kegiatan Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit sebesar Rp.2.618.860.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.591.616.165,- atau 99%
 - 7) Pada kegiatan Pengadaan logistik keperawatan rumah sakit sebesar Rp.332.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.658.000,- atau 96%
- g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah sakit mata.
- 1) Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 471.110.914,- dengan realisasi sebesar Rp. 396.710.299,- atau 84 %.
- h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD
- 1) Pada kegiatan Pelayanan tenaga para medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.204.130.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.834.628,- atau 96,00%.
 - 2) Pada kegiatan Pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 123.774.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.092.657,- atau 91%.

- i. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - 1) Pada kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 108.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.003.979.068,52,- atau 118,51%. mengalami kenaikan sebesar 18,51% dari total anggaran dimana nilai ambang batas maksimal 21% tingkat capaian *Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah*

Lampiran 3.A.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Belanja		Hasil/Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
			Anggaran	Belanja	Rencana	Realisasi		
1		3	4	5	6	7	8	9
		Rumah Sakit Umum Kota Dumai						
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	34,227,329,900	31,675,817,150	100%	92.56%	100.00	
		BELANJA LANGSUNG	69,016,194,566	66,097,428,566	100%	96.00%	100.00	
1.02.02.001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	8,763,280,658	8,532,648,120				
	1.02.02.001.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,723,331,100	2,646,299,673				
		Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	100%	100%	Fisik
		Hasil : Tercapainya Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	83.80%	100%	Keuangan
	1.02.02.001.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,656,600,000	2,645,498,400				

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

		Keluaran : Penyediaan Tenaga dan Alat Kebersihan kantor			12 Bulan	100%	100%	Fisik
		Hasil : Terpenuhinya Tenaga dan Alat Kebersihan Kantor			100%	95.79 %	100%	Keuangan
1.02.02.001.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		700,000,000	698,996,500				
		Keluaran : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	100%	100%	Fisik
		Hasil : Terlaksannya administrasi perkantoran			100%	49%	100%	Keuangan
1.02.02.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12,651,000	12,651,000				
		Keluaran : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12240 Exp	100.00 %	100%	Fisik
		Hasil : Kebutuhan bahan bacaan yang belum terpenuhi untuk pegawai RSUD			100%	43.42 %	100%	Keuangan
1.02.02.001.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		524,898,558	524,482,747				
		Keluaran : Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah			12 Bulan	100	100%	Fisik
		Hasil : : Tercapainya persentase pegawai yang memerlukan rakor dan Konsultasi			100%	99.20 %	100%	Keuangan
1.02.02.001.019	Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor		2,145,800,000	2,004,719,800				
		Keluaran : Tersedianya tenaga			12	100%	100%	Fisik

		pengamanan kantor			Bulan				
		Hasil : Terpenuhinya tenaga jasa pengamanan kantor			100%	93.00 %	Rp 1	Keuangan	
1.02.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334,184,525	304,718,414					
	1.02.02.002.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	334,184,525	304,718,414					
		Keluaran : Pelaksanaan pemeliharaan rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit			12 Bulan	100%	100%	Fisik	
		Hasil : Terpeliharanya secara rutin mobil operasional dan ambulance rumah sakit			100%	91.18 %	100%	Keuangan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	392,399,200	174,719,357					
	1.02.02.005.0 01	Pendidikan pelatihan formal	392,399,200	174,719,357					
		Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			45%	45%	45%	Fisik	
		Hasil : Meningkatnya kompetensi / kemampuan PNS			45%	45%	45%	Keuangan	
1.02.02.01 6		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3,559,147,500	3,473,899,979					
	1.02.02.016.1 8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3,559,147,500	3,473,899,979					
		Keluaran : Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kota Dumai			12 bulan	100%	100.00 %	Fisik	
		Hasil : Ter;ayanannya masyarakat miskin dan kurang mampu			100%	97.60 %	100.00 %	Keuangan	

		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	356,361,000	34,500,000				
	1.02.02.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	356,361,000	34,500,000				
		Keluaran : Pelaksanaan Akreditasi RSUD Kota Dumai			10%	10%	10%	Fisik
		Hasil : Terlaksanannya akreditasi RSUD Kota Dumai			10%	10%	10%	Keuangan
1.02.02.26		Program Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru	44,811,806,169	43,233,511,740				
	1.02.02.026.001	Pembangunan Rumah Sakit	3,816,083,559	3,485,997,000				
		Keluaran : Pelaksanaan pembangunan RSUD Kota Dumai			1 Keg	80%	100%	Fisik
		Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit			100%	91%	100%	Keuangan
	1.02.02.026.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit	23,676,131,000	23,635,270,122				
		Keluaran : Pengadaan alat-alat rumah sakit			100%	100%	100%	Fisik
		Hasil : Peningkatan Pelayanan Rumah sakit			100%	100%	100%	Keuangan
	1.02.02.026.019	Pengadaan obat-obat rumah sakit	12,693,730,810	12,630,449,603				
		Keluaran : Penyediaan Obat-obatan Rumah Sakit Rumah Sakit			100%	100%	100%	Fisik
		Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan Di rumah Sakit			100%	100%	100%	Keuangan

1.02.1.02.2.2 6.20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	1,575,000,000	471,000,000					
	Keluaran : Tersedianya Ambulan di RS			100%	30%	30%	Fisik	
	Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Di rumah Sakit			100%	30%	30%	Keuangan	
	1.02.02.026.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	100,000,000	99,520,850				
	Keluaran : Terlaksannya pengadaan rumah sakit			100%	100%	100%	Fisik	
	Hasil : Tercapainya perlengkapan rumah Sakit			100%	100%	100%	Keuangan	
1.02.02.26.023	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	2,618,860,800	2,591,616,165					
	Keluaran : Penyediaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit			2 Keg	100%	100%	Fisik	
	Hasil : Tersediannya bahan-bahan logistik Rumah sakit			100%	99.00%	100%	Keuangan	
1.02.02.26.027	Pengadaan logistik keperawatan	332,000,000	319,658,000					
	Keluaran : Pelaksanaan Logistik Keperawatan			1 Keg	100%	100%	Fisik	
	Hasil : Tersedianya Logistik Keperawatan RSUD Kota Dumai			100%	95.86%	100%	Keuangan	
1.02.02.27	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru	751,110,914	676,710,296					
1.02.02.027.001	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	471,110,914	396,710,299					
	Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan			100%	100%	100%	Fisik	

		Rutin/Berkala Rumah Sakit						
		Hasil : Terpeliharanya Ruimah Sakit			100%	84.00%	100%	Keuangan
	1.02.02.027.017	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	280,000,000	279,999,997				
		Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat			12 bln	100%	100%	Fisik
		Hasil : Terpeliharanya rutin berkala alat-alat kesehatan			100%	100%	100.00 %	Keuangan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD	10,327,904,600	9,946,720,657				
		Peningkatan Pelayanan Tenaga Para Medis di RSUD	10,204,130,000	9,834,628,000				
		Keluaran : Terbayarnya Insentif Kesehatan			584 Orang	100%	100%	Fisik
		Hasil : Terlayannya pasien RSUD Kota Dumai			100%	96.00%	100%	Keuangan
		Pelatihan dan Pendidikan tenaga keperawatan RSUD	123,774,600	112,092,657				
		Keluaran : Penyediaan Jumlah Keperawatan yang mengikuti Pelatihan			1 Keg	100%	100%	Fisik
		Hasil : Meningkatnya Kompetensi dan kemampuan tenaga keperawatan			100%	91.00%	100%	Keuangan

A.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Capaian kondisi akhir 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Kapasitas Debit Air Bersih	Liter/detik	65	65	16,05
Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100	100	100
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	37.45	33.48	93.23
Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	Rasio	135M : 535Ha	135M : 535Ha	81,81

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Kapasitas Debit Air Bersih

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 65 Liter/detik dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 65 liter/detik atau 16.05%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air, Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa. Indikator Kinerja ini belum mencapai target dikarenakan Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan

program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis nantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022.

- b. Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun KRK

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 100 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 100 % atau 100 %.Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang, Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang, Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang, Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang.

- c. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 37,45 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 33,48 atau 93,23 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat, Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur, Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat, Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan, Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur,

Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan, kegiatan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong, Pemeliharaan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

d. Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 135M : 535Ha dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 135M : 535Ha atau 81,81%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong, Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir.

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 17.582.788.530,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.892.541.618,00 atau sebesar 90,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.485.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.431.525.871,00 dan atau sebesar 99,29% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 60 KM atau capaian realisasi 100 %.

b. Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 atau sebesar 100,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahundengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

c. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.434.780.331,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.244.772.800,00 dan atau sebesar 86,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipeliharadengan target 16 Unitatau capaian realisasi 100 %.

d. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.080.112.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 954.477.700,00 dan atau sebesar 88,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkandengan target 1000 Matau capaian realisasi 100 %.

e. Kegiatan Pembangunan infrastruktur Air Bersih

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.564.895.499,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.243.765.247,00 dan atau sebesar 82,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersihdengan target 50075 Jiwa atau capaian realisasi 44 %.: Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis naantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022.

2. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 700.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 614.470.817,00 atau sebesar 87,78% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 328.439.063,00 dan atau sebesar 82,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan RDTR dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

b. Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 286.031.754,00 dan atau sebesar 95,34% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

3. Program Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 258.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 201.362.000,00 atau sebesar 77,99% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen TABG dengan target 48 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

b. Kegiatan Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 68.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.050.000,00 dan atau sebesar 44,06% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Survey Pemetaan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

c. Kegiatan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 71.312.000,00 dan atau sebesar 79,24% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 100 %.

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 atau sebesar 60,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 dan atau sebesar 60,39 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pengawasan IMB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

5. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 64.059.968.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.947.465.833,00 atau sebesar 98,26% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.267.774.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.168.689.633,00 dan atau sebesar 98,23% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang jalan yang dibangun dengan target 10 Km atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.600.410.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.597.749.000,00 dan atau sebesar 99,83% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang dibangun dengan target 12 Unit atau capaian realisasi 67%.

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.784.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 181.027.200,00 dan atau sebesar 94,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan bulanan kegiatan dengan target 5 Laporan atau capaian realisasi 100 %.

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 10.575.608.454,88 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.425.213.900,00 atau sebesar 98,58% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.226.451.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.078.637.400,00 dan atau sebesar 98,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara dengan target 10 Ruas atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.349.157.054,88 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.346.576.500,00 dan atau sebesar 99,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Jembatan yang di Rehabilitasi/Pelihara 1 Tahun dengan target 12 Unit atau capaian realisasi 100 %.

7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 2.981.025.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.746.291.062,00 atau sebesar 92,13% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan alat-alat Berat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 758.947.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 689.741.043,00 dan atau sebesar 90,88% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengadaan alat berat yang diadakan dengan target 5 Unit atau capaian realisasi 20 %. Tidak

tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refofusing anggaran pada kegiatan ini.

b. Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratoriumkebinamargaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 794.524.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 649.242.301,00dan atau sebesar 81,71% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat ukur dan bahan Laboratorium yang diadakan dengan target 10 Unit atau capaian realisasi 100 %.

c. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.846.529.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.714.618.118,00 dan atau sebesar 92,86% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat berat yang dipelihara dengan target 22 Unit atau capaian realisasi 93,33%.

d. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 660.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 637.782.267,00 dan atau sebesar 96,63% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara dengan target 15 Unit Unit atau capaian realisasi 100 %.

8. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp.2.162.325.750,00dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.975.573.424,00 atau sebesar 91,36% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.380.000,00 dan atau sebesar 45,84% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi)

- yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- b. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.150.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.874.500,00 dan atau sebesar 45,92% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- c. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 51.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.043.924,00 dan atau sebesar 98,13% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- d. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.001.479.250,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 857.680.000,00 dan atau sebesar 85,64% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 100%.
- e. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.020.406.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.013.815.000,00 dan atau sebesar 99,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 83%.

- f. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.750.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.960.000,00 dan atau sebesar 22,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0%. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- g. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 34.440.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.820.000,00 dan atau sebesar 98,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 7.477.352.550,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp6.401.477.166,00 atau sebesar 85,61% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.446.448.450,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.890.236.766,00 dan atau sebesar 89,79% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dengan target 1200 M atau capaian realisasi 100%
- b. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.030.904.100,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.511.240.400,00 dan atau sebesar 74,41% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 2,1 KM atau capaian realisasi 70%.

10. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 889.962.330,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 796.088.203,00 atau sebesar 89,45% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 758.640.350,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 676.130.339,00 dan atau sebesar 89,12% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku perencanaan/DED Turap dengan target 7 Buku atau capaian realisasi 71%.

b. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 131.321.980,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.957.864,00 dan atau sebesar 91,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang turap yang dibangun dengan target 165 M atau capaian realisasi 100 %.

11. Program Pengendalian Banjir

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 3.698.425.240,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.314.691.290,00 atau sebesar 89,62% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.060.465.190,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.820.641.290,00 dan atau sebesar 79,68% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di peliharadengan target 500 M atau capaian realisasi 100 %.

b. Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan- badan sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.030.050,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah

Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir dengan target 100 M atau capaian realisasi 0 %. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refofusing anggaran pada kegiatan ini.

c. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 554.930.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 494.050.000,00 dan atau sebesar 89,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengendali Banjir yang dibangun dengan target 2 Unit atau capaian realisasi 100 %.

12. Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 3.513.141.669,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.825.000,00 atau sebesar 1,45% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.513.141.669,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.825.000,00 dan atau sebesar 23,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun dengan target 2 Unit atau capaian realisasi 1,45%. Kegiatan ini tidak mencapai target karena Belum mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan Prov Riau.

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 2.394.224.707,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.892.587.927,00 atau sebesar 79,05% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 576.221.857,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 302.894.235,00 dan atau sebesar 52,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.637.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266.419.400,00 dan atau sebesar 99,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyamandengan target 35 Ruangan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 224.825.150,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 185.749.500,00 dan atau sebesar 82,62% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahundengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 215.394.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 178.299.550,00 dan atau sebesar 82,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.406.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.060.000,00 dan atau sebesar 97,22% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 Tahundengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 77.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.854.000,00 dan atau sebesar 29,53% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun dengan target 324 EB atau capaian realisasi 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 74.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.635.400,00 dan atau sebesar 53,27% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

h. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 576.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 538.775.842,00 dan atau sebesar 93,52% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 266.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 247.700.000,00 dan atau sebesar 92,98% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga keamanan kantor dengan target 12 Orang atau capaian realisasi 100%.

j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.440.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.200.000,00 dan atau sebesar 89,69% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran dengan target 1 Orang atau capaian realisasi 100%.

14. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 15.893.931.241,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.387.611.616,00 atau sebesar 96,81% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.755.357.019,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.446.797.041,00 dan atau sebesar 97,38% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang dibangun dengan target 6 Unit atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.875.000,00 dan atau sebesar 93,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakandengan target 1 Unit atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.680.000,00 dan atau sebesar 91,42% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

d. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 267.214.000,00 dan atau sebesar 97,17% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantordengan target 15 Unitatau capaian realisasi 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 969.296.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 884.032.575,00 dan atau sebesar 91,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pemeliharaan

kendaraan dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.709.777.822,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.620.013.000,00 dan atau sebesar 96,69% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 259.943.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 257.350.950,00 atau sebesar 99,00% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.162.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.137.050,00 dan atau sebesar 98,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang dibuat dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 100%.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 44.017.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.810.000,00 dan atau sebesar 99,53% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Laporan atau capaian realisasi 100%.

c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.764.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 158.403.900,00 dan atau sebesar 99,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Rencana Kerja

SKPD yang dibuat dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

16. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 28.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00 atau sebesar 13,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00 dan atau sebesar 13,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan dengan target 5 Kegiatan atau capaian realisasi 100%.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 162.445.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.623.700,00 atau sebesar 74,87% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

Lampiran 3.A.3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
I	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
		dan Penataan Ruang		Capaian Program	:	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						
					Keluaran	:	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
				2	Penyediaan jasa kebersihan kantor						
					Keluaran	:	Jumlah ruang kerja yang bersih dan nyaman	35 Ruangan	35 Ruangan		
					Hasil	:	Terciptanya ruang yang	35 Ruangan	35 Ruangan		

						bersih dan nyaman	n	n			
				3	Penyediaan alat tulis kantor						
					Keluaran	: Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						
					Keluaran	: Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
					Keluaran	: Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				6	Penyediaan bahan						

					bacaan dan peraturan perundang-undangan							
					Keluaran	:	Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				7	Penyediaan makanan dan minuman							
					Keluaran	:	Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							
					Keluaran	:	Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor							
					Keluaran	:	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 Orang	12 Orang			
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi	12 Bulan	12 Bulan			

					Perkantoran						
				10	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran						
					Keluaran	:	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran	1 Orang	1 Orang		
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
				B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
					Capaian Program	:	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%		
				1.	Pembangunan gedung kantor						
					Keluaran	:	Jumlah fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai yang dibangun	6 Unit	11 Unit		
					Hasil	:	Terbangunnya fasilitas umum / perkantoran Kota Dumai	6 Unit	11 Unit		
				2.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional						

					Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibutuhkan	1 Unit	1 Unit			
					Hasil	:	Tersedianya Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit			
				3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							
					Keluaran	:	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				4.	Pengadaan peralatan gedung kantor							
					Keluaran	:	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit			
					Hasil	:	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit			
				5.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas							
					Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum/perkant oran Kota Dumai	12 Bulan	12 Bulan			

				Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							
				Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
				Capaian Program	:	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%			
			1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							
				Keluaran	:	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	40 Orang			
				Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			

				D.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
					Capaian Program	:	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%		
				1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						
					Keluaran	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	2 Laporan	2 Laporan		
					Hasil	:	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
				2.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						
					Keluaran	:	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan		
					Hasil	:	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan		

				3.	Penyusunan rencana kerja anggaran						
					Keluaran	:	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen		
					Hasil	:	Tersedianya Rencana Kerja Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen		
				E.	Program pembangunan jalan dan jembatan						
					Capaian Program	:	Persentase Jalan dan jembatan yang di bangun	35,91%	33,48%		
				1.	Pembangunan jalan						
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan yang Baik	10 Km	25,513 Km		
					Hasil	:	Tersedianya Panjang jalan dalam kondisi baik	10 Km	25,513 Km		
				2.	Pembangunan jembatan						
					Keluaran	:	Jumlah Jembatan yang Baik	12 Unit	8 Unit		
					Hasil	:	Tersedianya Jembatan dalam kondisi baik	12 Unit	8 Unit		
				3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						
					Keluaran	:	Jumlah	5	5		

					Laporan Bulanan Kegiatan	Laporan	Laporan			
				Hasil	:	Tersianya Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 Laporan	5 Laporan		
			F.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
				Capaian Program	:	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	62%	62%		
			1.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
				Keluaran	:	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1.200 M	3172 M		
				Hasil	:	panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1.200 M	3173 M		
			2.	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong						
				Keluaran	:	Jumlah panjang saluran drainase yang	3 KM	2,1 KM		

					dipelihara					
					Hasil	:	panjang saluran drainase yang dipelihara	3 KM	2,1 KM	
				G.	Program pembangunan turap/talud/bronjong					
					Capaian Program	:	Persentase wilayah DPL terendah yang bebas dari abrasi	20%	20%	
				1.	Perencanaan turap/talud/bronjong					
					Keluaran	:	Tercapainya Hasil Perencanaan Pengelolaan Jaringan Sungai	7 Buku	5 Buku	
					Hasil	:	Tersedianya Perencanaan Pengelolaan Jaringan Sungai	7 Buku	5 Buku	
				2.	Pembangunan turap/talud/bronjong					
					Keluaran	:	Tercapainya Daerah Bebas dari Bahaya Abrasi/Banjir Pada Pemukiman Penduduk Sekitar	165 M	166 M	

						Pembangunan					
					Hasil	: Daerah Bebas dari Bahaya Abrasi/Banjir Pada Pemukiman Penduduk Sekitar Pembangunan	165 M	166 M			
				H.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
					Capaian Program	: Persentase ruas Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	35,91%	33,48%			
				1.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan						
					Keluaran	: Panjang Jalan yang dipelihara	10 Ruas	158 Ruas			
					Hasil	: Terlaksananya Panjang Jalan yang dipelihara	10 Ruas	158 Ruas			
				2.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan						
					Keluaran	: Jumlah Jembatan yang dipelihara	12 Unit	55 Unit			
					Hasil	: Terlaksananya Jumlah Jembatan yang dipelihara	12 Unit	55 Unit			

				I.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
					Capaian Program	:	Persentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan	50%	50%		
				1.	Pengadaan alat-alat berat						
					Keluaran	:	Jumlah alat-alat berat yang diadakan	5 unit	5 unit		
					Hasil	:	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
				2.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan						
					Keluaran	:	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	10 Unit	1 Unit		
					Hasil	:	alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	10 Unit	1 Unit		
				3.	Rehabilitasi/pemeliharaan an alat-alat berat						

					Keluaran	:	Presentasi alat-alat berat yang dipelihara	22 Unit	22 Unit			
					Hasil	:	alat-alat berat yang dipelihara	22 Unit	22 Unit			
				4.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan							
					Keluaran	:	Jumlah Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	15 Unit	15 Unit			
					Hasil	:	terlaksananya Pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	15 Unit	15 Unit			
				J.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							
					Capaian Program	:	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	4.300 SR	2311 SR			
				1.	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai							
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	60 KM	160 KM			

				Hasil	:	Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	60 KM	160 KM			
			2.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi							
				Keluaran	:	Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Terpeliharanya saluran irigasi	12 Bulan	12 Bulan			
			3.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air							
				Keluaran	:	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	16 unit	16 unit			
				Hasil	:	Terpeliharanya pinru air	16 unit	16 unit			
			4.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai							
				Keluaran	:	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	1000 M	1000 M			
				Hasil	:	Dibersihkannya saluran sungai	1000 M	1000 M			
			5.	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih							
				Keluaran	:	Masyarakat yang terlayani	50.075 Jiwa	21900 Jiwa			

					air bersih					
				Hasil	:	Masyarakat yang terlayani air bersih	50.075 Jiwa	21900 Jiwa		
			K.	Program Pengendalian Banjir						
				Capaian Program	:	Presentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	20%	20%		
			1.	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai						
				Keluaran	:	Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di pelihara	500 M	623 M		
				Hasil	:	Terpeliharanya Bantaran dan Tanggul Sungai	500 M	623 M		
			2.	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir						
				Keluaran	:	Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun	2 unit	4 unit		
				Hasil	:	Terbangunnya bangunan pengendali banjir	2 unit	4 unit		

				L.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
					Capaian Program	:	Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	20%	20%			
				1.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Kota							
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	1 ruas	1 ruas			
					Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	1 ruas	1 ruas			
				2.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Timur							
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	1 ruas	1 ruas			
					Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	1 ruas	1 ruas			
				3.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat							
					Keluaran	:	Jumlah	6 ruas	6 ruas			

						Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun					
					Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	6 ruas	6 ruas		
				4.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Barat						
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	6 ruas	6 ruas		
					Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	6 ruas	6 ruas		
				5.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Dumai Selatan						
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	6 Ruas	6 Ruas		
					Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	6 Ruas	6 Ruas		
				6.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur						
					Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi)	6 Ruas	5 Ruas		

					yang diBangun					
				Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	6 Ruas	5 Ruas		
			7.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Medang Kampai						
				Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	1 ruas	1 ruas		
				Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	1 ruas	1 ruas		
			8.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan						
				Keluaran	:	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan (Semenisasi) yang diBangun	6 ruas	6 ruas		
				Hasil	:	Terbangunnya Ruas Jalan Lingkungan	6 ruas	6 ruas		
			M.	Program Perencanaan Tata Ruang						
				Capaian Program	:	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	100%		

				1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan						
					Keluaran	:	Jumlah dokumen penyusunan RDTR	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Hasil	:	tersedianya dokumen RDTR	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2.	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang						
					Keluaran	:	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	10 Kali	10 Kali		
					Hasil	:	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	10 Kali	10 Kali		
				N.	Program Pemanfaatan Ruang						
					Capaian Program	:	Rasio Pemetaan Kecamatan	28%	28%		
				1.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang						
					Keluaran	:	Jumlah dokumen TABG	48 Dokumen	48 Dokumen		
					Hasil	:	tersedianya dokumen TABG	48 Dokumen	48 Dokumen		

				2.	Survey dan pemetaan							
					Keluaran	:	Jumlah Dokumen survey Pemetaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Hasil	:	Terlaksananya Survey Pemetaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				3.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang							
					Keluaran	:	Jumlah Peserta Sosialisasi IMB	50 Orang	50 Orang			
					Hasil	:	Terlaksananya Sosialisasi IMB	50 Orang	50 Orang			
				O.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
					Capaian Program	:	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	100%	100%			
				1.	Pengawasan pemanfaatan ruang							
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengawasan pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Hasil	:	Tersedianya Laporan Pengawasan pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			

				P.	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air						
					Capaian Program	:	Terbangunnya Bangunan Pusat-pusat Pengendalian Air	4	0		
				1.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air						
					Keluaran	:	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun	2 unit	0 unit		
					Hasil	:	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun	2 unit	0 unit		
				Q.	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah						
					Capaian Program	:	Persentase Kinerja yang di publikasikan	100,00 %	100,00 %		
				1.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan						

							Persentase kinerja di Publikasikan	5 Kegiata n	1 Kegiatan			
					Keluaran	:						
							Persentase kinerja di Publikasikan	5 Kegiata n	1 Kegiatan			
					Hasil	:						
											Dst	Dst
											Dst	

A.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2017-2021 urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat), maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)	Ket
Fasilitas lahan untuk pemakaman umum	Ha	6,5	5,5	85 %	
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	%	3,50	0,26	7,4 %	Refocussing Anggaran
Persentase Lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85 %	-	-	IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++ pada tahun 2020 terbangun sebanyak 0, sedangkan Tangki septik individu terbangun sebanyak 483 unit
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	7 %	24,32 %	100 %	
Persentase pembangunan rumah tidak layak huni	%	7 %	24,32 %	100 %	
Ruas Jalan dengan sarana penerangan jalan umum	Ruas Jalan	437	435	99,54%	

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

1. Fasilitas lahan untuk Pemakaman Umum

Pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh OPD terkait yaitu Tempat Pemakaman Umum Marga Sarana dengan program dan kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan pemakaman dengan luas 5,5 ha. (Pada tahun 2018, pada obyek Taman Makam Pahlawan telah di serahkan dalam hal pengelolaannya pada OPD Dinas Sosial).

2. Panjang Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan

Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2020 jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 4 paket dengan kondisi refocusing anggaran penanggulangan akibat bencana covid-19, sehingga terjadi pengurangan paket pekerjaan infrastruktur. Realisasi IKU-nya 0,26 % dengan realisasi capaian 7,4%.

3. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++, Dinas Perkim membangun Tangki Septik Individu sebanyak 483 unit dengan penerima manfaat 1954 jiwa sehingga realisasi IKU sebesar 0 %.

4. Persentase pembangunan rumah tidak layak huni

Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Dumai, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 1412 hasil pengurangan tahun- tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pembangunan program perumahan sebanyak 344 unit yang bersumber dari DAK, BSPS dan APBD provinsi. Adapun realisasi IKU nya 24,32 % dengan capaian realisasinya 100 %.

5. Ruas Jalan dengan sarana penerangan jalan umum

Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2

kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 23 paket pekerjaan PJJU. Adapun realisasi IKU- nya 435 Ruas Jalan dengan capaian realisasinya 99,54 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan secara tugas dan fungsi utamanya adalah mendirikan dan memberikan rumah sehat layak huni yang di berikan kepada masyarakat kurang Program Pengembangan Perumahan mampu. Program ini di anggarkan sebesar Rp. 158.304.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.747.000,- atau 75,64%. Adapun kegiatan pada program pengembangan perumahan, yaitu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

a. Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu ini di anggarkan dana sebesar Rp. 158.304.000,- dan telah di pergunakan sebesar Rp. 119.747.00,- atau realisasi sebesar 75,64% dengan indikator Jumlah Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh ini di anggarkan sebesar Rp. 866.116.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 808.823.000,- atau 93,39%. Adapun program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh ini hanya memiliki satu kegiatan.

a. Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kegiatan pembangunan / peningkatan infrastruktur ini di anggarkan dana sebesar Rp. Rp. 866.116.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 808.823.000,- atau 93,39%. Dengan indikator Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik.

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Program Pengelola areal pemakaman secara tugas dan fungsi dikelola oleh seksi pemakaman yang berada di bawah bidang Perumahan. Adapun pengelolaan pemakaman untuk tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai tempat pemakaman umum yaitu TPU Marga Sarana termasuk pemeliharannya. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini sebesar Rp. 276.807.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 204.429.260,- atau 73,85 % Dana yang dianggarkan untuk Program Pengelolaan area pemakaman ini memiliki satu kegiatan yaitu :

a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

Kegiatan sarana dan prasarana pemakaman dianggarkan dana sebesar Rp. 276.807.250,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 204.429.260,- atau realisasi sebesar 73,85 %. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan merupakan kegiatan yang berjalan di bidang listrik, pada penerangan jalan umum pada khususnya. Adapun pada program ini memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum, dan pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum. Adapun program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 13.163.329.618,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.275.566.584,- atau 85,66%

a. Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum

Pengembangan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum dianggarkan dana sebesar Rp. 2.545.844.400,- dan telah dipergunakan sebesar Rp 2.210.547.973,- atau terealisasi 86,83%. Dengan indikator Jumlah Pengembangan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum

b. Pemeliharaan Jaringan Listrik Dan Penerangan Jalan Umum.

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum dianggarkan dana sebesar Rp. 10.617.485.218,- dan telah

dipergunakan sebesar Rp. 9.065.018.611,- atau terealisasi 85,38 %. Dengan indikator Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan sarana peralatan berupa barang habis pakai, seperti penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, penyediaan kendaraan operasional, dll guna menunjang berjalannya tugas rutin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kota Dumai dalam hal pelayanan tugas-tugas bantuan dan perpanjangan, Penerangan jalan dan Pengelolaan Sarana Pemakaman, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 876.199.968,- dan realisasi penyerapan anggaran Rp. 697.095.502,- atau 79,56 %. Dana yang dianggarkan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, secara khusus yang dibagi ke dalam berbagai kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.800.000,- dan telah digunakan sebesar Rp. 1.800.000,- atau terealisasi 100 %. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase rata-rata surat yang disampaikan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Dianggarkan dana sebesar Rp. 101.960.000,- dan telah digunakan sebesar Rp. 92.975.026,- atau terealisasi 91,19 %, dana ini diperuntukkan sebagai operasional dan pelayanan kantor yang dibayarkan sesuai dengan tagihan pemakaian listrik air, dan telepon untuk kegiatan dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase kinerja yang baik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Dianggarkan dana sebesar Rp. 24.819.375,- dan telah digunakan Rp. 12.932.930,- atau terealisasi 52,11 % Dana ini digunakan untuk kegiatan operasional rutin petugas lapangan dalam kegiatan pengawasan. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah

Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 58.519.790,- dan telah digunakan Rp. 51.377.659,-. atau terealisasi 87,80 %, dana tersebut digunakan sebagai bentuk pemeliharaan rutin kebersihan kantor berupa pembelian alat-alat kebersihan untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan bersih dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase ruangan kerja yang bersih dan nyaman

e. Penyediaan alat tulis kantor

dianggarkan dana sebesar Rp 25.287.246,- dan telah digunakan Rp. 7.614.200,- atau terealisasi sebesar 30,11% dikarenakan efisiensi anggaran. Dana tersebut mampu digunakan sebagai bentuk kegiatan rutin pelayanan kantor berupa alat tulis untuk menunjang tugas rutin dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah digunakan Rp. 7.039.000,- atau terealisasi sebesar 70,39 %. Dana tersebut digunakan sebagai bentuk kegiatan rutin pelayanan kantor berupa cetak blangko pelayanan perizinan dan fotokopi serta untuk menunjang tugas rutin dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Persentase dokumen yang terakomodir

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.672.300,- dan telah digunakan Rp. 0,- atau terealisasi sebesar 0 % karena tidak ada pergantian instalasi listrik pada kantor Dinas Perkim. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi.

h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per undang- undangan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 8.000.000,- dan telah digunakan Rp. 6.000.000,- atau terealisasi sebesar 75 %. Dana tersebut digunakan

dalam bentuk penyediaan surat kabar setiap hari untuk sumber informasi bagi PNS dinas. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makan dan minum

dianggarkan dana sebesar Rp. 11.000.000,- dan telah digunakan Rp. 1.527.000,- atau terealisasi sebesar 13,88 % dikarenakan efisiensi anggaran dan kurangnya kegiatan pertemuan dikarenakan protokol covid-19. Dana tersebut digunakan untuk makan dan minum rapat dan tamu di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kota Dumai. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dianggarkan dana sebesar Rp. 539.926.257,- dan telah digunakan Rp. 451.945.608,- atau terealisasi sebesar 83,71 % Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dalam bentuk kunjungan dinas ke daerah lain untuk bertukar informasi dan melakukan perbandingan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan daerah lain. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 93.215.000,- dan telah digunakan Rp. 63.884.079,- atau terealisasi sebesar 68,53 % dikarenakan efisiensi anggaran. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji petugas jaga malam/Sekuriti sehingga terciptanya keamanan kantor. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa tenaga keamanan kantor.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur erat kaitannya dengan kepegawaian dan fasilitas yang menunjang seperti Kendaraan dinas operasional, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin gedung kantor, dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional.

Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini sebesar Rp. 678.072.017,- Dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 422.145.545,- atau 62,26 %. Dana yang dianggarkan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, secara khusus yang dibagi ke dalam berbagai kegiatan yaitu :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 0,- atau terealisasi sebesar 0 % dikarenakan efisiensi anggaran dan tidak ada penambahan perlengkapan pada kantor Dinas Perkim dikarenakan kondisi perlengkapan - perlengkapan yang masih baik. Adapun dana pada kegiatan tersebut di gunakan untuk melengkapi perlengkapan gedung kantor dengan indikator keluaran Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dianggarkan dana sebesar Rp. 332.708.467,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 296.739.997,- atau terealisasi sebesar 89,19 %. Adapun anggaran pada kegiatan ini di peruntukkan untuk perawatan kendaraan operasional di lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan indikator keluaran Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pengadaan peralatan gedung kantor.

Pengadaan peralatan gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp. 185.339.600,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 59.229.548,- atau terealisasi sebesar 31,96 % dikarenakan efisiensi anggaran dan meminimalisir pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Perkim karena peralatan yang dibutuhkan masih dalam kondisi baik. Adapun dana pada kegiatan tersebut di gunakan untuk melengkapi peralatan gedung kantor dengan indikator keluaran Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur dianggarkan dana sebesar Rp. 68.400.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 6.000.000,- atau terealisasi sebesar 8,77 % dikarenakan efisiensi anggaran. Adapun anggaran pada kegiatan ini di peruntukkan untuk perawatan perlengkapan gedung kantor di lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan indikator keluaran Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dianggarkan dana sebesar Rp. 61.623.950,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 60.176.000,- atau terealisasi sebesar 97,65 %. Adapun anggaran pada kegiatan ini di peruntukkan untuk Rehabilitasi gedung kantor di lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan indikator keluaran Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur lebih difokuskan kepada pengadaan perlengkapan dinas/atribut Pegawai negeri Sipil dan Tenaga Kerja Buruh Lapangan baik berupa pakaian kerja, sepatu kerja, Helm Proyek, dan perangkat *safety* lainnya Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini sebesar Rp. 23.800.000,- Dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.790.000,- atau 87,35 %. Kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dianggarkan dana sebesar Rp. . 23.800.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 20.790.000,- atau terealisasi sebesar 87,35 %. Dengan indikator Persentase identitas pekerja lapangan

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas ASN dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Program ini didukung dengan satu

kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini adalah sebesar Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini dianggarkan sebesar Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran. Indikator keluarannya adalah Persentase kinerja pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Penetapan Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Penetapan Kinerja dan Keuangan merupakan kegiatan Subbagian program dan Subbagian Umum pada unit kerja yang secara prinsip mengelola/ menangani atau memprogram dan merencanakan seluruh kegiatan selama satu tahun serta melaporkan semua hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara bulanan maupun tahunan serta semua yang menyangkut permasalahan perbendaharaan pada unit kerja. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini sebesar Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran.

a. Penyusunan laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan dana sebesar Rp. Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran. Indikator kegiatan yaitu Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

dianggarkan dana sebesar Rp. 45.701.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran. Indikator kegiatan yaitu Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Dianggarkan dana sebesar Rp. 44.778.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran. Indikator kegiatan yaitu Jumlah Penyusunan rencana kinerja SKPD

10. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan yang layak serta mendukung terwujudnya kota tanpa kumuh kota Dumai. Program ini didukung dengan dua kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini adalah sebesar Rp 4.386.137.593,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.054.740.144,- atau 92,44 %. Kegiatan pada program Lingkungan Sehat Perumahan yaitu :

- a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dianggarkan dana sebesar Rp 3.816.997.593,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 3.586.416.144,-. atau terealisasi sebesar 93,96 % dengan indikator Jumlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin
- b. Peningkatan kualitas dan penjegahan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dianggarkan dana sebesar Rp. 569.140.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 468.324.000,- atau terealisasi sebesar 82,29 % dengan indikator Jumlah Peningkatan kualitas dan penjegahan program kota tanpa kumuh

11. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat ataupun pihak terkait tentang informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional ataupun keagamaan. Program ini didukung dengan satu kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 0,- atau 0 % dikarenakan tidak adanya kegiatan Dumai Expo dan Perayaan-perayaan lainnya akibat Covid-19 sehingga penggunaan anggaran diminimalisir. Kegiatan pada Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

Dianggarkan dana sebesar Rp 15.000.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 0,- atau 0 % dikarenakan tidak adanya kegiatan Dumai

Expo dan Perayaan-perayaan lainnya akibat Covid-19 sehingga penggunaan anggaran diminimlasir. Indikator Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pada OPD serta melakukan pengelolaan barang milik perangkat daerah khusus di lingkungan OPD Perkim. Program ini didukung dengan satu kegiatan. Adapun jumlah anggaran untuk menunjang program ini adalah sebesar Rp 0,- dikarenakan refocusing anggaran. :

a. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Dianggarkan dana sebesar Rp Rp 0,- dikarenakan Refocusing anggaran. Indikator kegiatan yaitu Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

Lampiran 3.A.4. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai	Tersedianya kualitas dan kuantitas perumahan yang layak	1.	Program Pengembangan perumahan/ Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	7%	24,32 %	-	-	-
			Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	1.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	6,5	5,5	-	-	-
				2.	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan/ Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum	437	435	-	-	-
				3.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh/ Pembangunan/Peningkatan infrastruktur	3,50%	0,26	Refocussing Anggaran	Melakukan kegiatan semaksimal mungkin dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia setelah refocussing secara efisien	-

		Terwujudnya Kota Dumai Tanpa Kumuh	1.	Program Lingkungan Sehat Perumahan / 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. Peningkatan kualitas dan penjelesaian program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	2,85%	-	Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++,	Pada Tahun 2020 Dinas perkim melakukan kegiatan pembangunan Tangki septik individu terbangun sebanyak 483 unit dengan penerima manfaat 1954 jiwa	-
--	--	------------------------------------	----	--	-------	---	---	--	---

A.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

A.5.1 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (dalam %)
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	2,25	3	3	100%
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yang Sigap dan Tanggap	40%	50%	50%	100%
Persentase Penegakan Peraturan Daerah / Perwako	50%	50%	50%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.965.486.940,- (delapan milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 6.650.974.240,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.314.512.700,- (dua milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah). Untuk realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sebesar Rp. 8.169.813.127,- (delapan milyar seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau capaian realisasi 91,13%. Capaian tersebut dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.934.838.686,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) Atau capaian 89,23% dan Realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.234.974.441,- atau capaian 96.56%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sebesar Rp. 210.850.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 94,47% dengan capaian indikator program yaitu persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target 70% tercapai sebesar 70% dengan capaian target mencapai 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pengamanan dan Penertiban

Dialokasikan dana sebesar Rp. 210.850.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 199.200.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 94,47%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengamanan dan Penertiban dari target 6 Kali terealisasi 6 Kali atau capaian kinerja 100%.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ini sebesar Rp. 29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 100% dengan capaian indikator program yaitu persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan target 100% dengan realisasi sebesar 100% atau capaian target sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai

Dialokasikan dana sebesar Rp. 29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau sebesar 100%. Adapun

capaian indikator keluaran(output) kegiatan Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 100 pengusaha terealisasi 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ini sebesar Rp. 321.203.400,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 318.976.400,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99.30% dengan capaian indikator program yaitu peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan target sebesar 1 kali, maka realisasi sebesar 1 kali atau capaian kinerja sebesar 100%, yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Dialokasikan dana sebesar Rp. 321.203.400,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah), dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 318.976.400,- (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99.30%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dari target 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali juga atau capaian kinerja 100%.

Realisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16 Realisasi Program, Kegiatan Rutin, Anggaran, Dan Realisasi Berdasarkan DPA OPD Satpol PP Kota Dumai

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	387.601.300	359.112.041
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.540.000	69.333.585

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.688.000	1.688.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.700.000	10.635.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43.091.700	43.091.700
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.796.000	36.796.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	15.042.000	15.042.000
9	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.171.000	13.587.600
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	18.000.000	17.650.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.416.000	9.416.000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.000.000	7.000.000
13	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	79.890.000	79.739.800
14	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	8.640.000	8.332.356
15	Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	43.200.000	43.200.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.744.000	308.497.000
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	55.727.000	53.725.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.568.000	36.540.000
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	13.900.000	13.900.000
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	198.399.000	187.182.000
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.150.000	17.150.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.890.000	13.890.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	13.190.000	13.190.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	700.000	700.000
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.237.300.000	1.202.725.000
1	Pengamanan dan Penertiban	210.850.000	199.200.000
2	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.026.450.000	1.003.525.000
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	29.475.000	29.475.000
1	Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai	29.475.000	29.475.000
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.299.000	2.299.000
1	Inventarisasi Aset	840.000	840.000
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan	1.459.000	1.459.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	321.203.400	318.976.400
1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	321.203.400	318.976.400

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran 3.A.5.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
				Pengamanan dan Penertiban	6 Kali	6 Kali	-	-	
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					
				Pengawasan terhadap penegakan perda perizinan dan non perizinan di kota Dumai	100 Usaha	100 Usaha	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
				Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Masyarakat	1 Kali	1 kali	-	-	

A.5.2 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pencapaian indikator sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, dapat dilihat pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 dalam tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian %
Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial	%	100	100	100
Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai	%	90	90	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keberhasilan dari 2 Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain :

1. Persentase keberhasilan pencegahan terjadinya konflik sosial.

Target dari indikator sasaran ini yaitu 100% dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 100%.

Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 100% (sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020). Keberhasilan ini didukung oleh program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 33 orang dan terealisasi sebanyak 33 orang atau sebesar 100%.

Kegiatan ini terdiri dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini elemen masyarakat terhadap ATHG

Stabilitas Daerah.

- b. Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya.

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terpantaunya aktivitas dan kegiatan ormas dan LSM dengan target kinerja selama 12 bulan dan terealisasi sebanyak 12 bulan atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau aktivitas dan kegiatan Ormas atau Lembaga oleh Tim Pendataan dan Pemantauan Ormas dan LSM.

- c. Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah.

Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing dengan target kinerja selama 12 bulan dan terealisasi sebanyak 12 bulan atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata aktifitas orang asing dan Tenaga Kerja Asing oleh Tim Pendataan dan Pemantauan Orang Asing.

- d. Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah.

Indikator kinerja kegiatannya yaitu rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik dengan target kinerja selama 10 bulan dan terealisasi sebanyak 10 bulan atau sebesar 100%.

Kegiatan ini merupakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Indikator kinerja kegiatannya yaitu meningkatnya koordinasi Forkopimda dengan target kinerja selama 8 bulan dan terealisasi sebanyak 8 bulan atau sebesar 100%.

2. Persentase laporan gangguan kamtibmas yang ditindaklanjuti dan pelaksanaan kegiatan politik daerah di Kota Dumai.

Target dari indikator sasaran ini yaitu 90% dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 90%.

Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 100% (sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020). Keberhasilan ini didukung oleh berbagai program antara lain :

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan terdiri dari :

1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan target kinerja adalah 90% dan terealisasi sebanyak 90% atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

- 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai dengan target kinerja adalah 90% dan terealisasi sebanyak 90% atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kerukunan antar suku di Kota Dumai melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

- b. Pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan terdiri dari :

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya laporan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% atau sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring pemilihan umum.

- 2) Pengelolaan administrasi bantuan partai politik

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan memberikan pemahaman tentang bantuan keuangan partai politik dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan terlaksananya sosialisasi aturan terkait bantuan keuangan partai politik.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.274.668.410 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.431.022.160 dengan realisasi sebesar Rp. 3.044.724.200 atau 88,74%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.843.646.250 dengan realisasi sebesar Rp. 1.712.641.679 atau 92,89%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 disampaikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 728.210.560 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 715.859.528 atau 98,30% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.121.000 atau 94,86% dengan indikator kinerja keluaran adalah persentase jumlah surat yang ditindaklanjuti dengan target 98% dan terealisasi 98% atau 100%.

b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.420.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.409.920 atau 83,86% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan jaringan internet, air bersih dan listrik dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.900.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya perizinan kendaraan dinas dengan target 100% dan terealisasi 100% atau 100%.

d) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.112.800 dan terealisasi sebesar Rp. 94.099.000 atau 99,99% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

e) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.000.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya peralatan kerja dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- f) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 84.886.600 dan terealisasi sebesar Rp. 83.621.700 atau 98,51% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- g) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.755.500 dan terealisasi sebesar Rp. 54.064.400 atau 98,74% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- h) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- i) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.960.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000 atau 98,48% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya surat kabar/majalah harian/mingguan/ bulanan dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- j) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.014.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.014.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan logistik kantor dengan target 11 bulan dan terealisasi 11 bulan atau 100%.
- k) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.385.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.295.000 atau 99,21% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebutuhan makanan dan

minuman dengan target 11 bulan dan terealisasi 11 bulan atau 100%.

l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 127.366.660 dan terealisasi sebesar Rp. 126.774.508 atau 99,54% dengan indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

m) Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.660.000 dan terealisasi sebesar Rp. 90.660.000 atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga keamanan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

n) Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 165.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 162.500.000 atau 98,48% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 131.300.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 130.248.000 atau 99,20% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 131.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 130.248.000 atau 99,20% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas yang dirawat dengan target 5 unit dan terealisasi 5 unit atau 100%.

c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 903.368.690 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 816.634.151 atau 90,40% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

31.939.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.122.000 atau 59,87% dengan indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dengan target 33 orang dan terealisasi 33 orang atau 100%.

- b) Kegiatan pemantauan kegiatan dan aktifitas organisasi masyarakat/ lembaga swadaya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.470.000 dan terealisasi sebesar Rp. 31.350.000 atau 90,95% dengan indikator kinerja keluaran adalah terpantaunya aktivitas dan kegiatan ormas dan LSM dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- c) Kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.470.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.937.000 atau 51,45% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- d) Kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 403.582.040 dan terealisasi sebesar Rp. 379.750.000 atau 94,09% dengan indikator kinerja keluaran adalah rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik dengan target 10 bulan dan terealisasi 10 bulan atau 100%.

- e) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 384.907.650 dan terealisasi sebesar Rp. 361.475.151 atau 93,91% dengan indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya koordinasi Forkopimda dengan target 8 bulan dan terealisasi 8 bulan atau 100%.

- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 31.500.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.800.000 atau 88,25% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.920.000 atau 89,23% dengan indikator kinerja keluaran adalah terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan target 90% dan terealisasi 90% atau 100%.

- b) Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.920.000 atau 89,23% dengan indikator kinerja keluaran adalah terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai dengan target 90% dan terealisasi 90% atau 100%.

- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 49.267.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.100.000 atau 44,86% melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.667.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.350.000 atau 47,46% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersedianya laporan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% atau 100%.

- b) Kegiatan pengelolaan administrasi bantuan partai politik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.000 atau 35,38% dengan indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan memberikan pemahaman tentang bantuan keuangan partai politik dengan target 100% dan terealisasi 100% atau 100%.

Lampiran 3.A.5.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Capaian Program : Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%			
				1 Kegiatan Jasa Surat Menyurat					
				Keluaran : Persentase jumlah surat yang ditindaklanjuti	98%	98%			
				Hasil : Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	98%	98%			
				2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi					

				, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Tersedianya kebutuhan jaringan internet, air bersih dan				
				Keluaran	:	listrik	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil	:	Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
			3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oper asional						
				Keluaran	:	Terlaksananya a perizinan kendaraan dinas	100%	100%		
				Hasil	:	Kantor	100%	100%		
			4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						
				Keluaran	:	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		

				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						
				Keluaran	:	Terpeliharaan ya peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						
				Keluaran	:	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
				Keluaran	:	Tersedianya barang	12 Bulan	12 Bulan			

					cetakan dan pengandaan					
					Tersedianya Kebutuhan Administrasi	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	: Kantor					
				8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor					
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan			
				Keluaran	: Kantor					
					Tersedianya Kebutuhan Administrasi	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	: Kantor					
				9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan					
					Tersedianya surat kabar/majal- ah harian/ming- guan/bulana	12 Bulan	12 Bulan			
				Keluaran	: n					

				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
				Keluaran	:	Tersedianya bahan logistik kantor	11 Bulan	11 Bulan			
				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	11 Bulan	11 Bulan			
				11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman						
				Keluaran	:	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	11 Bulan	11 Bulan			
				Hasil	:	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	11 Bulan	11 Bulan			
				12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar						

				Daerah					
					Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan		
				Keluaran :					
					Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil :					
				13 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor					
					Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Keluaran :					
					Tersedianya Kebutuhan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil :					
				14 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran					
					Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
				Keluaran :					
					Tersedianya Kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil :					

					Administrasi Kantor					
				B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
					Capaian Program	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		
				15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					
					Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	5 Unit	5 Unit		
					Hasil	Terawatnya Kendaraan Dinas	5 Unit	5 Unit		
				C	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					

				Capaian Program	Persentase peningkatan keamanan dan ketertiban Kota Dumai	100%	100%			
				16	Kegiatan Penyelenggaraan Deteksi Dini dan Peringatan Dini Aparat Intelijen Daerah					
					Keluaran	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah	33 orang	33 orang		
					Hasil	Meningkatnya keamanan dan ketertiban Kota Dumai	33 orang	33 orang		
				17	Kegiatan Pemantauan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakat /Lembaga Swadaya					
					Keluaran	Terpantaunya aktivitas dan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan		

					ormas dan LSM					
					Meningkatnya keamanan dan ketertiban					
				Hasil	: Kota Dumai	12 Bulan	12 Bulan			
				18	Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah					
					Tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing					
				Keluaran	:	12 Bulan	12 Bulan			
					Meningkatnya keamanan dan ketertiban					
				Hasil	: Kota Dumai	12 Bulan	12 Bulan			
				19	Kegiatan Rumusan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan dan Penyelesaian Konflik Daerah					
					Rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian					
				Keluaran	:	10 Bulan	10 Bulan			

					konflik				
					Meningkatny a keamanan dan ketertiban	10 Bulan	10 Bulan		
				Hasil	: Kota Dumai				
				20	Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				
					Meningkatny a koordinasi	8 Bulan	8 Bulan		
					Keluaran	: Forkopimda			
					Meningkatny a keamanan dan ketertiban	8 Bulan	8 Bulan		
					Hasil	: Kota Dumai			
				D	Program Pengemban gan Wawasan Kebangsaan				
					Persentase peningkatan wawasan kebangsaan solidaritas	100%	100%		
					Capaian Program	: antar			
					umat beragama				
				21	Kegiatan Peningkatan Toleransi				

				dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama						
				Keluaran	:	Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai	90%	90%		
				Hasil	:	Meningkatny a wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	90%	90%		
				22 Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat						
				Keluaran	:	Terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai	90%	90%		
				Hasil	:	Meningkatny a wawasan kebangsaan solidaritas antar umat beragama	90%	90%		
				E Program Pendidikan Politik						

				Masyarakat						
				Capaian Program	:	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%	100%		
				23 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						
				Keluaran	:	Tersedianya laporan hasil pemantauan perkembangan situasi politik di daerah	100%	100%		
				Hasil	:	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik	100%	100%		
				24 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bantuan Partai Politik						
				Keluaran	:	Terwujudnya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	100%	100%		

					dan memberikan pemahaman tentang bantuan keuangan partai politik				
					Meningkatny a kesadaran masyarakat tentang pendidikan politik				
				Hasil :		100%	100%		

A.5.3 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. 18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dumai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian dalam (%)
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	12%	5%	42%
2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	35% permukiman 25% lahan 30% hutan	21% pemukiman 28% lahan 0% hutan	60% pemukiman, 112% lahan, 0% hutan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2020

Adapun Realisasi pelaksanaan Indikator pada Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp 559.889.650,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 519.185.200,- (lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau 92,73% dengan indikator kinerja keluaran jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran.

2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebencanaan

Kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana dialokasikan dana sebesar Rp 814.954.150,- (delapan ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 496.717.200,- (empat ratus

sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) atau 60,95% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kejadian penanganan bencana dengan target kinerja 150 kali kejadian (Hotspot).

Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 19.024.925.700,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.947.513.300,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.077.412.400,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.380.670.917,- atau terserap 85,64% dan Belanja Langsung terserap Rp. 12.313.220.770,- atau 81,67%.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 391.173.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 358.874.406,- atau 91,74%

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.910.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 2.910.000,- atau 100%, dengan indikator keluaran jumlah materai 6000 dan 3000 dengan target kinerja keluaran 595 lembar dan terealisasi 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 41.542.048,- atau 59,35% dengan indikator keluaran Jumlah penyediaan jasa telepon, air dan listrik kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 74.217.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 74.187.200,- atau 99,96% dengan indikator keluaran jumlah penyediaan jasa petugas kebersihan kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 9.200.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 6.012.300,- atau 65,35% dengan indikator keluaran jumlah peralatan yang diservis dengan target kinerja keluaran 13 unit dan terealisasi 100%.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 27.464.600,- dengan realisasi penyerapan Rp. 27.462.900,- atau 99,99% dengan indikator keluaran jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.140.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 2.125.000,- atau 99,30% dengan indikator keluaran jumlah blanko cetak dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.800.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 12.671.000,- atau 95,39% dengan indikator keluaran jumlah komponen listrik dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 11.364.000,- atau 98,82% dengan indikator keluaran jumlah koran/bahan bacaan dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 9.530.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 9.402.000,- atau 98,66% dengan indikator keluaran jumlah rapat yang dilaksanakan dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 78.197.958,- atau 98,66% dengan indikator keluaran jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja keluaran 35 orang dan terealisasi 100%.
 - k. Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 64.612.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 64.600.000,- atau 99,98% dengan indikator keluaran jumlah penyediaan jasa petugas keamanan kantor dan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
 - l. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 38.400.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 38.400.000,- atau 100% dengan indikator keluaran jumlah penyediaan jasa petugas administrasi perkantoran dengan target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 234.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 208.297.650,- atau 89,02% :
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 25.690.000, atau 98,81% dengan indikator keluaran jumlah peralatan mesin dan alat kantor yang dibutuhkan dengan target kinerja keluaran 2 paket dan terealisasi 100%.
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 76.700.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 73.940.000, atau 96,40% dengan indikator keluaran jumlah peralatan gedung kantor dengan target kinerja keluaran 6 unit dan terealisasi 100%.

c. Pengadaan Mebeleur

Jumlah Anggaran sebesar Rp 11.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 10.900.000,- atau 92,37% dengan indikator keluaran Jumlah mebelur kantor dengan target kinerja keluaran 6 unit dan terealisasi 100%.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 119.500.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 97.767.650, atau 81,81% dengan indikator keluaran jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin kantor yang dipelihara serta target kinerja keluaran 12 bulan dan terealisasi 100%.

3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 2.179.279.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.129.660.835,- atau 97,72%:

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 129.990.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.075.635,- atau 93,14% dengan indikator keluaran jumlah peralatan dan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis dengan target kinerja keluaran 14 unit dan terealisasi 100%.

b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 559.889.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 519.185.200,- atau 92,73% dengan indikator keluaran jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dengan target kinerja keluaran 7 kecamatan dan terealisasi 100%.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.489.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.489.400.000,- atau 100% dengan indikator keluaran Jumlah peralatan dan mesin pemadam kebakaran dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100%.

4. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 814.954.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 496.717.200,- atau 60,95%:

a. Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 814.954.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 496.717.200,- atau 60,95% dengan indikator keluaran jumlah kejadian penanganan bencana, target kinerja keluaran 150 kali kejadian (hotspot) realiasi 70 kali kejadian (hotspot).

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 11.458.005.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.119.670.679,- atau 79,59%:

a. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.803.275.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 7.598.628.085,- atau 86,32% dengan indikator keluaran Jumlah sarana dan prasarana kebakaran di Wilayah Rawan Bencana Karhutla, target kinerja keluaran 387 unit barang dan terealisasi 384 unit atau 99,22%.

b. Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 244.370.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 232.681.000,- atau 95,22% dengan indikator keluaran Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan pengendalian karhutla sebanyak 70 orang dan terealisasi 100%.

c. Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 491.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 480.268.790,- dengan indikator keluaran Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pembentukan MPA sebanyak 240 orang dan terealisasi 100%.

d. Penetapan Posko Pengendalian Karhutla

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 890.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 190.852.000,- dengan indikator keluaran Jumlah penetapan status siaga darurat karhutla sebanyak 2 kali dan terealisasi 1 kali atau 50%.

e. Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 890.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 190.852.000,- dengan indikator keluaran Jumlah hari pemadaman kebakaran hutan dan lahan 150 hari pemadaman dan terealisasi 70 hari atau 46,67%.

f. Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 370.905.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 195.233.500,- dengan

indikator keluaran Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian karhutla sebanyak 12 kali dan terealisasi 5 kali atau 41,67%.

- g. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui beragam metode
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 470.555.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 368.815.950,- dengan indikator kinerja keluaran Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 180 orang dan terealisasi 100%.

Lampiran 3.A.5.3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	595 Lembar	595 Lembar	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13 Unit	13 Unit	-	-	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	35 Orang	35 Orang	-	-	
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	

			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Unit	6 Unit	-	-	
			Pengadaan Mebelur	6 Unit	6 Unit	-	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
			Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	150 Kali Kejadian (Hotspot)	110 Hari Kejadian (Hotspot)	-	-	
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	14 Unit	14 Unit	-	-	
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	7 Kecamatan	7 Kecamatan	-	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Unit	1 Unit	-	-	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
			Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	387 Unit Barang	384 Unit Barang	-	-	
			Pelatihan/Pembekalan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	70 Orang	70 Orang	-	-	
			Pendamping (Pembentukan/Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	240 Orang	240 Orang	-	-	
			Penetapan Posko Pengendalian Karhutla	2 Kali	1 Kali	-	-	
			Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	150 Hari Pemadaman	70 Hari Pemadaman	-	-	
			Patroli Pencegahan Pengendalian Karhutla	12 Kali	5 Kali	-	-	
			Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Beragam Metode	180 Orang	180 Orang	-	-	

A.6 Urusan Wajib Sosial oleh, Dinas Sosial

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Sosial Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.19. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial
Kota Dumai Tahun 2020**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	52	94,07	180,90
Persentase PMKS yang tertangani	%	28	27,04	96,59
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85	99,46	117,01
Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	%	100	100	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	10	0	0

Sumber :Dinas Sosial Kota Dumai, 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuansosial

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 52% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 94,07% dengan capaian 180,90%. Meningkatnya capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan social menjadi 180,90% disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19, anggaran yang dipergunakan dalam penyaluran BANSOS ini didapat dari hasil Refocusing anggaran OPD seluruh Kota Dumai sebagai stimulus pemulihan ekonomi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang berdampak dari kebijakan pemerintah atas Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Anggaran ini menggunakan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang ditetapkan oleh TIM Gugus Tugas Covid-19

Pemerintah Kota Dumai. Penerima Bansos ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima NON DTKS.

Berdasarkan laporan TIM Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota Dumai, jumlah bantuan sosial yang ditetapkan sebanyak 28.578 KPM dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerima NON DTKS Tahap I dari target sebanyak 28.578 KPM, terealisasi sebanyak 27.060 KK dengan bantuan berbentuk sembako senilai Rp. 282.200,-
- b. Penerima NON DTKS Tahap II dan III sekaligus dari target sebanyak 28.578 KPM, terealisasi sebanyak 26.798 KK dengan bantuan berbentuk uang tunai senilai Rp. 300.000,- yang pelaksanaannya melalui kelurahan dengan pendampingan TIMWAS Kelurahan
- c. Total bantuan yang terealisasi sebesar Rp. 23.715.132.000,- dari total jumlah bantuan yang dianggarkan Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp. 25.211.511.600,-.

Untuk PMKS yang menerima BANSOS BPNT merupakan bantuan yang di anggarakan langsung dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Persentase PMKS yang tertangani

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 28% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 27,04% dengan capaian 96,59%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 telah melakukan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau sebanyak 19 orang. Kegiatan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan, Adapun kegiatan pada tahun ini Jumlah PMKS yang ditangani yaitu kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 17 orang, Anak Korban Tindak Kekerasan sebanyak 7 orang, Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 89 orang , anak terlantar sebanyak 25 orang, korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 4 orang, Korban tindak kekerasan sebanyak 33 orang yang penanganan dan pendampingannya langsung dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial mulai dari tingkat Kelurahan, Polres dan Kejaksaan.

3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 85% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 99.04% dengan capaian 117,01%. Meningkatnya capaian Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social menjadi 117,01% merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung kerekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penggunaan anggaran APBD hanya diperuntukkan bagi Pendamping PKH sebagai anggaran operasional pendamping sesuai dengan surat edaran Kementerian Sosial dengan nomor 202/MS/C/12/2018 tentang permintaan dana *sharing* daerah sebesar 5% dari jumlah bantuan social penerima PKH. Capaian target Renstra dari belanja APBD tahun 2020 yang berdasarkan formulasi indikator persentase PMKS skala yang memperoleh menerima bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak mendapatkan anggaran dari APBD.

4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 100% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 100% dengan capaian 100%. Kegiatan Pendukung sasaran ini yaitu Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Adapun kegiatan ini pada tahun 2020 yaitu Dinas Sosial Kota Dumai melakukan Penanganan dan memberikan bantuan kepada korban bencana melalui Dinas Sosial Kota Dumai sebanyak 83 KK.

5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social.

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Sosial Kota Dumai yaitu 10% dan realisasi indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 0% dengan capaian 0%. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social 0% hal ini disebabkan anggaran PMKS ini merupakan anggaran dari Kementerian Sosial yang mekanisme pembayarannya langsung ke rekening penerima

jaminan sosial melalui program ASPD (*Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas*) sebanyak 48 orang. Untuk anggaran APBD yang diperuntukkan bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social sepenuhnya dialihkan (Refocusing) keanggaran bantuan Pandemi Covid-19.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.950.953.618,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.3.023.805.740,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.3.927.147.878,-. Untuk realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp.2.618.528.268,- atau terserap 86,60% dan belanja langsung Rp. 3.636.354.550 ,- atau terserap 92,60%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran.

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.286.848.408,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.261.660.095,- atau 98,04% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 143.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.140.495.000,- atau 98,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah petugas pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 119.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.112.327.226,- atau 94,08% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor Dinas Sosial.

- c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.19.885.560,- atau 79,54% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 127.174.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.127.145.000,- atau 99,98% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan kebersihan kantor.
- e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 22.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.21.250.000,- atau 94,44% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan kerja yang baik.
- f. Kegiatan Penyediaan jasa alat tulis kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 130.129.708,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.129.726.181,- atau 99,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor.
- g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 54.147.220,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.53.594.000,- atau 98,98% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
- h. Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 14.961.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.14.531.900,- atau 97,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya alat-alat listrik.
- i. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 105.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

- Rp.103.150.000,- atau 98,24% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- j. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 5.136.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.006.000,- atau 97,47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan rumah tangga yang cukup.
- k. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 14.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10.320.000,- atau 71,67% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan.
- l. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 24.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.23.015.000,- atau 94,13% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya minuman pegawai.
- m. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 7.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.7.700.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu.
- n. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 328.979.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 328.944.228,- atau 99,99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya rapat koordiansi dengan instansi terkait tingkat pusat, provinsi dan kab/kota.
- o. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 164.570.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 164.570.000,- atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah tersedianya petugas keamanan kantor selama 1 (satu) tahun.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 602.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 597.664.002,- atau 99,13% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 394.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.391.300.000,- atau 99,26% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya gedung kantor.
- b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 208.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2606.364.002,- atau 99,57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan.

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 24.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 24.593.500,- atau 99,57% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhitsar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 5.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.783.000,- atau 99,71% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya laporan kinerja SKPD (Renja,LPPD,LKJ dan LKPJ).
- b. Kegiatan Pelaporan prognosis realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 13.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.111.000,- atau 99,33% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya laporan prognosis SKPD (RKA, RKAP dan Prognosis).
- c. Kegiatan Pelaporan keuangan akhir tahun anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp.

5.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.699.500,- atau 99,57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya laporan keuangan SKPD.

4. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 673.821.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 598.044.949,- atau 88,75% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 430.276.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.410.789.949,- atau 95,47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data PMKS dan PSKS
- b. Kegiatan Pengembangan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 243.545.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.255.000,- atau setara dengan 76,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH.

5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 839.783.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.660.365.004,- atau 78,64% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 193.508.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 189.875.000,- atau 98,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat.
- b. Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah social kemasyarakatan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 259.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 124.560.004,- atau 48,09% dari anggaran. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai.

- c. Kegiatan perlindungan Sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.167.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.156.940.000,- atau 93,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah PMKS yang dilayani.
- d. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.219.485.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.188.990.000,- atau 86,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masyarakat.

6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 199.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.199.367.000,- atau 99,99% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 199.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.367.000,- atau 99,99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial.

7. Program pengelolaan areal pemakaman.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 299.714.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.294.660.000,- atau 98,31% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 299.714.720,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 294.660.000,- Atau 98,31% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpeliharanya tempat pemakaman Pahlawan.

Adapun penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Kota Dumai melalui mitra kerja sosial dapat dilihat sebagai berikut :

1. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 1 an. NASRI BUTAR-BUTAR.
2. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2014 Peringkat 4 an. ARNITA.
3. Peringkat 1 Tk. Nasional Tahun 2014 an. SUPARJIH Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial.
4. TKSK berprestasi Tk. Propinsi Riau tahun 2016 Peringkat 2 an. PRAYITNO SUSILO, ST.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berprestasi Kota Dumai dan Juara 2 sebagai Peserta Orientasi dan seleksi Pilar-pilar Sosial Teladan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 an. HENDRA JEFRI A.
6. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berprestasi Kota Dumai dan Juara 4 sebagai peserta Orientasi dan seleksi Pilar-pilar Sosial Teladan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 an. LILIS ARYANI.
7. Karang Taruna berprestasi Kota Dumai dan Juara 4 sebagai peserta Orientasi dan seleksi Pilar-pilar Sosial Teladan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 an. DEKY INDRAWAN.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berprestasi Kota Dumai dan Juara 5 sebagai peserta Orientasi dan seleksi Pilar-pilar Sosial Teladan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 an. BAMBANG RINAWAN.

Lampiran 3.A.6. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Dinas Sosial Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI I	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Sosial	Dinas Sosial	Perwako Nomor 44 Tahun 2020	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
				Pendataan verifikasi dan validasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	19.922 KK	19.982 kk			
				Pengembangan pendampingan program keluarga harapan (PKH)	6.186 KK	6.486 kk			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
				penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	200 kk	93 kk	Jumlah kejadian bencana dalam 1 tahun		

				Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan	50 orang	19 orang	Jumlah Disabilitas Mental terlantar dalam 1 tahun		
				Penanganan Perlindungan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan	100%	100%			
				Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat	8.481 KK	11.587 kk			
				Program pengelolaan areal pemakaman					
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	12 bln	12 bln			
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	190 orang	73 orang	73 orang terdiri dari 66 org PSM dan TKSK 7 orang tidak memenuhi target 117 orang yang terdiri dari PSKS lainnya berupa kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial hal ini disebabkan : 1. keterbatasan anggaran 2. Kebijakan Pemerintah terhadap Kejadian wabah covid 19 secara Nasional	Solusi : 1. Terpenuhinya Anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan 2. Menunggu hasil keputusan Pemerintah tentang kejadian wabah covid 19 secara Nasional	
							Dst	Dst	Dst

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

B.1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021, dapat dilihat pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 dalam tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN %
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89	90,86	102
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	90	96,3	107
Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,09	0,01	1,88
Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,85	52,02	94,8
Capaian kota layak anak (KLA)	Predikat	Nindya (3)	Madya (2)	66,7

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

Keberhasilan dari 5 Indikator Kinerja Sasaran diatas didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain:

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target dari indikator sasaran ini yaitu 89 dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 90,86. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 102% (melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020).

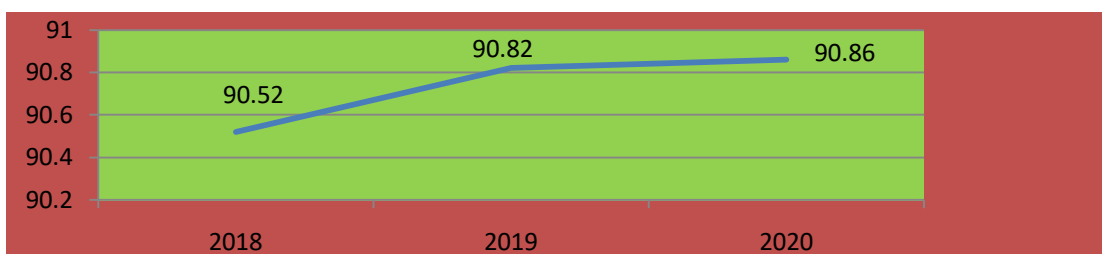
Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator keluaran adalah:

- Terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender dan anak dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100% yang melibatkan seluruh lembaga organisasi perempuan dan anak yang ada di kota Dumai.
- Terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100% dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah Kota Dumai sehingga dihasilkan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.
- Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target kinerja 1 kegiatan. Sehubungan dengan terjadinya wabah covid-19 dan sebagai upaya pencegahan penularan wabah tersebut, maka kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas organisasi perempuan tidak bisa dilaksanakan sehingga pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut harus dilakukan rasionalisasi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG = Gender Development Index) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai meningkat setiap tahunnya seperti tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.18. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai Tahun 2018-2020

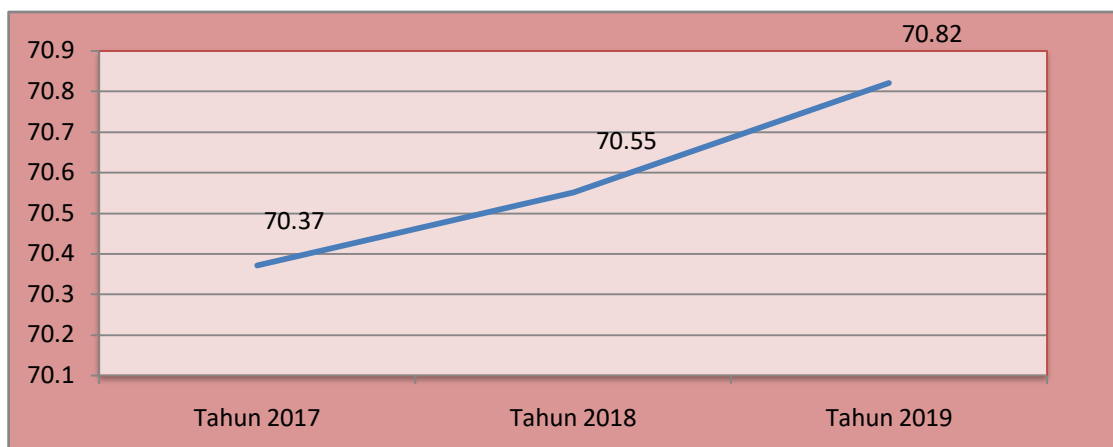


Sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, selain IPG juga digunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender yang telah dicapai melalui berbagai arah kebijakan dan program pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu (1) Keterwakilan perempuan di parlemen, (2) Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, dan (3) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Indikator pembangunan gender terbagi dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan aktivitas ekonomi. Salah satu indikator penting dalam pengukuran IPG adalah Angka Harapan Hidup saat lahir. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat masyarakat. Angka Harapan Hidup Kota Dumai tahun 2017 sampai dengan 2019 seperti digambarkan pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.19. Angka Harapan Hidup
Kota Dumai Tahun 2017 s/d Tahun 2019**



Sumber Data Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2020

Meningkatnya angka harapan hidup di Kota Dumai seperti yang terlihat pada grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai dari tahun ke tahun.

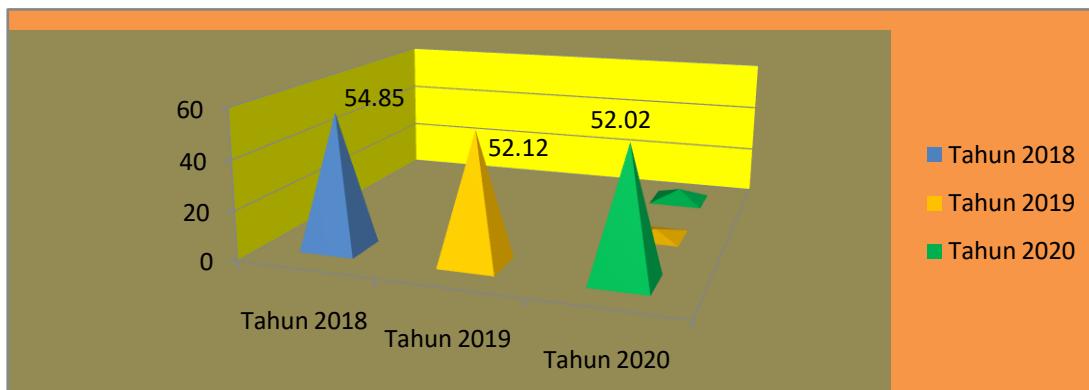
B. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 54,85 % dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 52,02% yang bermakna bahwa dari 105.564 jiwa angkatan kerja perempuan, terdapat sebanyak 54.915 jiwa perempuan yang bekerja (belum mencapai target yang ditetapkan).

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target sebanyak 7 kecamatan dan terealisasi sebanyak 1 kecamatan. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran sehubungan dengan terjadinya pandemi covid-19 sehingga kegiatan ini tidak bisa terlaksana untuk 7 Kecamatan. Kegiatan ini merupakan salah satu program peningkatan perempuan dengan menggunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.20. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020



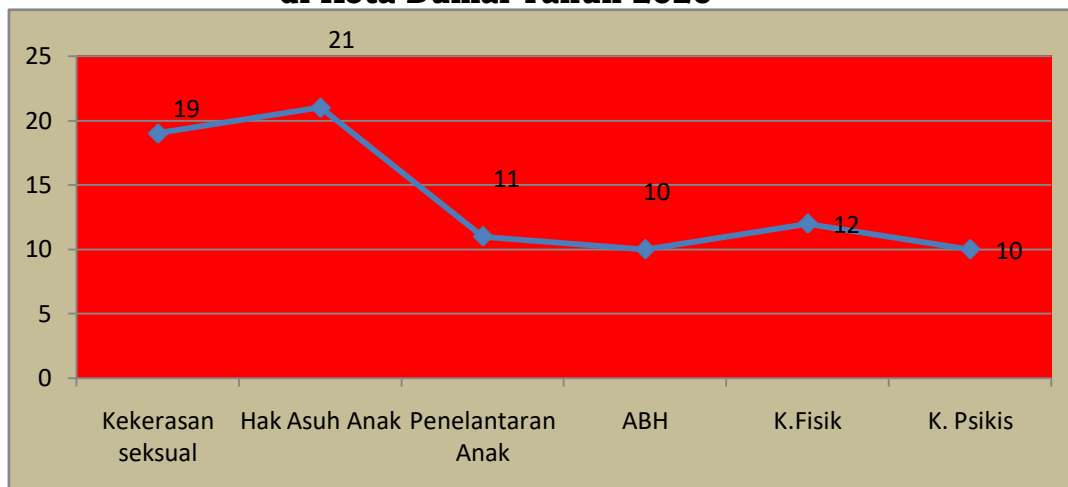
Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020

C. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar

Target dari indikator sasaran ini yaitu 90 % dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 96,3% (melebihi target kinerja). Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target kinerja kegiatan sebanyak 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan antara lain meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2020 telah tercatat sebanyak 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdiri dari kekerasan terhadap anak sebanyak 89 kasus dan kekerasan terhadap perempuan (≥ 18 tahun) sebanyak 32 kasus. Dari 89 kasus kekerasan terhadap anak diperoleh data sebanyak 19 kasus mengalami kekerasan seksual, hak asuh anak sebanyak 21 kasus, penelantaran anak sebanyak 11 kasus, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 10 kasus, kekerasan fisik sebanyak 12 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 10 kasus seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini.

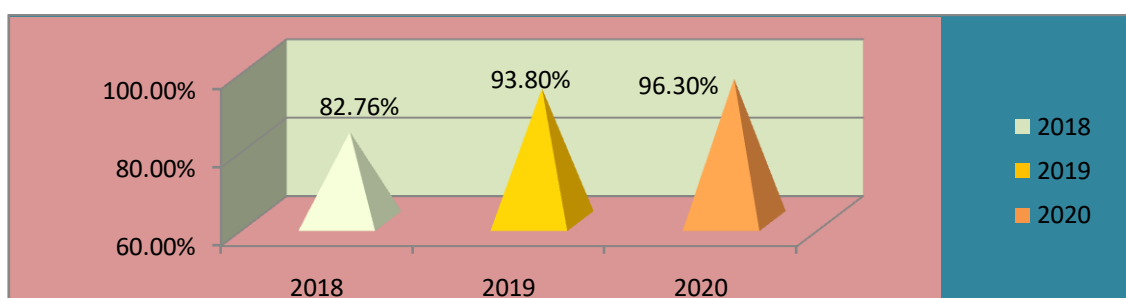
**Grafik 3.21. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
di Kota Dumai Tahun 2020**



Sumber Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai Tahun 2020

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa jenis kasus kekerasan terhadap anak yang ditemukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai Tahun 2020 terbanyak dengan kasus hak asuh anak sebanyak 21 kasus. Berikut cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standardi Kota Dumai bisa dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.22. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar di Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai Tahun 2020

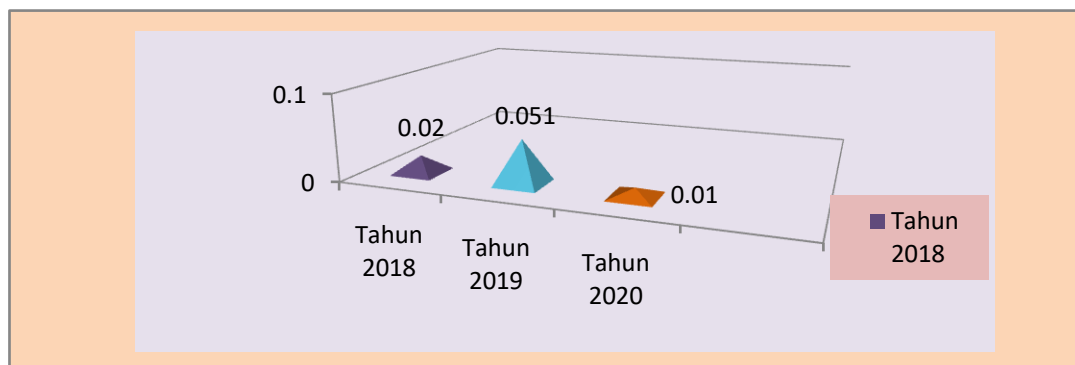
Dari grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan selama 3 tahun berturut-turut terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target kinerja kegiatan sebanyak 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan antara lain meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan pada tahun 2020 antara lain layanan konseling sebanyak 80 kasus, konsultasi psikologis 5 kasus, layanan visum 5 kasus, dan pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) rekam kasus oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak(UPT PPA) sebanyak 80 kasus.

Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Target dari indikator sasaran ini yaitu sebesar 0,09% dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 0,01% yang bermakna bahwa dari 146.963 jiwa penduduk perempuan Kota Dumai, ditemukan sebanyak 16 kasus perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka angka capaian ini mengalami penurunan yaitu dari 0,051% pada tahun 2019 menjadi 0,01% yang berarti capaian kinerja semakin meningkat (semakin rendah kasus yang ditemukan maka semakin baik capaian kinerjanya) seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.23. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai Tahun 2018 s/d 2020



Sumber Data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai Tahun 2020

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup berarti pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya (di bawah target capaian 0,09%). Hal ini disebabkan karena telah berfungsinya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai salah satu wadah perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Dumai serta semakin gencarnya sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak dengan melibatkan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta, dan meningkatnya kesadaran serta kepedulian masyarakat Kota Dumai untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan yang ditemukan di wilayahnya.

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada kegiatan :

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dengan target kinerja kegiatan sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam rangka terintegrasi sosial, yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya, dengan sasaran kegiatan adalah para korban kekerasan dan kelompok rentan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pertemuan dengan perempuan korban tindak kekerasan, serta pembinaan pada kelompok rentan seperti disabilitas dan lanjut usia.

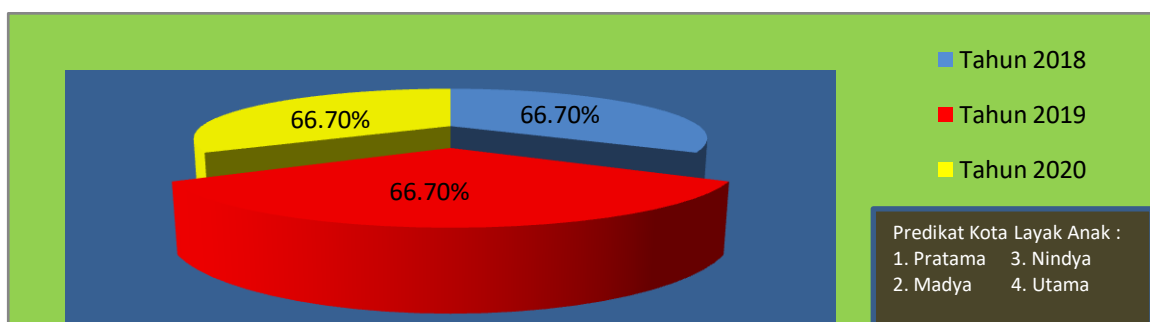
- Pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan dengan target kinerja kegiatan sebanyak 20 kelurahan dan terealisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan sasaran Satuan Tugas PPPA dan tenaga pendamping di UPT sebanyak 20 orang serta pembinaan Satuan Tugas PPPA terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di 20 kelurahan, dan monitoring evaluasi Satuan Tugas PPPA di 7 kecamatan.

E. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Target dari indikator sasaran ini adalah tercapainya kota layak anak (KLA) dengan predikat Nindya(3) dan realisasi capaian pada tahun 2020 masih bertahan dengan predikat Madya (2). Dengan demikian pencapaian target indikator sasaran tersebut sebesar 66,7% (belum mencapai target) seperti tergambar pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.24. Capaian Kota Layak Anak Kota Dumai
Tahun 2018 s/d 2020**



Sumber Data Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama 3 tahun berturut-turut Kota Dumai telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Madya (2). Adapun penilaian Kota Layak Anak terbagi atas (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya dan (4) Utama. Dan pada tahun 2020 masih memperoleh predikat Madya (2) atau sebesar 66,7% yang berarti belum mencapai target yang diinginkan yaitu Nindya (3). Salah satu yang menjadi indikator penting dalam penilaian kota layak anak adalah adanya data terpilah gender dan anak sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan responsif gender, namun belum semua Perangkat Daerah di Kota Dumai memiliki data terpilah gender dan anak sehingga penginputan analisis gender belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Keberhasilan ini didukung oleh program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui kegiatan:

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan forum anak kota Dumai dengan target kinerja kegiatan sebanyak 50 orang dan terealisasi sebanyak 100%. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembinaan forum anak tingkat kelurahan dan kecamatan serta lomba forum anak tingkat kecamatan.
- Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak dengan target kinerja sebanyak 20 sekolah dan terealisasi 100% , terselenggaranya pembinaan puskesmas ramah anak dengan target kinerja sebanyak 30 orang dan terealisasi 100%. Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain bimbingan teknis sekolah ramah anak, dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas ramah anak, serta peringatan hari anak nasional untuk kota Dumai tahun 2020.
- Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya bimbingan teknis replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 50 orang dan terealisasi 100%, serta terselenggaranya bimbingan teknis pembinaan aktivis PATBM sebanyak

250 orang namun tidak bisa terealisasi karena situasi pandemic covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut sehingga pagu anggaran untuk kegiatan tersebut harus dirasionalisasikan. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya - upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak. Selain itu juga dilaksanakan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak.

- Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
Indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta tersedianya media informasi dengan target 75% dan terealisasi 100%. Pendataan gender dan anak di Kota Dumai melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada dengan harapan dapat menghasilkan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender. Namun kondisi saat ini, belum semua Perangkat Daerah menggunakan data terpilah gender dan anak sehingga pendataan gender dan anak belum bisa diinput secara optimal.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.638.865.719.- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.526.286.700.- dengan realisasisebesar Rp.4.212.210.431.- atau 93.06% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.112.579.019.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.046.648.189.- atau 96.87%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 disampaikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 sebesar Rp. 747,755,688,- dan telah terealisasi sebesar 711,881,104,- atau 95,20% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp 450,000,- atau 100% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penyediaan surat menyurat dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123,699,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 109,714,693,- atau 88,69% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp 2,350,000,- atau 100% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perengakapan kantor dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15,400,000,- dan terealisasi sebesar 6,504,000,- atau 42,23% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target kinerja 12 bulan dan 100%.
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51,176,675,- dan terealisasi sebesar Rp. 50,905,625,- atau 99,47% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 74,430,443,- dan terealisasikan sebesar Rp. 74,404,675,- atau 99.97% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67,647,670,- dan terealisasikan sebesar Rp. 65,840,500,- atau 97.33% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8,604,900,- dan terealisasikan sebesar Rp. 8,603,850,- atau 99.99% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8,400,000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 8,400,000,- atau 100% dengan indikator keluaran tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12,252,000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 12,040,800,- atau 98,28% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya makan dan minum rapat dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 202,000,000,- dan terealisasikan sebesar Rp. 201,621,961,- atau 99,81% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%.
12. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80,945,000,- dan terealisasikan sebesar

Rp. 79,245,000,- atau 97.90% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya tenaga pengamanan kantor (2 orang) dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.

13. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100,400,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91,800,000,- atau 91,43% dengan indikator keluaran jumlah jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran (3 orang).

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 sebesar Rp. 274,345,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 274,000,000,- atau 99.87 % melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13,125,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,125,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran tersedianya perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket atau 100 %.
2. Kegiatan pengadaan mebeleur. Anggaran dinas yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48,950,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48,950,000,- atau 100 % dengan target kinerja tersedianya sarana pendukung perlengkapan gedung kantor dengan target kinerja 3 unit dan terealisasi sebesar 3 unit atau 100 %.
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3,000,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 2,966,000.- atau 99.99% dengan indikator keluaran terpeliharanya rumah dinas dengan target kinerja 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit atau 100%.
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 116,370,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 116,360,000.- atau 99.99% dengan indikator keluaran tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau 100%, serta terpenuhinya jasa supir kendaraan

dinas operasional dengan target kinerja 2 orang dan terealisasi 100%.

5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6,800,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 6,800,000.- atau 100% dengan indikator keluaran tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6,100,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 6,100,000.- atau 100% dengan indikator keluaran tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 100%.
7. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10,000,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 10,000,000.- atau 100% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya sarana kerja yang layak dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi sebesar 1 paket atau 100%.
8. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70,000,000.- dan terealisasi sebesar Rp. 69,699,000.- atau 99,57% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya sarana kerja yang layak dengan target kinerja 1 paket dan terealisasi sebesar 1 paket atau 100%.

C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.508.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32,253,000.- atau 88,35% melalui kegiatan antara lain:

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.425.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- atau 88,53% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen LKj, LPPD, LKPJ dan Renstra dengan target kinerja 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.

2. Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.582.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.752.000,- atau 86,25% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
 3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.501.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.501.000,- atau 100% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- D. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 sebesar Rp.646.294.298,- dan terealisasi sebesar Rp. 630,115,854,- atau 97,40%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.068.341,- dan terealisasi sebesar Rp.31,468,341.- atau 98,13% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan namun tidak bisa terealisasi karena adanya pandemi covid-19 sehingga pagu anggaran untuk kegiatan tersebut harus dirasionalisasikan.
 2. Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.940.144,- dan terealisasi sebesar Rp.37,031,000,- atau 92,72% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan Forum

Anak Kota Dumai

dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan capaian kota layak anak.

3. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.193.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189,717,000,- atau 98,03% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%, terselenggaranya Pembinaan puskesmas ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%, terselenggaranya Rakor Kota Layak Anak dengan target kinerja 50 dan terealisasi sebanyak 50 atau 100%.
4. Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.149.693.800,- dan terealisasi sebesar Rp.142,834,500,- atau 95,42% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau 100%. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.98.702.100,- dan terealisasi sebesar Rp.98,582,100,- atau 99,88% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya bimbingan teknis replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi 50 orang atau 100%, terselenggaranya bimtek pembina aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 250 orang dan terealisasi sebanyak 250 orang atau 100%.

6. Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
Anggaran yang tersedia sebesar Rp 36.283.313,- dan terealisasi sebesar Rp.36,011,313,- atau 99.25% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %, serta tersedianya media informasi dengan target 75% dan terealisasi 75 %. Pendataan gender dan anak di Kota Dumai melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada dengan harapan dapat menghasilkan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.
 7. Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.96.071.600,- dan terealisasi sebesar Rp.94,471,600,- atau 98,33 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100 %. Pelaksanaan pengarusutamaan gender memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yaitu berupa adanya prasyarat awal, komponen kunci dan keluaran (output) untuk menjadi dasar bagi terlaksananya pengarusutamaan gender.
- E. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 13.863.938,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,823,331,- atau 99,71 % dengan kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah, dengan indikator keluaran adalah peningkatan pengamanan fisik barang milik daerah dengan target kinerja 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- F. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.342.937.095,- dan terealisasi sebesar Rp. 334,634,900,- atau 99,36 %. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 105.595.270,- terealisasi sebesar Rp.105,227,500,- atau 99,65 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebanyak 50 orang, dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100 %. Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam rangka terintegrasi sosial, yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat dilingkungannya.
2. Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.004.400,- terealisasi sebesar Rp.27.004.400,- atau 100 % dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target kinerja sebanyak 120 orang, namun tidak bisa terealisasi karena situasi pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia.
3. Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.034.425,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,020,000,- atau 98,86 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%. Tujuan kegiatan ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai kepala keluarga, serta untuk meningkatkan peranan perempuan sebagai kepala keluarga.
4. Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.200.303.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192,383,000,- atau 96,05 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan dengan target kinerja sebanyak 20 kelurahan

dan terealisasi 20 kelurahan atau 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan sasaran Satuan Tugas PPPA dan tenaga pendamping di UPT sebanyak 20 orang serta pembinaan Satuan Tugas PPPA terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di 20 kelurahan, dan monitoring evaluasi Satuan Tugas PPPA di 7 kecamatan.

G. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.46.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45,940,000,- atau 95,27 %. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26,740,000,- atau 97,68 % dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target kinerja 40 organisasi, dan terlaksananya peringatan hari kartini dan hari ibu dengan target kinerja sebanyak 2 kegiatan. Untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia.
2. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.6.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6,000,000,- atau 97,56 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dengan target kinerja 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau sebesar 100 %, dan terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja 7 kecamatan dan terealisasi sebanyak 1 kecamatan atau sebesar 14,29 %. Tidak terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia. Tujuan kegiatan ini secara umum adalah meningkatkan peran perempuan pada pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, dan

khususnya untuk meningkatkan status kesehatan perempuan, meningkatkan status pendidikan perempuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

3. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.13.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13,200,000,- atau 98,88 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dengan target kinerja 7 kecamatan dan terealisasi sebanyak 1 kecamatan atau sebesar 14,29 %.
- H. Program penyebaran informasi pemerintah daerah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 100% dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya kegiatan Dumai Expo dan pawai keliling Idul Fitri dan Idul Adha dengan target kinerja 3 kegiatan dan realisasi 0 % mengingat situasi pandemic covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana.

Lampiran 3.B.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program pelayanan administrasi perkantoran					
				Penyediaan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak Ada		
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada		
				Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada		
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak					
				Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak					
				- Terselenggaranya peningkatan kapasitas organisasi perempuan	1 Kegiatan	0	Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19	Mengusulkan kembali pagu kegiatan dan tetap melaksanakan kegiatan secara virtual	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai Pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak	80 kasus	80 kasus	Tidak ada		
				- Terselenggaranya bimtek replikasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50 Orang	50 Orang	Tidak ada		
				- Terselenggaranya bimtek pembinaan aktifis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	250 Orang	0	Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19	Mengusulkan kembali pagu kegiatan dan tetap melaksanakan kegiatan secara virtual	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	
				Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	50 Orang	50 Orang	Tidak ada		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan	40 Organisasi	0	Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19	Mengusulkan kembali pagu kegiatan dan tetap melaksanakan kegiatan secara virtual	
				- Terlaksananya peringatan hari kartini dan hari ibu Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera - Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga	2 Kegiatan 7 Kecamatan	0 1 Kecamatan	Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 Tidak Ada	Mengusulkan kembali pagu kegiatan dan tetap melaksanakan kegiatan secara virtual	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Terlaksananya program terpadu peningkatan peranata wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) di Kota Dumai Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	10 Kelurahan	10 Kelurahan	Tidak Ada		
					7 Kecamatan	1 Kecamatan	Tidak Ada		
				Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar Nasional/Daerah /Keagamaan	3 Kegiatan	0	Rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19	Mengusulkan kembali pagu kegiatan dan tetap melaksanakan kegiatan secara virtual	

B.2. Urusan Wajib Tenaga Kerja, Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai Tahun 2020

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	A.14 Ketenagakerjaan				
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	85%	0%	0
	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirusahaan	%	50%	0%	0
	Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan	%	50%	40%	100
	Besaran kasus yang dsieleasakan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	65%	40%	100
B.	B2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN				
	8. Ketransmigrasian				
	Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi	%	40%	0%	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirusahaan ditargetkandalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 85%, dan telah dilakukan Pelatihan sebanyak 0 orang dari 0 orang yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai sehingga realiasi yang telah tercapai adalah 0%.

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas :

1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

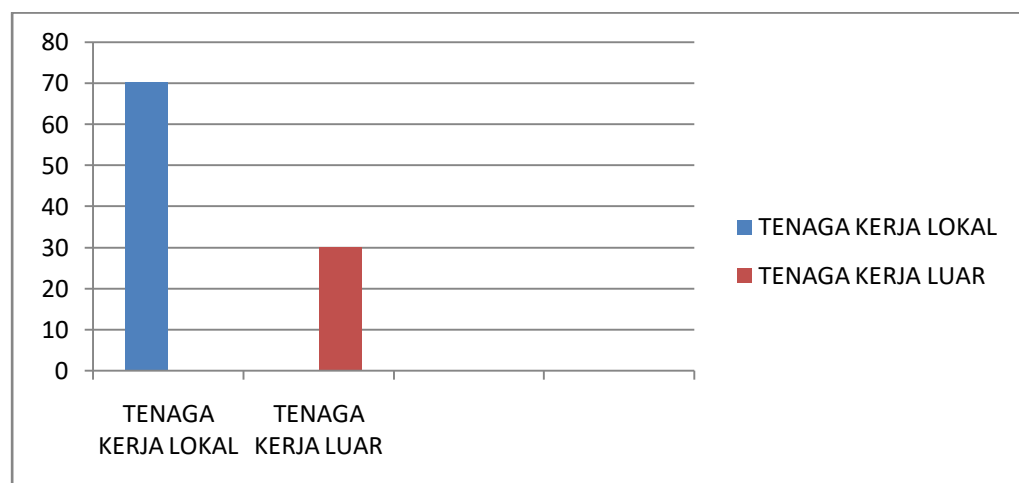
Adapun kendala yang dihadapi sehingga pelayanan dasar non wajib ini belum mencapai target adalah karena belum maksimalnya pagu anggaran yang di usulkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran.

b. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirusahaan
Indikator Besaran Tenaga Kerja mendapatkan Pelatihan Kewirusahaan dalam Sasaran Renstra yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 50% tahun 2020 Tenaga Kerja yang diberikan Pelatihan Kewirusahaan sebanyak 0 orang Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan.

Indikator Besaran Tenaga Kerja tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan ditargetkan dalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 50% dan telah di Data dan dievaluasi bahwa Tahun 2020 tenaga kerja yang terdaftar 5.474 orang sehingga realisasi yang telah tercapai adalah 100%.

Kegiatan pendukung Sasaran yaitu Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dimana kegiatan tersebut Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan telah melampaui Target Sasaran di Renstra. Meskipun Target Sasaran di Renstra telah tercapai namun sesungguhnya kuantitas pencari kerja yang mendapatkan suatu pekerjaan masih perlu di evaluasi. Penempatan Tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan merupakan suatu tantangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi permasalahan pengangguran. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Dumai sudah mengeluarkan PERDA 10 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari 70% tenaga kerja lokal dan 30% dari tenaga kerja luar dan Perwako Dumai juga mengotpimalkan penempatan tenaga kerja helper 100%.

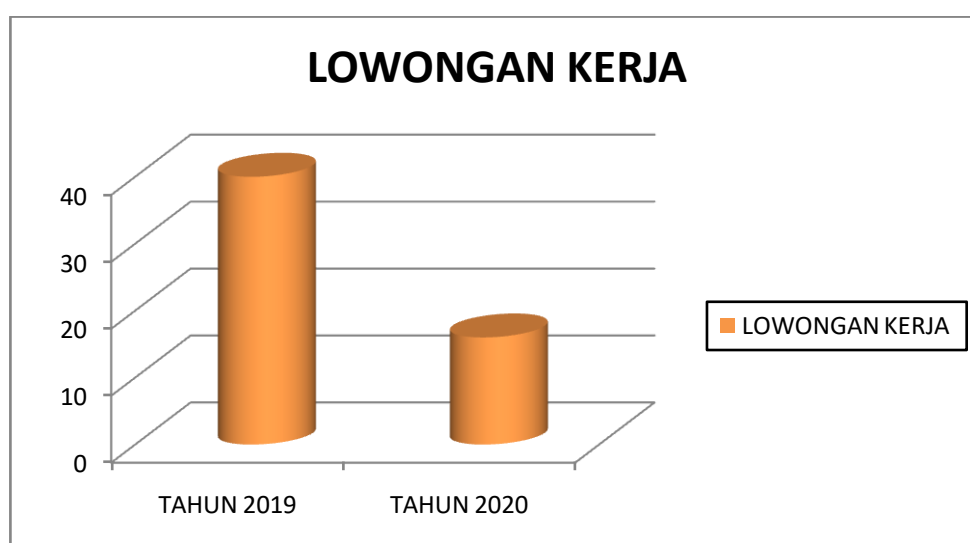
Grafik 3.25. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Di Kota Dumai



Kegiatan pendukung Sasaran yaitu Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, kegiatan ini dilakukan untuk Mengumpulkan dan meneliti data hasil antar kerja (data pencari kerja, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja), mengatur dan menyusun data dalam kelompok umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan sektor lapangan usaha di buat dalam suatu Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Informasi lowongan pekerjaan memuat Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan: Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratat jabatan yang dibutuhkan untuk itu perlu adanya Infromasi Bursa Kerja. Adapun lowongan pekerjaan di perusahaan yang berada di Kota Dumai Tahun 2019 sebanyak 40 Perusahaan, tenaga kerja yang terdaftar di tahun 2019 berjumlah 1.524 orang dan di Tahun 2020 sebanyak 16 Perusahaan, tenaga kerja yang tedaftar di tahun 2020 berjumlah 5.474 orang.

Grafik 3.26. Jumlah Lowongan Pekerjaan



c. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB) ditargetkan dalam sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dimana Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebesar 65% Tahun 2020 sebanyak 10 kasus atau realisasi 100%.

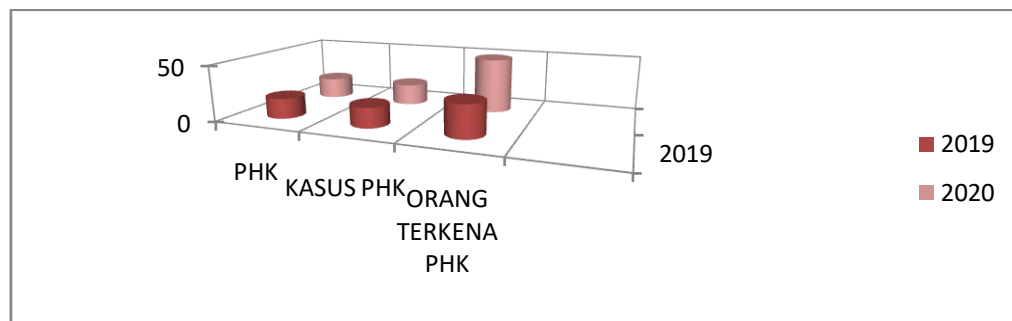
Keberhasilan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai karena adanya dukungan regulasi yang tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh perusahaan serta tingginya kesadaran pekerja dan pengusaha akan pentingnya menjadi peserta BPJS.

Semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah secara Bipartit, apabila perundingan mencapai persetujuan atau kesepakatan, maka persetujuan bersama (PB) tersebut di catatkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun apabila perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Salah satu persyaratan yang mutlak dalam pencatatan tersebut adalah bukti atau risalah perundingan Bipartit (Pasal 3), apabila bukti perundingan tidak ada, maka pencatatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 hari untuk melakukan perundingan Bipartit, jika perundingan menghasilkan kesepakatan (damai) maka akan dibuat Perjanjian Bersama (PB) yang akan dicatatkan ke PHI, jika tidak menemui kesepakatan dengan bukti/risalah perundingan yang lengkap, maka kepada para pihak ditawarkan tenaga penyelesaian perselisihan apakah melalui Konsiliator atau Arbitrase, jika para pihak tidak memilih atau justru memilih mediasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dalam forum mediasi.

Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Grafik 3.27. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)



Tabel 3.22. Kasus Pertahun

NO	KASUS	2019	2020
1	PHK	18	19
2	Kasus PHK	18	19
3	Orang Terkena PHK	29	49
	JUMLAH	65	87

Upah Minimum juga termasuk pemeriksaan setiap tahunnya yang ada di Perusahaan Kota Dumai Nilai Upah Minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten terdiri dari Perwakilan Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah, dibentuk secara Tripartit. Keterlibatan pihak akademisi dipastikan ada di ketiga tingkat. Perwakilan Pemerintah setara dengan perwakilan dari pekerja dan pengusaha di semua tingkat dewan pengupahan, sementara keterlibatan akademisi dan ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum Provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun.

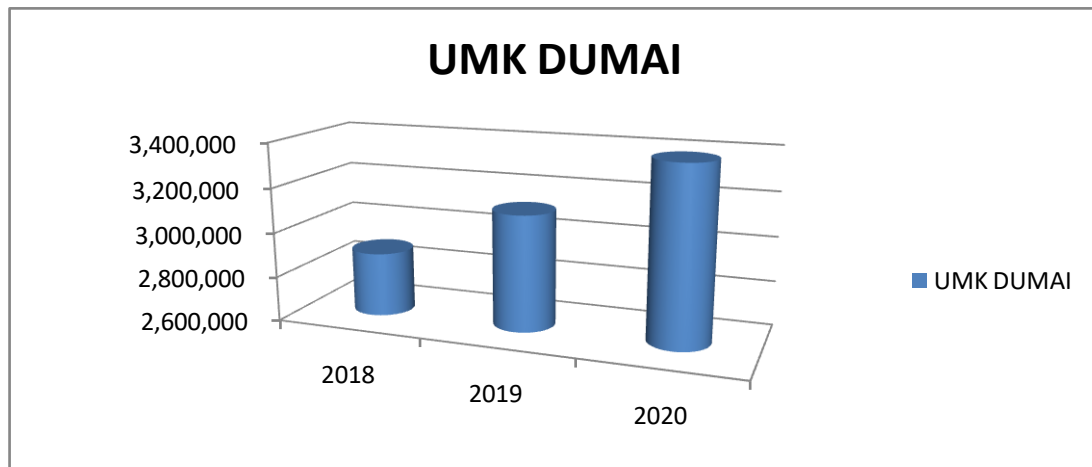
Formula tersebut mengharuskan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahun, berdasarkan akumulasi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan mengatur mengenai Dewan Pengupahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dimana fungsi dari Dewan Pengupahan tersebut adalah menjadi penasihat penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan upah dan mengembangkan sistem upah nasional.

Dewan Pengupahan Kabupaten akan mengirimkan usulan mereka kepada Walikota yang nanti akan diteruskan kepada Gubernur. Usulan ini juga akan dibagi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dimana mereka akan mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menentukan upah minimum provinsi (tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan), yang dihitung berdasarkan formula untuk perhitungan upah minimum setiap tahun. Adapun begitu Dewan Pengupahan masih berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal pengupahan, seperti membantu melakukan supervisi dan monitor penerapan struktur dan skala upah di perusahaan dan juga melakukan survei kebutuhan hidup layak setiap 5 (lima) tahun sekali.

Grafik 3.28. Persentase Kenaikan upah minimum kota Dumai dalam 1 tahun 2017-2020



Tabel 3.23. Jumlah Besar UMK Kota Dumai

No	TAHUN	UMK	KET (%)
1	2018	2.886.665,44	92.37%
2	2019	3.118.453,87	92.57%
3	2020	3.383.834,29	92.16%

B. Jumlah Pelayanan dan Penyuluhan Bagi warga transmigrasi

Untuk Program dan Kegiatan Transmigrasi untuk Tahun 2020 tidak dianggarkan.

Adapun Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dengan Jumlah 9 program dan 27 kegiatan di Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pada Tahun 2020, jumlah Anggaran Rp. 1.441.350.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.391.153.838,- atau sebesar 95.52% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) *Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 3.150.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 1.200.000,- dan atau sebesar 38.02%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah benda pos dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

2) *Kegiatan Penyediaan Jasa Komunika, Sumber Daya Air dan Listrik*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 141.960.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 127.796.929,- dan atau sebesar 90,02%,adapun IndikatorKinerja keluaran adalah jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik yang terpenuhi dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

3) *Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 9.500.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 6.874.000,- dan atau sebesar 72,36%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas dengan target 6 unit atau capaian realisasi 100%.

4) *Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 75.684.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 75.624.800,- dan atau sebesar 99,92%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Anggaran Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

5) *Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 26.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 26.000.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah Peralatan dan Jasa Kerja dengan target 65 Unit atau capaian realisasi 100%.

6) *Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 94.108.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 90.512.000,- dan atau sebesar 96,18%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah Jumlah kebutuhan akan ATK dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

7) *Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 58.760.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 56.486.000,- dan atau sebesar 96,13%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

8) *Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 6.973.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 6.973.100,- dan atau sebesar 100%,adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

9) *Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 6.583.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 5.950.000,- dan atau sebesar 90,38%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah bahan bacaan yang dibaca selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

10)*Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 9.234.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 9.230.000,- dan atau sebesar 99,96%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan logistik kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

11)*Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 12.962.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 12.083.000,- dan atau sebesar 93,22%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

12)*Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp 243.288.550,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp 242.377.109,- dan atau sebesar 99,63%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

13) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 40.800.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Jasa Keamanan Kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 269.137.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 268.800.000,- dan atau sebesar 99,87%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran Rp233.760.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 219.900.000,- atau sebesar 94,07% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

A) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 130.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp129.750.000,- dan atau sebesar 99,81%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Pemeliharaan dan perbaikan gedung dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

B) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp103.760.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp90.150.000,- dan atau sebesar 86,88%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Fasilitasi pemeliharaan rutin kendaraan dinas dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

**C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 29.850.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.690.000,- atau sebesar 92,76% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

01) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp6.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.840.000,- dan atau sebesar 64%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Penyusunan Dokumen Renja dan Lakip dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

02) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp23.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp23.850.000,- dan atau sebesar 100%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

03) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp0,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp0,- dan atau sebesar 0%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 0%.

a) PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Pada Tahun 2020, jumlah Anggaran Rp150.150.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 144.188.400,- atau sebesar 96,03% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

01) Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp30.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp24.350.000,- dan atau sebesar 80,76%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kepres RI No. 04 Tahun 1980 dengan target 50 Perusahaan atau capaian realisasi 100%.

02) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp119.838.400,-danatausebesar 99,87%,adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Data Informasi asar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b) PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN TENAGA KERJA

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran Rp29.448.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.668.500,- atau sebesar 97,35% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

01) Kegiatan Pembinaan Dewan Pengupahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 29.448.500,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp. 28.668.500,- dan atau sebesar 97,35%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah rapat rutin Dewan Pengupahan Kota Dumai dengan target 5 kali atau capaian realisasi 100%.

Lampiran 3.B.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50 Perusahaan	50 Perusahaan	-	-	
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	1 Paket	1 Paket	-	-	
				Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja					
				Pembinaan Dewan Pengupahan	5 kali	5 kali	-	-	

B.3. Urusan Lingkungan Hidup, Oleh Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka 5 (lima) tahun 2017-2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kegiatan. Dalam mencapai tujuan dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan IKU (indikator Kinerja Utama), seperti pada table 3.24 dibawah ini.

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Capaian kondisi akhir 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
Urusan Lingkungan Hidup				
Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani	Wilayah	5	5	100
Persentase kualitas udara	%	75	75	100
Persentase kualitas air	%	75	75	100

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Untuk mencapai indikator Kinerja utama Tersebut saat ini Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 telah melaksanakan program kegiatan yang dapat menunjang pencapaian IKU ada 3 (tiga) Program dan 3 Kegiatan seperti yang dijabarkan pada kegiatan berikut:

1. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

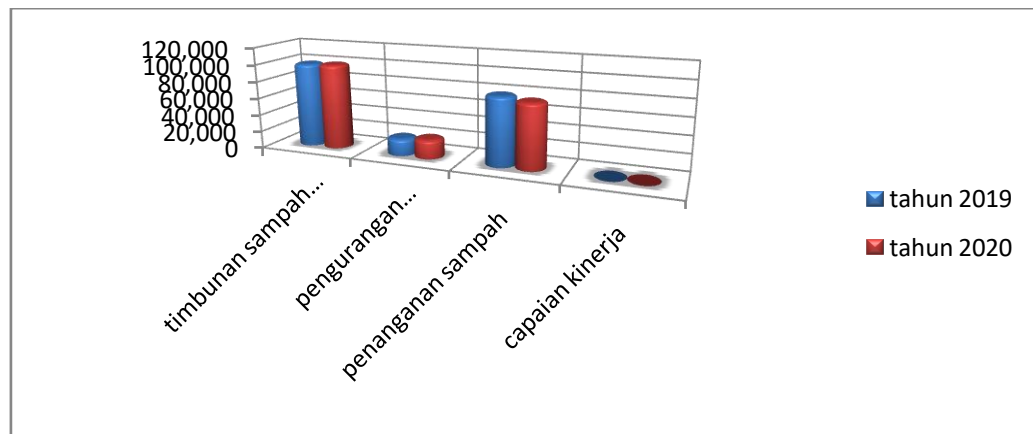
Kegiatan : Peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.

IKU : Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani.

Target pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani, tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dimana kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 5.670.248.900,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.661.603.200 ,-atau sebesar 100 %,- artinya dari Alokasi anggaran yang disediakan telah dapat menanggulangi timbunan sampah sebesar 57.76 M3/Tahun sedangkan produksi timbunan volume sampah kota dumai sebesar 109.956,25 M3 /Tahun tahun 2020 artinya Dibandingkan tahun 2019 ada peningkatan pengelolaan sampah. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana (17 armada dan 11 Bak container) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah dapat mengakomodir titik rawan sampah sehingga target yang diinginkan yaitu meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat berjalan optimal. Alokasi anggaran yang disediakan telah dapat menanggulangi timbunan sampah sebesar 61.320 M3/Tahun sedangkan produksi timbunan volume sampah kota dumai sebesar 109.956,25 M3 / artinya ada peningkatan volume sampah per tahun yang belum tertangani secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana (17 armada dan 11 Bak container) belum dapat mengatasi titik rawan sampah di Kota Dumai sehingga capaian target meningkatnya pelayanan persampahan belum dapat berjalan secara optimal.

Jika dilihat dari grafik penanganan sampah tahun 2019 dan 2020 terdapat pengurangan sampah

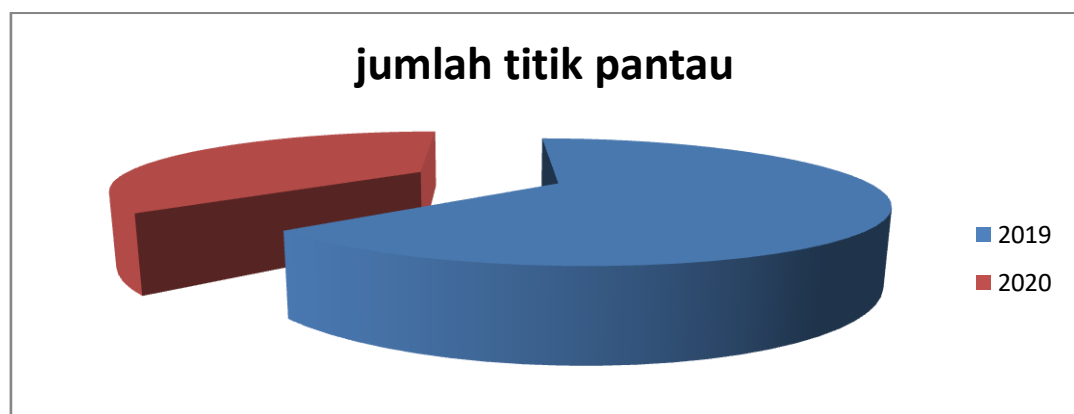
Grafik 3.29 Penanganan Sampah



- a. **Program** : **Peningkatan Pengendalian Polusi**
Kegiatan : **Pengujian Polusi Udara Ambien**
IKU : **Persentase Kualitas Udara**

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara Kota Dumai target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan pengambilan analisa sampel sebanyak 4 titik di Kota Dumai. Dengan anggaran sebesar 53.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar 44.960.554,- atau 84.27%. Hasil analisa sample terhadap uji parameter didapat kualitas udara di Kota Dumai tidak ada yang melebihi ambang batas sesuai Kep No. 50/MENLH/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, dan Baku tentang Tingkat Kebisingan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996. Dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.30. Jumlah Titik Pemantauan Udara



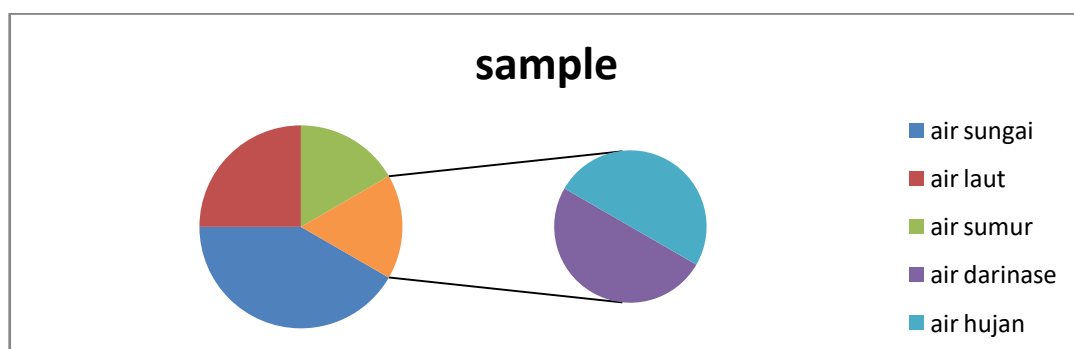
b. **Program** : **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan : **Pengendalian Pencemaran Air**

IKU : **Persentase Kualitas Air**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air sumur sebanyak 2 sampel, air sungai sebanyak 4 sampel, air laut sebanyak 3 sampel, air drainase sebanyak 1 sampel, air hujan sebanyak 1 sampel di Kota Dumai. Dengan realisasi 2 sumur di Kecamatan Kota Dumai air sungai Kota Dumai sebanyak 4 sample, air laut sebanyak 3 sample dan drainase sample sebanyak 1 sample. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 102.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar 72.499.606,- atau 70.94 %. Artinya alokasi anggaran yang disediakan telah dapat menguji beberapa parameter sample dari hasil pengujian parameter tidak ditemukannya sample yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 seperti pada grafik dibawah ini

Grafik 3.31. Besaran Debit Air



2. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun Anggaran Tahun 2020, dimana total anggaran untuk 13 (tiga belas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan Anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebesar Rp. 15.571.690.649,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.406.130.140,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.196.690.640,- Untuk realisasi belanja realisasi belanja langsung terserap Rp. 15.301.529.992 atau 98,27 %

Adapun Program/Kegiatan dan realiasi anggaran/keuangan Yang dilaksanakan Dinas Lngkungan Hidup pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan kegiatan rutin Dinas Lngkungan Hidup dalam Menujang Tugas dan Fungsinya. Dalam Melaksanakan urusan tersebut Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pada Kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesarRp.163.740.000,- danrealisasi keuangan sebesar Rp. 137.445.420,- atau 83.94%. Dengan indikator keluaran jumlah penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pada Kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.70.313.500,- danrealisasi keuangan sebesar Rp.65.537.050,- atau 93.21%. Dengan indikator keluaran jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas

- c. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Pada Kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14.043.270,- danrealisasi keuangan sebesar Rp. 13.981.000,- atau 99,56%. Dengan indikator keluaran jumlah transaksi keuangan yang terlaksana
- d. Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Pada Kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.38.645.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.538.200,- atau 99,72%. Dengan indikator keluaran jumlah penyedian jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88.067.470,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.88.067.350,- atau 100%. Dengan indikator keluaran jumlah penyedian alat tulis kantor
- f. Penyedian Barang Cetakan dan Pengggandaan
Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.29.669.540,- danrealisasi keuangan sebesar Rp.29.666.600,- atau 100% indikator keluaran jumlah barang cetakan dan pengggandaan
- g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.749.925,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 12.649.000,- atau 99,21% Dengan indikator keluaran jumlah penyedian kebutuhan komponen listrik kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
Pada Kegiatan inialokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.000.000,- danrealisasi keuangan sebesar Rp.15.380.000,- atau 85,44%. Dengan indikator keluaran jumlah penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- i. Penyedian Makanan dan Minuman
Pada Kegiatan iniAlokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 44.120.000,- danrealisasi keuangan sebesar Rp.43.946.000,- atau 98,61%. Dengan indikator keluaran jumlah penyedian makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan.

- j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 333.893.294,- dan realisasi keuangan Rp.333.545.235,- atau 99,90% Dengan indikator keluaran jumlah koordinasi konsultasi keluar daerah.
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 89.271.600,- dan realisasi keuangan Rp.89.174.400,- atau 99,89%. Dengan indikator keluaran jumlah penyediaan jasa keamanan kantor
- m. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 245.443.050,- dan realisasi keuangan Rp.245.170.050,- atau 99,89%. Dengan indikator keluaran jumlah penyediaan jasa administrasi kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan salah satu penunjang Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemeliharaan rutin adapun kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.898.900,- dan realisasi keuangan Rp.19.898.000,- atau 100%. Dengan indikator keluaran jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 219.550.000,- dan realisasi keuangan Rp. 216.856.000,- atau 98,77%. Dengan indikator keluaran jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / operasional
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.399.303.400,- dan realisasi keuangan Rp. 3.398.534.140,- atau 99,98%. Dengan indikator keluaran jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin / berkala

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.220.000,- dan realisasi keuangan Rp. 20.020.000,- atau 73,55% Dengan indikator keluaran jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini merupakan pedoman dan laporan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38.887.250,- dan realisasi keuangan Rp.38.887.250.970,- atau 100%. Dengan indikator keluaran jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 32.485.250,- dan realisasi keuangan Rp.32.485.250,- atau 100%. Dengan indikator keluaran jumlah dokumen laporan keuangan
- c. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 34.883.800,- dan realisasi keuangan Rp. 34.863.800,- atau 99.94%. Dengan indikator keluaran jumlah dokumen laporan penyusunan rencana kinerja PD

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan untuk menanggulangi Sampah, yang mana sampah yang dihasilkan setiap hari selalu bertambah akibat Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat.

Sehingga timbunan sampah menjadi meningkat meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan sampah tersebut ada 3 kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan Pada Kegiatan ini Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.670.248.900,- danrealisasi keuanganRp.5.661.603.200,- atau 99,85%.Pada Kegiatan ini telah mencapai target yang diinginkan. Yaitu layanan titik rawan sampah dapat di akomodir.

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi juga meningkat. Kegiatan ekonomi/pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan menjadi rusak. Hal tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya manusia pula yang akan menanggung biaya pemulihannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.

Kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota bersih, sehat, teduh, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.700.000,- sedangkan realisasi keuanganRp.17.214.006,- atau 97.25%.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen dan perizinan serta pengaduan. Pada tahun 2019 realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 26.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.568.050,- atau 99.32% artinya dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi sudah mencapai

target yaitu adanya verifikasi dan evaluasi pengaduan masyarakat. Yang mana pada tahun 2020 ada 11 pengaduan telah diselesaikan.

c. Pengendalian Pencemaran Air

Kegiatan pengendalian pencemaran air bertujuan sebagai acuan untuk menentukan kelas air di Kota Dumai, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan serta tersedianya data pemantauan kualitas air yang optimal. Pada kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.102.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.499.606,- atau 70.94% dengan target keluaran tercapainya pelayanan pencegahan pencemaran air. Artinya dengan anggaran yang disediakan kegiatan ini dapat mengambil sampel air sumur sebanyak 2 sampel, air sungai sebanyak 4 sampel, air laut sebanyak 3 sampel, air drainase sebanyak 1 sampel, air hujan sebanyak 1 sampel di Kota Dumai. Dengan realisasi 2 sumur di Kecamatan Kota Dumai air sungai Kota Dumai sebanyak 4 sampel, air laut sebanyak 3 sampel dan drainase sampel sebanyak 1 sampel. Dari beberapa parameter sampel pengujian parameter tidak ditemukannya sampel yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kepmen LH No. 179 Tahun 2004 (lampiran 1) tentang baku mutu air laut; Permenkes No. 32 Tahun 2017 lampiran 1 tabel 1-3 air untuk keperluan hygiene sanitasi.

d. Pengembangan laboratorium Lingkungan Hidup

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.800.000 dan realisasi keuangan sebesar 17.636.217, atau 99.08% telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya laboratorium lingkungan hidup.

- e. Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)** Pada kegiatan ini alokasi anggaran keuangan sebesar Rp. 19.750.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.738.950 atau 99,94 % telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan AMDAL/UKL/UPL

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

b Pengembangan data dan informasi lingkungan

kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi terkait dokumen pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Kegiatan ini anggaran Rp. 15.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.15.780.637,- atau 99,88%. Kegiatan ini menghasilkan buku data dan buku laporan yang disebut buku status lingkungan hidup Kota Dumai

9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a. Pengujian polusi udara ambien

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polusi bagi lingkungan udara kota Dumai . pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.960.554,- atau sebesar 84,27%, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sampel di 4 titik lokasi yang ada di kota Dumai hasil pengujian dari beberapa parameter tersebut didapat tingkat polutan di Kota Dumai tidak ada yang melebihi nilai baku mutu.

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pemeliharaan RTH

Pada Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.671.350.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.664.955.500,- atau sebesar 99,76%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai keindahan kota.

b. Pengembangan Taman Rekreasi

Kegiatan ini merupakan upaya dinas lingkungan Hidup dalam melakukan pengembangan ruang Terbuka hijau agar lokasi yang ada di kota Dumai menjadi lebih tertata .Pada Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 263.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 261.595.000,- atau sebesar 100%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu tercapainya penataan taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau.

11. Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan melalui kegiatan

a. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi

Pada Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 265.434.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.261.127.997,- atau sebesar98.38%,- telah mencapai target yang di inginkan

b. Analisa Vegetasi bekas terbakar

Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.131.373.022 atau sebesar Rp. 131.373.022 atau sebesar 99.92 % telah mencapai target yang diinginkan yaitu tersedianya analisa vegetasi bekas terbakar.

- c. Perencanaan Strategis dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dari lahan

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 143.473.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 142.834.934 atau sebesar 99.56 % telah mencapai target yang diinginkan yaitu tersedianya pencegahan kebakaran hutan dan lahan

- d. Pengembangan sarana prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 143.473.000 dan realisasi keuangan sebesar 99.56 % dengan target tersedianya buku pencegahan kebakaran hutan dan lahan

12. Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui kegiatan

- a. Pengelolaan barang milik perangkat daerah

Pada Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.587.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.587.750,- atau sebesar 100%,- telah mencapai target yang diinginkan yaitu jumlah pengelolaan inventaris barang milik daerah

13. Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan

- a. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pada Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 303.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 302.902.766,- atau sebesar 97,70%,- telah mencapai target yang diinginkan yaitu tersedianya jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana.

C. Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja dan prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dicapai sejak tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

- Penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional SMPN 1 Dumai.
- Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai , MAN Dumai.
- Meraih predikat adiwiyata tingkat kota tahun 2016 yaitu, MAN Dumai, SMP PGRI Dumai, SDN 019 Bumi Ayu Dumai, SDN 009 Tanjung Palas Dumai, dan SMP Lancang Kuning Dumai
- Meraih predikat adiwiyata tingkat kota tahun 2018 yaitu, SMPN 11 Bukit Kayu Kapur, SMP YKPP, SD 07 Tanjung Penyembal.

D. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya anggaran dan tenaga aparatur dalam bidang pengawasan lingkungan hidup. Kegiatan Pengawasan bidang lingkungan hidup sangat diperlukan apalagi dengan semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industri baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut.
- b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.
Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang kompleks, sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai kepentingan ekonomi,, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu masih adanya keterbatasan pengetahuan teknis dalam pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan/ usaha.

c. Kapasitas kelembagaan

Kompleksnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Dumai serta kewajiban melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengharuskan Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan instansi lain dengan kapasitas kelembagaan yang lebih besar.

2. Solusi

Adapun upaya / solusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan Lingkungan hidup adalah :

- a. menekankan upaya preventif pengelolaan lingkungan hidup yang tetap sasaran dalam menanggulangi terhadap pencemaran/perusakan lingkungan hidup, hal ini diperlukan peran serta masyarakat dan berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang dinamis
- b. Penambahan Anggaran terhadap program dan kegiatan yang dapat menunjang TUPOKSI Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai visi dan misi Walikota serta Dapat mencapai terlaksananya Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup terhadap perannya dalam mengelola lingkungan Hidup.
- c. Adanya pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
- f. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Lampiran 3.B.3. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup		<p>Program pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik</p> <p>Hasil : Pelayanan terhadap masyarakat makin meningkat</p>	12 bln 12 bln	12 bln 12 bln			
				<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>Keluaran : Belanja jasa KIR dan STNK</p> <p>Hasil : Kendaraan yang mempunyai KIR dan STNK</p>	76 Unit 76 Unit	76 Unit 76 Unit			
				<p>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>Keluaran : Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun</p> <p>Hasil : Tercapainya prosentase transaksi keuangan</p>	12 bln 80%	12 bln 80%			
				<p>Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>Keluaran alat-alat kebersihan kantor</p> <p>: Pembayaran honor petugas kebersihan kantor dan tersediaan alat-alat kantor</p>	12 bln	12 bln			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Hasil : Meningkatnya kebersihan kantor	100%	100%			
				Penyediaan alat tulis kantor Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan Alat tulis kantor : Terlaksananya aktivitas kantor dan pelayanan terhadap masyarakat Hasil	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan yang terpenuhi Hasil : terwujudnya komponen listrik 1 tahun	12 bln 90%	12 bln 90%			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Keluaran : Tersedianya informasi bahan bacaan Hasil : Terwujudnya informasi bahan bacaan/surat kabar harian	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Penyediaan makanan dan minuman					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian,tamu dan rapat Hasil : Makanan dan minuman harian,tamu dan rapat	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Tercapainya prasantase pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80% 80%	80% 80%			
				Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Keluaran : Pembayaran honor tenaga keamanan kantor Hasil : Keamanan kantor	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Penyediaan jasa Pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga teknis dinas lingkungan hidup dan unit-unit kerja Hasil : Jumlah tenaga honor dan tenaga teknis	12 bln 15 org	12 bln 15 org			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Pengadaan Perlengkapan	70%	70%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Gedung Kantor Hasil : Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai	70%	70%			
				Pengadaan peralatan gedung kantor Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	70% 100%	70% 100%			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala Hasil : Tersedianya BBM, Pelumas dan service pendukung operator kantor	12 bln 100%	12 bln 100%			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Hasil : Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana kinerja aparatur	80% 100%	80% 100%			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Keluaran : laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD yang disusun Hasil : Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan	12 bulan 80%	12 bulan 80%			
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Keluaran : Terpenuhinya laporan akuntabilitas dan keuangan akhir tahun Hasil : Terwujudnya laporan akuntabilitas keuangan akhir tahun	12 bulan 100%	12 bulan 100%			
				Penyusunan rencana kinerja SKPD Keluaran : Prosentase jumlah kegiatan yang tersusun Hasil : Penyusunan rencana kerja SKPD	12 bulan 100%	12 bulan 100%			
				Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Keluaran : Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat Hasil : Terwujudnya pelayanan persampahan dan meningkatkan kebersihan kota	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan			
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi penilaian Kota sehat/adipura Keluaran : Penilaian kota sehat adipura Hasil : Terwujudnya kota dumai yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan	75% 75%	75% 75%			
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluaran : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil : Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	50% 4 laporan	50% 4 laporan			
				Pengendalian pencemaran air Keluaran : Meningkatnya pelayanan pencegahan pencemaran air Hasil : terwujudnya penfendalian pencemaran air	70% 85%	70% 85%			
				Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup Keluaran : Persentase peralatan/perlengkapan laboratorium lingkungan hidup yang tersedia Hasil : Tersedianya Peralatan laboratorium	85% 85%	99.08 % 99.08 %			
				Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL) Keluaran : Jumlah pengawasan dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL) di Kota Dumai Hasil : Tersedinaya dokumen Amdal : UKL/UPL	1 Dokumen	99,94%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<p>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>Pengembangan data dan informasi lingkungan</p> <p>Keluaran : Adanya jumlah dokumen kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja</p> <p>Hasil : Terciptanya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>2 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p>	<p>2 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p>			
				<p>Program Peningkatan pengendalian polusi</p> <p>Pengujian polusi udara ambien</p> <p>Keluaran : Adanya status mutu udara ambien kota dumai</p> <p>Hasil : Terciptanya pengujian polusi udara ambien</p>	<p>70%</p> <p>1 Tahun</p>	<p>70%</p> <p>1 Tahun</p>			
				<p>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Pemeliharaan RTH</p> <p>Keluaran : Adanya taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara</p> <p>Hasil : Terwujudnya taman kota dan jalur hijau dalam kota</p>	<p>80%</p> <p>12 bulan</p>	<p>80%</p> <p>12 bulan</p>			
				<p>Pengembangan taman rekreasi</p>					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Keluaran : Persentase terbangunnya taman \- taman di dalam kota dan tertatanya pedestraian di taman bukit gelanggang : Terwujudnya taman kota terpelihara Hasil	80% 80%	80% 80%			
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Keluaran : Tersedianya papan informasi pencegah kebakaran hutan dan lahan : Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan Hasil	23 unit	23 unit			
				Analisa Vegetasi Bekas Terbakar Keluaran : Dokumen analisa Vegetasi dan penilaian dampak lahan terbakar hasil : tersedianya dokumen analisa vegetasi	1 Dok	1 Dok			
				Perencanaan Strategi dan Ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan keluaran : dokumen/ peta identifikasi dan pemetaan sumber air lahan rawan terbakar	1 Dok	1 Dok			
				Pengembangan Sarana Prasarana Penbcegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Keluaran : Buku Pencegahan kebakaran hutan dan lahan Hasil : tersedianya Buku Pencegahan Kebakaran hutan	250 buku 250 buku	250 buku 250 buku			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<p>PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN</p> <p>Penanaman Di kawasan Bergambut Keluaran : penanaman Pohon di Kawasan Bergambut di Hasil : Terciptanya Kawasan Pohon di Lahan Bergambut</p>	<p>4 kec</p> <p>4 kec</p>	<p>4 kec</p> <p>4 kec</p>			
				<p>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Keluaran : Adanya dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam yang terlaksana : Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>Hasil</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>			
				<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pengelolaan barang milik daerah Keluaran : Adanya pengelolaan inventaris barang milik daerah selama satu tahun : terpenuhinya pengelolaan inventaris barang milik daerah</p> <p>Hasil</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

B.4. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Melalui pencapaian indicator kinerja sasaran seperti yang tersaji pada Tabel 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian indicator kinerja tujuan pada misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 “Indeks kepuasan masyarakat”.

**Tabe 3.25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Nilai indeks kepuasan pelayanan administrasi	nilai	80	83,41	104%
Persentase ketercukupan sarana dan prasarana	%	85	0	0%
Cakupan penduduk	%	85	99	117%
Cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	96	100	104%
Cakupan penduduk	%	97	90	93%
Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki	%	45	35	77%
Persentase Akta Perkawinanyan	%	100	100	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Pada tahun 2020 secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indicator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai indeks pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, maka indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur penting yang menggambarkan baik atau kurang baiknya pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. IKM terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2020 diukur melalui

survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap 2.332 responden (masyarakat yang dilayani).

Indeks kepuasan masyarakat ini diukur untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan public secara berkala sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ke depan. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Unsur-unsur yang dinilai sebagai variabel penyusun indeks kepuasan masyarakat diantaranya:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Prosedur pelayanan;
3. Kecepatan pelayanan;
4. Kewajaran biaya pelayanan;
5. Kesesuaian produk pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan;
9. Penanganan pengaduan pelayanan;
10. Tanggungjawab petugas pelayanan;
11. Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan;
12. Kedisiplinan petugas pelayanan;
13. Keadilan mendapatkan pelayanan;
14. Kenyamanan lingkungan;
15. Keamanan lingkungan; dan
16. Kemudahan mendapatkan informasi.

Nilai persepsi, nilai IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Nilai Persepsi, Nilai IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, Dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai IKM	Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
a	1	≤ 25	D	Tidakbaik
b	2	26- 50	C	Kurangbaik
c	3	51- 75	B	Baik
d	4	76- 100	A	Sangatbaik

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap ke-enam belas unsur pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada 4 (empat) loket pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka nilai indeks pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2020 adalah sebesar 83,41. Artinya kinerja unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2020 berada dalam predikat “A” SANGAT BAIK. Nilai ini melebihi target nilai indeks pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 yang tertuang pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 80, dengan tingkat capaian 104%.

- b. Persentase ketercukupan sarana dan prasarana penunjang layanan Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi belanja peralatan dan perlengkapan penunjang layanan}}{\text{Total kebutuhan peralatan dan perlengkapan penunjang layanan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase ketercukupan sarana dan prasarana penunjang layanan” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 85%. Pada tahun 2020, realisasi belanja peralatan dan perlengkapan penunjang layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebesar Rp.0,- dari total rencana pada tahun 2020 didokumen Renstra sebesar Rp.544.387.379,-.

Berdasarkan kedua data tersebut, maka persentase ketercukupan sarana dan prasarana penunjang layanan tahun 2020 adalah sebesar 0%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 tidak memenuhi target yang direncanakan.

c. Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KT – el yang memiliki KTP – el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP – el}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el adalah sebanyak 223.181 jiwa dari total jumlah penduduk 17 tahun keatas (penduduk wajib KTP-el) yang wajib melakukan perekaman KTP-el sebanyak 224.540 jiwa. Berdasarkan kedua data tersebut, maka cakupan penduduk yang memiliki KTP-el tahun 2020 adalah sebesar 99%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 117%.

d. Cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 96%. Pada tahun 2020, jumlah rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga(KK) adalah sebanyak 94.461, dan terdapat 94.461 kepala keluarga. Berdasarkan kedua data tersebut, maka cakupan rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) tahun 2020 adalah sebesar 100%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 104%.

- e. Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 97%.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah sebanyak 102.235 jiwa, dan jumlah penduduk usia 0-18 tahun di Kota Dumai adalah sebanyak 113.688 jiwa. Berdasarkan kedua data tersebut, maka cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran tahun 2020 adalah sebesar 90%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 93%.

- f. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk 0 – 18 tahun yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk 0 – 18 tahun}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 45%. Pada tahun 2020, jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki KIA adalah sebanyak 39.281 orang, dan jumlah anak usia 0-18 tahun di Kota Dumai adalah sebanyak 113.688 jiwa. Berdasarkan kedua data tersebut, maka cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA tahun 2020 adalah sebesar 35%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 77%.

- g. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah usulan pembuatan akte perkawinan}}{\text{Jumlah akte perkawinan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase akta perkawinan yang diterbitkan” tahun 2020 pada Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020, jumlah usulan pembuat anakteperkawinan yang diajukan oleh pemohon adalah sebanyak 3.390 berkas, dan jumlah akte perkawinan yang diterbitkan adalah sebanyak 3.390. Berdasarkan kedua data tersebut, maka persentase akta perkawinan yang diterbitkan tahun 2020 adalah sebesar 100%, artinya realisasi indikator ini ditahun 2020 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100%.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai adalah sebesar Rp.7.274.730.760,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.132.794.380,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.3.141.936.380,-. Pada belanja langsung, dana untuk melaksanakan program/kegiatan pada tahun anggaran 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari APBD sebesar Rp.1.948.958.380,- (62%) dan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp.1.192.978.000,- (38%).

Realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp.3.827.711.489,- atau terserap 92,6% dan belanja langsung terserap Rp.3.099.636.320,- atau 98,7%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp.1.220.993.880,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.216.778.478,- (99,65%). Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.494.000,- (99,87%) dengan indicator kinerja keluaran jumlah penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (duabelas)

bulan (100%).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.179.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 176.812.098,- (98,29%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.153.204.000,- dengan realisasi sebesar Rp.153.204.000,-(100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

d. Penyediaan Alat Tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.139.460.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.610.000,- (99,39%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan alat tulis kantor dengantarget 8 (delapan) bulan dan terealisasi 8 (delapan) bulan (100%).

e. PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.93.425.000,- realisasi Rp.93.405.000,- (99,98%) dengan indikator kinerja jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.34.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp.34.153.000,- (99,88%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target 6 (enam) bulan dan terealisasi 6 (enam) bulan

- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.525.000,- (97,43%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 5 (lima) bulan dan terealisasi 5 (lima) bulan (100%).
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.23.292.000,- dengan realisasi sebesar Rp.23.292.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan dengan target 11 (sebelas) bulan dan terealisasi 11 (sebelas) bulan (100%).
- i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 215.887.380,- dengan realisasi sebesar Rp. 215.883.380,- (99,99%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target 8 (delapan) bulan dan terealisasi 8 (delapan) bulan (100%).
- j. Penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.122.400.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan jasa keamanan kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (duabelas) bulan (100%).
- k. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 246.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.246.000.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran dengan target 12 (duabelas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp. 362.695.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.353.451.000,- (97,45%). Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.98.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.98.000.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sebanyak 1 (satu) unit dan terealisasi 1 (satu) unit (100%).
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.172.656.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.461.000,- (94,28%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala sebanyak 4 (empat) kendaraan dan terealisasi 5 (lima) kendaraan (125%).
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 104.040.100,- dengan realisasi sebesar Rp.103.900.000,- (99,95%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (duabelas) bulan (100%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp.39.319.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39.319.000,- (100%). Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.33.883.300,- dengan realisasi sebesar Rp.33.883.300,-(100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja PD sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 3 (tiga) dokumen (100%).
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

2.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.220.000,-.(100%) dengan indicator kinerja keluaran jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%).

c. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.216.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen (100%).

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp.1.392.891.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.364.051.542,- (97,93%). Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.28.483.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.258.700,- (99,21%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah laporan informasi data kependudukan sebanyak 2 (dua) laporan dan terealisasi 2 (dua) laporan (100%).

b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.530.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 83% dan terealisasi 92,32% (111,23%).

c. Pengembangan data base kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.600.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 99,50% dengan indikator kinerja keluaran *updating database* kependudukan dengan target 12

(duabelas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

- d. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.22.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.800.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 34,21% dengan indicator kinerja keluaran jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan (100%).
- e. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.22.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.800.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 34,21% dengan indicator kinerja keluaran jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan (100%).
- f. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.000.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran jumlah kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang disosialisasikan sebanyak 1 (satu) kebijakan dan terealisasi 1 (satu) kebijakan (100%).
- g. Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.312.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.306.600.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 98,27% dengan indicator kinerja keluaran Persentase kepengurusan dokumen kependudukan yang dilayani sebesar 100% dan terealisasi 100% (100%).
- h. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.651.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp.644.652.500,-. Tingkat

pencapaian terealisasi sebesar 98,92% dengan indicator kinerja keluaran Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 12% dan terealisasi 12,32% (103%).

i. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.650.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 65% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah system yang dikelola untuk pemanfaatan data kependudukan sebanyak 1 (satu) system dan terealisasi 1 (satu) system (100%).

j. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.204.273.000,- dengan realisasi sebesar Rp.203.960.342,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 99,85% dengan indicator kinerja keluaran Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan adm induk sebanyak 11 (sebelas) kali dan 15 (lima belas) kali (136,36%).

5. Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp. 113.036.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.113.036.000,- (100%).

Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Pendataan akta kelahiran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.71.246.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.246.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 97% dan terealisasi 90% (93%), dan persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 45% dan terealisasi 35% (77%).

b. Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.41.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.790.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja

keluaran jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%).

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Padatahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp.13.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.13.000.000,- (100%).

Realisasi masing-masing kegiatan pada program ini sebagai berikut:

a. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.13.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.000.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik sebesar 87% dan terealisasi 90% (103,45%).

PENGHARGAAN TAHUN 2020

Prestasi yang diraih oleh Dinas Dukcapil Kota Dumai Tahun 2020 diantaranya:

No.	Nama Penghargaan	Asal Penghargaan	Tahun Perolehan
1.	Sertifikat dari Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IKMD) Pekanbaru kepada Disdukcapil Kota Dumai sebagai Sponsorship IMKD Cup dengan Tema "Junjung Tinggi Sportifitas dan Kreatifitas Dalam Berkompetensi Dimasa Pandemi". 	Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IKMD) Pekanbaru	2020

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TAHUN 2020

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang masih rendah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam penyelesaian masalah;
3. Belum optimalnya kerjasama dan pemanfaatan data;
4. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
5. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal;
6. Kurangnya kapasitas SDM serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan secara daring;
7. Sarana dan prasarana penunjang layanan adm induk yang tidak layak pakai.

Lampiran 3.B.4. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100 %	100%	-	-	
Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	-	-		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	-	-		
Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-		
Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah penyediaan alat tulis kantor	8 bulan	8 bulan	-	-		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	-	-		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 bulan	6 bulan	-	-		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 bulan	5 bulan	-	-	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	11 bulan	11 bulan	-	-	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 bulan	8 bulan	-	-	
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	-	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1 unit	1 unit	-	-	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	4 kendaraan	5 kendaraan	-	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan secara rutin/berkala terhadap peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	6 dokumen	6 dokumen	-	-	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja PD	3 dokumen	3 dokumen	-	-	
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	-	-	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	83%	83%	-	-	
					Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	83%	83%	-	-	
				Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi data kependudukan	2 laporan	2 laporan	-	-	
				Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil	83%	92%	-	-	
				Pengembangan data base kependudukan	Updating data base kependudukan	12 bulan	12 bulan	-	-	
				Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat	1 laporan	1 laporan	-	-	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)	Jumlah kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang disosialisasikan	1 kebijakan	1 kebijakan	-	-	
				Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase kepengurusan dokumen kependudukan yang dilayani	100 %	100%	-	-	
				Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	12%	12%	-	-	
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah sistem yang dikelola untuk pemanfaatan data kependudukan	1 sistem	1 sistem	-	-	
				Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	11 kali	15 kali	-	-	
				Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pendataan administrasi kependudukan	100 %	100%	-	-	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase pendataan administrasi pencatatan sipil	71%	64%	1. Keterbatasan anggaran 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan	1. Penambahan anggaran 2. Peningkatan pelayanan melalui kerjasama dengan organisasi/ lembaga pendidikan dan kesehatan	
				Pendataan akta kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	97%	93%	Adanya pemahaman masyarakat bahwa kepemilikan akte kelahiran mulai diperlukan ketika anak akan memasuki sekolah	Peningkatan pelayanan melalui kerjasama dengan organisasi/ lembaga pendidikan dan kesehatan	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	45%	35%	Terbatasnya penyedia ribbon dan film untuk pencetakan KIA, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KIA	Penambahan anggaran	
				Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	87%	87%	-	-	
				Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	87%	90%	-	-	

**B.5. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,
Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian dalam (%)
1.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,070 %	1,70	121,76%
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>)	63,2 %	75,50%	119,46%
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)(%)	18,6 %	13,20%	140,91%
4.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	25 Institusi	35 Institusi	140,00%

Sumber Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

1. Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Target dari Indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 2,070% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 1,70% atau dengan capaian 121,76%. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 1,70% (melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020). Keberhasilan ini didukung oleh program antara lain :

a. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan

Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan antara lain

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru Pembina, dan lingkungan sekitar sekolah dalam melakukan penerapan pendidikan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga
- b. Memberikan wawasan, sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang Program KKBPK kepada peserta didik.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Pendidikan kependudukan dapat terintegrasi kedalam mata pelajaran dan kurikulum.
 - b. Guru Pembina dan peserta didik matang dalam mengolah data kependudukan.
 - c. Guru Pembina dan peserta didik memahami konsep kependudukan, dan pembekalan siswa menghadapi bonus demografi.
2. Kegiatan Advokasi KIE Program KKBPK Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Terbinanya program KKBPK dengan target kinerja 7 Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan atau sebesar 100%. Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai ajang untuk, meningkatkan silaturahmi, kekompakan antar peserta Kampung KB dan saling tukar menukar pengalaman dalam pengelolaan Kampung KB di setiap Kecamatan.
 3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya lini lapangan yang kompeten dengan target kinerja 7 Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan atau sebesar 100%. Sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 02/DPP&KB/2020 tentang Penempatan Wilayah Tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun anggaran 2020, bahwa untuk kepentingan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk wilayah tugas Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan KB dalam capaian cakupan KB dilapangan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

lainnya perlu mengangkat kembali tenaga honorer di Dinas PP&KB. Adapun jumlah petugas Lini lapangan Non PNS di Kota Dumai berjumlah 11 orang dan jasanya dibayarkan selama 12 bulan.

4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya lini lapangan yang kompeten dengan target kinerja 12 Bulan dan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%. Kegiatan Operasional kelompok masyarakat peduli KB antara lain:

- a. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader

Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunandata oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

- b. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader

Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

5. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan kampung KB.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya lini lapangan yang kompeten dengan target kinerja 12 Bulan dan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%. Adapun Kegiatan Fasilitasi pengelolaan kampung KB terhadap Integrasi program BANGGAKENCANA :

A. Pertemuan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembekalan dan kesepakatan bersama tentang fungsi dan peran pokja dalam pengembangan dan penggerakan Kampung KB, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas menuju masyarakat Dumai makmur dan madani.

B. Lokakarya Mini Program Banggakencana Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB.

Tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kemitraan dalam melaksanakan Program KKBPK terhadap Lintas Program terkait

C. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB

Secara umum tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membahas rencana teknis untuk membangun kesepakatan dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB yang dihadiri PD-KB, BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat, Penyuluh KB, dan Kader kelompok kegiatan.

D. Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB

Tujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga, masyarakat dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita dan remaja.
- b. Meningkatkan kualitas kelompok BKB, BKR, BKL.
- c. Peningkatan kemampuan petugas kader dan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL.

- d. Memberikan acuan pembentukan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS.
- b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan Kegiatan Fasilitasi pembina balai penyuluhan KB. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan dengan target kinerja 7 Balai dan terealisasi sebanyak 7 Balai atau sebesar 100%. Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta ganti cara ke Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum. Kegiatan ini dilakukan di 7 Balai Penyuluhan yang terletak di Kecamatan Se Kota Dumai.
- c. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan dengan target kinerja 5 Kelompok dan terealisasi sebanyak 5 kelompok atau sebesar 100%. Kegiatan ini antara lain :
 1. Sosialisasi stunting BKB Tingkat Kecamatan
Pada Sosialisasi Stunting BKB tingkat Kecamatan di laksanakan di 7 Kecamatan Kota Dumai dengan jumlah peserta yg mengikuti 40 orang yang terdiri dari Kader BKB, PKB dan PLKB.
 2. Sosialisasi stunting BKR Tingkat Kecamatan
Pada Sosialisasi stunting BKR Tingkat Kecamatan di laksanakan di 7 Kecamatan Kota Dumai dengan jumlah peserta yg mengikuti 40 orang yang terdiri dari Kader BKR, PKB dan PLKB.

3. Sosialisasi Stunting Tingkat Kota

Untuk Sosialisasi Stunting Tingkat Kota dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27-28 Februari 2020 di Hotel Grand Zuri Jalan Sudirman Kota Dumai, dengan jumlah peserta yang hadir berjumlah 80 orang yang terdiri dari Camat, Kader BKB, Kader BKR, PLKB dan PKB.

2. Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*)

Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 63,2% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 75,50% atau 119,46%.

Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 75,41% dengan kata lain realisasi capaian Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kinerja baik dari Dinas PPKB pada tahun 2020. Keberhasilan ini didukung oleh Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan antara lain

1. Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskes dengan target kinerja 12 Bulan dan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelayanan konseling KB. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Subur dengan target kinerja 75 % dan terealisasi sebanyak 70% Bulan atau sebesar 93,33%.
3. Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB dengan target kinerja 4 Moment dan terealisasi sebanyak 2 Moment atau sebesar 50,00%. Kegiatan ini tidak berhasil dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 di awal bulan Maret sehingga mengakibatkan sebagian kegiatan yang sudah di rencanakan terpaksa dibatalkan.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)(%)

Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 18,6% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 13,20% atau 140,91%.

Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 13,27% dengan kata lain realisasi capaian Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kinerja baik dari Dinas PPKB pada tahun 2020. Keberhasilan ini didukung oleh Program Keluarga Berencana dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan keluarga berencana. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Terbinanya kelompok kegiatan dengan target kinerja 7 Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan atau sebesar 100%. Adapun sasaran kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana adalah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga/Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dan Lintas Sektor terkait.
2. Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target kinerja 89 Unit dan terealisasi sebanyak 89 Unit atau sebesar 100,00%.
3. Kegiatan Dukungan media KIE dan manajemen BOKB. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 Bulan dan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100,00%. Dukungan manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, ATK, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
4. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan. Target dari Indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yaitu 25 Institusi dan

capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 35 Institusi atau 140,00%.

Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 35 institusi dengan kata lain realisasi capaian Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kinerja baik dari Dinas PPKB pada tahun 2020. Keberhasilan ini didukung oleh Program Keluarga Berencana dengan kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 788.188.057,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 731.152.052,- atau sebesar 92,76% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 270.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 270.000,- Atau 100% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya benda-benda dalam kegiatan surat menyurat dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 132.080.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.928.941,- Atau 80,96% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

- c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 137.617.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 114.217.500,- Atau 83,00%adapun Indikator kinerja keluaran adalahTerpenuhinya jasa tenaga supir dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.900.925,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.566.000,- Atau 99,18%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 64.452.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 63.600.500,- Atau 98,68%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 59.895.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.874.000,- Atau 98,29%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

- g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.283.450,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.254.000,- Atau 42,66%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- h. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.717.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.920.400,- Atau 58,36%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.313.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.160.000,- Atau 98,65%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Makan Dan Minum Rapat dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- j. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 208.458.382,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 208.160.711,- Atau 99,86%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya fasilitas pendukung perjalanan dinas bagi aparatur dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

k. Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor (2 org) dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.800.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.800.000,- Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 28.100.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- atau sebesar 100% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.600.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- Atau 12,50%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.300.000,- Atau 50,27%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya peralatan kerja

yang berfungsi dengan baik dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 27.061.041,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.060.500,- atau sebesar 99,998% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.493.941,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.493.600,- Atau 99,999%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunya dokumen LKj, LKPJ, LPPD dan RENSTRA dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 4 Dokumen atau 100%.

- b. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.960.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.959.800,- Atau 99,990%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunnya rencana kerja anggaran murni dan perubahan dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 2 Dokumen atau 100%.

- c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.607.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.607.100,- Atau 100%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 1 Dokumen atau 100%.

4. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 6.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- Atau 0%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terselenggaranya perayaan hari - hari besar keagamaan dengan target 3Kegiatan atau capaian realisasi 0 Kegiatan atau 0%.

5. Program Keluarga Berencana
Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 1.287.693.627,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.272.411.603,- atau sebesar 98,81% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.838.627,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.778.000,- Atau 99,77%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terbinanya kelompok kegiatan dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 7 Kecamatan atau 100%.
 - b. Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.123.545.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.108.885.000,- Atau 98,70%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target 89 Unit atau capaian realisasi 89 Unitatau 98,70%.

c. Kegiatan Dukungan media KIE dan manajemen BOKB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 138.310.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 137.748.603,- Atau 99,59%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksankandengan target 12Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 73.697.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.627.200,- atau sebesar 99,91% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 73.697.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.627.200,- Atau 99,91%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai dengan target 20 Kelompok atau capaian realisasi 20 Kelompok atau 100%.

7. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 165.580.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.998.457,- atau sebesar 88,78% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 95.298.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 80.684.118,- Atau 84,66%adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskesdengan target 12Bulan atau

capaian realisasi 12 Bulan atau 100%

b. Kegiatan Pelayanan konseling KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 31.582.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 29.021.125,- Atau 91,89%adapun Indikator kinerja keluaran adalahTerselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Suburdengan target 75% atau capaian realisasi 70% atau 93,33%

c. Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 38.700.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.293.214,- Atau 96,36%adapun Indikator kinerja keluaran adalahTerselenggaranya kegiatan Pelayanan KBdengan target 4 Moment atau capaian realisasi 2 Moment atau 50%.

8. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 537.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 518.768.873,- atau sebesar 96,57% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi pembinan balai penyuluhan KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 537.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.518.768.873,- Atau 96,57%adapun Indikator kinerja keluaran adalahTersedianya operasional dalam kegiatan balai penyuluhan dengan target 7 Balai atau capaian realisasi 7 Balai atau 100%.

9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 253.138.755,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.586.736,- atau sebesar 99,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 253.138.755,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.586.736,- Atau 99,39% adapun Indikator kinerja keluaran adalah Pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina dengan target 5 Kelompok atau capaian realisasi 5 Kelompok atau 100%.

10. Program Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 1.259.061.520,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.251.888.060,- atau sebesar 99,43% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 51.304.800,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.304.700,- Atau 100,00% adapun Indikator kinerja keluaran Terbinanya institusi masyarakat yang mendapatkan pendidikan kependudukan dengan target 5 Institusi atau capaian realisasi 5 Institusi atau 100%

- b. Kegiatan Advokasi KIE Program KKBPK

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 231.374.720,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 231.124.235,- Atau 99,89% adapun Indikator kinerja keluaran Terbinanya program KKBPK dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 7 Kecamatan atau 100%

- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 211.312.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 211.289.125,- Atau 99,99% adapun Indikator kinerja keluaran Tersedianya lini lapangan yang kompeten dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 7

Kecamatan atau 100%

d. Kegiatan Operasional kelompok masyarakat peduli KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 198.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- Atau 100,00% adapun Indikator kinerja keluaran Tersedianya operasional bagi petugas PPKBD dan Sub PPKBD dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%

e. Kegiatan Fasilitas pengelolaan kampung KB

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 567.070.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 560.170.000,- Atau 98,78% adapun Indikator kinerja keluaran Terlaksananya pertemuan dan kordinasi pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%

PENGHARGAAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS Terbaik Pertama Tingkat Provinsi Riau Tahun 2020
2. Apresiasi Pengelolaan Program Bangga Kencana Harapan Kedua dalam rangka hari Keluarga Nasional ke- 27 Tahun 2020



Lampiran 3.B.5. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana					
				Pembinaan keluarga berencana	7 Kecamatan	Kecamatan	-	-	
				Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	89 unit	89 unit			
				Dukungan media KIE dan manajemen BOKB	12 bulan	12 bulan	-	-	
				Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					
				Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	20 kelompok	20 kelompok			
				Program Pelayanan Kontrasepsi					
				Pengadaan alat kontrasepsi	12 Bulan	12 Bulan			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelayanan konseling KB	75%	70%	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid-19		
				Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	4 moment	2 moment	Keterbatasan pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid-19		
				Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					
				Fasilitasi pembina balai penyuluhan KB	7 balai	7 balai			
				Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	5 kelompok	5 kelompok			
				Program Pengendalian Penduduk					
				Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan	5 institusi	5 institusi			
				Advokasi KIE Program KKBPK	7 kecamatan	7 kecamatan			
				Peningkatan Kualitas Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK	7 kecamatan	7 kecamatan			
				Operasional kelompok masyarakat peduli KB	12 bulan	12 bulan			
				Fasilitasi pengelolaan kampung KB	12 bulan	12 bulan			

B.6. Urusan Wajib Dinas Perhubungan, Oleh Dinas Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan dan Revisi RPJMD Kota Dumai Tahun 2017-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2020

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	10,380	2.794	26,92
2	Persentase layanan angkutan darat	%	0.68	0.0068	1,00
3	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Unit	7	4	57,14
4	Rasio izin trayek	Rasio	1 : 39.488	1 : 20.142	70.70
5	Pemasangan rambu-rambu	%	46	78	169,88

Sumber Data Dinas Perhubungan, 2020

Secara umum, Dinas Perhubungan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2017-2021 yang telah diwujudkan dalam Tahun 2020 melalui pelaksanaan 5 (Lima) Indikator Sasaran.

Meskipun demikian, masih terdapat indikator kinerja sasaran belum tercapai sepenuhnya dan perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan Capaian Kinerja belum dapat berhasil dilaksanakan 100 %.

Adapun Capaian Indikator Sasaran tersebut yaitu :

1. Jumlah Uji KIR Angkutan umum di dalam indikator ini ditargetkan 10.380 namun dalam pelaksanaan terealisasi 2.794 atau sebesar 26,92%, dikarenakan terhitung bulan Juni Tahun 2020 UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat melaksanakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR), berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tanggal 04 Juni 2020 Nomor AJ/0052/1/DJPD/2020 Perihal Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengumuman Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai Nomor 551.23/DISHUB-PKB/60/2020 Tanggal 11 Juni 2020 tentang penutupan sementara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Dumai, maka capaian indikator ini tidak dapat terealisasi dengan maksimal.
2. Persentase Layanan Angkutan Darat di dalam indikator ini ditargetkan 0.68 % namun dalam realisasinya hanya 0.0068 %. Belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan Angkutan Perkotaan dan belum adanya modernisasi angkutan kota sehingga indikator tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Teminal Bis di dalam indikator ini ditargetkan 7 terminal namun dalam realisasinya baru 4 Terminal yang diantaranya Terminal Penumpang, Bandar Udara Pinang Kampai, Pelabuhan Penumpang, Terminal Penumpang/Penyeberangan Ro-Ro, belum tercapainya Indikator Kinerja tersebut disebabkan Besarnya data yang diolah sehingga merealisasikannya butuh dana dan waktu, dan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan untuk pengelolaan Terminal Barang tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Rasio izin trayek di dalam indikator ini ditargetkan 1 : 39.488 dalam realisasinya belum dapat terlaksana 100% dikarenakan menurunnya jumlah angkutan perkotaan dan angkutan umum di Kota Dumai dari tahun ke tahun serta bertambahnya angkutan berbasis online yang semakin berkembang.

5. Pemasangan Rambu-rambu capaian indikator ini adalah 78%, atau 169,88% melebihi target sebesar 46 %.Indikator tersebut tercapai atas usulan dari masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum teralisasi sehingga dilaksanakan pada tahun 2020..

A. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Perhubungan Kota Dumai telah merencanakan untuk melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan dengan anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 22.210.755.492,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.477.673.598,00.

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2020, belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp. 7.918.285.992,00 atau mencapai 81.05 %. Untuk belanja langsung yang telah terealisasi sebesar Rp. 21.762.852.339,66 atau mencapai 97,98% dengan uraian sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan kegiatan rutin Dinas Perhubungan dalam Menujang Tugas dan Fungsinya. Dalam Melaksanakan urusan tersebut Dinas Perhubungan melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 667.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 620.530.792,- atau 93,03%.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 793.528.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 792.128.100,00 atau 99,82%.

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 39.400.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.372.500,00 atau 99,93%.

- e. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 95.075.895,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 95.009.395,00 atau 99,93%.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 160.176.765,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 125.753.562,00 atau 78,51%.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 25.466.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.430.000,00 atau 99,86%.
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 260.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 254.300.000,00 atau 97,81%.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.643.672,00 atau 72,03%.
- j. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 16.575.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.540.000,00 atau 99,79%.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 599.060.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 592.344.834,00 atau 99,54%.

1. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.229.500.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 1.227.800.000,00 atau 99,86%.

m. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 385.600.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 385.600.000,- atau 100%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini merupakan penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan capaian program ini adalah presentase tersedianya sarana & prasarana aparatur, adapun kegiatan dari program ini adalah :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 655.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 654.720.000,00 atau 99,96%.

b. Pengadaan mebeleur

Kegiatan Pengadaan Mebeleur, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 58.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 58.000.000,00 atau 100%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 731.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 729.037.500,00 atau 99,73%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 347.124.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 327.688.526,00 atau 94,40%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.416.407,00 dan realisasi keuangan Rp. 1.133.412.800,00 atau 99,63%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur
Program ini disediakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur yang ada di Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu melalui kegiatan berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 83.230.100,00 dan realisasi keuangan Rp. 83.000.000,00 atau 99,72%.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program ini disediakan untuk membuat pedoman dan laporan kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adapun kegiatannya sebagai berikut.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.700.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 5.696.000,00 atau 99,93%.
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.800.000.- dan realisasi keuangan Rp. 0,00 atau 0%. Realisasi keuangan pada kegiatan ini tidak teralisasi disebabkan kurangnya besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.800.000.- dan realisasi keuangan Rp. 0,00 atau 0%. Realisasi keuangan pada kegiatan ini tidak teralisasi disebabkan kurangnya besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

5. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.11.446.785.175,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.241.310.658,66 atau 98,20% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:
- a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Perhubungan
Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan perhubungan, Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 435.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 434.403.000,00 atau 99,86%.
 - b. Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 31.200.000,00 atau 82,11%.
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 152.580.000.- dan realisasi keuangan Rp. 151.380.000.- atau 99,21%.
 - d. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara, realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.821.205.175,00 dan realisasi keuangan Rp. 10.624.327.658,88 atau 98,18%.
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- Pada tahun 2020, jumlah anggaran program ini sebesar Rp. 525.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 424.160.000,00 atau 86,47% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :
- a. Rehabilitas/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Rehabilitas/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realiasasi keuangan Rp. 149.600.000,00 atau 99,73%.

- b. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 375.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 274.560.000,- atau 73,22%.dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dialokasikan ke kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di Kota Dumai.

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 939.277.550,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesarRp. 939.262.000,- atau 99,99%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini:

- a. Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 939.277.550,00 dan realisasi keuangan Rp. 939.262.000,00 atau 99,99%dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga teknis kontrak.

- b. Penyelenggaran, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesarRp. 0,00 dan realisasi keuangan Rp. 0,00. Anggaran pada kegiatan ini tidak Terealisasi disebabkan refocusing anggaran dan anjuran dari pemerintah untuk mematuhi protocol kesehatan, sehingga event besar nasional ini tidak dapat direalisasikan anggarannya. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan, pengendalian,dan pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Pada Tahun 2020.

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.817.900.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.801.578.000,00 atau 99,10%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini:

a. Pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 598.710.000,- atau 99,78% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Lengkap dan Memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas, yang berupa tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas. Keluaran dari kegiatan ini yaitu :

- a) Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Kec. Dumai Barat;
- b) Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Kec. Dumai Timur;
- c) Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan Kec. Dumai Selatan;
- d) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang Tunggal;
- e) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Kantilever;
- f) Pengadaan dan Pemasangan Rambu RPPJ;
- g) Pengadaan Stone Barrier.

b. Pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 627.200.000,- dan realisasi keuangan Rp. 626.099.000,- atau 99,82% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah marka jalan yang terbangun guna terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, teratur dan terkendali. Adapun keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Parkir di UPT. Perparkiran Khusus;
 - b. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Gunung Merapi;
 - c. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Raya Bukit Datuk;
 - d. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Abdurrabkhan;
 - e. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Teratai;
 - f. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Budi Kemuliaan;
 - g. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Syech Umar;
 - h. Pembuatan Dan Pengecatan Marka Jalan Kesuma.
- c. Operasi penertiban dan penegakan hukum
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.100.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 152.495.000,00 atau 92,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yaitu :
- a) Patroli Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dipersimpangan, pasar dan lokasi sekolah pada pagi dan siang hari;
 - c) Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Hari-hari Besar.
- d. Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 336.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 334.824.000,- atau 99,65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pemasangan APILL dan LPJU Tenaga Surya yaitu berupa kegiatan :
- a) Pengadaan Lampu Warning Tiang di Kecamatan Dumai Kota;
 - b) Pengadaan Lampu Warning Tiang di Kecamatan Dumai Selatan;
 - c) Pengadaan Lampu Warning Tiang di Kecamatan Dumai Timur;

e. Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 89.600.000,- dan realisasi keuangan Rp. 89.450.000,- atau 99,83% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Median Jalan dan Pulau Jalan yang memadai yaitu berupa pengadaan median/kanstin di bundaran putri tujuh. Median/kanstin dimaksud sangat diperlukan guna peningkatan aspek keamanan berkendara di lokasi bundaran putri tujuh yang selama ini tidak dalam keadaan baik.

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 178.740.000,- dan realisasi keuangan Rp. 177.925.000,- atau 99,54%. Adapun indikator capaian program kegiatan ini adalah Jumlah fasilitas kelaikan alat uji Kendaraan Bermotor yang memadai, anggaran pada kegiatan ini dipergunakan untuk belanja alat pendukung BLUe sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor Aj.502/10/6/DjPD/2019 Tanggal 25 Februari 2019 Perihal Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

10. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0,00 dan realisasi keuangan Rp. 0,00, hal ini disebabkan tidak dilaksanakannya acara Dumai expo pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi COVID-19.

Lampiran 3.B.6. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Perhubungan Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					
				Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	4 dokumen	4 dokumen		1. Terciptanya kenyamanan untuk pengguna	1. Akan berupaya melakukan sosialisasi
				Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	3 kali	1 kali	33.3 3%	1. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat menimbulkan keramaian 2. Belum adanya gagasan untuk melaksanakan tatap muka secara online	untuk lebih banyak ke masyarakat pengguna jasa keur sehingga dapat
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, laut dan udara	12 Bulan	12 Bulan		kecelakaan di jalan raya yang berdampak pada diri sendiri dan juga orang lain	memotivasi ataupun meningkatkan
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 dokumen	2 dokumen		2. Adanya kesadaran masyarakat melakukan keur secara tidak langsung pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat secara signifikan	minat untuk membawa kendaraannya untuk dapat di keur tepat waktu
			Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ					2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
				Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	5 unit	5 unit			
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan		3. Faktor Dominan yang mempengaruhi penurunan pengguna angkutan	penurunan minat pengguna angkutan
			Perhubungan	Pogram peningkatan pelayanan angkutan				penurunan pengguna angkutan	perkotaan/angkot di Kota Dumai,

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

									perkotaan	
				Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	12 Bulan	12 Bulan			(oplet) adalah kenyamanan dan fasilitas	pengguna angkutan umum lebih
				Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 Kali	0 Kali	0.00 %	1. Kegiatan terfokus pada Tim Gugus Percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga tidak dibentuk tim Angkutan lebaran, Natal & tahun baru	angkutan umum yang nyaman selama dalam	mengutamakan angkutan alternatif
								2. Anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota/mudik pada saat terjadi pademi Covid-19	perjalanan masih menjadi pertimbangan	taksi online/grab dan lain-lain
			Perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	3. Faktor semakin banyaknya angkutan
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	700 unit	546 unit	78.0 0%		4. Menyatukan izin angkutan perkotaan dan	online dan menurunnya peminat
				Pengadaan marka jalan	10 lokasi	8 lokasi			mempermudah keur angkutan kota/oplet	angkutan umum (oplet) sehingga
				Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum	5 operasi	5 operasi				
				Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	5 lokasi	3 lokasi	60.0 0%	1. Kurangnya usulan dari masyarakat	5. Mencegah dan mengurangi angka kecelakaan	tidak lagi pengurus oplet yang
								2. Survey penyediaan fasilitas kelengkapan jalan sedang dilaksanakan sehingga lokasi pemasangan belum bisa ditentukan	lalu lintas	memperpanjang izin, dan semakin
				Pembangunan trotoar, median jalan dan pulau jalan	1 lokasi	1 lokasi			6. Memberikan petunjuk kepada pengguna	sulit untuk lulus uji kendaraan (keur)
			Perhubungan	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	2 unit	1 unit	50.0 0%	1. Adanya teguran dari Kementrian Perhubungan tentang Evaluasi Kinerja Unit Pelaksana Teknis	jalan yang jelas	karena oplet semakin tua

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

								2. Hasil Kalibrasi Alat Uji & Uji coba penerapan Uji elektronik sedang dilaksanakan sehingga alat yang tidak support ke sistem belum diketahui		4. Kedepannya akan ditingkatkan
			Non Urusan	Program pelayanan administrasi perkantoran						pasangan rambu-rambu dengan
				Penyediaan jasa surat menyurat	1500 Surat	1500 Surat				cara mendata setiap ruas jalan sesuai
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				dengan kebutuhan dan berdasarkan
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan				aturan yang berlaku sesuai dengan
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan				kewenangan kota
				Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan				
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan				
			Non Urusan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit				
				Pengadaan mebeleur	10 Unit	10 Unit				

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 lokasi	5 lokasi			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26 unit	26 unit			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 unit	12 unit			
			Non Urusan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
				Pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	5 Orang			
			Non Urusan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen			
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen			
			Adminit rasi	Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah					
			Pemerintahan	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi Hari-hari besar Nasional/daerah/keagamaan	3 kali	0 kali	0.00 %	1. Tidak dilaksanakannya kegiatan dumai expo pada tahun 2020	
								2. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat menimbulkan keramaian	

B.7. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

A. Capaian Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	%
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase koperasi yang aktif	%	88,20%	66,53%	75,43%
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	78,39%	24,95%	31,83%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	65%	57,74%	88,83%
		Persentase Pengembangan Kawasan Industri	%	72%	0%	0%
		Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	%	95%	25%	26,32%

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel 3.30 Pengukuran Kinerja
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai
Tahun 2020**

No	Indikator	Capaian 2019 %	2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase koperasi yang aktif	87,50	88,20	66,53	75,43	93,17	93,17
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	78,01	78,39	24,95	31,83	78,67	78,67
3.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	62	65	57,74	88,83	68	68
4.	Persentase Pengembangan Kawasan Industri	70	72	0	0	75	75
5.	Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih	91	95	25	26,32	100	100

Dari Tabel Pengukuran Kinerja PD Tahun 2020 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini:

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase koperasi yang aktif pada tahun 2020 target sebesar 88,20% sedangkan realisasi sebesar 66,53% sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 75,43%. Keberhasilan ini didukung oleh program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target kinerja 70% dan terealisasi sebesar 33,26%, Jumlah Koperasi aktif di Kota Dumai cukup besar berdasarkan data keragaan koperasi jumlah koperasi yang ada di Kota Dumai pada tahun 2019 sebanyak 190 Koperasi sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 163 Koperasi, dari jumlah tersebut terjadi penurunan sebanyak 27 Koperasi, penurunan ini di sebabkan karena adanya wabah covid-19 sehingga mengakibatkan pengurus koperasi sudah melaksanakan RAT.

Dari perkembangan Koperasi diatas masih terdapat permasalahan yang dihadapi koperasi, diantaranya masih ada koperasi yang aktif dan memiliki anggota yang banyak dan aset yang besar perlu tetap dilakukan pembinaan agar koperasi tersebut tetap eksis dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat lainnya. Untuk koperasi yang tidak berkembang perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi agar kedepannya, koperasi yang kurang aktif dapat tumbuh menjadi koperasi yang maju dan mensejahterakan anggotanya.

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro dan Kecil , pada tahun 2020 target 78,39% sedangkan realisasi 24,95% sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 31,83%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang kondusif Dengan kegiatan Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UMKM yang produktif disetiap kecamatan target kinerja 7 kecamatan atau sebesar 100%. Pendataan UMKM Kota Dumai yang dilaksanakan disusun berdasarkan data perkecamatan, pada tahun 2019 data UMKM Kota Dumai sebanyak 16.134 UMKM sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 17.285 UMKM, dari jumlah tersebut diatas mengalami kenaikan sebesar 1.151 UMKM dari tahun sebelumnya, kenaikan tersebut disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat untuk berwirausaha baru. Dari beberapa hal yang dilakukan di atas adalah untuk menciptakan

UMKM naik kelas melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan akses pembiayaan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, pada tahun 2020 target 65% sedangkan realisasi sebanyak 57,74% sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 88,83%. Keberhasilan ini didukung oleh Pendataan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dapat kita lihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2019 yaitu industri pengolahan. pada tahun 2018 di data Badan Pusat Statistik Industri pengolahan sebesar 56,48% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 57,74% dari data tersebut Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada Industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,26 %, kenaikan ini disebabkan karena sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan di Kota Dumai.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Pengembangan Kawasan Industri, pada tahun 2020 target sebesar 0% sedangkan realisasi sebesar 0% sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 0%. dimana pada tahun 2019 Capaian realisasinya 92,95%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh program dan kegiatan tidak ada anggarannya karena keterbatasan anggaran di tahun 2020 dan adanya wabah covid-19.
5. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih, dimana pada tahun 2020 target sebesar 95%, sedangkan realisasi sebesar 25% sehingga capaian realisasi tahunan sebesar 27,47%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri dan Pembinaan Industri Kerajinan dan Industri Kreatif, bahwa pagu anggaran program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan pengembangan dan pelayanan industri dan pembinaan industri kerajinan dan industri kreatif tahun tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 250.000.000,-.

Mengingat adanya kondisi pandemi covid-19 sehingga dilaksanakan rasionalisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 205.197.500,-, sehubungan dengan hal tersebut diatas, indikator kinerja dari kegiatan ini sebesar 25%.

A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir antara lain :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase koperasi yang aktif, dimana kondisi pada tahun 2020 realisasi kinerja indikator sebesar 66,53% Sedangkan capaian kinerja sebesar 75,43%. dimana pada tahun 2019 realisasi kinerja indikator sebesar 84,44% sedangkan capaian kinerja indikator 96,50%. Dalam hal ini, Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena adanya wabah Covid-19 sehingga mengakibatkan pengurus koperasi tidak bisa melaksanakan RAT.
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro dan Kecil, dimana kondisi pada tahun 2020 realisasi sebesar 23,25%, sedangkan capaian kinerja sebesar 29,66%, dimana pada tahun 2019 capaian realisasinya sebesar 121%, penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari tenaga pendamping di karenakan wabah covid-19.
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, dimana pada tahun 2020 realisasi sebesar 57,74%, sedangkan capaian kinerja sebesar 88,83%. Dimana pada tahun 2019 capaian realisasi tahunan sebesar 91,10%, Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya wabah covid-19 sehingga mengakibatkan Pertumbuhan ekonomi Daerah menurun .
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Pengembangan Kawasan Industri, yang mana kondisi pada tahun 2020 realisasi sebesar 0%, sedangkan capaian kinerja sebesar 0% dimana pada tahun 2019 Capaian realisasinya 92,95%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh program dan kegiatan tidak ada anggarannya karena keterbatasan anggaran di tahun 2020 dan adanya wabah covid-19..

5. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif yang terlatih, dimana pada tahun 2020 realisasi sebesar 56% sehingga capaian sebesar 58,94%. dimana pada tahun 2019 capaian realisasinya 62%, sehingga mengalami penurunan disebabkan karena kurangnya pendampingan dari Dinas karena tidak bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaku IKM yang ada di Kota Dumai.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2020) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase koperasi yang aktif dimana pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 66,53%, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 sehingga mengakibatkan pengurus koperasi tidak bisa melaksanakan RAT.
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Mikro dan Kecil dimana pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 23,25%, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari tenaga pendamping di karenakan wabah covid-19.
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 57,76 %. Mengalami penurunan dari target yang ditetapkan disebabkan oleh adanya wabah covid-19 yang membuat para pelaku industri rumah tangga tutup dan melemahnya perekonomian dimasyarakat.
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Pengembangan Kawasan Industri pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 0%, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan disebabkan tidak adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan yang menjadi keberhasilan dari indikator kinerja sasaran dan adanya wabah covid-19 sehingga tidak bisa turun kelapangan untuk monitoring.

5. Indikator kinerja sasaran Persentase pelaku Industri Kecil dan menengah dan Industri kreatif pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 25% mengalami penurunan dari target yang ditetapkan disebabkan adanya wabah covid-19 sehingga tidak bisa melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelaku IKM yang ada di Kota Dumai.

A.4. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.629.928.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.209.531.491,- atau 33,26% . adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target 70% atau capaian realisasi 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.212.570.000,- terealisasi sebesar Rp.209.531.491,-, Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan koperasi yang ada di Kota Dumai, pembinaan koperasi dilakukan untuk memberikan motivasi bagi pengurus koperasi agar dapat mengembangkan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi dengan target 70% dan ada 7 koperasi berprestasi di Kota Dumai, pada tahun 2020 dilakukan pembinaan dan pengawasan koperasi dengan tingkat capaian 100%.

Pencapaian target pada tahun 2020, dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penatausahaan koperasi yang ada di Kota Dumai yaitu sejumlah koperasi pada tahun 2020 sebanyak 245 terdapat 163 koperasi aktif (66,53%) dan 82 koperasi tidak aktif (50,30%). Pada tahun 2019 Jumlah Koperasi sebanyak 225, jika dibandingkan

dengan 2020 terjadi kenaikan dikarenakan pengurus dan anggota sudah memahami tentang penyusunan laporan keuangan koperasi, telah melakukan RAT. Selanjutnya Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM membentuk Tim melakukan penilaian - penilaian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian koperasi dan UMKM, untuk menentukan kesehatan dan kemampuan usaha koperasi di Kota Dumai. Dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Dumai melakukan penilaian koperasi yang terbaik di Kota Dumai. Ada 7 koperasi berprestasi yaitu:

**Tabel 3.31 Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Dumai
Tahun 2020**

NO	NAMA KOPERASI	NOMOR/TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	PERINGKAT JUARA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	PRIMKOPPOL RESORT KOTA DUMAI	117/PAD/BH/INDAGKOP/KOP /VII/2004 30 JULI 2004	Jl.Jendr.Sudirman nomor 1	JUARA I
2.	PRIMKOPAL LANAL DUMAI	85/PAD/BH/INDAGKOP/KOP/ X/2003 13 OKTOBER 2003	Jl. Jendr.Sudir man nomor 86	JUARA II
3.	KOPKAR KARYA BERSAMA WILMAR GROUP	04/BH/KWK.4/5.1/IX/1995 04 SEPTEMBER 1995	Jl. Dumai-Sungai Pakning	JUARA III
4.	KOPERASI IMPIAN BERSAMA	113/BH/KDK.4.2/1.2/II/1999 04 FEBRUARI 1999	Jl. Sungai Teras	Harapan I
5.	PRIMKOPAU SATUAN RADAR 232 DUMAI	390/BH/PAD/KWK.4/5.1/VIII /1996 13 AGUSTUS 1996	Jl. Radar	Harapan II
6.	KOPERASI SANJAYA UTAMA	225/BH/IV.10/DISKOP,UKM& PM/XII/2010 20 DESEMBER 2010	Jl. Raya Lubuk Gaung	Harapan III
7.	KOPERASI SUMBER NIAGA SEJAHTERA	198/BH/IV.10/DISKOP,UKM& PM/VII/2009 13 JULI 2009	Jl. Harapan	Harapan IV

2. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator kinerja kegiatannya yaitu keluarannya adalah Pelatihan Pengembangan usaha dan pelaporan bagi koperasi, Pelatihan kewirausahaan/management perkoperasian bagi koperasi dan pelatihan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro target 47 orang atau capaian realisasi 0%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.417.358.000,- terealisasi sebesar Rp.0, Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya wabah covid-19.

b. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.138.211.000. Dan yang terealisasi sebesar Rp.138.211.000, atau 100%. adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya pembinaan UMKM yang Produktif disetiap Kecamatan dengan target 7 kecamatan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.211.000,- terealisasi sebesar Rp. 138.211.000,-.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan pembinaan UMKM;
2. Untuk mengetahui perkembangan dan Produk Unggulan UMKM;
3. Menambah wawasan Pelaku UMKM tentang kewirausahaan;
4. Untuk meningkatkan kemampuan daya saing produk; dan
5. Untuk meningkatkan Pemasaran Produk.

c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.44.802.500,00. Dan yang terealisasi sebesar

Rp.44.802.500,00 atau 100%. adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program peningkatan kemampuan teknologi industri adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pelatihan bagi IKM dengan target 15 IKM. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.722.500,- terealisasi Rp.29.722.500,-.

2. Kegiatan Pembinaan Industri kerajinan dan industri kreatif

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya jumlah pembinaan dan promosi industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda dengan target 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.080.000,- terealisasi Rp. 15.080.000,-.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran :

Dari hasil Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan IV Tahun 2020 terhadap Program rencana kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp.1.546.177.311 dari jumlah anggaran Rp. 2.008.458.900 atau 76,98 % dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Lampiran 3.B.7. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
I	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian		A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Koperasi dan UKM			Capaian Program	:	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%		
				1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat						
					Keluaran	:	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil	:	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		
				2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
					Keluaran	:	Tersedianya Jasa Komunikasi,	12 Bulan	12 Bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Sumber Daya Air dan Listrik					
				Hasil	: Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					
				Keluaran	: Tersedianya Perlengkapan dan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	: Terlaksananya Perlengkapan dan Kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
				Keluaran	: Tersedianya Barang cetakan dan	12 Bulan	12 Bulan			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						penggandaan				
				Hasil	:	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
				5		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Keluaran				
						Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Hasil				
				6		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Keluaran	:	Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan peraturan perundangan 12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Terlaksananya Surat Kabar, Majalah dan peraturan perundangan 12 Bulan	12 Bulan			
				7		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman				
				Keluaran	:	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu 11 Bulan	9 Bulan			
				Hasil	:	Terlaksananya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu 11 Bulan	9 Bulan			
				8		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				
				Keluaran	:	Terlaksananya Rapat 12 Bulan	12 Bulan			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Konsultasi program Kerja				
					Hasil :	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
				9	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor					
					Keluaran :	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil :	Terlaksananya Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
				10	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran					
					Keluaran :	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil :	Terlaksananya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Administrasi Perkantoran					
				B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
					Capaian Program :	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		
				11	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					
					Keluaran :	Terawatnya gedung kantor dan sarana kerja lainnya	1 tahun	1 tahun		
					Hasil :	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang baik dan Layak	1 tahun	1 tahun		
				12	Kegiatan Pemeliharaan					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					
					Keluaran	:	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	
					Hasil	:	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	
				13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor					
					Keluaran	:	Terawatnya peralatan dan sarana kerja lainnya	1 tahun	1 tahun	
					Hasil	:	Tersedianya peralatan dan sarana kerja lainnya	1 tahun	1 tahun	
				C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
					Capaian Program :	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan 100%	100%			
				14	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
					Keluaran :	Terlaksananya evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya 3 dokumen	3 dokumen			
					Hasil :	Tersedianya Laporan LKPJ, LKj, dan LPPD 3 dokumen	3 dokumen			
				15	Kegiatan pelaporan keuangan akhir					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					tahun					
					Keluaran :	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen		
					Hasil :	Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen		
				16	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					
					Keluaran :	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan		
					Hasil :	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan		
				D	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif					
					Capaian Program :	Jumlah usaha mikro	1.225 UMKM	1.225 UMKM		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						kecil dan menengah produktif yang dibina				
				17	Kegiatan Pembinaan pengembangan usaha kecil menengah					
					Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan UMKM yang produktif di setiap Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan		
					Hasil	: Meningkatnya kualitas Pembinaan UMKM	7 Kecamatan	7 Kecamatan		
				E	Program Peningkatan Kualitas kualitas koperasi					
					Capaian Program	: Persentase Peningkatan Kulaitas kelembagaan koperasi	90%	90%		
				18	Kegiatan Monitoring,					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Evaluasi dan Pelaporan					
					Keluaran :	7 Kecamatan	0%			
					Hasil :	7 Kecamatan	0%			
				19	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi					
					Keluaran :	70%	70%			
					Hasil :	70%	70%			
				20	Kegiatan Peningkatan					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
					Keluaran :	Pelatihan pengembangan Usaha dan pelaporan bagi koperasi 47 Orang	0%			
						Pelatihan Kewirausahaan/Manajemen Perkoperasian bagi koperasi 47 Orang	0%			
						Pelatihan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro 47 Orang	0%			
					Hasil :	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi/pengurus koperasi/pengawas koperasi/Anggota koperasi/pengelola 141 Pengurus/Anggota/Pengelola/Pengawas Koperasi/Pelaku usaha mikro/Wirausaha pemula dan 3	0%			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
						koperasi/Pengawas koperasi/pelaku usaha mikro/usaha pemula dan tenaga pendamping	tenaga pendamping				
2	Perindustrian	Dinas Perindustrian		F	Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri						
		Koperasi dan UKM			Capaian Program	:	Jumlah Peningkatan perusahaan Industri	250 IKM	0%		
							Jumlah pengrajin Industri Kreatif yang terlatih	250 IKM	0%		
							Jumlah Pengembangan pemasaran produk kerajinan daerah	15 Produk	0%		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
				21	Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri						
					Keluaran :	Jumlah Pelatihan bagi IKM	15 IKM	25%			
					Hasil :						
				22	Kegiatan Pembinaan Industri kerajinan dan industri kreatif						
					Keluaran :	Jumlah pembinaan dan promosi industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda	100%	25%			
					Hasil :						

B.8. Urusan Wajib Penanaman Modal, Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Penanaman Modal, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pesandian.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Penanaman Modal, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pesandian, dapat dilihat pencapaian Tahun Anggaran 2020 dalam Tabel 3.32 sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN %
Urusan Penanaman Modal				
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Rp.	Rp. 6.022.113.766. 368,-	Rp. 12.961.297.980. 000,-	215,23
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	80	80,09	100,11

Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Tahun 2020

Keberhasilan dari 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran di atas didukung oleh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun penjelasan dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Target dari indikator sasaran ini yang terdapat pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebesar Rp. 6.022.113.766.368,- dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sampai pada bulan September sebesar Rp. 12.961.297.980.000,- atau sebesar 215,23%.

Selama sampai dengan triwulan IV tahun 2020 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 7.117.105.500.000,- mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 218,09% dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 5.844.192.480.000,- (naik 57,95%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.704 orang.

Realisasi investasi (PMDN/PMA) selama periode Januari – Desember tahun 2020 secara keseluruhan meningkat 118,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan kegiatan investasi telah kembali menggeliat dengan sebanyak 474 proyek, sehingga target realisasi investasi tahun 2020 adalah 215,23% melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Dumai menjadi daerah yang potensial untuk berinvestasi.

Keberhasilan ini didukung oleh program peningkatan promosi kerjasama dan investasi, yang pada tahun 2020 mempunyai 3 (tiga) kegiatan, yaitu Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM dengan target kinerja 12 Perusahaan dan terealisasi sebanyak 12 perusahaan atau sebesar 80%. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah keikutsertaan dalam pameran/seminar/rakor/presentasi daerah dengan target indikator 1 event dan terealisasi sebanyak 0 event atau sebesar 0%. Dan kegiatan Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya program TJSP di Kota Dumai dengan target 5 perusahaan dan terealisasi 0 perusahaan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu pada angka indeks 80 dan capaian indikator sampai tahun 2020 yaitu pada angka indeks 80,09 atau sebesar 100,11%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan 9 Prinsip Pelayanan Publik. Dengan perolehan angka indeks sebesar 80,09, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan “B” dengan kategori penilaian BAIK, karena berada pada nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat dalam nilai 76,61 – 88,30.

Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kegiatan Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan serta Kegiatan Survey Penerbitan Perizinan, adalah merupakan kegiatan pendukung pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan agar tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dimana hasil pengukuran memuat 9 unsur prinsip pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, diantaranya persyaratan pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; waktu pelayanan; kewajaran biaya pelayanan; kesesuaian produk pelayanan; kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku pelaksana pelayanan; sarana dan prasarana pelayanan; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan.

Dari hasil kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Dumai berdasarkan hasil survey masyarakat memperoleh nilai baik. DPMPTSP Kota Dumai menyadari bahwa usaha yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada “pelanggan” dalam pelayanan masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana yang masih dirasakan oleh beberapa responden/masyarakat selaku penerima layanan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentunya harus adanya kerjasama yang baik antar personil pelaku pelayanan yang ada pada DPMPTSP Kota Dumai, serta adanya dukungan dari Kepala Daerah dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Perhatian dari Instansi dan pihak terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan DPMPTSP Kota Dumai dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut. Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan kinerja para aparatur pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat terukur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain itu Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 9.289.108.080,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.241.895.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.437.077.595,- atau 88,89%. Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.047.213.080,- dengan realisasi Rp. 1.936.952.542,- atau sebesar 94,62%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 1.186.327.140,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.141.837.128,- atau sebesar 96,25% melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 677.500,- atau 75,28%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 176.440.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 146.699.214,- atau sebesar 83,14%. Adapun indikator kinerja keluarannya terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.800.000,- dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.376.905,- atau sebesar 96,69%. Adapun indikator kinerja keluarannya terbayarnya izin kendaraan dinas dengan target 15 unit atau capaian realisasi fisik 10 unit atau sebesar 83,33%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 117.393.560,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.383.960,- atau sebesar 99,99%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.046.500,- atau 82,05%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya peralatan kerja yang layak pakai dengan target 12 bulan dengan capaian realisasi 100%.
- f) Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 128.516.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 128.516.800,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya alat tulis kantordengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 103.760.000,- denganrealisasi sebesar Rp. 100.685.000,- atau sebesar 97,04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya barang cetakan administrasi perkantoran dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.108.200,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.961.300,- atau sebesar 83,62%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya peralatan listrik kantordengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.934.000,- atau sebesar 91,12%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya bahan bacaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

j) Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 26.511.300,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 25.647.500,- atau sebesar 96,74%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya makan minum rapat, tamu dan kegiatan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 275.110.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 274.439.529,- atau sebesar 99,76%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target 10 bulan atau capaian realisasi 83,33%.

l) Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 81.746.880,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.328.520,- atau sebesar 95,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 222.623.440,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 220.903.014,- atau sebesar 99,23% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 2.400.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor dengan target 10 unit kegiatan dengan capaian realisasi 40%.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 50.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.972.000,- atau sebesar 97,17%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya peralatan gedung kantor dengan target 5 unit kegiatan atau capaian realisasi 100%.

c) Pengadaan Meubeler

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pengadaan meubeler kantor dengan target 15 unit dengan capaian realisasi 7%.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 163.823.440,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 163.531.014,- atau sebesar 99,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 15.130.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.15.130.000,- atau sebesar 100%, melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.630.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 10.630.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya laporan kinerja dan keuangan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000,- dan yang terealisasi anggarannya sebesar Rp. 1.200.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersusunnya laporan semester keuangan dengan target 2 laporan atau capaian realisasi 100%.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.300.000,- dan telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 laporan atau capaian realisasi 100%.

4. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 159.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 156.177.410,- atau sebesar 98,13%, melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 19.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.640.000,- atau sebesar 95,10%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM dengan target 15 Perusahaan atau capaian realisasi 80%.

b) Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 120.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.677.410,- atau sebesar 99,32%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor//presentasi investasi daerah dengan target 1 event, namun capaian realisasi 0%.

Kegiatan ini sudah dilakukan persiapannya namun tidak dapat diselenggarakan karena sesuai himbauan Pemerintah Kota Dumai bahwa kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan banyak orang seperti Kegiatan Pameran Investasi ditunda pelaksanaannya sebagai akibat dari masa pandemic covid-19 di Kota Dumai.

c) Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan inisebesar Rp. 19.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.860.000,- atau sebesar 93,75%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah teraksananya program TJSP di Kota Dumai dengan target capaian 5 Perusahaan atau capaian realisasi 0%. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020, kegiatan ini hanya dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama beberapa perusahaan di Kota Dumai untuk persiapan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Dumai..

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 122.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.121.329.730,- atau sebesar 99,40%. Program ini direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut

a) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 122.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.121.329.730,- atau sebesar 99,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target 1 aplikasi atau capaian realisasi 100%.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 340.810.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.280.502.760- atau sebesar 82,31%. Program ini direalisasi melalui kegiatan sebagai

berikut :

- a) Peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.442.760,- atau sebesar 99,98%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%

- b) Pengawasan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.800.000,- atau sebesar 96,24%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan dengan target 15 berkas atau capaian realisasi 27%.

- c) Survey penerbitan perizinan

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 297.060.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.260.000,- atau sebesar 79,87%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah izin usaha yang akan diterbitkan dengan target 3.390 izin. Dari total permohonan izin yang terdaftar melalui sistem perizinan berusaha secara online terintegrasi (OSS) seluruh jenis perizinan tahun 2020 berjumlah 28.159 pemohon. Dan capaian realisasi perizinan berusaha seluruh sektor yang terbit melalui OSS dan SIPERI untuk wilayah Kota Dumai berjumlah 1.071 perizinan.

7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 1.112.500,- dengan

realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.072.500- atau sebesar 96,40%. Program ini direalisasi melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Koordinasi pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.112.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.072.500,- atau sebesar 96,40%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terlaksananya tersedianya laporan asset yang akuntabel dengan target 1 dokumen atau capaian realisasi 100%.

I. PENGHARGAAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Dengan Capaian Realisasi Investasi Besar Tahun 2017 s.d. 2020, seperti yang terlihat di bawah ini.

PENGHARGAAN

NO.	NAMA PENGHARGAAN	ASAL PENGHARGAAN	PERINGKAT	TAHUN PEROLEHAN
1.	Kabupaten/Kota dengan Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN Periode Januari s.d. Desember Tahun 2020	Gubernur Riau	I	2020



II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TAHUN 2020

Adapun beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada tahun 2020 diantaranya:

- Koordinasi dan kesamaan persepsi belum maksimal antara tim teknis pada masing-masing PD teknis mengenai pelayanan sehingga PD teknis belum dapat mengintegrasikan perizinan dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai PD atau unit teknis pelayanan perizinan yang sesuai dengan *Standar Operational Prosedure (SOP)*,
- Belum optimalnya pelaksanaan informasi publik mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,
- Akurasi data tidak optimal dan belum tersedia data base sebagai kendali monitoring penyelenggaraan pelayanan perizinan,

Lampiran 3.B.8. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Hasil (outcome) : Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor</p>	100%	96.15%			
				<p>1 <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> Keluaran (output) : terselenggaranya kegiatan surat menyurat</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>2 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> Keluaran (output) : terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>3 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional</i> Keluaran (output) : terbayarnya izin kendaraan dinas</p>	15 Unit	10 Unit			
				<p>4 <i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i></p>					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keluaran (output) : terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	12 bulan			
				5 <i>Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor</i> Keluaran (output) : tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	12 bulan	12 bulan			
				6 <i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i> Keluaran (output) : tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan			
				7 <i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i> Keluaran (output) : tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan			
				8 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> Keluaran (output) : tersedianya peralatan listrik kantor	12 bulan	12 bulan			
				9 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i> Keluaran (output) : tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>1 0</p> <p>Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>Keluaran (output) : tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>1 1</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p> <p>Keluaran (output) : terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</p>	12 bulan	10 bulan			
				<p>1 2</p> <p>Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan</p> <p>Keluaran (output) : terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>1 3</p> <p>Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Keluaran (output) : terbayarnya jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Hasil (outcome) : Persentase ketersediaan sarana dan</p>	100%	61.67%			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				prasarana aparaturnya					
				1 Pengadaan Perlengkapan Gedung 4 Kantor Keluaran (output) : tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 Unit	4 Unit	penetapan target indikator yang tidak menyesuaikan dengan besaran/jumlah pagu anggaran kegiatan dan jumlah item rincian belanja		
				1 Pengadaan Peralatan Gedung 5 Kantor Keluaran (output) : tersedianya peralatan gedung kantor	5 Unit	5 Unit			
				1 Pengadaan Mebeleur 6 Keluaran (output) : jumlah pengadaan mebel	15 Unit	1 Unit	penetapan target indikator kinerja kegiatan (output) tidak disesuaikan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan pagu anggaran dan item rincian belanja		
				<i>1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala</i> <i>7 Kendaraan Dinas/ Operasional</i> Keluaran (output) : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil (outcome) : Persentase Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%			
				<i>1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> Keluaran (output) : tersedianya laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan			
				<i>1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i> Keluaran (output) : tersusunnya laporan semester keuangan	1 laporan	1 laporan			
				<i>2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keluaran (output) : tersedianya laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	2 laporan			
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Hasil (outcome) : Jumlah investor berskala nasional	168 investor	85 investor			
				<i>Peningkatan Kegiatan</i> 2 <i>Pemantauan, Pembinaan dan</i> 1 <i>Pengawasan Pelaksanaan</i> <i>Penanaman Modal</i> Keluaran (output) : Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM	15 Perusahaan	12 Perusahaan			
				2 <i>Penyelenggaraan pameran</i> 2 <i>investasi</i> Keluaran (output) : jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah	1 event	0 event	Sesuai dengan himbauan Pemerintah, di masa Pandemic Covid-19, kegiatan-kegiatan yang		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mengundang kerumunan banyak orang ditunda pelaksanaan ya		
				2 Peningkatan Tanggung Jawab 3 Sosial Perusahaan Keluaran (output) : terlaksananya program TJSP di Kota Dumai	5 Perusahaan	0 Perusahaan			
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
				Hasil (outcome) : Persentase Penyebarluasan Pelayanan Informasi Perizinan	80%	80%			
				2 Penyusunan Sistem Informasi 4 terhadap Layanan Publik Keluaran (output) : tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	1 aplikasi	1 aplikasi			
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu					
				Hasil (outcome) : Jumlah Pelayanan Administrasi Perizinan	4.230 izin	1.071 izin			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>2 5 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keluaran (output) : terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>2 6 Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Keluaran (output) : terlaksananya peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan</p>	15 berkas	4 berkas			
				<p>2 7 Survey Penerbitan Perizinan Keluaran (output) : jumlah izin yang akan diterbitkan</p>	3.390 izin	1.071 izin			
				<p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil (outcome) : Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang Terpeliharaan dan Terdata</p>	100%	100%			
				<p>2 8 Koordinasi Pendampingan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keluaran (output) : tersedianya laporan aset yang akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen			

B.9. Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga, Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai tahun 2017- 2021 urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.33. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				
Peringkat olahraga ditingkat propinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah /PPDA)	Peringkat	0	0	0
Urusan Pilihan Pariwisata				
Kunjungan wisata	Presentase	53,15%	3.834 39.325	92.85%

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

1.1 Peringkat olahraga ditingkat propinsi (Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah /PPDA)

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan karena kegiatan PPDA dilaksanakan 2 tahun sekali.

1.2 Presentase organisasi pemuda yang aktif

Dari organisasi pemuda yang ada di kota Dumai organisasi pemuda yang aktif sebanyak 55%, hal ini sesuai dengan target indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Target indikator sasaran renstra untuk kegiatan kepemudaan ditarget 52% organisasi pemuda, kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan karena terbatasnya anggaran, akhirnya bisa dilaksanakan 2 kegiatan, yaitu

kegiatan seleksi dan pembinaan Paskibraka dan kegiatan Seleksi dan pembinaan Pemuda marchingband dengan realisasi sebesar 100 %. (dilakukan refofusing anggaran akibat Pandemi Covid -19)

1.3. Jumlah klub olahraga

Dari jumlah klub olahraga yang ada dikota Dumai, klub olahraga sebanyak 82 klub. Pada tahun 2020 tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah klub olahraga dikota Dumai sebanyak 82 klub.

1.4. Lapangan Olahraga

Target awal dari indikator sasaran renstra untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga ada 1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga tidak dilaksanakan dilakukan refofusing Anggaran akibat Covid -19.

1.5. Jumlah pembinaan cabang olahraga

Dalam meningkatkan prestasi olahraga, perlu didukung dengan pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, terutama untuk membina mental dan memupuk bakat-bakat yang ada. Dalam rangkaian tersebut, dukungan klub-klub olahraga akan sangat membantu untuk menciptakan bibit-bibit pemuda yang berprestasi dibidang olahraga. Pada tahun 2020 target capaian tercatat 28 klub olahraga sementara realisasi mengalami peningkatan klub olahraga sebanyak 32 klub yang tercatat di KONI. Untuk kegiatan pada tahun 2020 realisasinya sebesar **114** %

1.6. Presentase Jumlah kunjungan wisata.

Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pembangunan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang. Jumlah target wisatawan mancanegara pada tahun 2020 sebesar 45 % wisatawan, realisasi pada tahun 2020 terjadi kenaikan kunjungan wisatawan menjadi **43.159** wisatawan. dengan rincian kunjungan domestic mengalami penurunan dari **38.043** orang yang ditargetkan, sedangkan kunjungan mancanegara mengalami penurunan dari target 12.908 orang menjadi **3.834** orang. Jadi penurunan jumlah kunjungan domestic dan mancanegara mencapai 53.15%.

Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.402.186.606,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.148.029.560,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.254.157.046,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.544.106.857,- atau 31,08% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.254.157.046- atau 63.62%

Adapun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun anggaran 2020 melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain disampaikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 1.680.199.526,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **1.617.942.949,-** atau sebesar 96.29% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.144.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 163.144.702,- dan atau sebesar 90,56% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembayaran rekening listrik,

di UPT ditaman Bukit Gelanggang dan air, pembayaran rekening listrik rekening telepon dan tagihan internet, tv kabel di kantor Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 90.56%.

b) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.540.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.9.540.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan dengan target 3 bulan atau capaian realisasi 100%.

c) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.675.000,- dan atau sebesar 83.44% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak yang dibayarkan dengan target 6 unit kendaraan atau capaian realisasi 100%.

d) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 437.045.700,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 433.544.100,- dan atau sebesar 99,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan jasa kebersihan kantor dan jasa kebersihan ditaman Bukit Gelanggang yang dibayarkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

e) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 63.127.425,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 63.126.300,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengadaan alat – alat tulis kantor untuk 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

f) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 48.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.999.600,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional kantor selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

g) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.999.450,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah komponen listrik bangunan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

h) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 34.950.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.950.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 4 unit atau capaian realisasi 100%.

i) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.064.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.980.000,- dan atau sebesar 98.96% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat kabar, majalah dan peraturan perundangan dengan target 20 exemplar atau capaian realisasi 98.96%.

j) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.176.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.171.500,- dan atau sebesar 99,97% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

k) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.509.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.509.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

l) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 406.667.001,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 370.395.095,- dan atau sebesar 91.08% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan target 1 tahun atau capaian realisasi 100%.

m) Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 381.019.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 377.038.662,- dan atau sebesar 98,96% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan jasa keamanan kantor dan ditaman Bukit Gelanggang selama 1 tahun dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

n) Kegiatan penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.957.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 55.957.000,- dan atau sebesar 99,84% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan tenaga honorer yang dibayarkan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp.227.785.600,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **227.662.859,-** atau sebesar 100% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.956.000,- dan atau sebesar 99,90% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan target paket atau capaian realisasi 100%.

b) Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 167.785.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 167.706.859,- dan atau sebesar 99,95% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas yang perlu dilakukan perawatan yang dibayarkan dengan target 6 kendaraan dinas atau capaian realisasi 100%.

c) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan sarana kerja lainnya dengan target 18 buah atau capaian realisasi 100%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 0,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **0,-** atau sebesar 0% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 7 orang atau capaian realisasi 0%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 14.645.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **14.645.000,-** atau sebesar 100% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.045.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.045.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen LAKIP/LKj-IP, LPPD, LKPJ dan Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan target 4 dokumen atau capaian realisasi 100%.

b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.860.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.860.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja

keluaran adalah jumlah Laporan akhir tahun kantor dengan target 1 Laporan atau capaian realisasi 100%.

c) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.740.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.740.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen Rencana Kerja dengan target 3 dokumen atau capaian realisasi 100%.

5. Program Pengembangan destinasi pariwisata

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 4.446.171.920,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **3.887.688.952,-** atau sebesar 87.44% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 299.250.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 298.902.000,- dan atau sebesar 99,88% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata di taman Taman Bukit Gelanggang dengan target 2 sarana dan prasarana atau capaian realisasi 100%.

b) Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.146.921.920,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.588.786.952,- dan atau sebesar 86.54% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata dengan target 2 sarana dan prasarana adapun dalam kegiatan ini ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.076.586.688,- dan APBDP yaitu : pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner, Gedung Toilet, Penataan Lansekap , Pembangunan Menara Pandang, Pembangunan Boardwalk, pembangunan TIC (Tourism Informasi Centre) Bukit Gelanggang, Pemasangan Paving Block di Pantai Puak, Pembuatan Jembatan di Pantai Puak, Pembuatan Jalan Setapak di Pantai Puak atau capaian realisasi fisik 87

6. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 687.176.150,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **682.908.900,-** atau sebesar 99,38% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Paskibraka

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 544.452.891,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 541.757.100,- dan atau sebesar 99,50% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 35 orang atau capaian realisasi 100%.

b) Kegiatan Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 142.723.259,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.151.800,- dan atau sebesar 98,90% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta marchingband yang dilatih dengan target 60 orang atau capaian realisasi 100%.

7. Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda

1. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 80.550.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 75.700.000 dan atau sebesar 93,98 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang dilatih untuk kewirausahaan dengan target 60 atau capaian realisasi 100%

8. Program Pengembangan Kemitraan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 543.715.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **543.407.000,-** atau sebesar 92,96% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 444.050.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 443.742.000,- dan atau sebesar 99,93% adapun

indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dengan target pelatihan yaitu : Pelatihan wisata budaya kuliner dan belanja, Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, Pelatihan wisata budaya tematik, Pelatihan manajemen home stay/rumah wisata/pondok wisata (2x pelatihan). atau capaian realisasi 100%.

- b) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.665.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.665.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti lomba mincing dengan target 700 orang atau capaian realisasi 50%. (dilakukan refofusing anggaran akibat dampak covid 19)

9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pada tahun 2020, jumlah anggaran **Rp. 41.280.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **33.350.000,-** atau sebesar 80.79% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar dengan target 1 cabang yaitu lomba bola kaki SSB U12, lomba ini diikuti oleh klub SSB U 12 tidak hanya dari Dumai tapi juga diikuti oleh klub SSB dari kab/kota dan propinsi lainnya seperti Jambi, Padang dan Medan atau capaian realisasi 100%.

- b) Kegiatan Senam kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 41.280.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.350.000,- dan atau sebesar 80.79% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Car Free Day) dengan target 11bulan atau capaian realisasi 100%.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 0 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar Rp. 0 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana dan prasarana yang direhab atau capaian realisasi 100 % (dilakukan reconfusing anggaran akibat dampak covid 19)

11. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi Hari-Hari Besar Nasional/ Daerah /Keagamaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau 100% adapun indikator jumlah informasi publik dan informasi hari besar nasional/daerah/keagamaan.

Lampiran 3.B.9. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
I	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
					Capaian Program	:	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%		
				1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
					Keluaran	:	Jumlah pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel	12 Bulan	12 Bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
				Hasil	:	Tersedianya pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet dan tv kabel	12 Bulan	12 Bulan			
				2		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Keluaran	:	Jumlah bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	:	Tersedianya bulan tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan	12 Bulan	12 Bulan			

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
						yang dibayarkan					
				3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						
					Keluaran	: Jumlah kendaraan yang dilakukan pembayaran pajak kendaraan	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil	: Terlaksananya jumlah kendaraan yang dilakukan pembayaran pajak kendaraan	12 Bulan	12 Bulan			
				4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan						

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Kantor					
					Keluaran	: Jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil	: Tersedianya jumlah bulan jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
				5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor					
					Keluaran	: Jumlah pengadaan alat tulis untuk 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil	: Tersedianya jumlah pengadaan alat tulis untuk 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan		
				6	Kegiatan Penyediaan					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Barang Cetak dan Penggandaan						
				Keluaran	:	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil	:	Tersedianya jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			7	Keluaran	:	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Hasil	:	Tersedianya jumlah penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	
				8	Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					Keluaran	:	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	
					Hasil	:	Tersedianya jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	
				9	Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					undangan					
					Keluaran	:	Jumlah surat kabar, majalah, dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	
					Hasil	:	Tersedianya jumlah surat kabar, majalah, dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	
				10	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
					Keluaran	:	Jumlah bulan tersedianya bahan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	
					Hasil	:	Tersedianya bahan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman					
					Keluaran :	Jumlah bulan tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil :	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan		
				12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					
					Keluaran :	Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan		
					Hasil :	Terlaksananya jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
				13	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor						
					Keluaran :	Jumlah bulan jasa keamanan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil :	Tersedianya bulan jasa keamanan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan			
				14	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran						
					Keluaran :	Jumlah bulan Tenaga Honorer yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan			
					Hasil :	Tersedianya jumlah bulan Tenaga Honorer yang	12 Bulan	12 Bulan			

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						dibayarkan				
					B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					Capaian Program	: Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		
				15	Kegiatan Pengadaan Mebeleur					
					Keluaran	: Jumlah Pengadaan meja dan kursi serta filling cabinet yang disediakan	12 bulan	12 bulan		
					Hasil	: Tersedianya jumlah pengadaan meja dan kursi serta filling cabinet yang	12 bulan	12 bulan		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
							disediakan				
				13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						
					Keluaran :	Jumlah terawatnya peralatan dan sarana kerja lainnya	12 bulan	12 bulan			
					Hasil :	Tersedianya peralatan dan sarana kerja lainnya	12 bulan	12 bulan			
				12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						
					Keluaran :	Jumlah kendaraan dinas yang perlu dilakukan perawatan	12 bulan	12 bulan			

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
					Hasil	:	Tersedianya jumlah kendaraan dinas yang perlu dilakukan perawatan	12 bulan	12 bulan		
				13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor						
					Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dan sarana kerja lainnya	12 bulan	12 bulan		
					Hasil	:	Tersedianya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya	12 bulan	12 bulan		
				C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian						

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kinerja dan Keuangan					
				Capaian Program	:	Persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan 100%	100%		
				Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14				
				Keluaran	:	Jumlah dokumen evaluasi laporan capaian kinerja kegiatan pembangunan dan ikhtisarnya 4 dokumen	4 dokumen		
				Hasil	:	Tersedianya Laporan LKPJ, LKj, LKj IP dan LPPD 4 dokumen	4 dokumen		

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				15	Kegiatan pelaporan keuangan akhir tahun					
					Keluaran :	Jumlah dokumen rencana kerja	1 laporan	1 laporan		
					Hasil :	Tersedianya dokumen rencana kerja	1 laporan	1 laporan		
				16	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran					
					Keluaran :	Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran	3 dokumen	3 dokumen		
					Hasil :	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	3 dokumen	3 dokumen		
				D	Program Peningkatan Peran Serta					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepemudaan					
				Capaian Program	:	Persentase Pemuda yang Berprestasi 100%	100%		
				17 Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Paskibraka					
				Keluaran	:	Jumlah peserta paskibraka yang terlatih 40 orang	40 orang		
				Hasil	:	Terlaksananya Jumlah peserta paskibraka yang terlatih 40 orang	40 orang		
				18 Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pemuda Marching Band					
				Keluaran	:	Jumlah Pemuda Marching Band yang di latih 80 orang	80 orang		
				Hasil	:	Terlaksananya Pemuda Marching 80 orang	80 orang		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
						Band yang di latih					
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						
					Capaian Program	: Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	100%	100%			
				19	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda						
					Keluaran	: Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek kewirausahaan	80 orang	80 orang			
					Hasil	: Terlaksananya Peserta yang mengikuti	80 orang	80 orang			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Bimtek kewirausahaan					
				F	Program Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi					
					Capaian Program :	Persentase Peningkatan Prestasi di Berbagai Cabang Olahraga	100%	100%		
				20	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi					
					Keluaran :	Jumlah bulan pelaksanaan car free day	11 bulan	11 bulan		
					Hasil :	Terlaksananya Jumlah bulan pelaksanaan car free day	11 bulan	11 bulan		

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG			TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
					G						
						Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					
						Capaian Program :	Persentase Peningkatan Prestasi di Berbagai Cabang Olahraga	100%	100%		
					21	Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah					
						Keluaran :	Jumlah Cabang Olahraga yang diikuti	3 cabor	3 cabor		
						Hasil :	Terlaksananya Cabang Olahraga yang diikuti	3 cabor	3 cabor		
					H	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Olahraga					
				Capaian Program	:	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	100%	100%	
				Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	22				
				Keluaran	:	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	2 sarana	2 sarana	
				Hasil	:	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	2 sarana	2 sarana	
				Program Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	I				
				Capaian	:	Persentase	100%	100%	

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Program		pengembangan lahan objek Wisata				
				Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	23					
				Keluaran	:	Jumlah Lahan Objek Wisata	1 Objek	1 Objek		
				Hasil	:	Tersedianya Lahan Objek Wisata	1 Objek	1 Objek		
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	J					
				Capaian Program	:	Persentase pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%		
				Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	24					

Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pariwisata					
				Keluaran	:	Terbangunnya sarana dan prasarana objek wisata 2 sarana	2 sarana		
				Hasil	:	Meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata 2 sarana	2 sarana		
				K					
				Program Pengembangan Kemitraan					
				Capaian Program	:	Persentase pengembangan kemitraan 100%	100%		
				25		Kegiatan Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya			
				Keluaran	:	Jumlah peserta yang mengikuti sadar wisata 320 orang	320 orang		
				Hasil	:	Terlaksananya jumlah peserta yang mengikuti sadar wisata 320 orang	320 orang		

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				26	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				
					Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba mancing	700 orang	700 orang		
					Hasil : Terlaksananya kegiatan lomba mancing	700 orang	700 orang		

B.10. Urusan Wajib Perpustakaan, Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai merupakan salah satu Instansi Pemerintah Kota Dumai yang memangku kepentingan 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan, pencapaiannya pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	ORANG	22.000 orang	9.032 orang	41 %
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	JUDUL BUKU	16.936 judul buku	13.403 judul buku	79%
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	81%	81 %	100%
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	70 orang	0	-

Sumber Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Kota Dumai pada Akhir Tahun 2020 dengan target 22.000 pengunjung/pemustaka, namun realisasi kunjungan masyarakat ke perpustakaan hanya sebesar 9.032 pengunjung/pemustaka atau sebesar 41 % yang terdiri dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum daerah Kota Dumai, Perpustakaan Keliling, perpustakaan masyarakat dan kelurahan serta perpustakaan tugu reformasi/lancang kuning. Hal ini jauh dibawah target dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 sehingga adanya larangan kunjungan ke fasilitas layanan perpustakaan.

2. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku di Perpustakaan Daerah Kota Dumai pada Akhir Tahun 2020 dengan target 16. 936 judul buku, untuk realisasi koleksi judul buku di perpustakaan sebesar 13.403 judul buku atau sebesar 79% sudah termasuk dengan buku digital. Untuk realisasi judul buku, tidak terjadi penambahan hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

3. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Untuk persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada Akhir Tahun 2020 dengan target 81% atau tambahan sebanyak 5 PD, dan terealisasi sebesar 100%.

4. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Untuk tahun anggaran 2020, Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Dumai tidak bisa melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang berupa kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta yang semula dengan target akumulasi dari tahun sebelumnya sebanyak 70 orang. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran, selain itu juga dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam masa pandemic covid 19.

Adapun Alokasi anggaran yang dianggarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai untuk tahun 2020 ini sebesar **Rp.5.517.536.120,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.446.097.620,-** sedangkan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.071.438.500,-**. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.3.106.970.594,-** atau terserap **90.15%** dan Belanja Langsung sebesar **Rp.1.986.614.129,-** atau sebesar **95.90%**.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SILPA	RATIO
BELANJA	5,517,536,120	5,093,584,723	-423,951,397	92.32%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,446,097,620	3,106,970,594	-339,127,026	90.16%
Belanja Pegawai	3,446,097,620	3,106,970,594	-339,127,026	90.16%
BELANJA LANGSUNG	2,071,438,500	1,986,614,129	-84,824,371	95.91%
Belanja Pegawai	22,900,000	22,900,000	0	100.00%
Belanja Barang dan Jasa	1,451,218,500	1,369,156,129	-82,062,371	94.35%
Belanja Modal	597,320,000	594,558,000	-2,762,000	99.54%

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran didukung oleh program kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Penyediaan jasa keamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan mebeleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- a. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
- b. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
- c. Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka
- d. Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)

5. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

- a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- a) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
- b) Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

7. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

- a. Pengumpulan data
- b. Pengklasifikasian data

Realisasi Kegiatan Tahun 2020

A. Urusan Rutin;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai merupakan Dinas yang melayani urusan Pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar perpustakaan, selain urusan perpustakaan dan urusan kearsipan ada juga urusan rutin yang dibawah sekretariat.

Alokasi anggaran belanja langsung yang digunakan untuk urusan rutin adalah sebesar Rp1.772.471.900,- dengan realisasi anggaran Rp.1.694.973.789,- atau sebesar 78.30% yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Untuk program ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 696,914,700.00,- dengan realisasi anggaran Rp. 662.762.649,- atau sebesar 95.10%

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Dengan anggaran sebesar Rp. 115.650.000,- dan terealisasi Rp. 97.075.272,- atau 83.94%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi juga sebesar 12 bulan.

b) *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*

Dengan anggaran sebesar Rp. 124.462.600,- dan terealisasi Rp. 123.033.600,- atau 98.85%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah periode terpenuhinya jasa kebersihan dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan.

c) *Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja*

Dengan anggaran sebesar Rp. 17.460.000,- dan terealisasi Rp. 17.460.000,- atau 100%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah terawatnya peralatan kerja yang dikelola/dirawat dan terealisasi sebesar 12 bulan, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi juga sebesar 12 bulan.

d) *Penyediaan Alat Tulis Kantor*

Dengan anggaran sebesar Rp. 42.362.000,- dan terealisasi Rp. 42.362.000,- atau 100%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah terpenuhinya ketersediaan ATK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya ketersediaan ATK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi juga sebesar 12 bulan.

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,- dan terealisasi Rp. 19.700.000,- atau 98.50%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah terpenuhinya barang cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 98.60%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya barang cetak dan penggandaan dinas perpustakaan dan kearsipandengan target 12 bulan dan terealisasi juga sebesar 12 bulan.

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan anggaran sebesar Rp. 3.514.100,- dan terealisasi Rp. 3.514.100,- atau 100%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah terpenuhinyaketersediaan komponen instalasi listrik dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya ketersediaan komponen instalasi listrik dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan.

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi Rp10.505.000,- atau 87.54%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah terpenuhinya ketersediaan media massa dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 87.54%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya ketersediaan media massa dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan.

h) Penyediaan Makanan dan Minuman

Dengan anggaran sebesar Rp. 31.350.000,- dan terealisasi Rp. 19.950.000,- atau 63.64%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah ketersediaan makanan dan minuman dengan target 12 bulandan terealisasi sebesar 63.64%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan.

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dengan anggaran sebesar Rp. 210.116.000,- dan terealisasi Rp. 209.162.677,- atau 99.94%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran

ini adalah jumlah pelaksanaan rakor keluar daerah dengan target 74 kali dan terealisasi sebesar 99.55%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi Rp. 120.000.000,- atau 100%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah terpenuhinya ketersediaan tenaga keamanan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpenuhinya tenaga keamanan dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Untuk program ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 1.069.757.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.026.511.140,- atau sebesar 95.96% digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Kantor

Dengan anggaran sebesar Rp. 292.270.000,- dan terealisasi Rp. 291.228.000,- atau 99.64%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah dokumen anggaran dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dengan anggaran sebesar Rp. 135.660.000,- dan terealisasi Rp. 133.90.000,- atau 98.70%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor dengan target 10 unit dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase ketersediaan peralatan gedung kantor dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

c. Pengadaan Mebeleur

Dengan anggaran sebesar Rp. 120.324.000,- dan terealisasi Rp. 120.217.000,- atau 99.91%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran

ini adalah tersedianya mebeleur dengan target 20 unit dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase ketersediaan mebeleur dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dengan anggaran sebesar Rp. 351.827.000,- dan terealisasi Rp. 312.353.140,- atau 88.78%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah periode terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 12 bulan dan terealisasi sebesar 100%.

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 99.600.000,- atau 99.60%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah pekerjaan rehab bangunan kantor dengan target 1 unit dan terealisasi sebesar 100%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 100%.

3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Untuk program ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 5.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.700.000,- atau sebesar 98.28% digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan anggaran sebesar Rp. 4.100.0000,- dan terealisasi Rp. 4.000.000

atau 98.39%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah laporan kinerja PD yang diselesaikan dengan target 8 laporan dan terealisasi sebesar 100% dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dengan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- dan terealisasi Rp. 20.400.000,- atau 100%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan dengan target 1 laporan dan terealisasi sebesar 100% dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90%.

**Tabel 3.35. Ratio realisasi pencapaian kinerja keuangan
pada program dan kegiatan urusan rutin**

N O	KODE REKENING	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RATIO CAPAI AN
1	2.17 .2.17.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696,914,700.00	662,762,649.00	95.10
2	2.17 .2.17.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	115,650,000.00	97,075,272.00	83.94
3	2.17 .2.17.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	124,462,600.00	123,033,600.00	98.85
4	2.17 .2.17.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17,460,000.00	17,460,000.00	100.00
5	2.17 .2.17.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	42,362,000.00	42,362,000.00	100.00
6	2.17 .2.17.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000.00	19,700,000.00	98.50
7	2.17 .2.17.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,514,100.00	3,514,100.00	100.00
8	2.17 .2.17.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,000,000.00	10,505,000.00	87.54
9	2.17 .2.17.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	31,350,000.00	19,950,000.00	63.64
10	2.17 .2.17.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210,116,000.00	209,162,677.00	99.55
11	2.17 .2.17.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00
12	2.17 .2.17.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,069,757,200.00	1,026,511,140.00	95.96
13	2.17 .2.17.01.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	292,270,000.00	291,228,000.00	99.64

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

14	2.17 .2.17.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	135,660,000.00	133,890,000.00	98.70
15	2.17 .2.17.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	190,000,000.00	189,440,000.00	99.71
16	2.17 .2.17.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	351,827,200.00	312,353,140.00	88.78
17	2.17 .2.17.01.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100,000,000.00	99,600,000.00	99.60
18	2.17 .2.17.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,800,000.00	5,800,000.00	98.28
19	2.17 .2.17.01.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,100,000.00	4,000,000.00	97.56
20	2.17 .2.17.01.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00
21	2.17 .2.17.01.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	105,427,700.00	101,311,700.00	96.10
22	2.17.2.17.01.01.15.0 3	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	25,427,700.00	22,071,700.00	86.80
23	2.17 .2.17.01.01 . 15.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
24	2.17 .2.17.01.01 . 15.11	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	30,000,000.00	29,240,000.00	97.47
25	2.17 .2.17.01.01 . 15.12	Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)	0.00	0.00	0.00
26	2.17 .2.17.01.01 . 18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	0.00	0.00	0.00
27	2.17 .2.17.01.01 . 18.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	0.00	0.00	0.00
28	2.17 .2.17.01.01 . 19	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	25,000,000.00	24,819,240.00	99.28
29	2.17 .2.17.01.01 . 19.01	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	25,000,000.00	24,819,240.00	99.28

30	2.17 .2.17.01.01 . 20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	70,654,000.00	69,124,000.00	97.83
31	2.17 .2.17.01.01 . 20.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	0.00	0.00	0.00
32	2.17 .2.17.01.01 . 20.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	70,654,000.00	69,124,000.00	97.83
3 3	2.18 .2.17.01.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	97,884,900.00	96,385,400.00	98.47
34	2.18 .2.17.01.01 . 15.02	Pengumpulan data	52,988,300.00	52,482,800.00	99.05
35	2.18 .2.17.01.01 . 15.03	Pengklasifikasian data	44,896,600.00	43,902,600.00	97.79

Sumber data LRA 2020

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, realisasi anggaran urusan Rutin berdasarkan rincian belanja sebagai berikut :

B. Urusan Perpustakaan;

Perpustakaan merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan meluas pada semua sector kegiatan dan kehidupan manusia baik dilingkungan instansi/lembaga pemerintahan maupun perkantoran swasta untuk mendukung dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan fungsi yang dimiliki perpustakaan adalah sebagai sarana sumber belajar, penelitian, informasi dan kebudayaan serta dapat memberi kontribusi penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka konsekwensi yang harus dipenuhi oleh perpustakaan adalah berusaha menyediakan bahan pustaka yang baik dan juga setepat mungkin bagi keperluan pimpinan pada suatu organisasi dan masyarakat pengguna lainnya.

Alokasi anggaran belanja langsung yang digunakan untuk urusan perpustakaan adalah sebesar Rp. 105.427.700,- dengan realisasi anggaran Rp.101.311.700,- atau sebesar 96.10% yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

Untuk program ini jumlah alokasi anggaran sama dengan besar anggaran diatas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) *Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah;*

Dengan anggaran sebesar Rp.25.427.700,- dan terealisasi Rp. 22.071.700,- atau 86.80%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah perpustakaan yang dibina dengan target 4 perpustakaan atau terealisasi sebesar 98.41%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dengan target 22.000 pengunjung tetapi hanya terealisasi dengan jumlah pengunjung sebanyak 9.032 pengunjung dikarenakan terjadinya pandemic covid19 sehingga adanya larangan berkumpul difasilitas umum,

b) *Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;*

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.50.000.000,- atau 100% . *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah lomba yang diadakan dengan target sebanyak 4 (empat) kegiatan lomba namun tidak terealisasi dikarenakan terjadinya refocusing anggaran karena pandemic covid sehingga adanya larangan berkumpul ditempat keramaian sehingga anggaran pada kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan untuk mempublikasikan, mempromosikan perpustakaan umum daerah Kota Dumai Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 22.000 pengunjung dan teralisasi 9.032 pengunjung.

c) *Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka;*

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,- dan realisasi Rp.29.240.000,- atau 97.47% . *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat dengan target sebanyak 200 eks dan teralisasi sebanyak 200 eks atau 100%.Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun teralisasi sebesar 9.032 pengunjung.

**Tabel 3.36. Ratio realisasi pencapaian kinerja keuangan pada
Program dan kegiatan urusan perpustakaan**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RATIO CAPAIAN
2.17 .2.17.01.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	105,427,700.00	101,311,700.00	96.10
2.17 .2.17.01.01 . 15.03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	25,427,700.00	22,071,700.00	86.80
2.17 .2.17.01.01 . 15.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
2.17 .2.17.01.01 . 15.11	Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	30,000,000.00	29,240,000.00	97.47

Sumber data LRA 2020

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, realisasi anggaran urusan Perpustakaan berdasarkan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 3.37 Jumlah koleksi bahan perpustakaan umum kota Dumai

NO	TAHUN	JUMLAH JUDUL	JUMLAH EKS
1	2008	6.921	6.921
2	2009	714	2.229
3	2010	1.341	2.715
4	2011	725	2.359
5	2012	343	1.660
6	2013	363	1.204
7	2014	1.179	31.359
8	2015	-	-
9	2016	-	-
10	2017	-	-
11	2018	1.325	2.650
12	2019	429	2460
JUMLAH		13.403	53.557

Tabel 3.38 Data Pengunjung Tahun 2020

NO	BULAN	KATEGORI					JUMLAH
		UMUM	KELILING	TUGU	KELURAHAN	iDuma i	
1	Januari	346	2428	78	306		3158
2	Februari	584	2153	143	283		3163
3	Maret	307	894	109	589		1899
4	April				61	1	62
5	Mei				54	1	55
6	Juni			34	115		149
7	Juli	39		102			141
8	Agustus	107		42		6	155
9	September	47				6	53
10	Oktober					24	24
11	November	21				4	25
12	Desember	146				2	148
TOTAL		1597	5474	508	1408	44	9032

Tabel 3.39 Daftar Nama-nama perpustakaan kelurahan/ masyarakat yang menjadi binaan perpustakaan daerah kota Dumai

NO	NAMA PERPUSTAKAAN	ALAMAT	KELURAHAN	NAMA PETUGAS	KET
1	AL-IKHLAS	Jl. Swadaya	Bukit Batrem	Rukiah	Rumah
2	NURI	Jl. Rambutan	Jaya Mukti	Sumedi	Posyandu
3	MINI REZEKI ANAK	Jl. Kakap No. 03	Pangkalan Sesai	Suwartono	Rumah
4	AMANAHAH	Jl. Berembang	Rimba Sekampung	Suwardi	Poskamling
5	KARANG TARUNA	Kel. Bukit Nenas	Bukit Nenas	Zaitun	Kantor Lurah
6	PUSTAKA CERIA	Jl. Natuna Gg.Merak No.07	Sukajadi	Mira Tania	Rumah
7	TUAH NEGERI	Jl. Patimura	Laksamana	Ena Juriani	Kantor Lurah
8	BUNGA BANGSA	Jl. Tanjung Jati	Buluh Kasap	M. Thamrin Ma'ruf	Kantor Lurah
9	BALQIS	Jl. Marlan Jaya Gg. Horas	Bukit Datuk	Bambang Wicaksono	Kantor Lurah
10	PINTAR	Puskesmas Bukit Timah	Bukit Timah	Misnawati	Puskesmas
11	TUAH ILMU	Kel. Bagan Keladi	Dumai Barat	Ilda Ria Erista	Kantor Lurah
12	RUMAH BACA PELANGI	Kel. Lubuk Gaung	Lubuk Gaung	Suyana	Kantor Lurah

13	PENYEMBAL INDAH	Kel. Tanjung Penyembal	Tanjung Penyembal	Siti Aminah	Kantor Lurah
14	PURNAMA	Jl. Tun Srilanang	Purnama	Juni Henrizal	Kantor Lurah
15	CAHAYA BASILAM	Kel. Basilam Baru	Basilam Baru	Rohani	Kantor Lurah

d) Cakupan layanan perpustakaan keliling sampai dengan tahun 2018, yaitu :

- SDN 006 Bukit Kayu Kapur;
- SDN 001 Rimba Sekampung;
- SMP Hayati Bukit Timah;
- TK IT Al-Izzah;
- SMPN 11 Bukit Kapur;
- SMP Purnama;
- SMPN 5 Dumai;
- SMKN 3 Dumai;
- TK IT An-Nur Bagan Keladi;
- TK Maryam Macora Bangsal Aceh;
- Panti Asuhan Muhammadiyah Jaya Mukti;
- Panti Asuhan An-Nur
- SDN 016 BUKIT Kayu Kapur;
- SD Qur'an Inabah Jaya Mukti;
- SDIT Al Madina Bagan Besar;
- SDN 009 Bagan Keladi;
- MTS Negeri Dumai;
- SDN 006 Mekar Sari Bukit Timah;
- MTSN Pelintung;
- SDN 004 Mundam;
- SDN 13 Mekar Sari Bukit Timah;
- SDN 009 Bukit Kayu Kapur;
- Panti Asuhan Al-Munawarah;
- MTs Ibadussholihin Bukit Timah;
- SDN 006 Teluk Makmur;
- SDN 002 Guntung;
- SDN 001 Teluk Makmur;
- SDN 010 Pangkalan Sesai;
- TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jaya Mukti;
- SDIT Ath Thariq;
- SMPN 016 Bukit Kayu Kapur;
- SDN 15 Bagan Besar;
- SDN 11 Mekar Sari;
- SDN 03 Pangkalan Sesai;
- SDN 019 Pangkalan Sesai.

C. Urusan Kearsipan;

Arsip memiliki arti penting dan strategis karena merupakan pusat informasi, pusat ingatan, bahan bukti resmi dan sejarah penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan Indonesia yang diatur dalam Undang- undang No. 07 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dan UU Kearsipan No. 43 tahun 2009.

Untuk melaksanakan kegiatannya, di alokasikan anggaran sebesar Rp.193.538.900,- dan terealisasi sebesar Rp.190.328.640,- atau sebesar 98.34%, Beberapa program kegiatan yang menjadi indikator kinerja pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pada tahun anggaran 2020 untuk program ini jumlah anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp24.819.240,- atau sebesar 99.28% dari anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah;

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.819.240,- atau 99.28%, dengan Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya dokumen kearsipan Kota Dumai dengan realisasi 1 kali yang dipelihara atau terealisasi 100%, Sedangkan hasil (*Out come*) dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

Untuk program ini jumlah anggaran sebesar Rp. 70.654.000,- dan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.124.000,- atau sebesar 97.83% dari anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

b) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip;

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 70.654.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.124.000,- atau sebesar 97.83%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan dengan 1perda dan perwa dan terealisasi 97%.Sedangkan *Outcome* dari kegiatan ini adalah jumlah SDM pengelola kearsipan

c. Program Perbaikan Sistem administrasi kearsipan

Untuk program ini jumlah anggaran sebesar Rp. 97.884.900,- dan jumlah realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.385.400,- atau sebesar 98.47% dari anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

m) Pengumpulan Data;

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 52.988.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.482.800,- atau sebesar 99.05%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah PD yang diakuisisi dengan target 5 PD terealisasi 100%. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

n) Pengklasifikasian Data;

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 44,896,600.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 43,902,600.00,- atau sebesar 97.79%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah PD yang diakuisisi dengan target 5 PD terealisasi 100%. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

**Tabel 3.40 Ratio realisasi pencapaian kinerja keuangan pada
Program dan kegiatan urusan kearsipan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Ratio capaian
2.17 .2.17.01.01.19	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	25,000,000.00	24,819,240.00	99.28
2.17 .2.17.01.01.19.01	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	25,000,000.00	24,819,240.00	99.28
2.17.2.17.01.01.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	70,654,000.00	69,124,000.00	97.83
2.17.2.17.01.01.20.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	70,654,000.00	69,124,000.00	97.83

2.18.2.17.01.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	97,884,900.00	96,385,400.00	98.47
2.18.2.17.01.01.15.02	Pengumpulan data	52,988,300.00	52,482,800.00	99.05
2.18.2.17.01.01.15.03	Pengklasifikasian data	44,896,600.00	43,902,600.00	97.79

Sumber data : LRA 2020

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, realisasi anggaran urusan Kearsipan berdasarkan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel.3.41 PD/ Kantor/Instansi Pemerintah yang di lakukan pengumpulan data (Akuisis) pada tahun 2009 - 2020 sesuai Peraturan Kearsipan

No.	Tahun	Nama PD / Bagian
1	2009	Bagian Umum Setdako
		Bagian Adm Pemerintahan Umum
		Bagian Umum Setdako
		Bagian Pertanahan
		BAPPEDA
		Dinas Pekerjaan Umum
		Sekretariat DPRD
2	2010	Dinas Pendidikan
		Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
		RSUD
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		KPU
		Inspektorat
		Dinas Perubungan
		BPKAD
		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kesehatan		
3	2011	BKD
		Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
		Dinas Tata Kota
		Dinas Koperasi UKM
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan olahraga
		Kantor Kesbang
4	2012	Dinas Sosial
		Badan KB
		Badan Pelayanan Terpadu
		Dinas Tata Kota

No.	Tahun	Nama PD / Bagian
		Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
		Dinas Koperasi UKM
		Kantor Lingkungan Hidup
		Kantor Pelayanan Pasar
5	2013	Inspektorat
		Kantor Camat Bukit Kapur
		Badan Narkotika Kota
		Kantor Camat Dumai Timur
		Kantor Camat Dumai Barat
6	2014	SMA Binaan Khusus
		SMKN 1
		SMAN 1
		SMKN 2
		SMAN 2
7	2015	Lurah Rimba Sekampung
		Lurah Jayamukti
		Lurah Bintan
		Lurah Sukajadi
		Lurah Teluk Binjai
		Lurah Buluh Kasap
		Lurah Bumi ayu
8	2016	BKD
		Bagian Humas
		BPN
		Sekretariat DPRD
		KPU
9	2017	Umum
		Dinas Kesehatan
		Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
		RSUD
		Dinas Pendidikan
10	2018	Bagian Umum Setdako
		Bagian Pemerintahan Setdako
		BPKAD
		Dinas Perhubungan
		Dinas Lingkungan Hidup
11	2019	Tidak ada dalam daftar kegiatan
12	2020	Dinas Perikanan
		Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Dinas Pekerjaan Umum
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Lampiran 3.B.10. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
				a. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah	4 perpustakaan	4 perpustakaan			
				b. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	4 kegiatan lomba	-	Refocusing Anggaran		
				c. Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka	200 eks	200 eks			
2	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan					
				a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	1 kali	1 kali			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					
				a. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	1 perda dan perwa	1 perda dan perwa			
				b. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	70 org	-	Refocusing Anggaran		
				Program perbaikan sistem administrasi kearsipan					
				a. Pengumpulan data	5 PD	5 PD			
				b. Pengklasifikasian data	5 PD	5 PD			

B.11. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika, Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 -2021, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:

**Table 3.42 Capaian indikator kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Kategori e-Goverment Kota Dumai	Indeks	2,5	2,54	101,6
Jumlah perangkat daerah (PD) yang terkoneksi ke jaringan internet	PD	32	36	112,5
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7	7	100
Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	95	100	105,26

Capaian keberhasilan dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas karena didukung dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

A. Kategori e-government Kota Dumai

Target dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,50 dengan realisasi 2,54 atau capaian sebesar 101, 6%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang ditelah ditetapkan pada tahun 2020, namun indeks 2,54 tersebut mendapatkan predikat cukup. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel. 3.43 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.44 Hasil perolehan nilai indeks SPBE

Kota Dumai Tahun 2019

Domain/Aspek Penilaian	Nilai
Domain kebijakan SPBE	2,00
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,28
Kebijakan Layanan SPBE	2,5
Domain Tata Kelola	1,86
Kelembagaan	1,00
Strategi dan Perencanaan	2,5
TIK	2,00
Domain layanan SPBE	3,06
Administrasi Pemerintahan	3,29
Pelayanan Publik	2,67
INDEKS SPBE : 2,54	
Predikat SPBE : Cukup	

Berdasarkan hasil perolehan nilai tersebut diatas, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera di evaluasi dan dibenahi, seperti kebijakan tata kelola SPBE dan Kelembagaan.

Terlepas dari itu semua itu, target SPBE dapat tercapai karena dukungan kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan indikator Persentase penerapan aplikasi e-Government target 80% dengan realisasi 80%, kemudian Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dengan indikator jumlah PD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi informasi serta kegiatan Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-goverment dengan indikator kategori e-government Kota Dumai dengan target 2,50 dan terealisasi 2,54 atau capaian 101,6%.

B. Jumlah PD yang terkoneksi ke jaringan internet

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 32 perangkat daerah (PD) yang terkoneksi ke jaringan internet dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebanyak 36 PD atau sebesar 112,5 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ini merupakan kegiatan yang menyediakan koneksi jaringan internet kepada PD serta melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pengelolaan jaringan internet. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah PD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan target 32 PD terealisasi sebanyak 36 PD diluar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai

Kegiatan Pengelolaan server dan aplikasi data center pemko dumai memiliki indikator Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola dengan target 1 data center dan terealisasi sebanyak 1 data center. Selain itu, terdapat juga Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e- government dengan indikator Persentase Infrastruktur Jaringan e-Government yang dikelola dengan target 50 % dan terealisasi sebesar 50%.

Tabel 3.45 Alokasi Bandwith Internet Tahun 2020

NO	SKPD	ALOKASI BANDWIDTH		TYPE KONEKSI
		METRO / LOKAL	INTERNASIOAL	
		Mbps	Mbps	
1	Bekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	15	Share / Up to
2	Inspektorat	100	20	Share / Up to
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	40	Share / Up to
4	Dinas Kesehatan	100	15	Share / Up to
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	15	Share / Up to
6	Dinas Sosial	100	15	Share / Up to
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	15	Share / Up to
8	Dinas Lingkungan Hidup	100	15	Share / Up to
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	15	Share / Up to
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	15	Share / Up to
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	15	Share / Up to
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	100	15	Share / Up to
13	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	15	Share / Up to
14	Dinas Perhubungan	100	40	Share / Up to
15	Dinas Perdagangan	100	30	Share / Up to
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	15	Share / Up to
17	Dinas Perikanan	100	15	Share / Up to
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	20	Share / Up to
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	20	Share / Up to
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	15	Share / Up to
21	Satuan Polisi Pamong Praja	100	40	Share / Up to
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	60	Share / Up to
23	Badan Pendapatan Daerah	100	20	Share / Up to
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100	30	Share / Up to
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	45	Share / Up to
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	25	Share / Up to
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	100	15	Share / Up to
28	Rumah Sakit Umum Daerah	100	20	Share / Up to
29	Kecamatan Bukit Kapur	100	15	Share / Up to
30	Kecamatan Dumai Barat	100	35	Share / Up to
31	Kecamatan Dumai Kota	100	30	Share / Up to
32	Kecamatan Dumai Selatan	100	40	Share / Up to
33	Kecamatan Dumai Timur	100	10	Share / Up to
34	Kecamatan Medang Kampai	100	40	Share / Up to
35	Kecamatan Sungai Sembilan	100	40	Share / Up to
36	Bekretariat	100	50	Share / Up to
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	50	Share / Up to

C. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina

Target dari indikator sasaran ini yaitu 7 kelompok informasi masyarakat daerah yang dibina dengan realisasi 7 kelompok informasi masyarakat yang telah dibina dengan capaian 100%. Pencapaian target kinerja tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Keberhasilan target ini didukung oleh kegiatanPenyebarluasan yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat dengan indikator Jumlah pertemuan target 1 pertemuan dan terealisasi sebanyak 1 pertemuan.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu fungsi dari KIM adalah :

1. Sebagai Wahana Informasi
2. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
3. Sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.
4. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :
 - * melalui informasi yang diperoleh berbagai sumber, KIM dapat menerapkan dalam berbagai aktifitas.
 - * anggota KIM dapat memperoleh peluang usaha dan dapat melakukan transaksi bisnis.
 - * informasi yang diperoleh dikemas dalam bentuk bahan informasi yang dapat dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Pengembangan dan pembinaan KIM memiliki peranan strategis dalam upaya menyongsong masyarakat informasi sebagai kehidupan masyarakat digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai melakukan pembinaan terhadap KIM yang sudah terbentuk. Pembinaan yang dilakukan antara lain KIM diharapkan dapat mengetahui, memahami tugas dan perannya. Adapun tugas KIM sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lain;
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain untuk wujudkan kebersamaan, kesatuan persatuan bangsa.

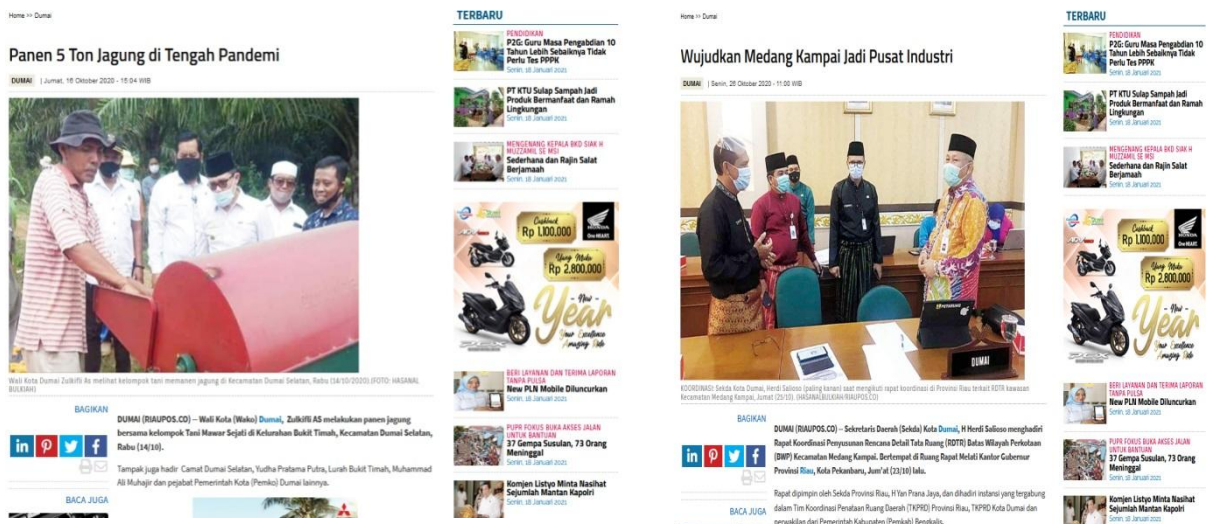
**Tabel 3.46 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kota Dumai yang dibina**

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama KIM	Jenis Usaha
1	Bukit Kapur Bukit Kayu Kapur	Mataram wek-wek	Peternakan
2	Dumai Timur Jaya Mukti Tanjung Palas Bukit Batrem Buluh Kasap	Kesuma Tuah Negeri Karya Bersama Asyfa Albey Gaharu Swadaya Meynis Jaya Bersama Tahu Surau Batrem Jaya Sejahtera	- Perkebunan Kelapa Sawit Keripik Nenas Keripik Nenas Repacking Madu Keripik Cabe, Teh Gaharu, Stik Kentang, dll Tali Kur, Tas Kulit, Kain sarung tenun - - - -
3	Dumai Kota Rimba Sekampung Dumai Kota Laksamana	Berkah Sekampung Maju Bersama Cahaya Laksamana	- - -
4	Dumai Barat Purnama Bagan Keladi	Purnama Lestari Tuah Informasi	- -
5	Sungai Sembilan Bangsal Aceh	Jambu Batu Usaha Bersama De Sista	Aneka Keripik Dodol Nenas

D. Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa.

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 95% Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebanyak 100% atau sebesar 105,26 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program kerjasama informasi dengan mass media.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah yang dilaksanakan selama tahun 2020. Adapun indikator untuk kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 jenis publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kerjasama media pada tahun 2020 ini terdiri dari 14 (empat belas) media cetak, 44 (empat puluh empat) media online dan 2 (dua) media televisi.



REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai pada tahun 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 12.104.558.422, Belanja langsung sebesar Rp. 7.808.294.804,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.296.263.618.

Tabel. 3.47 Realisasi keuangan

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Langsung	7.808.294.804	7.708.478.858	98,72
2	Belanja Tidak Langsung	4.296.263.618	3.700.821.744	86,14
	Jumlah	12.104.558.422	11.409.300.602	94,26

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 disampaikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.031.401.094 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.007.961.120,- atau 97.73% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99.75 %;

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.400.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 121.182.746,- (seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 88,84 %;

3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 125.145.600,- (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 124.973.140,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99,86%.

4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 64.489.000,- (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99.98%.

5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.512.025,- (enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu dua

puluh lima rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 65.422.300,- (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99,86%.

6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sebesar 90%.
7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,40%.
8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.270.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.095.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,64%.
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.314.548.469,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 314.402.909,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau sebesar 99,95%.
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%.

11. Kegiatan Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintah Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 131.625.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 125.012.025,- (seratus dua puluh lima juta dua belas ribu dua puluh lima rupiah) atau sebesar 94,98%.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) atau sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 176.970.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.820.000,- atau 97.65% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 13.960.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99.71 %;
2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 133.880.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 132.360.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,86%;
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.090.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 91,10%.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 35.850.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.850.000,- atau 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sebesar 100 %;

2. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) atau sebesar 100 %;

3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- atau 96.67% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 96.67%.

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.459.772.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.452.242.128,- atau 99.83% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.991.829.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 3.989.264.600,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,94 %;

2. Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.872.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 200.222.000,- (dua ratus juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,68%;

3. Kegiatan Pengelolaan media *online* Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,34 %;

4. Kegiatan Pengelolaan website Pemko Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.240.685,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,51%;

5. Kegiatan Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.985.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu

rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 30.213.743,- (tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 97,51 %;

6. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 %;
7. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.573.300,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 101.223.300,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,68%
8. Kegiatan Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.227.800,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.227.800,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 100 %;

f. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 16.577.753,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.577.753,- atau 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.577.753,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 16.577.753,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 100%;

g. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.903.080.410,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.847.259.410,- atau 97.07% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 294.270.377,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 282.610.377,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,04 %;
2. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.561.000,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %;
3. Kegiatan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 299.240.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 297.240.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,33%;
4. Kegiatan Penyebarluasan informasi hari-hari besar
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.715.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 96.715.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 100%;
5. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.906.048,- (delapan juta sembilan ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar

Rp. 8.906.048,- (delapan juta sembilan ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 100%;

6. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.199.387.985,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.161.787.985,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 96,87%;

h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 42.146.417,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.646.417,- atau 96.44% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.146.417,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 40.646.417,- (empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 96,44%;

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 20.595.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.220.000,- atau 98.18% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar 20.595.000,- (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,18%;

j. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik / Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 106.902.030,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.402.030,- atau 93.92% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.510.000,- (empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.760.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 89,33%;
2. Kegiatan Penyusunan data statistik Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 62.392.030,- (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 60.642.030,- (enam puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga puluh rupiah) atau sebesar 97,20%;

PENGHARGAAN TAHUN 2020

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Riau pada acara malam anugerah keterbukaan informasi publik KI Riau Award Tahun 2020 .yang dilaksanakan di Pekanbaru. Untuk kategori Kabupaten/Kota ada 7 (tujuh) PPID yang mendapat penghargaan dalam evaluasi dan monitoring pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Kota Dumai mendapat **peringkat 5** (lima) dengan prediket “**cukup informatif**”..

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TAHUN 2020

Permasalahan terhadap capaian indikator kinerja sasaran khususnya pada indikator Kategori e-government atau indeks SPBE Kota Dumai, dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh evaluator dari Kemenpan, terdapat sejumlah kelemahan pada indeks kebijakan tata kelola SPBE, Kelembagaan dan teknologi informasi Komunikasi.

Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penataan SPBE yang meliputi proses bisnis terintegrasi, perencanaan dan penganggaran TIK, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai. Kebijakan pengelolaan SPBE dapat terwujud dengan baik didukung dengan masterplan SPBE dan serta dukungan anggaran yang memadai. Materplan SPBE ini akan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kota Dumai kedepan.

Lampiran 3.B.11. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Bukan Pelayanan Dasar
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika/...	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Kualitas jaringan internet kondisi baik yang digunakan PD	36 PD			
				Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Sistem informasi yang berjalan dengan baik	80%			
				Kegiatan Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai	Media online yang dikelola dengan baik	1 media online			
				Kegiatan Pengelolaan website Pemko Dumai	Meningkatnya pengelolaan aktifitas website	1 website			
				Kegiatan Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai	server dan aplikasi data center berjalan dengan baik	1 data center			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai	Command center dikelola dengan baik	1 command center			
				Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government	Meningkatnya Jaringan e-governmet dalam kondisi baik	50%			
				Kegiatan Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government	Meningkatnya Indeks e-governmen kategori baik	2.54			
				Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					
				Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kemampuan SDM komunikasi dan infromasi	1 orang			
				Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media					
				Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Meningkatnya Informasi yang disampaikan	4 media visual			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	1 pertemuan			
				Kegiatan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Majalah berisi informasi pemerintrah daerah dihasilkan dengan baik	12 majalah			
				Kegiatan Penyebarluasan informasi hari-hari besar	Informasi hari besar yang disebarkan kepada masyarakat	2 even			
				Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Meningkatnya pemahaman Kelompok informasi masyarakat	7 KIM			
				Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah	Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah yang dilaksanakan dengan baik	4 publikasi, 7 informasi			
2	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik / Daerah					

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Meningkatnya data statistik daerah	50%			
				Kegiatan Penyusunan data statistik Kota Dumai	dokumen data statistik yang dihasilkan sesuai ketentuan	1 dokumen			
3	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah					
				Kegiatan Pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Pemerintah Daerah	Meningkatnya perlindungan informasi pemerintah daerah	55%			

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

C.1. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan, Oleh Dinas Perikanan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Perikanan Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Kelautan dan Perikanan, disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan

Indikator kinerja sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian dalam (%)
Nilai Konsumsi ikan	103,26 kg/kapita/th	107,47	104,07
Produksi perikanan budidaya	273,06 ton	286,55	104,94
Produksi perikanan tangkap	318,83 ton	585,79	183,73
Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbina	37 kelompok	28	75,67
Jumlah kelompok nelayan yang terbina	34 kelompok	18	52,94

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut:

A. Nilai Konsumsi ikan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 107,47 kg/kapita/th, dan target dapat dicapai atau realisasi tahun 2020 yaitu 103,26 kg/kapita/th. Pencapaian dapat tercapai karena dienuhi ikan yang berasal dari luar Kota Dumai. kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya terus dilakukan seperti sosialisasi makan ikan atau gemar ikan yang dilakukan oleh Forum Gemar Makan Ikan yang diketua oleh Walikota Dumai dengan bekerjasama PKK Kota Dumai dan Dinas Perikanan Kota Dumai. Program yang capai target ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Hasil Olahan Perikanan. Kegiatan ini juga dilakukan survey ikan masuk ke Kota Dumai dalam bentuk segar dan produksi ikan di Kota Dumai yang dibantu tenaga pendampingan baik dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan APBD Kota Dumai.

B. Produksi perikanan budidaya

Target dari indikator sasaran ini yaitu 273,68, capaian kinerja di peroleh sebesar 286,55 ton atau 104,94% dari target, capaian ini tidak terlepas bagaimana upaya peningkatan dengan pendampingan teknologi baik

sektor air tawar maupun air payau, berupa teknologi intensif pemeliharaan udang.

C. Produksi Perikanan Tangkap

Target dari indikator sasaran ini yaitu 318,83 ton, capaian kinerja di peroleh sebesar 585.79 ton atau 183.73% dari target, capaian ini tidak terlepas dari pembinaan nelayan melalui tenaga pendamping yang berasal dari pusat dan Kota Dumai sendiri. Bila mencermati angka capaian akan terlihat sangat signifikan sekali, hal ini karena adanya perbaikan cara menghitung data yang dipusatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kota Dumai dan pendataan yang dilakukan langsung oleh tenaga pendamping perikanan tangkap/ bidang kenelayanan.

D. Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbina

Target dari indikator sasaran ini yaitu 37 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 28 kelompok atau 75,68 % dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 5 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 2 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016.

E. Cakupan bina kelompok nelayan

Target dari indikator sasaran ini yaitu 34 Kelompok, capaian kinerja di peroleh sebesar 18 kelompok atau 52,94% dari target, hal ini dapat tercapai melalui pendampingan yang dilakukan oleh 3 orang tenaga pendamping yang didanai dari APBD Kota dan pusat sebanyak 1 orang yang merupakan lanjutan pada program PUMP tahun 2015 dan 2016.

Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.531.427.901,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.970.411.640,00,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.561.016.261,00,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.506.669.539,- atau 88,32 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.501.385.806,- atau 97,67 %

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dan realisasi Program dan kegiatan rutin wajib dimasukkan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp. 692.366.041,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 682.819.812,- atau sebesar 98,62 % dengan dukungan 11 kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 825.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 825.000,- atau 100 % dan target capaian kegiatan (output) terkirim surat dalam 12 bulan sebanyak 1000 surat, realisasi target terkirim sebanyak 1040 surat atau 104%.
 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 177.600.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.719.532,- atau 95,56 % dan target capaian kegiatan (output) jumlah rekening telepon sebanyak 12 rekening, jumlah pemakaian listrik sebanyak 24 rekening, jumlah pemakaian internet sebanyak 36 rekening, realisasi kegiatan rekening telepon sebanyak 12 rekening, jumlah pemakaian listrik sebanyak 24 rekening, jumlah pemakaian internet sebanyak 36 rekening atau seluruhnya 100 %.
 3. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.024.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.788.875,- atau 84,61 % dan target capaian kegiatan (output) terbayarnya izin kendaraan dinas sebanyak 6 unit, realisasi target terlaksana sebanyak 6 unit atau seluruhnya 100%.
 4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 80.031.790,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.980.000,- atau 99,94% dan target capaian kegiatan (output) 1. Terbayarnya jasa pemotongan rumput selama 48 kali, 2. Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan kantor 3 unit kerja selama 12 bulan, 3. Terbayarnya Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 36 ob realisasi target terlaksana 1. Pemotongan rumput sebanyak 48 kali, 2 peralatan dan bahan

kebersihan untuk 3 unit kerja selama 12 bulan 3. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 36 ob atau seluruhnya 100%.

5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 59.563.971,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.563.000,- atau 99,99 % dan target capaian kegiatan (output) tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan, realisasi target terlaksana sebanyak 12 bulan atau 100%.
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.621.280,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.620.000,- atau 99,98 % dan target capaian kegiatan (output) terpenuhi barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan, realisasi target terlaksana sebanyak 12 bulan atau 100%.
7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 6.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) jumlah bahan bacaan, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 1440 eksamplar, realisasi target terlaksana sebanyak 1440 eksamplar atau 100%.
8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya makanan dan minuman sebanyak 894 orang kali, realisasi target terlaksana sebanyak 894 orang kali atau 100%.
9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 133.700.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.323.405,- atau 99,72% dan target capaian kegiatan (output) terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota negara dan ibukota provinsi lain sebanyak 200 OHK, terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota Provinsi Riau sebanyak

36 OHK dan terlaksananya perjalanan dinas ke ibukota kabupaten/kota lain sebanyak 16 OHK , realisasi target terlaksana sebanyak secara berurutan 48 OHK, 32 OHK dan 78 OHK atau 100%.

10. Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 61.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.200.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya tenaga keamanan kantor sebanyak 36 (3 Orang 12 Bulan), realisasi target terlaksana sebanyak 36 OB atau 100%.

11. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 153.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.000.000,- atau 100% dan target capaian kegiatan (output) tersedianya penataan/tertib administrasi kantor sebanyak 96 (8 Orang 12 Bulan), realisasi target terlaksana sebanyak 96 OB atau 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp. 569.122.220,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 567.180.600,- atau sebesar 99,66 % dengan dukungan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 323.081.325,- atau 99,41 % dan target capaian kegiatan (output) 1. Terlaksananya Rehab Gedung Kanto 1 unit, 2. Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor 1 unit, realisasi kegiatan secara berurutan 482 voucher, 12 kali, 8 unit atau sebesar 100%.

2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 237.636.220,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.633.600,- atau 99,99 % dan target capaian kegiatan (output) 1. Jumlah voucher BBM kendaraan dinas/operasional sebanyak 547 voucher, 2. Service kendaraan

- dinas sebanyak 12 kali, 3. Terlaksananya pengadaan suku cadang kendaraan dinas sebanyak 35 unit, realisasi kegiatan secara berurutan 482 voucher, 12 kali, 8 unit atau sebesar 100%.
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 6.486.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.466.000,- atau 99,69% dan target capaian kegiatan (output) Terlaksananya Service peralatan gedung kantor 32 kali, realisasi realisasi kegiatan secara berurutan 32 kali atau sebesar 100%.
- c. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp. 8.240.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.240.000,- atau sebesar 100 % dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.240.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.240.000,- atau 100 % dan target capaian kegiatan (output) 1. Tersusunnya dokumen laporan sebanyak 15 eksamplar 2. Terlaksananya penyampaian informasi website sebanyak 12 kali, realisasi realisasi kegiatan secara berurutan 5 dokumen, 12 kali atau sebesar 100%.
- d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan anggaran sebesar Rp. 99.610.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.610.000,- atau sebesar 100% dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan peningkatan keanekaragaman produk hasil olahan perikanan.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 99.610.000,- dan realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 99.610.000,- atau sebesar 100% dan target capaian kegiatan (output) 1. Terlaksananya lomba masak menu serba ikan sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting nilai konsumsi ikan sebanyak 8 kali,

realisasi kegiatan untuk lomba masak menu serba ikan sebanyak 2 kali dan terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting sebanyak 8 kali atau sebesar 100%.

- e. Program pengembangan budidaya perikanan anggaran sebesar Rp. 1.040.303.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 991.160.394,- atau sebesar 99,37% dengan dukungan 3 kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul
Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 910.933.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 865.310.000,- atau 94,99 %. Kegiatan ini memiliki Tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 500.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 128,32%, Produksi benih dicapai sebesar 641.580 ekor.
 2. Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Anggaran pada kegiatan sebesar 125.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.800.000 atau sebesar 98,08%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 40 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 72 orang kali. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 28 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi pada tahun 2020 sebesar 286,55 ton dari pembudidayaikan Kota Dumai, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 175,63 ton, produksi budidaya air payau 110,91 ton. Bila dibandingkan dengan target produksi budidaya perikanan tahun 2020, maka dapat disimpulkan telah tercapai 104,94%.
 3. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
Anggaran pada kegiatan sebesar 4.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.050.000 atau sebesar 97,12%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran Terlaksananya pemantauan usaha pembudidaya 31 kali dan hasilnya Realisasi kegiatan

pemantauan usaha pembudidaya 31 kali, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 175,63 ton, produksi budidaya air payau 110,91 ton. Bila dibandingkan dengan terget produksi budidaya perikanan tahun 2020, maka dapat disimpulkan telah tercapai 104,94%.

f Program Pengembangan Perikanan produksi perikanan tangkap anggaran sebesar Rp. 100.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.575.000,- atau sebesar 100% dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Realisasi Keuangan Sampai dengan bulan Desember 2020, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp. Rp.100.575.000,- dan Realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar Rp.100.575.000,- atau 100%. Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayanan sebanyak 3 orang, belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 240 orang/kali hasil kunjungan terhadap 30 KUB (Kelompok Usaha Bersama). Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap hanya ada 18 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya. Adapun kelompok nelayan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
2. KUB Batu Karang, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
3. KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
4. KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan

5. KUB Terbit Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 6. KUB Nelayan Bakti, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Sungai Barat
 7. KUB Maju Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.
 8. KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 9. KUB Basilam Pesisir, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 10. KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan
 11. KUB Muara Geniut, berlokasi di Kelurahan Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan
 12. KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
 13. KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai.
 14. KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
 15. KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
 16. KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
 17. KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
 18. KUB Mundam Jaya, berlokasi di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai
- g. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar anggaran sebesar Rp. 376.038.329,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 363.532.000,- atau sebesar 96,67% dengan dukungan 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi
Budidaya Perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 40.800.000,- ,dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.800.000,- atau 100%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor UPT. BBI Air Payau sebanyak 24 OB dan terealisasi 100%.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kota Dumai		Pengembangan Perikanan Tangkap					
				Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Terlaksananya operasional pendampingan 240 OK	240 OK	Tidak ada Permasalahan		
					Produksi perikanan tangkap 275,42 Ton	585.79 ton	Produksi Turun Sedikit dikarenakan pandemi	Untuk tahun kedepan diupaya ditingkatkan produksi	
				Pengembangan Budidaya Perikanan					

				Pengembangan bibit ikan unggul	Produksi benih ikan unggul 500.000 ekor	641,580 ekor	Tidak ada permasalahan		
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Honorarium tenaga pendamping 72 ob	72 ob	Tidak ada permasalahan		
					Terlaksananya operasional 40 kali	40 kali	Tidak ada permasalahan		
				Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksananya pemantauan usaha pembudidaya 31 kali	31 kali	Tidak ada permasalahan		

				Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					
				Ekstensifikasi, instensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton) 275,42 Ton	585.79 ton	Produksi Turun Sedikit dikarenakan pandemi		

C.2. Urusan Pilihan Pertanian, Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Pelaksanaan urusan pilihan pertanian sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2017-2021. Pencapaian sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sampai dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 49 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
DKPP 2018 - 2019**

No	Indikator kinerja sasaran	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
A	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat				
1	Angka Kecukupan Protein	52 gr/kap/ha ri	52 gr/kap/h ari	52 gr/kap/h ari	100,0 0
B	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan				
1	Cakupan Bina Kelompok Tani	140 Kelompo k	159 Kelompo k	173 Kelompo k	100,0 0
C	Meningkatnya Produksi Pertanian				
1	Produksi Komoditi Pertanian	22.418 Ton	21.041 Ton	33.260 Ton	100,00
2	Produksi Komoditi Perkebunan	85.025 Ton	85.256 Ton	85.340 Ton	100,0 0
3	Populasi Ternak	7.013 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak	6.768 Satuan Ternak	100,0 0

No	Indikator kinerja sasaran	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
D	Menurunnya Kasus Hewan Menular				
1	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	0 Kasus	11 Kasus	1 Kasus	100,0 0
2	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	6 Kasus	15 Kasus	5 Kasus	100,0 0
3	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis	0 Kasus	10 Kasus	6 Kasus	100,0 0

Dari tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat ini dilaksanakan melalui program pembangunan peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan). Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni; Angka Kecukupan Protein.

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2020 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 52 gr/kapita/hari.

Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein sampai dengan tahun 2019 yakni 52 gr/kapita/hari atau 100,00% dari target 52 gr/kapita/hari. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

B. Meningkatkan Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan

Sasaran Meningkatkan Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan ini dilaksanakan melalui program Peningkatan Kesejahteraan petani. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni; Cakupan Bina Kelompok Petani.

Cakupan Bina Kelompok Tani merupakan jumlah dari kelompok tani di Kota Dumai yang diberikan bantuan baik sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, lahan pekarangan maupun peternakan dan juga pelatihan/magang. Target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2020 yakni 159 Kelompok. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 173 Kelompok atau tercapai 100%. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Kedua kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, sasaran ini juga didukung oleh kegiatan pada program lain yang mendukung secara tidak langsung.

C. Sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian

Sasaran Meningkatkan Produksi Pertanian mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a. Produksi Komoditi Pertanian

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian pada tahun 2020 sebesar 21.041 Ton dengan capaian sebesar 33.260 Ton atau tercapai 100,00% dari target.

b. Produksi Komoditi Perkebunan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Perkebunan pada tahun 2020 sebesar 85.256 Ton dengan capaian sebesar 85.340 Ton atau 100,00% dari target.

c. Populasi Ternak

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak. Target indikator kinerja Populasi Ternak pada tahun 2020 sebanyak 6.303 Satuan Ternak dengan realisasi 6.768 Satuan Ternak atau tercapai 100,00% dari target.

D. Sasaran Menurunnya Kasus Hewan Menular

Sasaran Menurunnya Kasus Hewan Menular pada tahun 2020 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal

Hewan Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Penurunan Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan pada tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kasus dengan capaian sebanyak 1 (satu) atau tercapai 100,00%. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

b. Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Kasus Hewan Menular Strategi Zoonosis pada tahun 2020 sebanyak 15 (lima belas) kasus dengan capaian sebanyak 5 (lima) kasus atau tercapai 100,00%. Kegiatan yang mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

c. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 program utama, yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Target indikator kinerja Jumlah Kasus Hewan Menular Strategi Non Zoonosis pada tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kasus dengan capaian sebanyak 6 (enam) kasus atau tercapai 100,00%. Kegiatan yang

mendukung arah kebijakan ini yaitu Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Adapun realisasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 483.162.950,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.464.098.200,00 atau 96,05% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.264.446.000,00 atau 97,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan sebanyak 15 Kelompok dengan realisasi 15 Kelompok.

b) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 213.162.950,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.652.200,00 atau 93,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah peternak yang terlatih 75 KK dengan realisasi 75 KK.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.071.933.234,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.029.027.224,00 atau 97,93% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.77.396.234,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.77.246.234,00 atau 99,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

- b) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.142.380.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.142.298.300,00 atau 99,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.
- c) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 620.450.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 605.821.800,00 atau 97,64%. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan 40 orang dengan realisasi 40 orang, Terlaksananya pengembangan tanaman buah dalam pot 2 kelompok dengan realisasi 2 kelompok.
- d) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.83.085.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.83.038.644,00 atau 99,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Pendampingan kegiatan APBN hortikultura dan tanaman pangan 1 Kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.
- e) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12.350.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.350.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penyuluhan p
- f) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.272.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.108.272.246,00 atau 97,54% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penanaman tanaman buah-buahan di KPT 3.000 batang dengan realisasi 3.000 batang,

Pengembangan Tanaman Cabe 14 Ha dengan realisasi 14 Ha, Pengembangan tanaman nenas 12 Ha dengan realisasi 12 Ha, Pengembangan Jagung Manis 2 ha dengan realisasi 2 Ha dan pengembangan Semangka 3 Ha dengan realisasi 3 Ha.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.213.349.861,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.176.653.064 atau 98,34% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.169.664.861,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.133.173.064,00 atau 98,32% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian 13 unit dengan realisasi 13 Unit, Pembangunan Box Culvert dan Dwiker 4 Unit dengan realisasi 4 Unit, Terlaksananya Land Clearing/Pembersihan Lahan di KPT 1 Kali dengan realisasi 1 Kali, Terlaksananya pembuatan saluran air/parit 1 unit dengan realisasi 1 kali, Terbangunnya saung/rumah istirahat dan kelengkapannya 1 unit dengan realisasi 1 unit, Terbangunnya tempat parkir mobil dan motor 1 unit dengan realisasi 1 unit, Terbangunnya saluran air (*long storage*) 1 unit dengan realisasi 1 unit, Pembangunan Irigasi Sumur Air Dangkal 4 Unit dengan realisasi 4 Unit, Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian 39 unit dengan realisasi 39 unit. Realisasi hanya 76,27% dikarenakan untuk pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal dari jumlah 5 unit hanya terlaksana 3 unit. 2 unit tidak terlaksana karena terkendala regulasi dan persyaratan kelompok tani penerima bantuan.
- b) Kegiatan Penyuluh Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.685.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.480.000,00 atau 99,53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan

teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.507.235.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.497.027.250,00 atau 97,96% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.200.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.780.000,00 atau 98,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah Bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan 4 kali dengan realisasi 4 kali.
- b) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 480.035.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 470.247.250,00.

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.343.925.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.341.257.875,00 atau 99,22% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.197.525.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.194.925.000,00 atau 98,68% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.
- b) Kegiatan Penyuluhan dan Pedampingan Bagi Pertanian/Perkebunan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.146.400.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.146.332.875,00 atau 99,95% dari anggaran. Adapun

indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pelatihan bagi pemuda tani/petani milenial 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya magang bagi pemuda tani/petani milenial 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.363.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.349.800.000,00 atau 96,36% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.178.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.168.000.000,00 atau 94,38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan, Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik verteriner di puskesmas 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

b) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.185.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.181.800.000,00 atau 98,27% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya Pengawasan Pematangan Hewan Qurban 1 Kali dengan realisasi 1 kali.

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.594.300.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.590.200.000,00 atau 99,31% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.348.660.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp.345.160.000,00 atau 99,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah Inseminasi Buatan (IB) yang dilakukan 1.150 ekor dengan realisasi 1.150 ekor.

b) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.245.640.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.245.040.000,00 atau 99,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Peternak 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya seleksi calon petani calon lokasi 15 Kelompok dengan realisasi 15 Kelompok.

8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.514.121.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.510.895.850,00 atau 99,37% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 514.121.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 510.895.850,00 atau 99,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Pengamatan Dini dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 15 kali dengan realisasi 15 kali.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.886.002.050,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.1.841.196.241,00 atau 97,62% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.800.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.2.767.000,00 atau 57,65% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.208.250.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.171.852.263,00 atau 82,52% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.39.550.000,00 atau 98,88 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12.700.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.11.200.000,00 atau 88,19 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.335.945.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.335.775.000,00 atau 99,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.89.092.050,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.8.892.000 atau 99,78% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.
- g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.79.350.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran

Rp.79.130.000 atau 99,72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan

- h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.11.695.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.11.595.000,00 atau 99,14% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- i) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.175.400.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.173.850.000,00 atau 99,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- j) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.17.640.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.17.100.000,00 atau 96,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- k) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14.550.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.13.150.000,00 atau 90,38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

- l) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.676.580.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.676.334.978,00 atau 99,96% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

m) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.190.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 12 dengan realisasi 12 Bulan.

n) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

o) Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terselengaran Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.278.273.450,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.1.261.062.750,00 atau 98,65% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 199.681.750,00 atau 99,84% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terbangunnya Pagar Kantor 1 Unit dengan realisasi 1 Unit.

b) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 237.950.000,00 atau 95,18% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya kendaraan dinas/operasional 8 Unit dengan realisasi 8 Unit.

c) Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.943.450,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 100.665.000,00 atau 99,72% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur 10 Jenis dengan

realisasi 10 Jenis.

d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.563.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 559.466.000,00 atau 99,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 4 Unit dengan realisasi 4 Unit, Rehab Sumur Bor di RPH 1 Unit dengan realisasi 1 Unit.

e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.164.330.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 163.300.000,00 atau 99,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan.

f) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.500.000,00 atau 100,00% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 1.500.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan dengan realisasi 2 Laporan.

g) Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.064.637.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.2.031.540.672,00 atau 99,60 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 958.045.00,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 935.879.400,00 atau 97,69% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemeliharaan persemaian tanaman kehutanan

1 ha dengan realisasi 1 Ha.

- b) Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 334.147.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 326.340.522,00 atau 97,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemeliharaan tahun I tanaman penghijauan sebanyak 5.000 Batang dengan realisasi 5.000 Batang.

- c) Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 772.445.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 769.320.750,00 atau 99,60% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pembuatan sumur resapan/biopori sebanyak 300 Buah dengan realisasi 300 buah, Terlaksananya pembuatan embung dan kantong air 3 buah dengan realisasi 0 Buah. Pembuatan embung ini tidak terlaksana karena rekening belanjanya merupakan Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sehingga harus melalui mekanisme hibah dimana usulan diberikan kepada masyarakat jika ada usulan proposal dari masyarakat, namun sampai batas waktu yang ditentukan usulan proposal permintaan dari masyarakat tidak ada sehingga pekerjaan tidak dilaksanakan.

h) Program Penanaman Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.732.425.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.712.633.300,00 atau 97,30% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Kegiatan Penanaman Di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.732.425.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 712.633.300,00 atau 97,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penanaman pohon penghijauan 15.000 batang dengan realisasi 15.000 Batang.

i) Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.678.292.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.053.044.163,00 atau 83,00% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.302.432.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.1.292.155.663,00 atau 99,21% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penanaman Jagung 2 Ha dengan realisasi 2 Ha, Penanaman Aren 30 Ha dengan realisasi 30 Ha dan penanaman durian 5 Ha dengan realisasi 5 Ha.

b) Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.375.860.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.1.760.888.500,00 atau 74,12% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengendalian karhutla 7 jenis dengan realisasi 6 jenis. Satu jenis sarana dan prasarana yang tidak terlaksana yaitu pengadaan kendaraan bermotor roda empat (Micro bus) untuk mobilisasi regu pemadam kebakaran lahan dan kebun, hal ini disebabkan karena harga kendaraan tersebut di e-katalog LKPP mengalami kenaikan sehingga pagu anggaran yang ada tidak mencukupi.

j) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.29.842.355,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.29.730.500,00 atau 99,63% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.842.355,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.

29.730.500,00 atau 99,63% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata target 100 persen dengan realisasi 100 Persen.

Lampiran 3.C.2. Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Dumai Tahun 2020

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Persentase Ketersediaan Kebutuhan Administrasi Kantor	100%	100%			
				1 Kegiatan Jasa Surat Menyurat					
				Keluaran : Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil : Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil : Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
				3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Keluaran : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			

			Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						
			Keluaran	: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						
			Keluaran	: Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor						
			Keluaran	: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			Keluaran	: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	: Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Keluaran	: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	12 Bulan			

				Bangunan Kantor					
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Keluaran	Tersedianya Peralatan dan : Perlengkapan Kantor	11 Jenis	11 Jenis			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	11 Jenis	11 Jenis			
			1 0	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
			Keluaran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- : Undangan	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			1 1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman					
			Keluaran	Tersedianya Makanan dan : Minuman	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			1 2	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					
			Keluaran	Terselenggaranya Rapat- rapat Koordinasi dan : Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			1 3	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor					
			Keluaran	: Tersedianya Tenaga	12	12			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

				Keamanan Kantor	Bulan	Bulan			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			1 4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Keluaran	Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	Lancarnya Administrasi : Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
			B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Capaian Program	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana : Aparatur	90%	90%			
			1 5	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor					
			Keluaran	Terbangunan Pagar Kantor : 1 Unit	1 Unit	1 Unit			
			Hasil	: Peningkatan Sarana Kantor	1 Unit	1 Unit			
			1 6	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					
			Keluaran	Tersedianya Kendaraan : Dinas/Operasional	8 Unit	8 Unit			
			Hasil	: Peningkatan Sarana Kantor	8 Unit	8 Unit			
			1 7	Kegiatan Pengadaan Mebeleur					
			Keluaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mebeleur	10 Jenis	10 Jenis			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

			Hasil	: Peningkatan Sarana Kantor	10 Jenis	10 Jenis			
			1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala						
			8 Gedung Kantor						
			Keluaran	: Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	4 Unit			
			Hasil	: Tersedianya Bangunan Gedung Kantor yang baik dan Layak	12 Bulan	4 Unit			
			1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala						
			9 Kendaraan Dinas/Operasional						
			Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan			
			Hasil	: Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
			Capaian Program	: Jumlah Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan			
			2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran						
			Keluaran	: Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan			
			Hasil	: Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan			
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
			Capaian Program	: Cakupan Bina Kelompok	159	159			

				Tani	Kelompok	Kelompok			
				2 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku 1 Agribisnis					
				Keluaran	: Jumlah Peternak yang dilatih	75 KK	75 KK		
				Hasil	: Peningkatan Kapasitas Peternak	75 KK	75 KK		
				2 Kegiatan Peningkatan Kemampuan 2 Lembaga Petani					
				Keluaran	: Jumlah Kelompok Tani yang terlatih dan dikembangkan	180 Kelompok	180 Kelompok		
				Hasil	: Peningkatan ilmu dan keterampilan petani	180 Kelompok	180 Kelompok		
				E Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)					
				Capaian Program	: Skor PPh Konsumsi	82,91 Skor	82,91 Skor		
				2 Kegiatan Penyusunan Data Base 3 Potensi Produk Pangan					
				Keluaran	: Terlaksananya Pendataan SP dan Ubinan Produktivitas Tanaman	12 Bulan	12 Bulan		
				Hasil	: Tersedianya Data SP dan Ubinan Produktivitas Tanaman	12 Bulan	12 Bulan		
				2 Kegiatan Laporan Berkala Kondisi 4 Ketahanan Pangan Daerah					
				Keluaran	: Terlaksananya pemantauan	12	12		

			2 7	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan						
				Keluaran	:	Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI	5 Kali	5 Kali		
				Hasil	:	Tersalurnya pengetahuan pangan yang Baik Bergizi Sehat dan Aman	5 Kali	5 Kali		
			2 8	Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian						
				Keluaran	:	Terlaksananya penanaman tanaman buah- buahan di KPT	3000 Batang	3000 Batang		
						Pengembangan Tanaman Cabe	14 Ha	14 Ha		
						Pengembangan Tanaman Nenas	12 Ha	12 Ha		
						Pengembangan Tanaman Jagung Manis	2 Ha	2 Ha		
						Pengembangan Semangka	3 Ha	3 Ha		
				Hasil	:	Penanaman Tanaman buah di KPT	3000 Batang	3000 Batang		
						Pengembangan tanaman hortikultura untuk masyarakat	31 Ha	31 Ha		
			F	Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan						
				Capaian Program	:	Jumlah pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan	1 Kali	1 Kali		
			2 9	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna						

				Keluaran	: Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian	13 Unit	13 Unit			
					Pembangunan Box Culvert dan Dwiker	4 Unit	4 Unit			
					Terlaksananya Land Clearing/ Pembersihan Lahan di KPT	1 Kali	1 Kali			
					Terlaksananya Pembuatan Saluran Air/Parit	1 Unit	1 Unit			
					Terbangunan Saung/ rumah istirahat dan kelengkapannya	1 Unit	1 Unit			
					Terbangunnya tempat parkir mobil dan motor	1 Unit	1 Unit			
					Terbangunnya Saluran Air (long storage)	1 Unit	1 Unit			
					Terbangunnya Irigasi Sumur Air Dangkal	4 Unit	4 Unit			
				Hasil	: Tersedianya alat dan mesin pertanian	13 Unit	13 Unit			
					Peningkatan Sarana berupa Box Culvert dan Dwiker di KPT	4 Unit	4 Unit			
					Tersedianya lahan siap tanam	1 Luasan	1 Luasan			
					Terbangunannya saluran air/ parit	1 Unit	1 Unit			
					Tersedianya Saung/ rumah istirahat dan kelengkapannya	1 Unit	1 Unit			
					Tersedianya tempat parkir mobil dan motor	1 Unit	1 Unit			
					Tersedianya sarana irigasi pertanian (long storage)	1 Unit	1 Unit			
					Tersedianya Irigasi Sumur Dangkal	4 Unit	4 Unit			
				3 0	Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat					

			guna						
			Keluaran	:	Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan	1 Kali	1 Kali		
			Hasil	:	hasil perkebunan Tersalurnya teknologi baru pengolahan hasil perkebunan kepada petani	1 Kali	1 Kali		
			G Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan						
			Capaian Program	:	Luas Peremajaan Tanaman Perkebunan	100 Ha	100 Ha		
			3 1		Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan				
			Keluaran	:	Jumlah Bimtek/temu lapang/sosialisasi budidaya tanaman perkebunan	4 Kali	4 Kali		
			Hasil	:					
			3 2		Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan				
			Keluaran	:	Peremajaan tanaman perkebunan, Pinang (1 Kelompok)	8800 Batang	8800 Batang		
			Hasil	:	Tersalurnya bantuan ke masyarakat berupa bibit pinang dan sarana intensifikasi perlindungan tanaman perkebunan	1 kelompok	1 kelompok		
			H Program Pemberdayaan Penyuluhan						

				pertanian/perkebunan Lapangan						
				Capaian Program	Jumlah Balai Penyuluh Pertanian yang meningkat Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit			
			3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan						
			3	Keluaran	Terpenuhinya rasio penyuluh yang polivalen 1 penyuluh 1 kelurahan	7 Kecamatan	7 Kecamatan			
					Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan programa	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil	penyuluhan Lancarnya pelaksanaan penyuluhan	12 Bulan	12 Bulan			
			3	Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan						
			4	Keluaran	Terlaksananya pelatihan bagi pemuda tani/ petani milenial	1 Kali	1 kali			
					Terlaksananya magang bagi pemuda tani/ petani milenial	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Hasil	Transformasi ilmu bagi pemuda tani / petani milineal	1 Kali	1 kali			
			I	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
				Capaian Program	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis	11 Kasus	11 Kasus			
					Jumlah Kasus Penyakit	15	15			

**Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah**

				Hewan Menular Strategis non Zoonosis	Kasus	Kasus			
				Jumlah Kasus Cemaran biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan	10 Kasus	10 Kasus			
			3 5	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak					
				Keluaran : Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas	12 Bulan	12 Bulan			
				Tersedianya alat dan bahan Vaksinasi Rabies, Jembrana dan SE	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Hasil : Lancarnya pelayanan keswan di puskesmas	12 Bulan	12 Bulan			
			3 6	Kegiatan Pengawasan Perdagangan ternak antar daerah					
				Keluaran : Terlaksananya pengawasan peredaran BAH/HBAH	12 Bulan	12 Bulan			
				Hasil : Lancarnya pemantauan peredaran BAH/HBAH	12 Bulan	12 Bulan			
			J	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
				Capaian Program : Jumlah Populasi Ternak	6.303 Satuan Ternak	6.303 Satuan Ternak			
			3 7	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak					
				Keluaran : Jumlah Inseminasi buatan yang dilakukan (IB)	1.150 Ekor	1.150 Ekor			

			Hasil	: Pengembangan ternak sapi	1.150 Ekor	1.150 Ekor			
			3 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak 8 kepada Masyarakat						
			Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pendampingan peternak	12 Bulan	12 Bulan			
				: Terlaksananya Seleksi Calon Petani Calon Lokasi	15 Kelompok	15 Kelompok			
			Hasil	: Terdistribukan perguliran ternak ke masyarakat	15 Kelompok	15 Kelompok			
			K Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
			Capaian Program	: Jumlah Penanganan Kebakaran Lahan Pertanian/Perkebunan	15 Kali	15 Kali			
			3 Kegiatan Pengendalian Kerusakan 9 Hutan dan Lahan						
			Keluaran	: Pengamatan dini dan Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun	15 Kali	15 Kali			
			Hasil	: Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun	15 Kali	15 Kali			
			L Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan						
			Capaian Program	: Jumlah Persemaian tanaman penghijauan yang bernilai produktif	1 Ha	1 Ha			

				4 0	Kegiatan Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)						
					Keluaran	:	Terlaksananya pembibitan tanaman penghijauan yang bernilai produktif	1 Ha	1 Ha		
					Hasil	:	Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan yang bernilai produktif	20.000 Batang	20.000 Batang		
							Tersedianya bibit tanaman kehutanan yang bernilai produktif	30.000 Batang	30.000 Batang		
							Tersedianya bibit tanaman buah produktif di kecamatan	18.250 Batang	18.250 Batang		
				4 1	Kegiatan Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)						
					Keluaran	:	Terlaksananya pemeliharaan Tahun II tanaman penghijauan	5.000 Batang	5.000 Batang		
							Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I Tanaman Penghijauan	6.000 Batang	6.000 Batang		
					Hasil	:	Terpeliharanya Tanaman Penghijauan di Luar Kawasan hutan Tahun II				
							Terpeliharanya Tanaman Penghijauan di Luar Kawasan hutan Tahun I				
				4 2	Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air						
					Keluaran	:	Terlaksananya pembuatan lubang biopori	350 buah	350 buah		
							Terlaksananya pembuatan kolam retensi	4 buah	4 buah		

			Hasil	:	Tersedianya lubang biopori	350 buah	350 buah			
					Tersedianya kolam retensi	4 buah	4 buah			
			M		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan					
					Capaian Program					
					Luas Agroforestry tanaman pertanian dan kehutanan	37 Ha	37 Ha			
					Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan karlabun	7 Jenis	7 Jenis			
			4		Kegiatan Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)					
					Keluaran					
					Terlaksananya Tanaman Jagung	2 Ha	350 buah			
					Terlaksananya Penanaman Aren	30 Ha	4 buah			
					Terlaksananya Penanaman Durian	5 Ha	5 Ha			
					Hasil					
					Agroforestry Tanaman Pertanian dan Kehutanan	37 Ha	37 Ha			
			4		Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					
					Keluaran					
					Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Karhutla	7 Jenis	7 Jenis			
					Hasil					
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendalian Karhutla	7 Jenis	7 Jenis			

				Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan						
				N	Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah					
					Capaian Program	Penanaman Pohon : Penghijauan	15.000 Batang	15.000 Batang		
				4 5	Kegiatan Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)					
					Keluaran	Terlaksananya Penanaman Pohon Penghijauan	15.000 Batang	15.000 Batang		
					Hasil	Tertanamnya Pohon Penghijauan	15.000 Batang	15.000 Batang		
				O	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
					Capaian Program	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata	100%	100%		
				4 6	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah					
					Keluaran	Persentase Aset Milik Perangkat Daerah yang terpelihara dan terdata	100%	100%		
					Hasil	Tersedianya data aset yang dipelihara	100%	100%		
									Dst	Dst
										Dst

A. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan. Adapun rincian Program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.04.4.099315/2020 (revisi 5) tanggal 22 Juli 2020. Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

- Pengembangan Cabe Merah 20 Ha.
- Pengembangan Cabe Rawit 5 ha, dan
- Pengembangan Bawang Merah 10 Ha

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat sebesar Rp.493.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.461.801.440,- atau 93,51%.

2. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.03.099314/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Propinsi Riau Nomor : 180/ DISPTPH-PANGAN/85 tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN

Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun Anggaran 2020. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 1.022.171.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.019.771.500,- atau 99,77%.

3. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaana dan sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.08.4.099322/2020 tanggal 03 Februari 2020. Jumlah alokasi anggaran untuk Dumai Rp. 312.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.278.596.000,- atau 89,17%. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 188/DISPTPH-PSP/88 tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan meliputi PPK, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar dan bendahara pengeluaran serta bendahara penerimaan anggaran APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan

Tugas pembantuan ini dengan Nomor : SP-DIPA-018.11.14.099426/2020 tanggal 12 Desember 2019, merupakan dana tugas pembantuan yang dititipkan melalui kegiatan dekosentrasi Badan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau yang kegiatannya dialokasikan untuk Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau Nomor : OT.210/13/SATKER-DPTPH/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Teknis / Kegiatan dekonsentrasi satuan kerja Dinas Pangan, Tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau di Kota Dumai. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 591.295.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 591.295.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.564.285.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.564.285.000,- Atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Pendampingan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) dengan target 12 kelompok yang terdiri dari 7 (tujuh) kelompok tahap penumbuhan dan 5 (lima) kelompok tahap pengembangan dan terealisasi sebanyak 12 kelompok (7 kelompok penumbuhan dan 5 kelompok pengembangan).

2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.200.000,- Atau 100% dari anggaran.

b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.18.810.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.810.000,- Atau 100,00% dari anggaran.

C.3. Urusan Pilihan Perdagangan, Oleh Dinas Perdagangan

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Perdagangan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Perdagangan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3. 50 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 Dinas Perdagangan
Kota Dumai**

No	Indikator	Satuan	Capaian kondisi akhir 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
1	2	3	4		
1	Ekspor bersih perdagangan	Rupiah	1.996 M	(USD) 10.396.561.570	53175852 %
2	Persentase pasar tradisional yang sesuai standard	%	23	20	86,95%

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a) Pengembangan pelayanan UPT Metrologi Legal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 114,266,145.00 (Seratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 93,539,145.00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan seratus empat puluh lima rupiah) atau 81,86%.

b) Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 14.550.000.00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 74,23%

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Kegiatan penambahan sarana dan prasarana Pasar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.66,924,000.00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 66,247,510.00 (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) Atau 98.99 %

b) Peningkatan pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pokok masyarakat.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20,600.000.00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.20.259,874.00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 98.35%

3. Program Pembinaan pedagang Kaki lima dan asongan

a) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30,505,000.00 (tiga puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30,505,000.00 (tiga puluh juta lima ratus lima ribu rupiah) atau 100.00%

b) Pedataan pedagang Kaki Lima.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.10,200,000.00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10,200,000.00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau 100.00%

4. Program Pelayanan administasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 744.000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.742,000.00 Atau 99.73%

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.246,750,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 245,442,381.00 Atau 99,47%

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.169,753,700.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.165,201,730.00 Atau 97.32%

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.430,201,850.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.429,966,850.00 Atau 99.95%

e) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.39,792,525.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39,792,525.00 Atau 100.00%

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.52,237,850.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.37,318,050.00 Atau 71,44%

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12,209,900.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.12,209,900.00 Atau 100.00%

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30,150,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30,080,000.00 atau 99.77%

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.9,900,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp9,885,000.00 Atau 99.85%

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.256,436,575.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.256,421,973.00 atau 99,99%

k) Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 364,500,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.364,029,952.00 Atau 99.87%

l) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.468,000,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.467,585,000.00 Atau 99.91%

5. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

a) Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.55,000,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.50,484,000.00 Atau 91.79%

b) Pengadaan mebeleur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.19,868,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.19,868,000.00 Atau 100.00%

c) Pemeliharaan Rutin/bekala peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.23,370,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.23,336,000.00 Atau 99.85%

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.10,216,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10,216,000.00 Atau 100.00%

b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1,800,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1,745,000.00 Atau 96.94%

c) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1,000,000.00 Dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.945,000.00. Atau 94.50%.

1. Pengembangan pelayanan UPT Metrologi legal

Indicator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 1.833Alat. Dinas perdagangan melalui UPT Metrologi legal melaksanakan pelayanan tera ini sebanyak 30 alat. Untuk mendukung indicator ini, dialokasikan pagu anggaran sebanyak Rp.114,266,145.00dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Pagu dana yang berhasil diserap adalah Rp.93,539,145.00 sehingga didapatlah persentase sebesar 81.86%

2. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Indikator keluaran dari kegiatan adalah jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha sebanyak 500 UTTP. Kegiatan ini dilakukan Dinas perdagangan di bawah bidang metrologi. Untuk mendukung indikator ini, dialokasikan pagu anggaran sebanyak Rp.14,550,000.00 dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, pagu dana yang berhasil diserap Rp.10,800,000.00sehingga persentase realisasi sebesar 74.23%

3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pokok masyarakat

Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mengendalikan terjadinya fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Dalam kegiatan ini ,diutamakan untuk memantau harga elpiji di kota Dumai. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh 7 kecamatan kota dumai. Untuk mendukung indikator kinerja ini, dialokasikan pagu dana sebesar Rp.20,600,000.00dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Pagu dana yang berhasil diserap adalah Rp.20,259,874.00 sehingga didapatlah presentase realisasi sebesar 98.35%

4. Penambahan sarana dan prasarana pasar

Indikator keluaran yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah sebanyak 2 buah pasar. Untuk mendukung indikator kinerja ini. Pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp.66,924.000.00dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Pagu dana yang berhasil diserap adalah Rp.66,247,510.00 sehingga di dapatlah presentase realisasi sebesar 98.99%

5. Pendapatan pedagang kaki lima

Indikator keluaran kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pedagang kaki lima. Untuk mendukung indikator kinerja ini. Dialokasikan pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp.10,200,000.00 dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Pagu dana

yang berhasil diserap adalah Rp.10,200,000.00 sehingga didapatkan presentase realisasi sebesar 100.00%

6. Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penataan dan penerbitan pedagang kaki lima dan asongan sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban pasar. Untuk mendukung indikator kinerja ini, dialokasikan pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp.30,505,000.00 dan sampai pada dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Pagu dana yang berhasil di serap adalah Rp.30,505,000.00 Sehingga didapatkan presentase realisasi sebesar 100,00%

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- Sering terjadinya gangguan terhadap kelancaran arus barang khususnya kebutuhan bahan pokok masyarakat terutama gas elpiji 3 kg sehingga sangat mempengaruhi fluktuasi harga dipasaran. Hal ini membuka kesempatan kepada pelaku usaha untuk berspekulasi yang mengakibatkan kadang kala ketersediaan barang/elpiji menjadi langka.
- Anggaran yang terbatas untuk menunjang kegiatan.

2. Solusi

- Meningkatkan serta mengintensitaskan pengawasan terhadap pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga ketersediaannya terjamin dengan tingkat harga yang wajar termasuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Pertamina dalam meningkatkan jumlah kuota LPG di Kota Dumai.
- Mengusulkan peningkatan SDM Aparatur dengan peningkatan kemampuan teknis.
- Mengusulkan peningkatan dana guna menunjang program dan kegiatan disektor perdagangan.

Lampiran 3.C.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan
Kota Dumai Tahun 2020

No	urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	kebijakan	Uraian Prog/KEG	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Pemasalahan
	Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Dumai		<p><u>A. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan</u></p> <p>1. Pengembangan Pelayanan UPT metrologi Legal 1883 Keluaran : Terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP Hasil : meningkatkan Kesadaran hukum bagi Pelaku usaha untuk melakukan Tera-tera ulang alat UTTP dan talibrasi dari kegiatan perdagangan</p> <p>2.Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian Keluaran : jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha Hasil : meningkatkan Kesadaran hukum bagi Pelaku usaha untuk melakukan Tera-tera ulang alat UTTP dan talibrasi dari kegiatan perdagangan</p> <p><u>B. Program kegiatan dan pengembangan ekspor</u></p> <p>1. sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor</p> <p><u>C. Program peningkatan efsiensi perdagangan dalam Negeri</u></p> <p>1. Penambahan sarana dan prasarana Pasar Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah yang ada Hasil : Menjadikan pasar rakyat sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang maju,mandiri dan profosional</p> <p>2. peningkatan pengawasan dan pengendalian distribusi bahan pokok masyarakat</p>	573 unit			
					1833	81,86%		
					500 UTTP	74,23%		
					5%			
					35 Ekpostir	0		
					15000 KK			
					1 Pasar	98,99%		
					7 Kecamatan	98,35%		

			<p>Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat Hasil : Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</p>				
			<p>D. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</p>	10 Bulan			
			<p>1. kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan keluaran: Frekuensi terlaksananya penataan dan penertiban PKL dan Asongan hasil : Terwujudnya penataan kreasi dan aktivitas pedagang kaki lima yang tertib</p>	3 Bulan	100%		
			<p>2. pendataan pedagang kaki lima keluaran: terlaksananya kegiatan pendataan pedangan kaki lima hasil : terwujudnya kawasan pedagang kaki lima yang tertib</p>	1 Kegiatan	100%		

D. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

D.1. Urusan Pemerintahan, Oleh Sekretariat Daerah

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka dapat dijelaskan pencapaian tahun anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3. 51 Indikator Kinerja Perubahan Tahun 2020
Sekretariat Daerah Kota Dumai**

No	Indikator kinerja sasaran	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
1.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat 5	Peringkat 5	Dalam Proses Penilaian	Proses
2.	Jumlah Konflik/Permasalahan Tanah di Kota Dumai yang terselesaikan	2 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100%
3.	Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan	274 Kelompok	281 Kelompok	281 Kelompok	100%
	PKK Aktif	100%	100%	100%	100%
	Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Masjid yang ditingkatkan Pembinaannya menjadi Masjid Paripurna Kecamatan	-	57,14%	-	-
5.	Persentase MoU dengan pihak ketiga yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%

6.	Persentase proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan SPSE	-	80%	80%	100%
----	--	---	-----	-----	------

Sumber : Sekretariat Daerah, 2020

Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan adalah, sebagai berikut:

1. Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau adalah dengan target peringkat 5. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 belum terealisasi karena penilaian LPPD Kota Dumai masih dalam proses di kantor pusat.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);

2. Jumlah konflik/permasalahan tanah di Kota Dumai yang terselesaikan adalah dengan target 5 kasus. Capaian indikator kinerja sasaran ini dari penyelesaian konflik/permasalahan tanah yang telah diselesaikan pada tahun 2020 dari target 5 kasus sudah terealisasi yaitu 5 kasus yang telah diselesaikan yaitu:
 - a) Tanah Hak Pakai PT. CPI-Dumai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 1975 dengan luas 3.385,46 Ha berakhir masa berlakunya pada 11 Agustus 1989, sebagian besar tanah tersebut berada dalam penguasaan kelompok masyarakat, orang perorang dan terdapat juga bangunan fasilitas Pemerintah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 - b) Permasalahan tanah dalam kawasan hutan;
 - c) Permasalahan tanah bangunan gedung SDN 002 Bagan Besar Bukit Kapur. Permasalahannya : Tanah tersebut diserahkan/dihibahkan pemiliknya untuk dibangun gedung panti asuhan, tetapi oleh karena tanahnya cukup luas maka ketua yayasan menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Dinas P dan K Kabupaten Dati II Bengkalis untuk pembangunan gedung SDN 002 Bagan Besar. Atas hal tersebut ahli waris keberatan dan

mengajukan permintaan ganti rugi atas tanah tersebut karena tidak sesuai peruntukannya;

- d) Permasalahan Tanah Kelompok masyarakat Kelurahan Mekar Sari, antara kelompok M. Rais dengan kelompok Sarmiyah. Terjadi saling klaim kepemilikan tanah. Permasalahan ini telah pernah difasilitasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan tetapi tidak menemui jalan keluar, maka pihak M. Rais mengajukan permohonan kepada Walikota Dumai untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini; dan
- e) Permasalahan Tanah Almarhum Kasban yang terletak di Jalan Tanjung Jati Kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Timur. Permasalahan: Ahli waris almarhum Kasban meminta pihak Kelurahan untuk menerbitkan Surat tanah atas tanah tersebut, tetapi pihak kelurahan keberatan untuk menerbitkan surat tanah tersebut karena menurut Lurah ada indikasi bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah hak pakai PT. CPI. Ahli waris almarhum Kasban membuat permohonan ke Walikota Dumai untuk fasilitasi permasalahan tersebut.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik - konflik pertanahan daerah Kota Dumai

3. Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK adalah dengan target sebanyak 281 kelompok binaan PKK.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dengan realisasi sebanyak 281 kelompok binaan PKK, sehingga persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan melalui 7 PKK Kecamatan dan 33 PKK Kelurahan di setiap kelurahan.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK).

PKK aktif dan Posyandu aktif dengan target persentase adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dengan realisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah PKK aktif di Kota Dumai

sebanyak 41 PKK aktif dan terealisasi sebanyak 41 PKK aktif.

Posyandu aktif dengan target persentase adalah 100%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dengan realisasi 100% sehingga persentase capaian kinerja ini adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan ini adalah Posyandu aktif di Kota Dumai sebanyak 196 Posyandu aktif dan terealisasi sebanyak 196 Posyandu aktif atau dengan persentase 100%. Dalam hal ini, PKK aktif dan Posyandu aktif Kota Dumai melakukan pembinaan di 7 kecamatan dan 33 kelurahan.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) dan kegiatan revitalisasi dan pembinaan Pokjanal Posyandu.

4. Persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan adalah dengan target sebanyak 57,14%. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 belum terealisasi sehingga kegiatan ini belum dilaksanakan karena peraturan daerah (Perda) belum disahkan oleh DPRD Kota Dumai (kriteria penetapan masjid paripurna di Kota Dumai belum terpenuhi) dan adanya pengurangan anggaran atau *refocusing* untuk mengatasi wabah *Pandemic Covic-19* di Kota Dumai.
5. Persentase proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan SPSE adalah 80%. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 adalah 80% dengan target dan realisasi 80% atau dengan capaian kinerja adalah 100%. **Kegiatan pendukung sasaran ini adalah kegiatan pengembangan dan penataan LPSE Kota Dumai**
6. Persentase MoU dengan pihak ke tiga yang dilaksanakan. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 adalah dengan target dan realisasi 100% atau dengan capaian kinerja adalah 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, kegiatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dan kegiatan peningkatan dan pengembangan kerjasama antara negara.

Adapun MoU dengan Kabupaten/Kota, Luar Negeri dan Pihak ke Tiga yang dilaksanakan adalah sebanyak 12 MoU. Dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.52 Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah
Kota Dumai pada Tahun 2020**

No	Perihal Kerjasama	Subjek Kerjasama		Jenis Kerjasama*
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua	
1	MoU dengan PT. Raja Sakti Telematika Tentang kerjasama Kegiatan Implementasi Aplikasi SIPKD Modul Aset	Pemerintah Kota Dumai (BPKAD Kota Dumai)	PT. Raja Sakti Telematika	KSDPK
2	MoU dengan Pemerintah Kota Bengkulu Tentang kerjasama Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Religius	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota Bengkulu	KSDD
3	MoU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan RI Tentang kerjasama Peningkatan Pembangunan di Kota Dumai melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	Pemerintah Kota Dumai (Dishub Kota Dumai)	STIP Kemenhub RI	KSDPK
4	MoU dengan Universitas Riau Tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Dumai	Universitas Riau	KSDPK
5	MoU dengan PT. Kaisar Energi Super Safira Tentang Pemanfaatan Kawasan Selinsing Kecamatan	Pemerintah Kota Dumai	PT. Kaisar Energi Super	KSPDK

	Medang Kampai Kota Dumai		Safira	
6	MoU dengan Kamar Dagang & Industri Kota Dumai dan Universitas Riau Tentang Kerja Sama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Kadin Kota Dumai dan Universitas Riau	KSDPK
7	MoU dengan Kepolisian Resort Kota Dumai Tentang kerjasama Penelusuran dan Pembinaan Siswa/I yang Berprestasi dalam Penerimaan Calon Anggota POLRI	Pemerintah Kota Dumai (Disdikbud Kota Dumai)	Kepolisian Resort Kota Dumai	KSDPK
8	Mou dengan PT. Tower Bersama Tentang Sewa Lahan, Pembangunan dan penoperasian Menara Telekomunikasi serta Program Penunjang Pengembangan Smart City Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai (Dishub Kota Dumai)	PT. Tower Bersama	KSDPK
9	Mou dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Dumai Provinsi Riau	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral	Pemerintah Kota Dumai	KSDD
10	Mou dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia tentang Peningkatan Pembangunan di Kota Dumai melalui Tridharma	Politeknik Transportasi Darat Indonesia	Pemerintah Kota Dumai	KSDPK

	PTDI – STTD			
11	Mou dengan PT.PLN (Persero) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU UP3 DUMAI tentang Kelistrikan dan Energi di Kota Dumai	PT.PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau UP3 Dumai	Pemerintah Kota Dumai	KSDPK
12	Mou dengan Yayasan Tuah Melayu Riau tentang Kerjasama Penembangan Potensi Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	Yayasan Tuah Melayu Riau	KSDPK

Keterangan:

- a. KSDD : Kerja Sama Dalam Daerah;
- b. SDPK : Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan
- c. KSDLN : Kerja Sama Dengan Luar Negeri.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Dumai tahun 2020 adanya dukungan *stake holder* terkait, kerjasama yang baik oleh pegawai negeri sipil di unit organisasi Sekretariat Daerah serta adanya koordinasi vertikal yang baik sehingga bersinergis antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Anggaran Belanja Sekretariat Daerah (APBD) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 46.781.749.607,- dengan realisasi sebesar Rp.41.931.629.473,- atau dengan persentase sebesar 89,63%.

Adapun rincian adalah sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah Rp.17.170.260.500,- dengan realisasi sebesar Rp.15.329.022.828,- atau dengan persentase sebesar 89,28% sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 29.611.489.107,- dengan realisasi

sebesar Rp.26.602.669.609,- atau dengan persentase sebesar 89,84%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Dumai pada 12 (dua belas) bagian tahun anggaran 2020 dapat jelaskan adalah sebagai berikut :

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

Terdiri dari 5 program dan 6 Kegiatan dengan pagu Rp.644.629.122,- dan realisasi keuangan adalah Rp.537.315.438,- atau dengan persentase 83,35% adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia Rp.124.585.872,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.105.945.872,- atau dengan persentase 85,04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah peringkat LPPD Kota Dumai dengan target pada peringkat 5 pada tahun 2020. Target dan realisasi ini belum terpenuhi dikarenakan LPPD Kota Dumai masih dalam penilaian di kantor pusat.
- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Pencapaian SPM
Jumlah anggaran yang tersedia Rp.17.074.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.660.000,- atau dengan persentase 74,14%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah laporan pencapaian target SPM dengan persentase adalah dengan target urusan/ bidang dan realisasi adalah 6 bidang atau dengan capaian realisasi 100%.

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- a) Kegiatan Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia Rp.91.902.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.700.000,- atau dengan persentase 78,02%, adapun indikator kinerja keluaran adalah penetapan batas antar daerah dan batas kecamatan dan kelurahan dengan realisasi adalah laporan batas antar daerah dan batas

kecamatan/kelurahan dengan persentase 100%.

3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Dumai

- a) Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.178.400.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.141.470.216,- atau dengan persentase 79,30%, adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan adalah 40 orang dengan realisasi 90% atau dengan realisasi kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.54.099.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.46.204.750,- atau dengan persentase 85,41%, adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase kegiatan monitoring pelaksanaan dana pembangunan infrastruktur kelurahan adalah 75% dengan realisasi 75 % dengan realisasi kinerja 100%.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Kegiatan Fasilitas Sekretariat DESK Pilkada Gubernur/Walikota dan Wakil Walikota

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.178.566.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.159.334.600,- atau dengan persentase 89,23%, adapun indikator kinerja keluaran adalah hasil perolehan suara pelaksanaan Pilkada adalah 7 kecamatan dengan target 7 kecamatan dengan realisasi 7 kecamatan atau dengan realisasi kinerja 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terdiri dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dengan pagu Rp.4.184.220.000,- dan realisasi keuangan adalah Rp.3.938.581.159,- atau dengan persentase 88,13% adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.31.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.750.000,- atau dengan persentase 88,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase kegiatan monitoring hibah/bantuan sosial adalah dari target persentase 75% dengan realisasi persentase adalah 75% monitoring hibah/bansos atau dengan persentase kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tenaga Kependidikan Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.955.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.930.875.000,- atau dengan persentase 98,72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah honorium guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu adalah selama 8 bulan dan target 8 bulan atau dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa

a) Kegiatan Penyediaan Beasiswa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.503.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.473.350.000,- atau dengan persentase 94,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mahasiswa/i keluarga kurang mampu yang berprestasi akademis sebanyak 161 mahasiswa/i dari target dan realisasi 151 mahasiswa/i dengan persentase realisasi adalah 93,78%.

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.65.050.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.64.881.701,- atau dengan persentase 99,74% Adapun indikator kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah event MTQ/ Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi yang diikuti. Adanya *refocusing* tahun 2020 dan terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020 maka kegiatan ini dilaksanakan sebatas persiapan untuk keikutsertaan Kota Dumai sedangkan pada event MTQ/STQ di Provinsi Riau ke-39 pada tahun 2020 di Kabupaten Pelalalawan diundur karena wabah Covid-19 di Provinsi Riau dan Indonesia pada umumnya.
- b) Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.497.420.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.454.202.195,- atau dengan persentase 91,31% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan adalah 1 kegiatan dengan target 1 kegiatan, jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan selama 5 bulan dengan target 5 bulan, Jumlah haul yang diikuti ke Basim Langkat, adapun persentase realisasi ke tiga kegiatan tersebut adalah 100%.
- c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.142.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.67.460.000,- atau dengan persentase 47,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan proses seleksi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), pelaksanaan manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Kota Pekanbaru Provinsi Riau hingga pulang ke Kota Dumai. Kegiatan pelaksanaan keberangkatan Haji tahun 2020 di batalkan keberangkatannya secara nasional dikarenakan adanya wabah Covid-

19 di Dunia dan termasuk di Makkah Arab Saudi

- d) Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari - Hari Besar Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.908.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.819.416.800,- atau dengan persentase 90,17%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan adalah sebanyak 878 orang dengan target dan realisasi yaitu 785 orang atau dengan realisasi 89,40%, jumlah hari besar keagamaan yang diperingati dan realisasi adalah dari target 8 hari besar Islam. Hari besar Islam yang dilaksanakan adalah Maulid Nabi Muhammad, SAW atau dengan persentase 12,5%. Kegiatan ini banyak tidak dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* tahun anggaran 2020 sehingga kegiatan ini dikurangi dan terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020.

- e) Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna

Jumlah anggaran pada kegiatan belum tersedia sehingga indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 yaitu persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan dengan target sebanyak 57,14% belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Masjid Paripurna belum disahkan oleh DPRD Kota Dumai (Kriteria Penetapan Masjid Paripurna di Kota Dumai belum terpenuhi) dan adanya *refocusing* atau pengurangan anggaran pada kegiatan ini untuk mengatasi wabah *Pandemic Covid-19* di Kota Dumai.

- f) Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.79.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.005.463,- atau dengan persentase 88,81%. Adapun indikator kinerja keluaran terlaksananya pelayanan kesehatan generasi muda dan pendidikan masyarakat yaitu 100%

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 6 (enam) kegiatan, dengan pagu Rp.772.611.000,- dan realisasi keuangan adalah Rp.726.258.427,- atau dengan persentase 94,00% dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a) Kegiatan Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.676.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.22.830.000,- atau 82,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase meningkatnya posyandu aktif di Kota Dumai dengan target 196 posyandu aktif dan realisasi 196 posyandu aktif atau dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)

1) Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.204.345.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.220.600,- atau 95,53%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai adalah lomba Pelaksanaan Kegiatan Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau dengan capaian kinerja 100%. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai dengan target 41 PKK dan realisasi 41 PKK. Kegiatan PKK ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Dumai melalui pembinaan-pembinaan PKK yang berada di 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan dengan capaian kinerja dengan persentase 100%.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.143.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 132.397.617,- atau 92,42%. Adapun indikator kinerja

keluarannya adalah persentase jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan UEK-SP dengan target 80% dan realisasi 80% yang dilaksanakan terhadap 33 UEK-SP di Kota Dumai dari target 33 UEK-SP dengan persentase capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a) Kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.242.131.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 223.321.000,- atau 92.23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Dumai, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan target dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.16.418.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.218.000,- atau 92.69%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan target dan persentase kinerja 100% yaitu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Kota Dumai pada tahun 2020.

c) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.138.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.137.271.210,- atau 98,91%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan peningkatan kinerja melalui evaluasi perkembangan kelurahan. Adapun tingkat pencapaian kegiatan evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2020 adalah dengan realisasi 100%. Tujuan evaluasi perkembangan kelurahan ini adalah memberdayakan masyarakat dengan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan.

BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA DAERAH

Terdiri dari 2 (dua) program serta 5 (lima) kegiatan, dengan pagu Rp.268.772.400,- dan realisasi keuangan adalah Rp.258.268.054,- atau dengan persentase 96,09% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Pembangunan

a) Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.65.259.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.64.570.700,- atau dengan persentase 98,94%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah dokumen kerjasama antar daerah (Kab/Kota dalam Provinsi Riau) dengan realisasi dengan target 1 dokumen dan realisasi adalah 1 dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.700.000,- atau dengan persentase 35,89%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah dokumen kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan target dan realisasi adalah 1 dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100%.

c) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Antar Negara.

Jumlah yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp.114.808.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 109.923.254,- atau dengan persentase 95,74%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah laporan kerjasama antar negara dengan target 1 laporan dan realisasi adalah 1 laporan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

d) Kegiatan Penyusunan Roadmap dan SOP Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.51.010.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.47.379.600,- atau dengan persentase 92,88%. Adapun indikator

kinerja keluarannya adalah jumlah dokumen Roadmap dan SOP kerjasama dengan realisasi dengan target 2 dokumen dan realisasi adalah 2 dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100%

2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- a) Kegiatan Rapat Kerja Daerah (Koordinasi Forum Kerjasama Bupati/Walikota Se Provinsi Riau)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.35.694.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.694.500,- atau dengan persentase 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah laporan kerjasama daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau yaitu 1 laporan. Dengan target dan realisasi adalah 1 laporan dengan capaian realisasi sebesar 100%

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

Terdiri dari 5 (lima) program serta 5 (lima) kegiatan, dengan pagu Rp.510.722.000,- dan realisasi keuangan adalah Rp.454.067.618,- atau dengan persentase 88,91% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a) Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.183.060.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 143,020.299,- atau dengan persentase 78,13%. Indikator kinerja keluarannya jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Dumai yang dibina dengan target 3 BUMD dengan capaian realisasi sebesar 100%.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.74.964.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.74,403.000,- atau dengan persentase 99,25%. Indikator kinerja keluarannya adalah persentase penerapan Bantuan Pangan Non Tunai Kota Dumai dengan target 80% dan terealisasi sebesar 80% dengan capaian realisasi sebesar

100%.

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

- a) Kegiatan Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Jumlah anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.74.394.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.74,173.000,- atau dengan persentase 99,70%. Adapun Indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah peserta sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah dengan target dan realisasi 50 peserta dengan capaian realisasi sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.17.430.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.330.000,- atau dengan realisasi 30,58%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah jumlah pameran investasi yang diikuti dengan realisasi adalah 1 (satu) event pameran dengan capaian realisasi kinerja 50%.

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- a) Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.160.871,7500- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.157.141.319,- atau dengan realisasi 97,68%. Adapun indikator keluaran adalah kontribusi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap sektor ekonomi dalam menjaga kestabilan harga adalah 1 laporan dengan target 1 laporan dan capaian realisasi sebesar 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp. 206.140.996,- dan realisasi keuangan adalah Rp.141.679.693,- atau dengan persentase 68,73% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.190.996,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.762.700,- atau 82,80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen yaitu laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2019 dan rencana kerja (Renja) Tahun 2021 dari target dan realisasi adalah 2 dokumen atau dengan realisasi capaian kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a) Kegiatan Evaluasi Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.109.900.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.86.548.193,- atau dengan persentase 78,75%.. Indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) dari target dan realisasi adalah 1 laporan atau dengan realisasi capaian kinerja 100%

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp.53.050.000,- dan realisasi Rp.19.368.800,-. atau dengan persentase 36,51%. Dengan indikator kinerja keluaran adalah laporan fasilitasi penyusunan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui DAK fisik tahun 2021 adalah 1 laporan dengan target dan realiasi adalah 1 laporan atau dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Terdiri dari 2 (satu) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp.949.517.966,- dan realisasi keuangan adalah Rp.941.873.667,- atau dengan persentase 99,19% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.255.613.521,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.253.157.367,- atau dengan persentase 99,04%. Indikator kinerja keluaran pada kegiatan ini adalah jumlah paket yang dilelang oleh Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Dumai sebanyak 80 paket dengan target dan realiasi atau dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.

b) Kegiatan Pengembangan dan Penataan LPSE Kota Dumai

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.694.698.780,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.644.528.685,- atau dengan persentase 99,20%. Indikator kinerja keluaran pada kegiatan ini adalah peningkatan pelaksanaan layanan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sebesar 90% dengan target dan realisasi adalah 90% atau dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Kegiatan Penyusunan dan Pemenuhan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.205.665,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.44.187.615,-atau sebesar 99,96%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah 100% dengan realisasi 100% atau dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.

BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

Terdiri dari 2 (dua) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp.286.226.000,- dan realisasi keuangan adalah Rp.241.397.892,- atau dengan persentase 84,33 % dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a) Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.136.737.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.104.956.888,- atau dengan persentase 76,76%. Adapun indikator kinerja terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 16 persil dari target 10 persil dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.58.371.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.58.370.554,- atau dengan persentase 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 49 persil dari target 15 persil dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

a) Kegiatan Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. Rp.91.118.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.052.450,- atau dengan persentase 85,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah konflik/permasalahan tanah di Daerah Kota Dumai yang terfasilitasi/terselesaikan yaitu realisasi data penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 5 kasus dari target dan realisasi 5 kasus dengan capaian kinerja adalah 100%.

BAGIAN UMUM

Terdiri 6 (tujuh) program serta 31 (tiga puluh satu) kegiatan, dengan pagu Rp.19.446.217.922,- dan realisasi keuangan adalah Rp.17.094.974.751,- atau dengan persentase 87,91% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.77.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.51.450.000,- atau sebesar 66,39%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat teradministrasi dan terdistribusi adalah 8.000 surat dengan dengan target dan realisasi 8.000 surat atau dengan capaian kinerja 100%.

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.995.900.004,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.681.710.722,- atau 84,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jasa pemakaian air, listrik dan telepon adalah selama 12 bulan dan target dan realisasi 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.159.536.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.147.160.350,- atau 92,24%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa jaminan barang milik daerah sebanyak 45 unit. Target dan realisasi adalah 21 unit (kendaraan dinas jabatan 4 unit, kendaraan dinas Sekda 2 unit dan kendaraan dinas operasional 15 unit) atau dengan capaian kinerja 100%.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.769.319.515,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.739.702.500,- atau 96,15%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah jumlah jumlah petugas kebersihan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 32 orang dengan target dan realisasi 32 orang atau dengan capaian kinerja 100%.

e) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.529.515.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.529.515.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengadaan/penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. Target dan realisasi selama 12 bulan atau dengan realisasi 100%.

f) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.150.351.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.146.723.500,- atau 97,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Target dan realisasi barang cetakan dan penggandaan adalah 12 bulan atau dengan realisasi kinerja 100%

g) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.79.185.790,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.37.895.000,- atau 47,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah 6 gedung dengan target dan realisasi 6 gedung (Kantor Walikota Dumai, Gedung Arsip, Sri Bunga Tanjung/Pendopo, Guest House, Media Center/PKK, Darma Wanita dan VIP Dinas Pariwisata) atau dengan capaian kinerja 50%.

h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.864.433.670,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.744.038.100,- atau 86,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makan dan minum untuk tamu dan

kegiatan kantor selama 11 bulan dari target 11 bulan atau dengan realisasi 100%.

- i) Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.3.689.381.447,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.589.381.447,- atau 97,29%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas dengan target dan realisasi 97,29% adalah 1.500 kali keberangkatan atau dengan persentase capaian kinerja 100%.
- j) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.600.000,- atau 24,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah *medical cek up* Walikota sebanyak 4 orang (Walikota, istri dan 2 anak) dan *medical cek up* Wakil Walikota sebanyak 4 orang (Wakil Walikota, istri dan 2 anak) dengan target dan realisasi 25%.
- k) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.594.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.588.482.000,- atau 99,06%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor adalah 22 orang dengan target dan realisasi 22 orang atau dengan capaian kinerja 100%.
- l) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 5 orang. Dari target dan realisasi 5 orang dengan

persentase kinerja adalah 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.403.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.380.049.833,- atau 94,31%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas. Target dan realisasi adalah 40 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.052.275.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.994.925.629,- atau 94,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan secara rutin rumah jabatan adalah 2 unit dengan target dan realisasi 2 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.895.256.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.876.902.519,- atau 97,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan secara rutin rumah dinas yaitu 2 unit dengan target dan realisasi 2 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.845.325.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.836.423.000,- atau 98,95%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan gedung kantor sebanyak 7 gedung dengan realisasi 7 gedung atau dengan capaian kinerja 100%.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.368.538.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp.217.529.365,- atau 59,02 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan mobil jabatan adalah 4 unit dengan target dan realisasi 4 unit atau dengan capaian kinerja 100%.

- f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.567.567.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.227.681.439,- atau 78,32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional adalah 12 bulan unit dengan target dan realisasi 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.372.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.298.025.851,- atau 79,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor adalah 4 unit dengan realisasi 4 unit atau dengan capaian kinerja 100%.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Walikota, Pendopo, PKK dan Media Center
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.762.280.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.733.819.000,- atau 96,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan taman gedung kantor walikota, pendopo, PKK, dan media center adalah 39 orang dengan target dan realisasi 39 orang atau dengan capaian kinerja 100%.
- i) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Mes Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.398.067.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.330.819.000,- atau 83,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan Mess Pemerintah Kota Dumai di Pekanbaru dengan target dan realisasi 1 gedung atau dengan

capaian kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.148.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.135.266.000,- atau 91,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pakaian dinas (KDH/WKDH) beserta perlengkapannya dengan target dan realisasi 2 orang (KDH/WKDH) atau dengan capaian kinerja 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a) Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.172.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.82.110.000,- atau 47,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh - tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan dengan target 24 kali dan realisasi atau dengan persentase capain kinerja 84%.
- b) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri.
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.495.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.463.183.000,- atau 93,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non depertemen/luar negeri adalah 30 kali dengan target dan realisasi adalah 30 kali atau dengan persentase capaian kinerja 100%.
- c) Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Lainnya.
- Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp.1.267.150.996,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.267.150.996,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya adalah 300 kali keberangkatan dengan target dan realisasi 300 kali keberangkatan atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

- d) Kegiatan Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.524.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.344.030.000,- atau 65,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makan dan minum harian dengan persentase capaian kinerja 85%.

- e) Kegiatan Pisah Sambut Muspida Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.107.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.31.450.000,- atau 29,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kegiatan pisah sambut forkopimda kota dengan target adalah 5 kali dan persentase 50%.

- f) Kegiatan Open House Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.49.875.000,- atau 99,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Open House Walikota, Wakil Walikota, Sekda Kota Dumai daerah adalah 1 kali dengan target dan realisasi sebanyak 1 kali atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

5. Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.68.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.53.725.000,- atau 79,12%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen/arsip yang terdata dan tertata

adalah 3.000 berkas dengan target dan realisasi atau dengan capaian kinerja 100%.

6. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - Hari Besar

- a) Kegiatan Peringatan Hari- Hari besar dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.781.670.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.351.765.000,- atau 45%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional adalah 10 kali dengan target dan realisasi 5 kaliperingatan hari - hari besar nasional atau dengan persentase 50%.

- b) Kegiatan Peringatan Hari Kesadaran Nasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.101.525.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.310.000,- atau 34,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyelenggaraan Hari Kesadaran Nasional adalah 7 kali dengan target dan realisasi 3 kali upacara/apel atau dengan persentase 40%.

BAGIAN ORGANISASI

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu Rp.122.786.997,- dan realisasi keuangan adalah Rp.120.632.181,- atau dengan persentase 98,25% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a) Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.80.325.997,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.78.503.264,- atau dengan persentase sebesar 97,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen survey kepuasan masyarakat, yaitu 1 dokumen SKM dari target 1 Dokumen SKM atau dengan realisasi kinerja adalah 100%.

2. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

a) Kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.35.061.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.34.728.917,- atau dengan persentase sebesar 99,05%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Rancangan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja PD, yaitu 2 Ranperwa dengan target dan realisasi adalah 2 Ranperwa atau dengan realisasi kinerja adalah 100%.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelas Jabatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.7.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.400.000,- atau dengan persentase sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah 1 dokumen yaitu Dokumen kelas jabatan dan nilai jabatan dengan capaian kinerja adalah 100%.

BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Terdiri dari 4 (empat) program serta 11 (sebelas) kegiatan, dengan pagu Rp.1.778.865.954,- dan realisasi keuangan adalah Rp.1.729.769.882,- atau dengan persentase 97,24% dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.500.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.2.800.000,- atau dengan persentase sebesar 80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan semester I Sekretariat Daerah tahun 2020 dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.49.397.300,00,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.48.197.300,00,- atau dengan persentase sebesar 97,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.7.540.000,00,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.7.540.000,- atau dengan persentase 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah SDM yang berkualitas (mengikuti BIMTEK) dalam pengelolaan keuangan dan asset adalah 15 orang. Dengan dengan target 15 orang dan teralisasi 15 orang atau dengan capaian kinerja adalah 100%.

b) Kegiatan Penertiban Aset

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.28.098.035,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.27.698.035,- atau dengan persentase sebesar 98,58%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan penertiban aset, inventarisasi aset dan pengamanan barang milik daerah di Sekretariat Daerah Kota Dumai adalah 1 laporan. Dengan target dan realisasi adalah 1 laporan atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

c) Kegiatan Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.42.501.619,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.41.749.047,- atau dengan persentase sebesar 98,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah konsultasi, komunikasi dan koordinasi keuangan daerah adalah sebanyak 48 kali. Dengan target dan realisasi 48 kali atau dengan persentase 100%.

d) Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.12.700.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.12.111.500,- atau dengan persentase sebesar 95,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah rekonsiliasi aset tahun 2019 dan Rekonsiliasi Aset Semester I Tahun 2020 adalah 2 rekonsiliasi dengan target dan realisasi yaitu 2 rekonsiliasi atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

e) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.19.709.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.19.169.000,- atau dengan persentase sebesar 97,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah rekonsiliasi laporan keuangan tahunan dan rekonsiliasi laporan keuangan semester dengan target dan realisasi adalah 2 rekonsiliasi atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

f) Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.27.410.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.14.943.000,- atau dengan persentase sebesar 54,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah penatausahaan administrasi keuangan Daerah adalah 12 bulan. Dengan target dan terealisasi yaitu 12 bulan atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.79.519.000,00,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.79.519.000,00,- atau dengan persentase sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 135 unit dan terealisasi 111 unit atau dengan persentase 75%

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.535.491.000,00,-

dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.503.052.000,- atau dengan persentase sebesar 93,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor sebanyak 25 unit dan terealisasi sebanyak 135 unit atau dengan persentase 99%.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.973.000.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.973.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional sebanyak 2 Unit dan terealisasi 2 unit atau dengan persentase 100%.

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Terdiri dari 3 (tiga) program serta 4 (empat) kegiatan, dengan pagu Rp.440.828.750,- dan realisasi keuangan adalah Rp.417.768.622,- atau dengan persentase 94,76% dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota Dumai.

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.194.605.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.190.606.324,- atau 97,94%. Indikator keluarannya adalah Jumlah perkara yang terselesaikan dan kerjasama antara TIM kuasa hukum Pemerintah Kota Dumai dengan konsultan hukum dengan target 6 perkara dan terealisasi 6 (enam) perkara dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Kegiatan Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang - Undangan dan Pembelian Buku Peraturan Perundang - Undangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.66.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.65.851.224,-

atau 99,77%. Adapun indikator keluarannya adalah informasi produk hukum bagi perangkat daerah dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai adalah 100% yaitu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Dumai, buku lembaran daerah, berita daerah. Dengan target dan realisasi adalah 100% atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

3. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

a) Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.128.223.750,- dengan realisasi sebesar Rp.109.442.525,- atau 85,35%. Adapun indikator keluarannya adalah jumlah Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum untuk menciptakan keadilan disemua komponen masyarakat adalah sebanyak 8 Perda. Dengan target dan realisasi 8 Perda dengan capaian kinerja adalah 100%. Jumlah Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia Lanjut;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Perda Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perda Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b) Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.52.000.000,- dengan realisasi sebesar 51.868.549,- atau 99,74% dari anggaran. Indikator keluarannya adalah Jumlah peserta pengetahuan hukum bagi masyarakat/siswa di Kota Dumai adalah 100 peserta. Dengan target dan terealisasi 100 peserta atau dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

Lampiran 3. D.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang oleh Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2020

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISAS I PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat Daerah	Peningkatan peran dan kualitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Keberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kota Dumai	100%				
				Revitalisasi dan Pembinaan Pokjantal Posyandu	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Dumai.	80%	80%	1. Terjadinya pandemi covid 19 membuat kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal karena terjadinya refocusing	1.Melaksanakan kegiatan dengan mengurangi jumlah peserta dan tetap memperhatikan protokol	

								anggaran dan penerapan protokol kesehatan	kesehatan	
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya Pengembangan lembaga ekonomi Pedesaan	100%				
				Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi kelurahan	90%	90%	Pengelolaan Lembaga Ekonomi Kelurahan yang belum maksimal	Pembinaan Lembaga Ekonomi Kelurahan yang dilakukan oleh tenaga pendamping.	
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun	90%				

				Desa	kelurahan					
				Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan tingkat nasional .	1 kegiatan ;	1 kegiatan;	Terjadinya pandemi covid 19 membuat kegiatan tidak bisa berjalan dengan maksimal karena terjadinya <i>refocusing</i> anggaran dan penerapan protokol kesehatan	1. Melaksana n kegiatan dengan mengurangi jumlah peserta dan tetap memperhatik an protokol kesehatan	
				Evaluasi Perkembang an Kelurahan	Kegiatan Peningkatan Kinerja melalui Evaluasi Perkembang an Kelurahan ;	1 kegiatan ;	1 kegiatan;		2. Melaksana n koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan dalam melaksana n	

									pemantauan penginputan data prodeskel dan epdeskel.	
				Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan Informasi dan Edukasi Teknologi Tepat Guna ;	7 kec;	7 kec;			
2	Pertanahan	Sekretariat Daerah		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemaatan Tanah	Persentase sertifikat tanah aset, tanah masyarakat yang terinventaris asi dan tersedianya lahan untuk pembanguna n Kota Dumai	100%				

				1. Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	10 Persil	16 Persil	-	-	
				2. Kegiatan Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran tanah Aset Pemerintah Kota Dumai	Jumlah data/persil tanah aset Pemerintah Kota Dumai	15 Persil	49 Persil	-	-	
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Jumlah konflik/per masalah tanah daerah Kota Dumai yang terfasilitasi dan terselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	-	-	

				Kegiatan Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan Daerah Kota Dumai	Realisasi data penyelesaian konflik pertanahan	5 Kasus	5 Kasus	-	-	
--	--	--	--	---	--	---------	---------	---	---	--

D.1 Urusan Pemerintahan, Oleh Sekretariat DPRD

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Dumai Tahun 2020**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020
Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95 %	95 %
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD, 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

1. Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu 95 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu Ada atau 100 %.

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, Satuannya RKT

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu ada dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu ada atau 100 %.

3. Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu ada dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu ada atau 100 %.

4. Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu ada dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu ada atau 100 %

Pada tahun 2020, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 52.918.054.972,- dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 31.559.954.610,- dan terserap Anggaran sebesar Rp. 18.898.975.348,- atau 60%.
2. Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp. 21.358.100.362,- Dan terserap Rp. 19.530.411.290,- atau 91,44 %.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Hearing/ Dialog dan Koordinasi hal ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada tahun 2020 jumlah anggaran sebesar **Rp. 11.220.132.890,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 10.597.292.069,-** atau sebesar 94,45% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.153.200.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.100.800.000,- atau sebesar 65,80 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

b) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 369.861.557,- atau sebesar 92,47% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa rekening listrik, telepon dan jaringan internet dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

c) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 76.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.900.000,- atau sebesar 11,63 % adapun indikator

kinerja keluaran adalah jumlah dekorasi dan sewa peralatan event-event DPRD Kota Dumai dengan target 4 dekorasi/event atau capaian realisasi 100 %.

- d) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.138.162,- atau sebesar 59,14 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik kendaraan dinas 20 kendaraan roda empat dan 7 roda duadengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

- e) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 601.100.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 561.314.800,- atau sebesar 93,38 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kebersihan ruangan dan halaman kantor DPRD, serta rumah Pimpinan DPRD dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

- f) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 223.892.140,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.669.350,- atau sebesar 97,22 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya alat tulis kantor DPRD Dan Sektetariat DPRD Kota Dumai dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

- g) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 313.491.150,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 253.088.986,- atau sebesar 80,73 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kelancaran administrasi perkantorandengan

target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- h) Kegiatan Penyediaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 128.001.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 68.260.300,- atau sebesar 53,33 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan habis pakai (alat listrik dan elektronik) untuk penerangan dan listrikan kantor dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

- i) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.760.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.661.000,- atau sebesar 23,36 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan bacaan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

- j) Kegiatan bahan logistik kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 166.063.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 83.169.820,- atau 50,08 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya bahan logistik untuk pimpinan DPRD dan keperluan materai dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

- k) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.080.300,- atau sebesar 49,41 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman untuk pimpinan dan anggota DPRD dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

l) Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.078.877.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.067.991.156,- dan atau sebesar 99,87 % adapun indikator kinerja keluaran adalah konsultasi dan koordinasi Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ke Ibu Kota Provinsi Riau, Ibu Kota Negara, Kabupaten dan Kota Lainnya dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

m) Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Pengelolaan Aset

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.28.396.668,- atau sebesar 94,66% adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya premi asuransi kendaraan dinas Pimpinan DPRD dengan target 3 unit atau capaian realisasi 100 %.

n) Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pemeriksaan kesehatan Anggota DPRD dan keluarga dengan target 120 orang atau capaian realisasi 100 %. Anggaran tersebut direvocusing sehingga target tidak tercapai.

o) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.633.948.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 617.217.970,- atau sebesar 97,36 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya petugas keamanan kantor dan rumah Pimpinan DPRD dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

p) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.800.000,- atau sebesar 69,73 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya honor untuk TKS SK Walikota pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pada tahun 2020 jumlah anggaran **Rp. 1.989.472.500,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **1.703.915.296,-** atau sebesar **85,65 %** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Kendaraan dinas operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD yang disediakan dengan target 4 unit atau capaian realisasi 100 %. Anggaran tersebut direvocusing sehingga target tidak tercapai.

b) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.400.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.079.500,- atau sebesar 98,68 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor yang disediakan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

c) Kegiatan peralatan gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 421.050.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 374.125.750,- atau sebesar 88,86 % adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya peralatan gedung

kantor yang disediakan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100 %.

d) Kegiatan pengadaan mebeleur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 64.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.800.000,- atau sebesar 94,26 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya mebeleur gedung kantordengan target776 unit atau capaian realisasi 100 %.

e) Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 362.340.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 313.605.000,- atau sebesar 86,55 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor DPRD serta halaman kantor DPRD yang terpelihara dengan target 100 % atau capaian realisasi 100 %.

f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.848.620.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 750.063.211,- dan atau sebesar 88,39 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan target 30 unit atau capaian realisasi 100 %.

g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.192.562.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.241.835,- atau sebesar 55,17 % adapun indikator kinerja keluaran adalah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Mesin Genset, Mesin Tik, dan Mebeler lainnya) dengan target 12

bulan atau capaian realisasi 100 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2020 jumlah anggaran **Rp. 349.500.000-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 341.160.000,-** atau sebesar **97,61 %** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. **Rp. 349.500.000-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **Rp. 341.160.000,-** dan atau sebesar **97,61 %** adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pakaian pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai beserta atribut dengan target 385stell atau capaian realisasi 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2020 jumlah anggaran **Rp. 100.000.000,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 86.500.000,-** atau sebesar **86,50 %** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp. 86.500.000,- dan atau sebesar 86,50 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisai dan lain-lain dengan target 45 orang atau capaian realisasi 100 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.

Pada tahun 2020 jumlah anggaran **Rp. 110.438.372,-** dan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 97.542.874,-** atau sebesar **88,32 %** yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp.3.420.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 420.000,- dan atau sebesar 12,28 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Kinerja OPD dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 100%.

b) Penyusunan Rencana Kinerja SKPD.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.107.018.372,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.122.874,- dan atau sebesar 90,75 % adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen usulan kinerja OPD dengan target 5 laporan atau capaian realisasi 100 %.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar **Rp. 7.346.056.600,-** dengan Realisasi Penyerapan anggaran Sebesar **Rp. 6.515.247.051,-** atau **88,69 %**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai Berikut :

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.447.017.500,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp.1.243.613.844,- atau 85,94 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah dengan target 8 pansus, rekomendasi atau capaian realisasi 100 %.

b) Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 281.400.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 110.245.000,- atau 39,18 %. Adapun Indikator indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pertemuan aspirasi masyarakat yang

diserap oleh Pimpinan DPRD dengan target 3 pertemuan dan realisasi terlaksana 1 pertemuan atau 33,33% dengan alasan kegiatan ini dilaksanakan pada saat masa pandemi Covid-19 yang masih belum memperbolehkan diadakannya pertemuan-pertemuan besar.

c) Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 131.120.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.213.000,- atau 39,82 %. Adapun indikator kinerjanya adalah terlaksananya kinerja tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan Dewan dengan target 7 AKDatau capaian realisasi 100%.

d) Rapat - Rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 569.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 330.107.812,- atau 57,97 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan target 33 paripurna atau capaian realisasi 100%.

e) Kegiatan Reses

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.353.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.327.615.135,- atau 98,06 % dengan indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat/konstituen/Daerah Pemilihan dengan target3 kegiatan / masa sidang anggota DPRD atau Kota Dumai atau capaian realisasi 100%.

f) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.730.179.443,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.690.538.908,- atau 97,71 % dengan indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota DPRD yang mengikuti

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 30 orang atau capaian realisasi 100%.

g) Kunjungan Kerja Komisi –Komisi DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 919.667.657,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 918.929.083,- atau 99,92 % dengan indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi Anggota DPRD dengan target 9 Kabupaten/Kota atau capaian realisasi 100 % dengan alasan terlaksananya seluruh kunjungan kerja komisi DPRD Kota Dumai.

h) Penyampaian Aspirasi masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.025.000,- atau 73,50 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat langsung kepada DPRD dengan target 5 pertemuan atau capaian realisasi 100 %. Kegiatan ini dilaksanakan ditengah kondisi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas.

i) Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA-PPASP, PPASP, APBD-P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 487.892.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 456.559.269,- atau 93,58 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pembahasan KUA-PPAS / KUPA-PPAS Perubahan, Perda RAPBD / P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis dan tindak lanjut LHP BPK RI dengan target 3 Perda dan 2 nota kesepakatan atau capaian realisasi 100 %.

j) Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 410.400.000,- dengan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 374.400.000,- atau 91,23 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah tenaga ahli, staf tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD, tenaga ahli Pimpinan DPRD dengan target 8 fraksi dengan realisasi 8 orang / fraksi atau capaian realisasi 100 %.

7. Program penyebaran informasi pemerintah daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar **Rp. 239.500.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 187.557.000-** atau **78,31 %**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penyebaran informasi pemerintah daerah adalah sebagai Berikut :

- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/ daerah/ keagamaan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 239.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.557.000- atau 78,31 %. Adapun indikator nya adalah terlaksananya sewa peralatan pada event-event di Kota Dumai dengan target 4 event.

8. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar **Rp. 3.000.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.197.000,-** atau **39,90 %**. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penyebaran informasi pemerintah daerah adalah sebagai Berikut

- a) Pengelolaan Barang milik perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.139.000- atau 71.30 %. Adapun indikator nya adalah jumlah Aset milik perangkat daerah yang terdata dengan target 90%.

D.1. Urusan Pemerintahan, Oleh Kecamatan Dumai Timur

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Dumai Timur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2017 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.54 Indikator kinerja sasaran Kecamatan Dumai Timur

Indikator kinerja sasaran	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (dalam %)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	80 %	85 %	75 %	100 %
kualitas sumber daya lembaga masyarakat	80 %	85 %	80 %	100 %
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	80 %	85 %	80%	100 %

Sumber : Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran di atas pada Tahun 2020, untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana berikut ini :

- 1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik** Target Pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator Cakupan Sarana Prasaranan Perkantoran Pemerintahan yang baik di Kecamatan Dumai Timur sebesar 85 % dengan realisasi sebesar 75 % atau tingkat capaian sebesar 100% karena program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur di Kecamatan Dumai Timur belum bisa memenuhi kebutuhan kantor Camat dan 5 (lima) Kantor Lurah se-Kecamatan Dumai Timur yang kekurangan meubeler (meja, kursi kerja, kursi rapat, lemari,

kursi tunggu pelayanan), peralatan kantor dengan jumlah ASN dan Tenaga Honor sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) personil.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2020 untuk indikator Kualitas Sumberdaya lembaga Masyarakat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 85% dengan realisasi sebesar 80 % atau tingkat capaian sebesar 80 %, karena kegiatan pelayanan posyandu ada yang sudah dikerjakan secara swadaya dan swakelola masyarakat setempat dan ketua RT/LPMK sangat pro aktif dalam menampung usulan masyarakat dan mengerti administrasi tingkat RT dan pengurus posyandu aktif dalam pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Timur tidak melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan di karenakan ada nya virus corona , Pada tahun 2020 ini Kecamatan Dumai Timur tidak ada kegiatan dalam penilaian pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan se-Propinsi Riau Tahun 2020 Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian beras miskin (raskin) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Timur khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat Rastra Kecamatan Dumai Timur sampai tahun 2020 adalah :

a) Kelurahan Tanjung Palas	3471 KK
b) Kelurahan Jaya Mukti	5448 KK
c) Kelurahan Teluk Binjai	5196 KK
d) Kelurahan Buluh Kasap	1495 KK
e) Kelurahan Bukit Batrem	2917 KK

Jumlah penerima beras raskin sampai tahun 2020 ini adalah 18527 KK, yang mana setiap KK mendapat bantuan beras 10 kg/KK.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2020 untuk indikator Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 85% dengan realisasi 100% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan pelaksanaan gotong royong di Kecamatan Dumai Timur sangat tinggi dengan memperoleh Juara I Tingkat Kota Dumai dan Juara I Tingkat Propinsi Riau. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dilihat pada tabel pencapaian indikator di atas, jika disandingkan capaian kinerja tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik, capaian kinerja tahun 2018 (75%), tahun 2019 (80%) dan tahun 2020 (85%) tidak mengalami kenaikan tidak memenuhi target pada indikator kinerja ;
2. Pada indikator Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat, capaian kinerja tahun 2018 (75%) tahun 2019 (80%) dan tahun 2020 (85%) persentase sedikit menurundantelah memenuhi target pada indicator kinerja
3. Pada indikator Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat, capaian kinerja tahun 2018 (75%), tahun 2019 (80%) dan tahun 2020 (85%) persentase meningkatdantelah memenuhi target pada indicator kinerja.

Untuk Anggaran Tahun 2020 jumlah Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Dumai Timur untuk Belanja Langsung setelah di refofusing sebesar Rp 4.295.091.425 -dan dari jumlah anggaran murni 7.540.409.916 yang tersedia ini mengakomodir 5 Kelurahan termasuk dana Kelurahan Program dan 33 (Tiga puluh tiga) Kegiatan di Kecamatan Dumai Timur. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan Kecamatan, yang mencakup 5 (Lima) Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.949.602.065,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 936.880.622,- atau 0.98 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

Rp 52.999.000'- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 52.995.000,- atau 99.99 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah materai dan benda pos lainnya dalam 1 (satu) tahun.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 63.031.560.00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 38.382.108,- atau 60.89 % Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pemakaian telepon, air, listrik dan speedy dalam 1 (satu) tahun selama 12 bulan dan realisasi kinerjanya 100 %. Pembayaran telepon, listrik dan speedy melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.700.000,00- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.700.000,00- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.781.725,- atau 35.89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja dengan realisasi kinerja 100 %.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 377.721.700- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 377.650.490,- atau 99.98 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja dengan realisasi kinerja 100 %.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 28.265.805- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar

Rp 28.265.805,- atau 100.00 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.491.902,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 30.213.439,- atau 99.09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 6.110.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 6.100.100.00,- atau 99.84 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.200.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.358.000 atau 74.42%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terbayarnya jumlah koran/majalah dalam 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

j) Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 39.997.000.- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.260.000,- atau 98.16 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 162.515.000

dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 161.340.000,- atau 99.28 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

1) Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 203.824.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 198.000.000,- atau 97,14 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor dengan realisasi kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 199.859.500 realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 197.965.000,- atau 0.99% yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0.00 %.Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya perlengkapan gedung kantor sebanyak 6 (enam) unit selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Pengadaan meubeler

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp0- ,- atau 0 %.Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya peralatan gedung kantor yang diadakan.

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 38.000.000,- setelah perubahan Rp, 52.987.500 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 52.010.000 atau 98.16 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua selama 1 (satu) tahun dengan realisasi dengan realisasi kinerja 100 %.

d) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Komputer

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 3.872.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.010.000,- , - atau 77.74 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

e) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 0,- Setelah Perubahan Sebesar Rp. 140.000.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 139.964.000,- atau 99.69 %.. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 34.160.050,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 33.104.000 atau 0.96 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 11,396,050- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 11,284.000,- atau 99.02 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja (LKj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 11.250.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 10.690.000,- atau 99.02 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terealisasinya laporan prognosis tahun 2020 sebanyak 2 (dua) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 11.514.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar

Rp 11.130.000,- atau 96.66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 391.997.500 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 391.325.000 atau 0.99 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00,- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 20 orang dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0.00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0.00,- atau 0.00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

c) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0.00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0.00,- atau 0.00 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tidak terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan ditanjung palas

d) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0.00,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp

0.00,- atau 0.00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan ditanjung palas

e) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Buluh Kasap

f) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Tanjung Palas

g) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Kelurahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem

h) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Kelurahan teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bukit Batrem

i) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 78.399.500.00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.265.000.00- atau 99.83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya operai dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Jaya Mukti

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 633.600'000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 618.300.000,- atau 0.97 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0 atau 0 %.Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0.- atau 0 %.

c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 199.200.000.- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 194.400.000.- atau 97.59%

d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 73.800.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 72.000.00.- atau 97.56 %

e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 159.300.000.- atau 97.61%

f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.800.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 60.300.000.- atau 97.57%

g) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 135.600.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 132.300.000.- atau 97.57%

h) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Usila Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.000.000.- atau 77,78%

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0 atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %.Adapun indikator kinerja keluaran adalah terwujudnya penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 302.899.570.- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 272.386.555,- atau 89,92% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan

ini sebesar Rp 64.095.914,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 55.807.354,- atau 87.07.

b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Batrem Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 55.395.914,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.635.798,- atau 85.99 %..

c) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jaya Mukti Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 67.455.914,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 63.827.762,- atau 94.62 %.

d) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Palas Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 53.955.914,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.775.532,- atau 88.55 %.

e) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluh Kasap Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.995.914,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 55.606.282,- atau 89.69 %

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 895.500.000.- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 895.500.000.- atau 100.00 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.600.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.600.000,- atau 100.00 %.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 195.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 195.900.000,- atau 100.00 %.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 156.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar

Rp 156.900.000,- atau 100.00 %.

d) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 219.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 219.300.000,- atau 100.00 %.

e) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 141.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 141.300.000,- atau 100.00 %.

f) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 172.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 172.500.000,- atau 100.00 %.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.808.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 13.808.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 27.240.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 27.240.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 dengan realisasi kinerja 100 %.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.400.000,- atau 0.82 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 15.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.400.000,- atau 0.82 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan

dibawah ini.

b) Pembinaan PKK Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

c) Pembinaan PKK Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0 atau 0 %

d) Pembinaan PKK Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

e) Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

11. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0. %

12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0.00%

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0.00%

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000.000. setelah perubahan sebesar Rp. 7.500.000 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.500.000 atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Infrastuktur Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.500.000,- atau 100.00%

14. Program Peningkatan Kesejahteraan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 200.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.750.000,- atau 15% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.750.000,- atau 15.00%

b) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%

c) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%

15. Program Penciptaan Iklim Usaha – usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyelenggaraan Pelatihan Tata Boga Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0 atau 0%

16. Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Bukit

Batrem Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0%

b) Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %.

c) Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%

18. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 0,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 14.067.600,- atau 0 %

b) Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Bukit Batrem

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0,00%

c) Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

d) Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,-

atau 0 %

e) Pengadaan Perlengkapan Pos Jaga/Ronda Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0 %

f) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan ketentraman dan ketertiban Umum Diwilayah kecamatan se Provinsi Riau

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0,- atau 0.00%.

D.1. Urusan Pemerintah, Oleh Kecamatan Dumai Selatan

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Selatan dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 dalam table 3.55 di bawah ini :

**Tabel 3.55 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Dumai Selatan
Kota Dumai Tahun 2020**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kondisi Akhir 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (dalam %)
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	100%	78,97%	78,97%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	100%	100%	100%
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan	%	100%	100%	100%

masyarakat meningkat				
----------------------	--	--	--	--

Keberhasilan dari 3 indikator kinerja sasaran diatas didukung oleh beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain :

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik

Target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 100%. Keberhasilan dari capaian indikator ini dikarenakan Kecamatan Dumai Selatan berupaya untuk meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam pelaksanaan pelayanan di kecamatan maupun di kelurahan melalui program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Dumai dan Renstra Kecamatan Dumai Selatan. Program yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

❖ Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yakni:

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan;

Pada kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan berkomitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan dasar khususnya terhadap balita dan usila melalui pelayanan Posyandu. Saat ini terdapat 38 Posyandu yang ada di Kecamatan Dumai Selatan dan tersebar pada 5 (lima) kelurahan. Pada Tahun 2020 kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

Untuk mengukur dan menilai sejauh mana kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan telah menjalankan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2020 yang lalu Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan publik. *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Selatan yang terdiri dari lomba BBGRM Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota dan

Lomba EVDESKEL. Kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena terjadinya pengurangan anggaran (Refokusing anggaran) untuk Tahun 2020 disebabkan COVID 19.

2. Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat

Target dari indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% pada tahun 2020. Untuk mencapai sasaran ini Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan 1 (satu) program pada tahun 2020, yakni :

- a. Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT dengan kegiatan pembinaan RT dan LPMK se-Kelurahan Kecamatan Dumai Selatan yaitu;

Pada program dan kegiatan ini Kecamatan Dumai Selatan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya lembaga LPMK dan RT dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta memberikan stimulus berupa bantuan honorarium terhadap Pengurus LPMK dan RT se-Kecamatan Dumai Selatan dalam rangka penyelerasan program-program pembangunan di wilayah kecamatan.

3. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Target dari indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 100% pada Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini Kecamatan Dumai Selatan melaksanakan 1 (satu) program pada tahun 2020, yakni :

- a. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat Kecamatan dengan kegiatan pembinaan PKK kecamatan dan kegiatan pembinaan PKK kelurahan.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memotivasi dan menggerakkan keluarga dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk menunjang peningkatan kesejahteraan keluarga.TP.

PKK Kecamatan Dumai Selatan selama ini aktif dalam menjalankan program-program pokok PKK bersama dengan TP. PKK Kelurahan. Hal ini terlihat dari berbagai perlombaan dan penilaian yang dilaksanakan baik pada tingkat kota maupun tingkat provinsi, TP. PKK turut memberi andil dan sumbangsih dalam penilaian tersebut. Selain itu TP. PKK Kecamatan bersama TP. PKK Kelurahan juga secara rutin melaksanakan pertemuan untuk membahas program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Anggaran belanja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2020 sebesar **Rp. 10,751,933,305,-** dengan rincian belanja tidak langsung **Rp.5,934,819,960,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.389.580.646,-** atau **90,81%** sedangkan Belanja langsung sebesar **Rp. 4,817,113,345,-** dengan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 4.465.908.619** atau **92,70%**.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

I. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 843.237.015,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 832.045.487,- atau 98,67% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 2.400.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai dan benda pos lainnya dengan realisasi 100%

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 96.924.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 89.367.625,- atau 92,20%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rekening Telepon, Air Bersih, Listrik dan Speedy dengan realisasi 92,20%.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.700.000,- atau 100%. Adapun indikator keluaran Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi 100%.

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- atau 48%. Adapun indikator keluaran Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional dengan realisasi 48%.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 145.919.100,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 145.329.100,- atau 99,60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi 100%.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 48.073.962,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 48.073.962,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Alat Tulis Kantor pada Kecamatan dengan realisasi 100%.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.967.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 25.967.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama dengan realisasi 100%.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.231.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.231.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Alat Listrik Kantor dengan dengan realisasi 100%.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.689.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.689.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Koran / Bahan Bacaan yang dibutuhkan Kantor dengan realisasi 100%.

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 48.747.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 48.662.000,- atau 99,83%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan dengan realisasi 100%.

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 216.225.953,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 216.225.800,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan realisasi 100%.

l) Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 183.870.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 183.600.000,- atau 99,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang dibayarkan dengan realisasi 100%

m) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.490.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 50.400.000,- atau 99,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 926.121.128,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 916.929.364,- atau 99% yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a) Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 275.272.728,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 274.380.564,- atau 99,68%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diadakan dengan realisasi 99,68%.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.475.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 79.386.400,- atau 95,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dengan realisasi 95,10%.

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 79.640.000,- atau 99,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan dengan realisasi 99,55%.

d) Pengadaan mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 79.838.000,- atau 99,80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah mebeleur kantor yang diadakan dengan

realisasi 100%.

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 66.038.200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 63.069.200,- atau 95,50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dengan realisasi 95,50%.

f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 19.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpeliharadengan realisasi 100%.

g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 20.800.000,- atau 99,52%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang terpeliharadengan realisasi 99,52%.

h) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 301.435.200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 300.815.200,- atau 99,79%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Kantor yang diadakandengan realisasi 99,79%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 26.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 26.468.200,- atau 99,79% yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 26.468.200,- atau 99,79%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah Jumlah Pakaian dinas yang diadakan dengan realisasi 99,79%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 38.599.300,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 36.887.300,- atau 95,56% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dengan realisasi 100%.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 12.704.300,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.642.300,- atau 99,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Prognosis Tahun 2019 dengan realisasi 100%.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.895.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 9.245.000,- atau 84,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi 100%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 551.335.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 435.410.200,- atau 78,97% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.640.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp. 5.640.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di kecamatan dengan realisasi 100%.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.345.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 16.345.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 138.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 115.500.000,- atau 83,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Simadengan realisasi 83,33%.

d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 111.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.67.225.200,- atau 60,56%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datukdengan realisasi 60,56%.

e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 97.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 80.550.000,- atau 82,87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 82,87%.

f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 80.850.000,- atau 81,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Saridengan realisasi 81,54%.

g) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 69.300.000,- atau 83,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 83,09%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 10.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang diadakan dengan realisasi 100%.

7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.600.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 483.703.250,- atau 60% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 500.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah persentase pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

b) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Maupun Non Alam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 75.025.000,- atau 75,03%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah Presentase pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam dengan realisasi 75,03%.

c) Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 88.812.250,- atau 88,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Presentase penanganan pencegahan bencana alam maupun non alam Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 88.81%.

d) Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 59.320.500,- atau 59,32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Presentase penanganan pencegahan bencana alam maupun non alam Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 59,32%.

e) Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 89.437.000,- atau 89,44%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Presentase penanganan pencegahan bencana alam maupun non alam Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 89,44%.

f) Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 87.247.500,- atau 87,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Presentase penanganan pencegahan bencana alam maupun non alam Kelurahan Bumi Ayu dengan

realisasi 87,25%.

g) **Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam Kelurahan Mekar Sari**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.83.361.000,- atau 83,36%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Presentase penanganan pencegahan bencana alam maupun non alam Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 83,36%.

8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 44.520.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.957.500,- atau 29,10% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) **Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bumi Ayu**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.320.000,- atau 64,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 64,47%.

b) **Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Timah**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.650.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.950.000,- atau 89,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 89,47%.

c) **Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Mekar Sari**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp. 8.820.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.887.500,- atau 21,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 66%.

d) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- atau 12,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 12,59%.

9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 24.890.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 22.970.000,- atau 92,29% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan infrastruktur kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.890.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 22.970.000,- atau 92,29%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur dengan realisasi 92,29%.

10. Program Pengembangan Data/Informasi

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 5.962.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.962.500,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.962.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.962.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah profil kelurahan dan kecamatan yang

disusun dengan realisasi 100%.

11. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 380.648.402,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 334.548.818,- atau 87,88% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.491.375,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 67.631.785,- atau 86,16%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 86,16%.

b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87.851.375,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 82.233.256,- atau 93.60%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 93.60%.

c) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 72.683.375,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 64.965.080,- atau 89,38%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 89,38%.

d) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 69.178.900,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 61.055.572,- atau 88,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 88,26%.

e) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 72.443.377,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp. 58.663.125,- atau 80,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 81%.

12. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 914.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 914.100.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 189.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 189.100.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.550.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 165.550.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

d) Pembinaan LPMK dan RT Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 134.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 134.150.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

e) Pembinaan LPMK dan RT Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 157.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 157.700.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 46.350.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 40.572.000,- atau 87,53% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- atau 33,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bumi Ayudengan realisasi 33,33%.

b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Ratu Simadengan realisasi 100%.

c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja

keluaran adalah persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.722.000,- atau 68,88%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 69%.

e) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan lingkungan Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- atau 33,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 33,33%.

f) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 26.350.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 26.350.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Tahun 2020 dengan realisasi 100%

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 28.032.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 28.032.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

b) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.750.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

c) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.964.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.964.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

d) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 6.543.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.543.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

e) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.775.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.775.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

15. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.630.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.630.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp. 9.230.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 9.230.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kelurahan dan kecamatandengan realisasi 100%.

b) Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 10.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Saridengan realisasi 100%.

16. Program upaya kesehatan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 7.700.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.700.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.700.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran Persentase peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bukit Timahdengan realisasi 100%.

17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 487.502.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 350.835.000,- atau 98% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 39.890.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 39.800.000,- atau 99.77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kebersihan persampahan Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

b) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 14.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.168.000,- atau 82,22%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya pelayanan persampahan Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 82,22%.

c) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.785.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.785.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah meningkatnya pelayanan persampahan kelurahan bukit timah dengan realisasi 100%.

d) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.937.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.835.000,- atau 97,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah meningkatnya pelayanan persampahan Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 97,93%.

e) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 71.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di Lingkungan Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

f) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 71.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di

Lingkungan Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

g) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 71.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 71.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kebersihan Persampahan di Lingkungan Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

h) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.990.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.490.000,- atau 24,92%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah meningkatnya pelayanan persampahan Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 24,92%.

18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.118.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 14.446.000,- atau 95,55% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 15.118.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 14.446.000,- atau 95,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengelolaan barang milik daerah yang diinventarisasikan selama 1 tahundengan realisasi 100%.

19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 46.068.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 46.068.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Peralatan Posyandu Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.068.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 46.068.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase pengadaan peralatan posyandu Kelurahan Ratu Simadengen realisasi 100%.

D.1. Urusan Pemerintahan, Oleh Dumai Kota

Akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Dumai Kota merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Kota untuk setiap pernyataan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.56

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN
2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	75	80	88	100	85	80
2.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat						
3.	Persentase						

swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat						
---	--	--	--	--	--	--

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
Target pencapaian realisasi kinerja tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2020 adalah (88%) dan tingkat capaian sebesar (100%), sebagaimana keterangan dibawah ini :

$$y = a / b \times 100 \% \text{ ----> } 1.925 / 2.184 \times 100\% = 88 \%$$

- y = Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik
a = Sarana dan Prasarana Kondisi Baik
b = Jumlah Keseluruhan Sarana Prasarana (Kondisi Baik + Kondisi Rusak atau Jumlah Kebutuhan)

Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Dumai Kota masih perlu penyempurnaan, belum bisa memenuhi kebutuhan Kantor Camat Dumai Kota yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan seperti mebeleur (meja, lemari arsip, kursi kerja, kursi rapat, kursi tunggu pelayanan), peralatan kantor (komputer, printer, AC, mesin fotocopy) dan

perlengkapan kantor (kamera digital) dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan tenaga honorer sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2020 adalah (88%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Kota pada tahun 2020 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya. Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Kota khususnya pada 5 (lima) Kelurahan, yang mana daftar penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dumai Kota sampai tahun 2020 adalah :

Tabel 3.57 Bantuan Pangan Non Tunai dan Penerima Keluarga Harapan

No	KELURAHAN	TAHUN 2020	TAHUN 2020	JUMLAH
		BPNT	PKH	
1	Kelurahan Dumai Kota	60 KK	108 KK	168 KK
2	Kelurahan Sukajadi	114 KK	112 KK	226 KK
3	Kelurahan Laksamana	63 KK	110 KK	173 KK
4	Kelurahan Bintan	1.702 KK	167 KK	1.869 KK
5	Kelurahan Rimba Sekampung	143 KK	188 KK	331 KK
	JUMLAH	2.082 KK	685 KK	2.767 KK

Jumlah penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya sebesar Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu berupa beras dan telur (nabati dan hewani).

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2020 adalah (88%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2020 ini pada Kecamatan Dumai Kota, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu

perbaikan akibat pasang surut air laut (banjir ROBB). Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2020 ini Kecamatan Dumai Kota sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Kota mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang petugas yang tersebar pada 5 (lima) Kelurahan. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Kota sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Kota mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Kota akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Kota. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Kota akan aman dan terkendali.

Jumlah anggaran untuk 3 (tiga) indikator ini sebesar Rp 4.323.026.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.042.914.661,- atau persentase anggaran 93,52 % yang dialokasikan melalui program dibawah ini

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 776.756.166,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 768.869.693,- atau 98,98 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.650.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.650.000,- atau 100 %.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 74.075.637,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 69.675.364,- atau 94,06 %.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp Rp 5.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.600.000,- atau 100 %.

d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.750.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 3.020.000,- atau 52,52 %.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp Rp 192.631.500,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 192.621.000,- atau 99,99 %.

f) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.993.350,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 40.981.000,- atau 99,97 %.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 13.875.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 13.875.000,- atau 100 %.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.015.520,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.013.000,- atau 99,94 %.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 11.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 11.308.000,- atau 98,33 %.

j) Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 41.882.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 41.803.480,- atau 99,1 %.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 197.583.159,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 197.122.849,- atau 99,77 %.

l) Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.200.000,- atau 100 %.

m) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 24.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 24.000.000,- atau 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 437.373.200,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 431.706.000,- atau 98,70 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 44.707.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 44.173.500,- atau 98,81 %.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 79.715.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 79.585.000,- atau 99,84 %.

c) Pengadaan mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.880.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 40.425.000,- atau 98,89 %.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 94.971.200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 90.935.000,- atau 95,75 %.

e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 22.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 21.660.000,- atau 98,45 %.

f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 25.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 25.000.000,- atau 99,60 %.

g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 130.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 129.928.000,- atau 99,94 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.325.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8.325.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 6.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 6.800.000,- atau 100 %.

b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.525.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.525.000,- atau 100 %.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 498.885.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 493.655.840,- atau 98,95 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 71.425.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 70.575.000,- atau 98,81 %.

b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.760.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 75.722.880,- atau 99,95 %.

c) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 76.840.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 76.442.880,- atau 99,48 %.

d) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 81.940.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 78.187.880,- atau 95,42 %.

e) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 113.040.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 112.984.320,- atau 99,95 %.

f) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 79.880.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 79.742.880,- atau 99,83 %.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 507.850.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 504.050.000,- atau 99,25 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.800.000,- atau 100 %.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.950.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 20.950.000,- atau 100 %.

c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.660.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp 117.660.000,- atau 100 %.

- d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.460.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 115.500.000,- atau 98,33 %.
- e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.460.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 117.460.000,- atau 100 %.
- f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintang**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.260.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.500.000,- atau 97,66 %.
- g) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 54.060.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 53.980.000,- atau 99,85 %.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 15.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 15.900.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Pembinaan Kehidupan Beragama**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 15.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 15.900.000,- atau 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 244.452.634,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 237.257.340,- atau 96,06 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 46.580.214,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 45.321.392,- atau 100 %.

b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 53.221.822,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 51.591.592,- atau 96,94 %.

c) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 54.772.664,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 52.994.848,- atau 96,66 %.

d) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 49.135.384,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 48.005.682,- atau 97,70 %.

e) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.742.550,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.393.826,- atau 96,69 %.

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.015.676.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.012.726.000,- atau 99,71 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.776.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 99.926.000,- atau 98,46 %.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar

Rp 163.300.000,- atau 100 %.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 237.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 236.850.000,- atau 99,89 %.

d) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 228.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 228.650.000,- atau 99,89 %.

e) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 187.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 187.900.000,- atau 100 %.

f) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 96.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 97.700.000,- atau 99,08 %.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 31.150.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 28.645.000,- atau 91,96 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 18.250.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.250.000,- atau 100 %.

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan kelurahan dumai kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.900.000,- atau 100 %.

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan kelurahan rimba sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.000.000,- atau 100 %.

d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan kelurahan sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.000.000,- atau 100 %.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 98.623.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 95.623.250,- atau 96,96 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 21.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 21.900.000,- atau 100 %.

b) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.550.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 20.550.000,- atau 100 %.

c) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 17.718.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 14.718.000,- atau 83,07 %.

d) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 21.170.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 21.170.500,- atau 100 %.

e) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 17.284.750,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 17.284.750,- atau 100 %.

11. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.785.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 11.785.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.990.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.990.000,- atau 100 %.

b) Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.795.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.795.000,- atau 100 %.

12. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.530.000,- atau 92,65 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 18.530.000,- atau 92,65 %.

13. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 600.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 364.781.538,- atau 60,80 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar

Rp 89.925.000,- atau 89,93 %.

**b) Penanganan dan pencegahan bencana alam maupun non alam
Kelurahan Laksamana**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 32.870.000,- atau 32,87 %.

**c) Penanganan dan pencegahan bencana alam maupun non alam
Kelurahan Dumai Kota**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.377.600,- atau 72,38 %.

**d) Penanganan dan pencegahan bencana alam maupun non alam
Kelurahan Rimba Sekampung**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 31.917.938,- atau 31,92 %.

**e) Penanganan dan pencegahan bencana alam maupun non alam
Kelurahan Sukajadi**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 62.974.000,- atau 62,97 %.

**f) Penanganan dan pencegahan bencana alam maupun non alam
Kelurahan Bintan**

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.717.000,- atau 73,72 %.

14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 38.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 34.610.000,- atau 89,90 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp 38.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 34.610.000,- atau 89,90 %.

15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.500.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Infrastruktur Kelurahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.500.000,- atau 100 %.

16. Program Pengembangan Data dan Informasi

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.350.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.950.000,- atau 88,06 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 3.350.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.950.000,- atau 88,06 %.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8.000.000,- atau 89,89 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 8.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8.000.000,- atau 89,89 %.

D.1. Urusan Pemerintah, Oleh Kecamatan Dumai Barat

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Dumai Barat dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2017 – 2021 urusan Pemerintahan Umum, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.58 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dumai Barat

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (DALAM %)
1	3	4	5
Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintahan yang baik	80%	70%	87,50%
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	80%	80%	100%
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	80%	80%	100%

Adapun penjelasan pencapaian indikator kinerja dari sasaran diatas pada tahun 2020 sebgaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik,

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2020 adalah 70% atau tingkat capaian sebesar 87,50%, karena program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Dumai Barat belum bisa memenuhi kebutuhan Kantor Camat dan 4 (empat) Kantor Lurah

se-Kecamatan Dumai Barat yang kekurangan meubeler (meja, kursi kerja, kursi rapat, lemari dll), peralatan kantor (Komputer, printer, laptop dll) dengan jumlah ASN dan Tenaga Honorer sebanyak 68 (enam puluh delapan) personil.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat.

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2020 adalah 80% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan pelayanan posyandu ada yang sudah dikerjakan secara swadaya dan swakelola masyarakat setempat dan ketua RT/LPMK sangat pro aktif dalam menampung usulan masyarakat dan mengerti administrasi tingkat RT dan pengurus posyandu aktif dalam pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan posyandu balita dan usila pada kader 4 (empat) kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan masyarakat pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pada Tahun 2020 ini Kecamatan Dumai Barat meraih juara umum II MTQ/STQ Tingkat Kota Dumai, Juara I Lomba Penyuluhan Kader PKK Tingkat Kota Dumai, Juara I Lomba Devile PKK (Jambore PKK) Tingkat Kota Dumai, Juara I Lomba Pantun Kader PKK Tingkat Kota Dumai (Jambore PKK). Untuk program nasional, pemerintah pusat telah menggalakkan program JKN dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) kepada masyarakat Kecamatan Dumai Barat khususnya pada 4 (empat) Kelurahan, yang mana daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat BNPT Kecamatan Dumai Barat Tahun 2020 adalah:

- Kelurahan Purnama	392	KK
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihksan	118	KK
- Kelurahan Bagan Keladi	268	KK
- Kelurahan Pangkalan Sesai	205	KK

Jumlah penerima BPNT sampai Tahun 2020 ini adalah 983 KK, yang mana setiap KK mendapat Bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Kartu Keluarga sejahtera (KKS) Rp. 200.000,-/bln/KK yang berupa Karbohidrat, protein, nabati dan hewani.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.

Target Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2020 (80%), sementara capaian indikator pada kondisi akhir tahun 2020 adalah 80% atau tingkat capaian sebesar 100%, karena kegiatan gotong royong di Kecamatan Dumai Barat sangat tinggi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk sms terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam pelayanan dibidang kesehatan, Pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar kader akan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu dimasa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan dari indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Kantor Camat Dumai Barat dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Dilihat pada tabel pencapaian indikator diatas, jika disandingkan capaian kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja pada Tahun 2019 (65%), dan tahun 2020 (70%) atau tingkat capaian sebesar 87,50% termasuk kategori “Baik”.

2. Pada Indikator Kualitas sumber daya lembaga masyarakat.

Capaian kinerja pada Tahun 2019 (75%), dan Tahun 2020 (80%) atau tingkat capaian 100% termasuk kategori “sangat baik”, dan telah memenuhi target pada indikator kinerja.

3. Pada Indikator Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat. Capaian kinerja pada Tahun 2019 (75%), dan pada Tahun 2020 (80%) atau tingkat capaian 100% termasuk kategori “sangat baik”, dan telah memenuhi target pada indikator kinerja.

Anggaran Belanja Kecamatan Dumai Barat pada Tahun 2020 di APBD Murni sebesar Rp. 12.967.998.740,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 9.049.718.040,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung di APBD Murni Rp. 5.479.009.040,- setelah di APBD Perubahan menjadi Rp. 5.296.058.540,- sedangkan Belanja Langsung di APBD Murni Rp. 7.488.989.700,-. Setelah di APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 3.753.659.500,- Untuk Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.760.594.548,- atau terserap 89,88% dan Belanja Langsung terserap Rp. 3.479.085.324,- atau 92,69%.

Adapun Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2020, Jumlah Anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.131.155.280,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 972.620.780,- Dengan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 953.113.990,- atau 97,99% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) **Penyediaan jasa surat menyurat**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.768.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.768.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah materai benda pos lainnya selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

b) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 72.600.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 61.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.023.533,- atau 79,84%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah rekening telepon, air bersih dan speedy/TV Kabel selama 1(satu) tahun dengan realisasi 79,84%.

c) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 47.200.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 7.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 3.740.000,- atau 51,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 51,94%.

d) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 2.227.000,- atau 44,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perpanjangan surat izin kendaraan dinasselama 1 (satu) tahun dengan realisasi 44,54%.

e) **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di

APBD Murni sebesar Rp. 197.142.200,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 197.582.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 197.224.010,- atau 99,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

f) **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 69.728.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 64.728.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 64.722.500,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

g) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 44.879.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 33.879.000,-. Dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 33.879.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

h) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 35.182.575,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 13.591.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 13.555.000,- atau 99,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kebutuhan alat listrik kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

i) **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koran/bahan bacaan yang dibutuhkan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 72.550.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 74.150.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 74.150.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah makanan/minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

k) Rapat – Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 248.905.505,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 176.522.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 176.494.807,- atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

l) Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 163.200.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 163.520.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 163.273.440,- atau 99,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa tenaga keamanan kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

m) Penyediaan Jasa Pelayanan Administarsi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 165.600.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 165.880.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 165.656.700,- atau 99,87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran yang dibayar selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 424.600.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 221.640.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 220.109.180,- atau 99,31% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 37.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 35.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 35.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan dengan realisasi 100%.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 92.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.500.000,- atau 98,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan dengan realisasi 100%.

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 65.700.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 69.740.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 69.709.180,- atau 99,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan realisasi 100%.

d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 11.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 11.900.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

e) Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di

APBD Murni sebesar Rp. 18.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 13.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 13.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 100%.

f) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 200.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi selama 1 (satu) tahun dengan realisasi 0%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 39.600.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 33.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 33.600.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 13.800.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 8.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan capaian kinerja selama 1 tahun dengan realisasi 100%.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 9.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2020 dengan realisasi 100%.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 16.800.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 15.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 15.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan realisasi 100%.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 387.556.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 282.036.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 281.637.160,- atau 99,86% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 25.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadisebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 10.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan kebersihan persampahan dilingkungan kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 100%.

b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 90.520.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 90.680.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.540.680,- atau 99,85%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan persampahan dengan realisasi 100%.

c) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 41.000.000,-. Namun setelah APBD

Perubahan menjadi Rp.0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan persampahan dengan realisasi 0%.

d) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 50.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi Rp.0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan persampahan dengan realisasi 0%.

e) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Pangkalan Sesai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 90.518.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 90.678.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.548.240,- atau 99,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan persampahan dengan realisasi 100%.

f) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 90.518.000,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 90.678.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.548.240,- atau 99,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Meningkatnya pelayanan persampahan dengan realisasi 100%.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 393.585.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadisebesar Rp. 372.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 358.050.000,- atau 96,25 % yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 21.585.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan dengan realisasi 0%.

b) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan STDI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 96.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 92.400.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan STDI dengan realisasi 96,25%.

c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 80.850.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi 96,25%.

d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 115.500.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama dengan realisasi 96,25%.

e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 72.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 69.300.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi 96,25%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 119.550.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadisebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.000.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 119.550.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadisebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 8.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan dengan realisasi 100%.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 257.113.120,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 261.113.120,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 253.625.744,- atau 97,13% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan STDI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 59.853.280,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 63.853.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 61.307.312,- atau 96,01%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 100%.

b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kelurahan Pangkalan Sesai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 61.653.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 60.398.316,- atau 97,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi (100%).

c) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 76.953.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 75.468.544,- atau 98,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 100%.

d) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 58.653.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 56.451.572,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah operasional kelurahan yang terpenuhi dengan realisasi 100%.

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 711.724.750,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 714.001.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 713.933.750,- atau 99,99% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan STDI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 151.961.250,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 152.423.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 152.406.250,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan STDI dengan realisasi 100%.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 167.942.750,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 168.470.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 168.453.750,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK

dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi 100%.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 239.859.500,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 240.684.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 240.667.500,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Purnama dengan realisasi 100%.

d) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan inidi APBD Murni sebesar Rp. 151.961.250,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadisebesar Rp. 152.423.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 152.406.250,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dakam Membangun Desa

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 74.590.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 32.090.000,- atau 43,03% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 32.090.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 32.090.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 dengan realisasi 100%.

b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase prilaku hidup bersih dan sehat dengan realisasi 0%.

c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Bagan Keladi.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase prilaku hidup bersih dan sehat dengan realisasi 0%.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 110.851.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 19.687.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 19.687.500,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 49.950.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 19.687.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 19.687.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 100%.

b) Pembinaan PPK Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 60.901.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina kelurahan dengan realisasi 0%.

11. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 58.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 58.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan dengan realisasi 0%.

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.712.850,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 6.712.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.712.000,- atau 99,99% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan infrastruktur kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.712.850,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 6.712.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.712.000,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur dengan realisasi 100%.

13. Program Pengembangan Data/Informasi

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 45.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 12.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 45.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 12.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan dengan realisasi 0%.

14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 6.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.000.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pengelolaan barang milik perangkat daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 6.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 4.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 4.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan pengelolaan barang inventaris milik perangkat daerah dengan realisasi 100%.

15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 1.017.608.200,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pembangunan jalan kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 300.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan yang dibangun dengan realisasi 0%.

b. Pembangunan jalan kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 330.730.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan yang dibangun dengan realisasi 0%.

c. Pembangunan jalan kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 386.878.200,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang jalan yang dibangun dengan realisasi 0%.

16. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.612.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Penyelenggaraan pelatihan tata boga Kelurahan STDI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.612.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terlaksananya pelatihan tata boga dikelurahan dengan realisasi 0%.

17. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 51.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-, dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan inidi APBD Murni sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dilestarikannya adat budaya daerah dengan realisasi 0%.

b. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan inidi APBD Murni sebesar Rp. 31.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dilestarikannya adat budaya daerah dengan realisasi 0%.

18. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 477.548.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 500.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 401.273.500,- atau 80,25% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 50.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pos jaga/ronda di kelurahan dengan realisasi 0%.

b. Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 391.700.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pos jaga/ronda di kelurahan dengan realisasi 0%.

c. Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun setelah APBDPerubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%.Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pos jaga/ronda di kelurahan dengan realisasi 0%.

d. Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 15.848.000,-.Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perlengkapan pos jaga/ronda yang diadakan dengan realisasi 0%.

e. Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam maupun non alam

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,-.dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 50.809.500,- atau 50,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam dengan realisasi 50,81%.

f. Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.752.500,- atau 90,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alamKelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dengan realisasi 90,75%.

**g. Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam
Kelurahan Pangkalan Sesai**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.550.500,- atau 90,55%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi 90,55%.

**h. Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam
Kelurahan Bagan Keladi**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 90.752.500,- atau 90,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi 90,75%.

**i. Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam
Kelurahan Purnama**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 78.408.500,- atau 78,41%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Purnama dengan realisasi 78,41%.

19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 175.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pembangunan dan rehabilitasi posyandu kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 80.000.000,-. Namun setelah APBD

Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah sarana dan prasarana posyandu dikelurahan dengan realisasi 0%.

b. Pembangunan dan rehabilitasi posyandu kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 60.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah sarana dan prasarana posyandu dikelurahan dengan realisasi 0%.

c. Pengadaan Peralatan posyandu kelurahan Pangkalan Sesai.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 35.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan posyandu yang diadakan dengan realisasi 0%.

20. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 853.100.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan di APBD Murni sebesar Rp. 150.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dengan realisasi 0%.

b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kelurahan Pangkalan Sesai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan di APBD Murni sebesar Rp. 450.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun dengan realisasi 0%.

c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 253.100.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang drainase yang dibangun dengan realisasi 0%.

21. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 28.625.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 13.401.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja adalah Terlaksananya pelatihan kader posyandu dengan realisasi 0%.

b. Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Bagan Keladi.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.612.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja adalah

Terlaksananya pelatihan kader posyandu dengan realisasi 0%.

c. Peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 7.612.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja adalah Terlaksananya pelatihan kader posyandu dengan realisasi 0%.

22. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 780.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 100.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang jalan yang dipelihara dengan realisasi 0%.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan Pangkalan Sesai.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 500.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang jalan yang dipelihara dengan realisasi 0%.

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 180.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang jalan yang dipelihara dengan realisasi 0%.

23. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD sebesar Rp. 254.540.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 176.335.000,- atau 69,28% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 40.980.000,- atau 81,96%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dengan realisasi 81,96%.

b. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD sebesar Rp. 143.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 85.690.000,- atau 59,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dengan realisasi 59,57%.

c. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD sebesar Rp. 60.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.665.000,- atau 81,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dengan realisasi 81,82%.

24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD sebesar Rp. 16.917.500,-. dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 16.917.500,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di

APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan dengan realisasi 100%.

b. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bagan Keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan dengan realisasi 100%.

c. Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD sebesar Rp. 6.917.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 6.917.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan dengan realisasi 100%.

25. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 60.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0% yang dialokasikan melalui kegiatan :

a. Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 30.000.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya sarana pendidikan dengan realisasi 0%.

b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di

APBD Murni sebesar Rp. 15.000.000,-.Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tercukupinya alat praktek dan peraga siswa dengan realisasi 0%.

c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD/TK Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 15.000.000,-.Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,-dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tercukupinya alat praktek dan peraga siswa dengan realisasi 0%.

D.1. Urusan Pemerintah, Oleh Kecamatan Medang Kampai

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Medang Kampaidan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.59 Capaian Indikator Sasaran Kecamatan Medang Kampai

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	Target 2020	REALISAS I TAHUN 2020	CAPAIAN (DALAM %)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Urusan Penanaman Modal				
Jumlah Belanja Langsung Anggaran 2020	Rupiah	3.109.445.000		
Urusan Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkatdaerah, Kepegawaian dan Persandian				
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	80	77,56	96,97%
Kualitas sumberdaya lembaga masyarakat	%	80	80	100
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	80	75,81	99,46

Sumber : Kecamatan Medang Kampai, Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran di ataspada Tahun 2020, untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang

Kampai yaitu 80% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 331.622.000 atau 96,97%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Kegiatan Penilaian Kinerja unit pelayanan publik. Adapun kegiatan ini mengukur Persentase meningkatnya kualitas pelayanan public adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Posyandu balita dan usila yang ada dan mengukur seberapa besar swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medang Kampai. Dari Data tersebut total posyandu yang ada di Kecamatan Medang Kampai berjumlah 130 org dan 26 posyandu terdiri dari balita dan usila. Dalam hal ini pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 4 (empat) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pembentukan kampung keluarga berencana Kota Dumai (KB), pembentukan Kelompok bina keluarga balita (BKB) “melati”, Kelompok bina keluarga lansia (BKL) “dahlia” dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) “Sakura” yaitu kelurahan Pelintung. Dengan kerjasama yang baik antar kaderakan dapat mengantarkan kecamatan pada perlombaan Gerakan Kecamatan Sayang Ibu di masa mendatang. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Medang Kampai sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan social budaya dilingkungan kelurahannya.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai yaitu 80% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 370.173.000. atau 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan LPMK dan RT. Adapun kegiatan ini mengukur Persentase peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan LPMK dan RT yang ada. Untuk

peningkatan kinerja LPMK dan RT dalam mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target dari indicator sasaran ini dalam Renstra Kecamatan Medang Kampai yaitu 80% dan capaian indicator ini sampai tahun 2020 yaitu 32.158.310 atau 99.46%. Kegiatan /lu pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Adapun kegiatan ini Terlaksananya Kegiatan 10 Program TP. PKK Tingkat Kecamatan Medang Kampai, Kegiatan tersebut memiliki sasaran indicator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indicator kegiatan yaitu Terlaksananya Kegiatan 10 Program TP. PKK Tingkat Kecamatan Medang Kampai dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. Tetapi dalam realisasi anggaran 99,46% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Sil pada lam penyerapan anggaran.

Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Anggota PKK Kecamatan Medang Kampai untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Medang Kampai serta seberapa tertibnya anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indicator sasaran ini adalah Keaktifan PKK Kecamatan Medang Kampai. Dari data yang diterima Jumlah PKK Kecamatan Medang Kampai berjumlah 110 orang Kelurahan dan Kecamatan. Pada tahun 2020 Kecamatan Medang Kampai meraih peringkat kesatu, kedua dan ketiga dalam penilaian (Lomba Parade Devile, Lomba Desain dan Peragaan budsa melayu harian,Lomba Dasa wisma, Lomba yelyel 10 program Pokok PKK, Lomba Joget Rebutan Kursi dan UP2K Terbaik Lomba HKG PKK, Lomba Parade (dalam rangka jambore PKK Kota Dumai dan Provinsi Riau).PKK Kecamatan Medang Kampai berjumlah 110 orang Kelurahan dan Kecamatan.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, dan indikator kinerja sudah maksimal hal ini disebabkan keberhasilan pencapaian dapat dilihat pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan untuk masing - masing kegiatan tersebut, perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%.

Dilihat pada table pencapaian indikator di atas, jika disandingkan capaian kinerja tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik, capaian kinerja tahun 2018 (98%), tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (96,97%) mengalami peningkatan;
2. Pada indikator Kualitas sumberdaya lembaga Masyarakat, capaian kinerja tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%) dan tahun 2020 (100%) persentase tetap;
3. Pada indikator Persentase swadaya Masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat, capaian kinerja tahun 2018 (99%), tahun 2019 (99,46%) dan tahun 2020 (99,64%) persentase tetap;

Anggaran Belanja Kecamatan Medang Kampai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.462.596.920,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.353.151.920,-sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 3.109.445.000,- Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi Rp 4.826.059.084,-atau terserap 90,15 % dan Belanja Langsung Rp 2.749.150.097,-atau terserap 88,41 %.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 734.857.640,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 727.882.928,- atau 99,05 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp 3.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.000.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah materai selama 12 bulan, terealisasi 100 %.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 21.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 17.104.341,- atau 81,44 %. Indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pemakaian telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun selama 12 bulan dan realisasi kinerjanya 100 %. Pembayaran listrik melalui KOPPEGTEL setempat berdasarkan pemakaian/kebutuhan kantor setiap bulannya.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 55.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 55.200.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia Rp. 6.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.4.497.250,- atau 68,14%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar Selama 12 Bulan dengan persentase capaian 100%.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 214.895.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp 214.895.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayar untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja sebanyak 12 (sebelas) orang selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 50.090.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.090.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibutuhkan selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 31.904.640,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 31.904.640,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.800.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik kantor selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.968.000,- dengan realisasi penyerapan. Anggaran sebesar Rp 9.392.000,- atau 94,22%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah koran/majalah dalam 12 (duabelas) bulan dengan realisasikinerja 100%.

j) Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran

sebesar Rp 71.995.000,- atau 99,99%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan selama 12 (duabelas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 140.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 139.604.697,- atau 99,71%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang melakukan perjalanan dinas selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

l) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 122.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 122.400.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga keamanan kantor sebanyak 6 (enam) orang dengan realisasi kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 281,774.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 278,254,000,- atau 98.75 % yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 103.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 102.740.000,- atau 99,27%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 19 (unit) selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

b) Pengadaan Mebeleur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 57.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 56.848.000,- atau 99,73 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah mebeleur kantor yang diadakan sebanyak 17 unit/set selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 79.574.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 77.726.000,- atau 97,68%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua sebanyak 9 unit selama 1 (satu) tahun dengan realisasi dengan realisasi kinerja 100%.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.8.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar 8.200.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.13.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- atau 99,23% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peralatan Gedung Kantor terpelihara selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

f) Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor

Jumlah Anggran untuk program ini sebesar Rp.20.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 19.840.000,- atau 96,78%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah rehabilitas sedang/berat Gedung kantor selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 281,774.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 278,254,000,- atau 98.75 % yang dialokasikan melalui kegiatan – kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.555.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.545.250,- atau 99,90%. Adapun indicator kinerja

keluaran adalah jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 25.504.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 25.204.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 8.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8.000.000,- atau 96,93 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen laporan pencapaian kinerja (LKj/LAKIP, Renja, Renstra, DPA Murni dan DPA Perubahan) sebanyak 4 (empat) dokumen dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 8.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8.200.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah laporan prognosis tahun 2018 sebanyak 2 (dua) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.004.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.004.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi kinerja 100 %.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 342.022.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 331.622.000,- atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

b) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 14,422,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 14,422,000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan sebanyak 4 (empat) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

c) Pembinaan pos pelayanan terpadu kelurahan guntung

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25,200,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.24,400,000,- atau 96,83%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Guntung yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

d) Pembinaan Pos Pelayanan Teradu Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100,800,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97,600,000,- atau 96,83% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 75.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 73,200,000 atau 96,83%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Mundam yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 126.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.122.000.000 atau 96,83%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila Kelurahan Pelintung yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 7,000,000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar 7,000,000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7,000,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7,000,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan yang diadakan sebanyak 4 Jenis Lomba realisasi kinerja 100 %.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 220.968.800,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 207.150.999,- atau 93,74 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 53,856,200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49,375,127,- atau 91,68 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan Guntung yang Terpenuhi selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 55,440,200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 51,181,556,- atau 92,32 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan teluk Makmur yang Terpenuhi selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 54,648,200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50,423,276,- atau 92,27 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan Mundam yang Terpenuhi selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

d) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 57,024,200,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 56,171,040,- atau 98,50 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah Jumlah Operasional Kelurahan pelintung yang Terpenuhi selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

8. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 370.173.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.370.173.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawahini :

a) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72,352,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 72,352,000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan RT Kelurahan Guntung yang dibayar selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 88.454.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 88.454.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan RT Kelurahan Teluk

Makmur yang dibayar selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

d) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 80.403.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 80.403.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mundam yang dibayarselama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

e) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 128.964.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 128.964.000,- atau 100 %. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan RT Kelurahan Pelintung yang dibayar selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 77.710.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 77.710.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 16,000,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16,000,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peningkatan partisipasi masyarakat yang diadakan selama 12 (dua belas) dengan realisasi kinerja 100%

b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 14,850,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 14,850,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja

keluaran adalah jumlah peningkatan partisipasi masyarakat yang diadakan selama 12 (dua belas) dengan realisasi kinerja 100%

c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 8,400,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 8,400,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peningkatan partisipasi masyarakat yang diadakan selama 12 (dua belas) dengan realisasi kinerja 100%

d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 38,460,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 38,460,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peningkatan partisipasi masyarakat yang diadakan selama 12 (dua belas) dengan realisasi kinerja 100%

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 33.933.810,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 32.158.310,- atau 94,67%. yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 13,933,810,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 13,808,310,- atau 99,10%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 100 %.

b) Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5,650,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4,000,000,- atau 70,80%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan

kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 100 %.

c) Pembinaan PKK Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4,600,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4,600,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 100 %

d) Pembinaan PKK Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4,666,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4,666,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 100 %

e) Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5,084,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5,084,000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah TP PKK yang bina di kecamatan dan kelurahan selama 12 (dua belas) bulan Pokja dengan realisasi kinerja 100 %

11. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

13. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

15. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

16. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

17. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

18. Program lingkungan sehat perumahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.227.020.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.78,000,000,- atau 34,36% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Guntung

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87,250,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp.0,00,- atau 0,00%. Penyerapan anggaran yang tidak terjadi dikarenakan belanja modal yang ada di kegiatan ini tidak sesuai dengan peraturan walikota Dumai tentang kegunaan dana kelurahan.

b) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 111,400,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39,000,000,- atau 35,01%. Penyerapan anggaran yang tidak terjadi dikarenakan dana yang tersisa dalam kegiatan ini adalah untuk operasional pemadaman kebakaran.

c) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Mundam

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78,370,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39,000,000,- atau 49,76%. Penyerapan anggaran yang tidak terjadi dikarenakan dana yang tersisa dalam kegiatan ini adalah untuk operasional pemadaman kebakaran.

20. Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.112.250.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.112,250,000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan teluk makmur

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30,000,000,- atau 100% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Teluk Makmur yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

b) Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan mundam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30,000,000,- atau 100% Adapun indicator kinerja

keluaran adalah jumlah penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Mundam yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

c) Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan guntung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.22,250,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22,250,000,- atau 100% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah penyelenggaraan musrenbang Kelurahan guntung yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

d) Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.30,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30,000,000,- atau 100% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah penyelenggaraan musrenbang Kelurahan pelintung yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.116.676.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.115,062,750,- atau 98,61% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.36,592,750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 36,562,750,- atau 99,92% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peningkatan operasi dan pemeliharaan yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%

b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,-dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

c) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Teluk Makmur

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

d) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

f) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.80,084,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78,500,000,- atau 98,02% Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah peningkatan operasi dan pemeliharaan yang dibayar selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%

22. Program penciptaan iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

23. Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

24. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

25. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.500,000,000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.377.136.860,- atau 75,42% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

b) Pembangunan pos jaga/ronda Kelurahan Pelintung

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

c) Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Mundam

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

d) Pengadaan perlengkapan pos jaga/ronda Kelurahan Guntung

Jumlah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

e) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.74,589,000,- atau 74,59%. Penyerapan anggaran yang tidak 100% dikarenakan harga satuan barang yang direncanakan cukup tinggi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu perencanaan bertepatan dengan pandemic covid 19 dimana harga barang yang berhubungan dengan pencegahan covid sangat tinggi. Sejumlah anggaran juga diperuntukkan untuk operasional

penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, namun setelah anggaran dapat digunakan kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di medang kampai.

f) Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam kelurahan mundam

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.72,648,400,- atau 72,65%. Penyerapan anggaran yang tidak 100% dikarenakan harga satuan barang yang direncanakan cukup tinggi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu perencanaan bertepatan dengan pandemic covid 19 dimana harga barang yang berhubungan dengan pencegahan covid sangat tinggi.

g) Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam kelurahan teluk makmur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.76,292,900,- atau 76,29%. Penyerapan anggaran yang tidak 100% dikarenakan harga satuan barang yang direncanakan cukup tinggi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu perencanaan bertepatan dengan pandemic covid 19 dimana harga barang yang berhubungan dengan pencegahan covid sangat tinggi.

h) Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam kelurahan Guntung

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.75,397,000,- atau 75,40%. Penyerapan anggaran yang tidak 100% dikarenakan harga satuan barang yang direncanakan cukup tinggi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu perencanaan bertepatan dengan pandemic covid 19 dimana harga barang yang berhubungan dengan pencegahan covid sangat tinggi.

**i) Penanganan dan Pencegahan bencana alam dan non alam
kelurahan Pelintung**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.78,209,560,- atau 78,21%. Penyerapan anggaran yang tidak 100% dikarenakan harga satuan barang yang direncanakan cukup tinggi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu perencanaan bertepatan dengan pandemic covid 19 dimana harga barang yang berhubungan dengan pencegahan covid sangat tinggi.

26. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

27. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

28. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.0,- dikarenakan terjadi refocusing dalam rangka penanggulangan pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat di kerjakan.

D.1. Urusan Pemerintahan, Oleh Kecamatan Bukit Kapur

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2017 – 2021 urusan wajib Otonomi Daerah, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.60 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bukit Kapur

INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI S/d TAHUN 2020	CAPAIAN DALAM (%)
1	2	3	4
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	80 %	80 %	100 %
Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	80 %	80 %	100 %
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	80 %	80 %	100 %

Sumber : Kecamatan Bukit Kapur

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing - masing kinerja tersebut. Nilai capaian Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2020 dapat dilihat dari rencana tingkat capaian pada rencana kinerja tahunan terhadap realisasi kinerja capaian sasaran. Adapun rincian capaian sasaran tahun 2020 sebagaimana berikut ini :

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- c) Program peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- d) Program peningkatan pelayanan kelurahan
- e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Realisasi Anggaran

- a. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran ini sebesar Rp. 1.059.516.770,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.041.142.381,- atau 95,71 %
- b. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini sebesar Rp.92.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.87.194.811,- atau %
- c. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini sebesar Rp. 43.605.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.42.781.802,- atau 98,11%
- d. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan Program peningkatan pelayanan kelurahan ini sebesar Rp. 175.942.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.175.942.000,- atau 100%
- e. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ini sebesar Rp.31.450.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.450.000,- atau 100%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

- a) Program menginsentifkan penanganan pengaduan masyarakat
- b) Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT
- c) Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Realisasi Anggaran

- a. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program menginsentifkan penanganan pengaduan masyarakat ini sebesar Rp.421.110.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.421.110.000,- atau 100%
- b. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT ini sebesar Rp. 885.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 885.900.000,- atau 100%
- c. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan ini sebesar Rp.44.348.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.44.348.000,- atau 100%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sementara strategi dari indikator diatas adalah memperkuat kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melayani sehingga arah kebijakan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat .

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada program ini adalah indikator kinerja capaian :

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Realisasi Anggaran

- a. Jumlah anggaran tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini sebesar Rp.14.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.14.850.000,- atau 100%
- b. Jumlah Anggaran Tahun 2020 yang tersedia untuk melaksanakan Program pengembangan wawasan kebangsaan ini sebesar Rp.0,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%

Adapun sasaran dari indikator diatas adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sementara strategi dari indikator diatas adalah meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga arah kebijakan meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.059.516.770,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.041.142.381,- atau 95,71% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.27.900.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.26.700.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau 95,69 %.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 63.900.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.57.555.972,- (Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu rupiah) atau 90,07%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.20.500.000 (dua puluh juta Lima Ratus Ribu rupiah) dengan

realisasi penyerapan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau 97,56%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.188.374.520,- (seratus Delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh Puluh Empat lima Dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.181.334.520,- (seratus Delapan puluh satu juta tiga ratus tiga Puluh Empat lima Dua puluh ribu rupiah) atau 96,26%.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini 43.826.250,- (Empat Puluh Tiga Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 43.826.250,- (Empat Puluh Tiga Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) atau 100%.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.38.604.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.36.483.925,- (Tiga Puluh Enam Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 94,51%.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.9.242.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.242.000,- (empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau 100 %.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau 100%.

- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini 137.520.000,- (seratus tiga puluh Tujuh juta Lima Ratus dua Puluh Ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.113.265.000,- (seratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 82,36%.
- j) Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.82.950.000,- (Delapan Puluh Dua Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.82.950.000,- (Delapan Puluh Dua Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%.
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 223.584.714,- (Dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) atau 98,49%.
- l) Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.147.900.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.147.400.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta Empat ratus ribu rupiah) atau 99,66%.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.92.300.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.87.394.811,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau 94,680 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.55.500.000,- (Lima Puluh lima juta lima ratus ribu rupiah

rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.50.401.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu seribu rupiah) atau 91%.

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.36.793.811,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau 99.98%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.31.450.000,- (Tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.450.000,- (Tiga Puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) atau 100%.

b) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.11.250.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.11.250.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus lima puluh Ribu rupiah) atau 70,58%.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.43.605.600,- (empat

puluh tiga juta enam ratus ribu lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.42.781.802,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu delapan ratus dua rupiah) atau 98.11 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.43.605.600,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu lima puluh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.42.781.802,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 98,11%

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,- (nol) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- (nol) atau 0 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Pembinaan kehidupan beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.0,- (nol) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 0,- (nol) atau 0%.

6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 421.110.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sepuluh Ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.421.110.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sepuluh Ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) atau 100%.

- b) Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. Rp.13.110.000,- (Tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.13.110.000,- (Tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau 100%.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.175.942.000,- (seratu tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu empat puluh dua ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.942.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a. Dukungan Operasional Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.175.942.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.175.942.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau 100%

8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 100%.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100%.

10. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Masyarakat Kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini:

- f) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100%.

D.1. Urusan Pemerintahan, Oleh Kecamatan Sungai Sembilan

Dalam Pencapaian Indikator sasaran yang terdapat dalam renstra Kecamatan Sungai Sembilan 2017-2021, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.61 Sasaran Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Sembilan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	80	76,51	95,63
	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	80	80	100
	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	80	0	0

Sumber Kecamatan Sungai Sembilan, Tahun 2020

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2020 untuk masing-masing indikator kinerja Sebagai Berikut

1. Cakupan Sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra kecamatan sungai sembilan tahun 2020 adalah 80 % dan terealisasi 76,51% atau 95,63%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 436.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 417.000.000,- atau 95,64 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah kader posyandu balita dan usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi 12 bulan serta jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dan terealisasi sebanyak 5 Kelurahan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di kelurahan dan peningkatan kinerja kader posyandu balita dan usila di Kecamatan Sungai Sembilan.

2. Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra kecamatan sungai sembilan tahun 2020 adalah 80 % dan terealisasi 80% atau 100%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 870.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 870.300.000,- atau 100 %. . Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Honorarium Pengurus LPMK dan Ketua RT selama 12 Bulan dan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau 100 %.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas Kinerja Pengurus LPMK dan Ketua RT di Kecamatan Sungai Sembilan.

3. Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra kecamatan sungai sembilan tahun 2020 adalah 0% dan terealisasi 0% atau 0%.

Adapun Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah . Capaian Kinerja ini Tidak memenuhi target yang diinginkan karena adanya Refocusing Anggaran untuk Covid 19..

Tujuan utama kegiatan ini memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Secara keseluruhan Kecamatan Sungai Sembilan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 9.747.415.580,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 8.980.007.208.- atau 92,13%. dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung 1 (satu) sasaran strategis adalah Rp. 1.314.100.000.- Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 1.295.100.000,- atau 98,55%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.085.123.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.1.043.399.934,- atau 96.15% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. 65.700.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 65.520.000.- atau 99,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Materai dalam satu tahun sebanyak 195 Buah dan terealisasi sebanyak 160 Buah atau 82,05%.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.68.822.712,-atau 81,93%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rekening Listrik, Air bersih dan internet dalam 1 tahun sebanyak 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini

sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.26.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 24.083.375,- atau 92,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah honorium supir yang dibayar selama 1 tahun dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.250.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar selama 12 Bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 4.250.000,- atau 85,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pemeliharaan AC, Komputer dan Mesin Potong Rumput sebanyak 37 Kali dan terealisasi 37 Kali atau 100,00%.

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 33.338.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.33.338.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah alat tulis kantor selama 1 tahun dan terealisasi 12 Bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

- h)** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.640.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 13.640.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- i)** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kebutuhan alat listrik selama 1 tahun dan terealisasi 12 bulan atau 100%.
- j)** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 78.120.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 78.120.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah surat kabar harian selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%.
- k)** Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 36.125.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.950.000,- atau 91,21%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah makan minum rapat dan tamu selama satu tahun dan terealisasi 11 bulan atau 100%.
- l)** Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 146.875.847,- atau 99,92%. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keluar daerah selama 1 tahun dan terealisasi 12 bulan atau 100%.

m) Penyediaan Jasa Tenaga Kemanan Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 326.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 306.000.000,- atau 93,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Keamanan selama 1 tahun sebanyak 192 ob dan terealisasi 180 ob atau 93,75%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 54.805.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 53.084.000,- atau 96,86% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 21.384.000,- atau 99,46% Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 54 Unit dan terealisasi 54 Unit atau 100%.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 19.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.5000.000,- atau 100,00% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan sebanyak 7 Unit dan terealisasi 7 Unit atau 100%.

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 13.805.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- atau 88,37%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 600.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 540.060.000,- atau 90,01% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam maupun non alam

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.415.000,- atau 96,42%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam maupun non alam di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 80% dan terealisasi 80%.

b) Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Lubuk Gaung

Jumlah Anggaran yang tersedian dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.775.000,- atau 89,78%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Lubuk Gaung sebesar 80% dan terealisasi 80%.

c) Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Basilam Baru

Jumlah Anggaran yang tersedian dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.740.000,- atau 86,74%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Basilam Barusebesar 80% dan terealisasi 80%.

d) Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Bangsal Aceh

Jumlah Anggaran yang tersedian dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 90.250.000,- atau 90,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Bangsal Aceh sebesar 80% dan terealisasi 80%.

- e) Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Batu Teritip

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.148.000,- atau 86,15%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Batu Teritip sebesar 80% dan terealisasi 80%.

- f) Penanganan dan pencegahan bencana alam dan non alam Kelurahan Tanjung Penyembal

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 90.732.000,- atau 90,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Tanjung Penyembal sebesar 80% dan terealisasi 80%.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp.62.225.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.50.221.000,- atau 80,71% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.875.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.875.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Musrenbang Kelurahan Lubuk Gaung sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

b) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Musrenbang Kelurahan Tanjung Penyembal sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

c) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.4.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.350.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Musrenbang Kelurahan Bangsal Aceh sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

d) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Basilam Baru.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.996.000,- atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Musrenbang Kelurahan Basilam Baru sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

e) Penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Batu Teritip.

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- atau 40,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Dokumen Musrenbang Kelurahan Basilam Baru sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 394.697.400,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.327.965.000,- atau 83,09% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Bangsal Aceh
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.126.433.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 109.670.000,- atau 86,74%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan peralatan mesin pemadam kebakaran kelurahan Bangsal Aceh sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan atau 100%
- b) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Lubuk Gaung
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.7.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan peralatan mesin pemadam kebakaran kelurahan Lubuk Gaung sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi 0 Kegiatan atau 0,00%.
- c) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Tanjung Penyembal
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.59.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.731.000,- atau 84,29%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan peralatan mesin pemadam kebakaran kelurahan Tanjung Penyembal sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan atau 100%.
- d) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Basilam Baru
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.55.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.687.000,- atau 70,34%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan peralatan mesin pemadam kebakaran kelurahan Basilam Baru sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan atau 100%.

- e) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kelurahan Batu Teritip

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.147.264.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 129.877.000,- atau 88,19%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan peralatan mesin pemadam kebakaran kelurahan Batu Teritip sebanyak 1 Kegiatan dan terealisasi 1 Kegiatan atau 100%.

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 21.650.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- atau 87,76% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.650.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- atau 87.76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium Petugas Persampahan di Kecamatan selama 12 Bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100%

7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 436.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 417.000.000,- atau 95.64% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- a) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau 46.88%.Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dengan dan terealisasi 5 Kelurahan atau 100%.

- b) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- atau 97.50%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah jumlah kader posyandu balita dan usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- atau 97.50%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.84.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.900.000,- atau 97.50%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- e) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.156.000.000,-dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 152.100.000,-atau 97.50%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- atau 97.50%.Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan

terrealisasi selama 12 bulan atau 100%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 177.630.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 174.713.000,- atau 98,36% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

- a) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Penyembal
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 34.806.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.34.806.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya dana dukungan operasional Kelurahan Tanjung Penyembal selama 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan atau 100%.

- b) Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangsal Aceh
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.34.806.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.34.414.000,- atau 98,87%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Bangsal Aceh selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%

- c) Pelayanan Administrasi Kelurahan Lubuk Gaung
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.34.806.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 34.806.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Lubuk Gaung selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- d) Pelayanan Administrasi Kelurahan Basilam Baru
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.34.806.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 34.806.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Basilam Baru

selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

e) Pelayanan Administrasi Kelurahan Batu Teritip

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.406.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 35.881.000,- atau 93.43% . Adapun indikator kinerja kelurahan adalah Tersedianya Dana Dukungan Operasional Kelurahan Batu Teritip selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%

9. Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 878.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 878.100.000,- atau 100,00% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 180.300.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK Kel.Tanjung Penyembal selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

b) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 117.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 117.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK Kel.Bangsal Aceh selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

c) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 234.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 234.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK Kel.Lubuk Gaung selama 12 bulan dan

teralisasi 12 Bulan atau 100 %.

d) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 211.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 211.500.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK Kel.Basilam Baru selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

e) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 133.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 133.500.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Honorarium RT dan LPMK Kel.Batu Teritip selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.200.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100,00% yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah 32.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 32.200.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Musrenbang di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100%.

D.2. Urusan Pengawasan, Oleh Inspektorat Daerah

Dalam pencapaian Indikator Kinerja sasaran perubahan yang terdapat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2016-2021 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.62 Indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (DALAM %)
Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)	70	77,91	111,30
Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau	79	76,49	96,82
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100
Peningkatan kapabilitas APIP	3	2	66,67

Sumber : Inspektorat, tahun 2020

Untuk skala penilaian terhadap Indikator kinerja sasaran pemerintah, menggunakan Peraturan Menpan dan RB Nomor 15 Tahun 2015 sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka (%)	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan,
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik,
4	B	>60 – 70	Baik,
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
6	C	>30 - 50	Kurang,
7	D	0 – 30	Sangat Kurang,

Sumber : Inspektorat, tahun 2020

Dari 4 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti. Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)

Pada tahun 2020 jumlah total rekomendasi adalah 344 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 268 temuan, sebanyak 21 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 39 temuan belum di tindaklanjuti.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebesar 77,91% sudah melebihi target dari 70%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai melebihi 100 %, hal ini menunjukkan capain dengan kategori **AA** dengan interpretasi **Sangat memuaskan**

2. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau

Pada sampai dengan tahun 2019 jumlah total rekomendasi adalah 1042 temuan, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 797 temuan, sebanyak 211 temuan masih dalam proses untuk ditindaklanjuti dan 21 temuan belum di tindaklanjuti, sedangkan tidak dapat

ditindaklanjuti 13 Temuan.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2019 sebesar 76,49% belum mencapai target dari 79%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan nilai 96,82%, hal ini menunjukkan capain dengan kategori **AA** dengan interpretasi **Sangat memuaskan**.

3. Tingkat Maturitas SPIP

Pada tahun 2019 Tingkat Maturitas SPIP mempunyai target penilai Level 3, sedangkan pada tahun 2020 Maturitas SPIP masih sama mempunyai target Level 3. Untuk penilaian Maturitas SPIP pada tahun **2019** mempunyai skor SPIP Pemerintah Kota Dumai sebesar 3,0602 atau sudah berada pada level 3. Sedangkan pada tahun 2020 penilaian tingkat maturitas SPIP belum keluar dari Pusat.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Penilaian Maturitas SPIP pada tahun 2019 skor level 3 sudah mencapai target level 3 , dengan capaian kinerja Penilaian maturitas SPIP 100% , hal ini menunjukkan capain dengan kategori **AA** dengan interpretasi **Sangat memuaskan**.

4. Peningkatan Kapabilitas APIP

Pada tahun 2020Peningkatan Kapabilitas APIP mempunyai target penilai Level 3. Untuk penilaian Kapabilitas APIP pada tahun **2020** mempunyai skor Penilaian Kapabilitas APIP Level 2 Penuh.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2020 skor level 2, belum mencapai target level 3, dengan capaian kinerja Penilaian Kapabilitas APIP 66,67% , hal ini menunjukkan capain dengan kategori **B** dengan interpretasi **Baik**.

Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 15.635.148.699,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.397.558.370,00 atau 92,08%.

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun Anggaran2020 disampaikan sebagai berikut , yaitu:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.429.980.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.040.669.000,- atau 79,17 %. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.949.185.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 935.550.000,- atau 96,46 %. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 74 LHP dan terealisasi 70 LHP atau 94,59 %, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah diprogramkan yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus.

b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/ SJ tanggal 4 Maret 2016. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.211. 625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.190.903.000,- atau 90,21 %. Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 5 (lima) Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi adalah 4 (empat) Dokumen atau 80,00% dikarenakan waktu untuk mengevaluasi/mereviu sudah terlambat dan terbatasnya waktu.

c) *Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.215.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- atau 80,23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 15 laporan dan terealisasi sebanyak 15 laporan atau 100%. Tercapainya target yang telah ditetapkan.

d) *Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.203.770.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.186.975.600,00 atau 91,75%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (Dua) kali dan terealisasi 2 (Dua) kali atau 100%.

e) *Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.88.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.277.000,- atau 96,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan

f) *Audit Khusus / Tertentu*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.300.000,- atau 13,68%. Adapun indikatornya adalah 1 Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 1 jumlah laporan Hasil Pemeriksaan sebesar 100%, kegiatan tersebut dilaksanakan di RSUD hanya pendampingan.

g) *Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.110.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.901.000,00 atau 74,46 %. Adapun indikator kinerja

keluarannya adalah jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD, yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasi 35 OPD atau 100%

h) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.100.000,-. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30.350.000,-atau 81,80 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan dengan target 8 OPD dan terealisasi 8 OPD atau terealisasi 100%

i) Pengendalian Gratifikasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.450.000,00.dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.322.000,00atau 99,85%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen/ Laporan dilaksanakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan atau terealisasi 100%

j) Reviu Penyerapan Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp0 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %.Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai dilaksanakan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan atau terealisasi 100%.

k) Rencana Aksi Pemberantasan korupsi Terintegrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.995.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.211.000,- atau 81,72 %. Adapun indikator kinerja keluarannya Laporan

l) Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan korupsi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.370.000,- atau 67,30 %. Adapun indikator kinerja keluarannya Laporan

m) Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar

Rp. 70.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 69.390.000,- atau 99 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

n) Saber Pungli

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.590.000,- atau 98,81 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

o) Survei Penilaian Integritas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.800.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

2. Program pada pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan melalui kegiatan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.198.378.020,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.318.000,- atau 98,46%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.198.378.020,- dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.318.000,- atau 96,76%.Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA dari yang direncanakan sebanyak 40 orang dan terealisasi 40 orang atau tingkat capaian 100%.

D.3. Urusan Perencanaan, Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Dokumen Rencana Startegis (RENSTRA) untuk jangka 5 (lima) tahun 2016-2021, terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2021. Keempat indikator yang dimaksud antara lain: (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan; (2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2020 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2019 tersaji pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.63 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun 2019

Indikator kinerja sasaran	Realisasi tahun 2019	Target Akhir 2020	Realisasi Tahun 2020
Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	37,23%	30%	39,50%
Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	99.4%	100%	96.65%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2020

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD melebihi target yang telah ditetapkan dimana usulan masyarakat telah terakomodir sebanyak 39,50 % dari yang di targetkan 30%.
2. Indikator Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, target 2020 adalah tersedianya 2 Dokumen, kedua dokumen tersebut, yakni :
 - a) Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
 - b) Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Peubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).
3. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, target 2020 adalah 100%, target ini terealisasi 96,65%. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut:
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Tahun Anggaran 2020, dimana total anggaran untuk 16 (Enam belas) program dan 53 (lima puluh Tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah Rp. 12.238.222.414,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.887.157.650,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.351.064.764,-. Untuk serapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.212.421.060,- atau 88,54% dan Belanja Langsung terserap Rp. . 5.814.386.917,- atau 91,55%. Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Pada Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 2.100.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 2.100.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan surat menyurat sebanyak 12 Bulan.

- b) Pada Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dialokasikan dana sebesar Rp. 18.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 17.348.850,- atau 94,29% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 Bulan.
- c) Pada Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 41.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 23.880.600,- atau 57,54% dengan capaian kinerja 95,18%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas sebanyak 24 Unit.
- d) Pada Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 124.900.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 124.900.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor sebanyak 12 Bulan
- e) Pada Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 55.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 51.174.000,- atau 92,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sebanyak 71 Unit.
- f) Pada Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 161.073.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 160.999.000,- atau 99,95 dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan alat tulis kantor sebanyak 12 Bulan.
- g) Pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 59.747.600,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 47.064.800,- atau 78,77% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 Bulan.

- h) Pada Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 29.827.731,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 29.827.731,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor sebanyak 12 Bulan.
- i) Pada Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 30.472.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 28.380.000,- atau 93,13% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan sebanyak 12 Bulan.
- j) Pada Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan dana sebesar Rp. 44.237.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 41.762.500,- atau 94,41% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan sebanyak 12 Bulan.
- k) Pada Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 368.099.734,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 368.070.400,- atau 99,99% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 12 Bulan.
- l) Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 128.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 127.380.000,- atau 99,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor sebanyak 12 Bulan.
- m) Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan dana sebesar Rp. 562.064.000,- dari dana yang

dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 562.064.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran sebanyak 12 Bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pada Kegiatan Pembangunan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 179.670.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 179.668.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor yang dibangun sebanyak 2 unit.
- b) Pada Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 144.026.800,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 142.926.800,- atau 99,24% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 6 Unit.
- c) Pada Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 199.348.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 154.350.700,- atau 77,43% dengan capaian kinerja 94,48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 14 Unit.
- d) Pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dialokasikan dana sebesar Rp. 413.691.983,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 413.584.800,- atau 99,97% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala sebanyak 24 Kendaraan.
- e) Pada Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 198.560.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 198.559.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi sebanyak 2 Unit.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pada Kegiatan Pembinaan mental dan fisik aparatur dialokasikan dana sebesar Rp. 57.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 27.805.000,- atau 48,44% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pembinaan jasmani dan rohani sebanyak 12 Bulan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Pada Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 17.100.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 17.100.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebanyak 3 Dokumen.
- b) Pada Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan dana sebesar Rp. 1.800.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 900.000,- atau 50% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen laporan keuangan sebanyak 2 Dokumen.

5. Program Pengembangan Data/ Informasi

- a) Pada Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 106.929.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.126.750,- atau 78,68% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah aplikasi yang digunakan sebanyak 2 Aplikasi.
- b) Pada Kegiatan Penyusunan Data Perencanaan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 50.860.000,- atau 84,77% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan data inputan E-Database SIPD Kemendagri sebanyak 1 Laporan.

6. Program Pengembangan Perumahan

- a) Pada Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dialokasikan dana sebesar Rp. 329.867.150,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 323.417.201, atau 98,04% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Pada Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dialokasikan dana sebesar Rp. 295.422.050,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 278.311.516,- atau 94,21% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan sebanyak 1 Dokumen.

8. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Kerjasama Pembangunan, melalui Kegiatan ;

- b) Pada Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 79.440.873,- atau 79,44% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah sebanyak 12 Bulan.

9. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, melalui Kegiatan ;

- c) Pada Kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan dialokasikan dana sebesar Rp. 90.882.425,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.158.200,- atau 99,20% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat sebanyak 1 Dokumen.

10. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar, melalui Kegiatan ;

- d) Pada Kegiatan Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp. 73.324.600,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 72.858.709,- atau 99,36% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi sebanyak 10 Kali.
- e) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 62.124.900,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.665.982,- atau 86,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebanyak 12 bulan.
- f) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri dialokasikan dana sebesar Rp. 100.528.069,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 83.739.943,- atau 83,3% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri sebanyak 1 dokumen
- g) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp. 260.927.412,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 249.234.212,- atau 95,52% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.
- h) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 88.416.250,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 84.716.250,- atau 95,82% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana sebanyak 1 Dokumen.

- i) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur dialokasikan dana sebesar Rp. 91.050.000,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.210.693,- atau 96,88% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur sebanyak 10 Kali.

11. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan daerah, melalui Kegiatan ;

- a) Pada Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dialokasikan dana sebesar Rp. 121.975.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 85.010.000,- atau 69,69% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah forum OPD yang dilaksanakan sebanyak 1 Forum.
- b) Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD dialokasikan dana sebesar Rp. 167.350.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 62.993.200,- atau 37,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RPJMD sebanyak 1 Dokumen.
- c) Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 210.550.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 154.520.700,- atau 73,39% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
- d) Pada Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 145.580.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 123.005.000,- atau 84,49% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra

dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional sebanyak 3 Kali.

- e) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 71.976.879,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 69.526.879,- atau 96,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- f) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dialokasikan dana sebesar Rp. 65.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 60.000.000,- atau 91,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- g) Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 61.800.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 46.100.000,- atau 74,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen evaluasi RKPD sebanyak 4 Dokumen.
- h) Pada Kegiatan Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals dialokasikan dana sebesar Rp. 82.195.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 75.526.900,- atau 91,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s sebanyak 1 Dokumen.
- i) Pada Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dialokasikan dana sebesar Rp. 106.750.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 100.750.000,- atau 94,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebanyak 1 Dokumen.

- j) Pada Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dialokasikan dana sebesar Rp. 140.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 120.475.100,- atau 86,05% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 Dokumen.
- k) Pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 54.650.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 46.899.400,- atau 85,82% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan sebanyak 1 Dokumen.

12. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui Kegiatan ;

- a) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 99.022.481,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 94.065.370,- atau 95,01% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.

13. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program perencanaan sosial budaya, melalui Kegiatan ;

- a) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dialokasikan dana sebesar Rp. 68.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 66.786.700,- atau 97,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- b) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 40.050.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 37.580.000,- atau 93,83% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah

dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.

- c) Pada Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM dialokasikan dana sebesar Rp. 98.840.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 96.222.400,- atau 97,35% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM sebanyak 1 Dokumen.
- d) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan dialokasikan dana sebesar Rp. 71.284.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 70.523.400,- atau 98,93% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur sebanyak 1 Dokumen.

14. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Kegiatan;

- a) Pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 29.200.000,- atau 97,33% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik sebanyak 90%.

15. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Perencanaan Tata Ruang, melalui Kegiatan ;

- a) Pada Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang di alokasikan dana sebesar Rp. 100.473.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.317.858,- atau 98,85% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang sebanyak 15 Kali.
- b) Pada Kegiatan Survey dan Pemetaan dialokasikan dana sebesar Rp. 76.160.500,- dari dana yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.160.500,- atau 100% dengan capaian

kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman sebanyak 1 Dokumen.

16. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program Pemanfaatan Ruang, melalui Kegiatan;

- c) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang di alokasikan dana sebesar Rp. 41.137.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.137.000,- atau 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai sebanyak 1 dokumen.

D.4. Urusan Keuangan, Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 urusan pemerintahan fungsi penunjang, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.64 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (dalam %)
Persentase belanja pendidikan	20%	23,80%	119,02%
Persentase belanja kesehatan	10%	22,87%	228,73%
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
Hasil Opini BPK	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2021

Adapun realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dapat disampaikan adalah, sebagai berikut:

1. Persentase belanja pendidikan (20%)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 1.519.982.943.001,88,- Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, adapun persentase belanja pendidikan sebesar 20% yaitu Rp.303.996.588.600. Dalam realisasinya alokasi belanja pendidikan sebesar Rp. 361.816.727.598,88 atau sebesar 23,80%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja pendidikan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 20%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 119,02%.

2. Persentase belanja kesehatan (10%)

Alokasi persentase belanja kesehatan 10% sebesar Rp. 151.998.294.300,19 Dalam realisasinya alokasi belanja kesehatan sebesar Rp. 347.669.932.692,- atau sebesar 22,87%. Dari data di atas, disimpulkan bahwa persentase belanja kesehatan telah melampaui target yang telah ditargetkan sebesar 10%, dengan capaian kinerja rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 228,73%.

3. Penetapan APBD

Penetapan APBD yang ditargetkan dalam indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020 yaitu Penetapan APBD tepat waktu. Adapun realisasinya yaitu terlaksananya penetapan APBD tepat waktu yaitu penetapan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan sebelum tanggal 1 Januari 2021 yang tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020.

4. Hasil Opini BPK

Hasil Opini BPK yang ditargetkan dalam indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020 yaitu WTP. Dalam realisasinya hasil opini BPK yang diperoleh pada tahun 2020 yaitu WTP untuk Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2019. Hasil ini telah tercapai dari target yang ditetapkan.

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 39.569.852.896,- dengan rincian sebagai berikut, yaitu: Belanja Tidak Langsung Rp. 29.501.169.387,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.068.683.509,-. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 28.758.644.171,- atau dengan persentase sebesar 97,48% dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp. 9.441.075.653,- atau dengan persentase sebesar 93,77%. Adapun secara keseluruhan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2020 sebesar Rp. 38.199.719.824,- atau sebesar 96,54%.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 2.563.882.108,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.443.291.052,- atau dengan persentase sebesar 95,30%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2020 sejumlah 14 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan sebesar Rp. 1.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.086.000,- atau sebesar 57,16%. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jasa surat menyurat sejumlah 12 bulan.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp. 45.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.834.400,- atau sebesar 40,96%. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sejumlah 12 bulan.

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 64.200.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 64.200.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor sejumlah 12 bulan.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dianggarkan sebesar Rp. 203.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 192.646.000,- atau sebesar 94,77%. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah ruangan yang bersih dan nyaman sejumlah 12 bulan.

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dianggarkan sebesar Rp. 109.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.840.000,- atau sebesar 93,58%. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah jasa perbaikan peralatan kerja sejumlah 12 bulan.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp. 132.753.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.715.000,- atau sebesar 98,46%. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah alat tulis kantor yang diperlukan sejumlah 12 bulan.

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 103.915.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.908.000,- atau sebesar Rp. 93,26%. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan sejumlah 12 bulan.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dianggarkan sebesar Rp. 46.400.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 43.370.000,- atau sebesar 93,47%. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah komponen instalasi listrik yang diperlukan sejumlah 12 bulan.

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 553.299.108,- dengan realisasi sebesar Rp. 506.279.670,- atau sebesar 91,5%. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan sejumlah 12 bulan.

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 19.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.200.000,- atau sebesar 93,62%. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah bahan bacaan yang tersedia sejumlah 12 bulan.

k) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 33.875.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.250.000,- atau sebesar 95,20%. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian tersedianya makan dan minum rapat dan tamu sejumlah 11 bulan.

l) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dianggarkan sebesar Rp. 970.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 969.741.982,- atau sebesar 99,97%. Kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah capaian kegiatan sebesar 99,90% dengan capaian jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sejumlah 12 bulan.

m) Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor dianggarkan sebesar Rp. 206.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.220.000,- atau sebesar 96,27%. Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah tenaga keamanan kantor sejumlah 12 bulan.

n) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan jasa pelaynan administrasi perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.000.000,- atau sebesar 93,06%. Kegiatan penyediaan jasa tenaga keamanan kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah tenaga keamanan kantor sejumlah 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 808.770.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 760.969.696,- atau sebesar 94,09%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2020 sejumlah 4 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan pembangunan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 197.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.310.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan pembangunan gedung kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor sejumlah 2 paket.

b. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan pengadaan mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 144.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.550.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan pengadaan mebeleur capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah mebeleur yang tersedia sejumlah 1 paket.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.500.000,- atau sebesar 99,67%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pemeliharaan gedung sejumlah 12 bulan.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dianggarkan sebesar Rp. 316.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 287.609.696,- atau sebesar 90,92%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sejumlah 12 bulan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 158.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.540.000,- atau sebesar 92,69%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2020 sejumlah 1 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 158.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.540.000,- atau sebesar 92,69%. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sejumlah 20 Orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 138.690.465,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 111.013.900,- atau 80,04%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2020 sejumlah 4 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp. 39.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.630.000,- atau sebesar Rp. 47,65%. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sejumlah 2 dokumen.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dianggarkan sebesar Rp. 6.154.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 4.741.000,- atau sebesar 77,04%. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan keuangan semesteran sejumlah 1 laporan.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dianggarkan sebesar Rp. 35.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.128.000,- atau sebesar 98,43%. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan keuangan akhir tahun sejumlah 1 laporan.

d. Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 57.746.465,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 52.514.900,- atau sebesar 90,94%. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kas Daerah dan Dana Perimbangan capaian kegiatan sebesar 100% dengan capaian jumlah laporan kas daerah dan dana perimbangan sejumlah 1 laporan.

5. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 0. Adapun kegiatan yang semula dianggarkan pada APBD 2020 dan dilakukan rasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan Tahun 2020 sejumlah 1 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Hari-Hari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan

Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan dianggarkan sebesar Rp. 0. Awalnya kegiatan ini dianggarkan pada APBD Murni dan kemudian dirasionalisasi pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp. 0 dengan alasan adanya wabah pandemi COVID-19 yang merebak seluruh dunia. Sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dimana output kegiatan sejumlah 3 kegiatan berupa kegiatan Dumai Expo, Pawai Idul Fitri dan Pawai Idul Adha.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.6.399.240.936,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.979.261.005,- atau 93,44%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2020 sejumlah 37 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan penyusunan standar satuan harga, dianggarkan sebesar Rp. 154.440.000,- realisasi sebesar Rp. 154.210.000,- atau sebesar 99,85%. Kegiatan penyusunan standar satuan harga tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian adalah buku standar

harga barang dan jasa sebanyak 1 laporan. Adapun hasil kegiatan penyusunan standar satuan harga berupa buku standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan pedoman penetapan harga barang dalam penyusunan APBD Tahun 2021.

- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.095.909.000,- realisasi sebesar Rp. 1.043.241.702,- atau 95,19%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang APBD Tahun 2021 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.178.006.000,- realisasi sebesar Rp. 119.311.000,- atau 67,03%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 582.720.000,- realisasi sebesar Rp. 532.810.000,- atau 91,43%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD menghasilkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

e. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 239.400.000,- realisasi sebesar Rp. 209.843.775,- atau 87,65%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2020.

f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp. 519.727.000,- realisasi sebesar Rp. 504.787.100,- atau 97,13%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perda. Kegiatan Penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019.

- g. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.77.190.650,- realisasi sebesar Rp. 69.104.800,- atau 89,52%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perwa. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2019.

- h. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula dianggarkan pada APBD 2020 namun dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan adanya wabah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- i. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.800.000,- realisasi sebesar Rp. 7.800.000,- atau 100%. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis dan sosialisasi manajemen /aset barang milik daerah sejumlah 130 orang.

j. Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi Aset dianggarkan sebesar Rp. 229.256.000,- realisasi sebesar Rp. 226.887.000,- atau 98,97%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan dokumen penelusuran gedung dan bangunan, penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 2 dokumen. Kegiatan inventarisasi Aset menghasilkan dokumen penelusuran gedung/ bangunan yang pendanaannya bersumber APBD dan APBD Provinsi.

k. Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan pengamanan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 117.290.000,- realisasi sebesar Rp. 95.914.500,- atau 81,78%. Kegiatan pengamanan barang milik daerah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan Peningkatan Pengamanan Fisik Terhadap Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pengamanan aset dengan tujuan sesuai peruntukkan dan penggunaannya.

l. Penertiban Aset

Kegiatan Penertiban Aset dianggarkan sebesar Rp.179.000.000,- realisasi sebesar Rp. 175.695.000,- atau 98,15%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD Baru sebanyak 36 OPD. Kegiatan penertiban aset menghasilkan kegiatan penertiban aset terhadap 36 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Dumai dengan maksud menertibkan seluruh aset milik Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan peruntukannya.

m. Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan sebesar Rp. 32.040.000,- realisasi sebesar Rp. 0. Adapun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya

wabah pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut

- n. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.108.500.400,- realisasi sebesar Rp.108.500.400,- atau 100%. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen keuangan Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi keuangan.
- o. Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah
Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 79.547.550,- realisasi sebesar Rp. 57.914.500,- atau 72,80%. Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah (1) Register SP2D BL dan BTL Perbulan sejumlah 1.500 lembar; (2) Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sejumlah 36 buku; (3) Register SP2D per SKPD sejumlah 3.500 lembar.
- p. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan
Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dianggarkan sebesar Rp. 228.263.112,- realisasi sebesar Rp. 216.141.312,- atau 94,69%. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah laporan barang milik daerah tahunan sejumlah 1 laporan.

q. Rekonsiliasi Aset SKPD

Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD dianggarkan sebesar Rp.200.196.000,- realisasi sebesar Rp. 186.797.000,- atau 93,31%. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah OPD yang dilaksanakan rekonsiliasi sejumlah 1 laporan. Kegiatan rekonsiliasi aset merupakan kegiatan rekon barang milik daerah diseluruh OPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi aset OPD yaitu agar pengelolaan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan.

r. Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.351.122.200,- realisasi sebesar Rp. 350.602.900,- atau 99,85%. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan capaian kegiatan terlaksananya penilaian terhadap BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan sejumlah 1 laporan. Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah merupakan kegiatan penilaian aset/barang milik daerah yang dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Penilaian aset/barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penghapusan aset sehingga dilakukan penilaian aset terlebih dahulu termasuk juga appraisal aset.

s. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 156.550.000,- realisasi sebesar Rp.155.900.000,- atau 99,58%. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim sejumlah 17 orang. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah merupakan kegiatan yang

mengirimkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terhadap aturan dibidang aset. Adapun kegiatan ini dengan mengirimkan sejumlah 17 orang yang dimaksudkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah memahami semua siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- t. **Penyusunan standar biaya**
Kegiatan Penyusunan standar biaya dianggarkan sebesar Rp.284.571.400,- realisasi sebesar Rp.270.942.650,- atau 95,21%. Kegiatan Penyusunan standar biaya sebesar 100% dengan capaian kegiatan buku standar biaya sejumlah 1 dokumen. Kegiatan penyusunan standar biaya menghasilkan buku standar biaya tahun anggaran 2021. Buku standar biaya tahun anggaran 2021 digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.
- u. **Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD**
Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.141.958.000,- realisasi sebesar Rp.137.658.000,- atau 96,97%. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah skpd dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan sejumlah 1 laporan. Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulannya kepada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dimaksudkan mensinkronkan antara realisasi belanja dan pendapatan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.
- v. **Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah**
Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.90.600.000,- realisasi sebesar Rp.89.320.000,- atau sekitar 98,59%. Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan 1(satu) laporan. Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah.

- w. **Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD**
Kegiatan Sosialisasi pedoman Penyusunan APBD yang dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan dilarangnya segala bentuk kegiatan yang dapat membuat berkumpul orang ramai selama dampak pandemi COVID-19.
- x. **Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran**
Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dianggarkan sebesar Rp. 235.000.000,- realisasi sebesar Rp.218.954.259,- atau seitar 93,17%. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran sebesar 100% dengan 1 (satu) laporan.
- y. **Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung**
Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.39.000.000,- realisasi sebesar Rp.38.979.500,- atau 99,95%. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung sebesar 100% dengan capaian kegiatan Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung sejumlah 8 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dimaksudkan mensinkronkan antara pengeluaran yang sudah dikeluarkan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.
- z. **Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi**
Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp.92.596.000,- realisasi sebesar Rp.92.438.000,- atau 99,83%. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan provinsi sebesar 100% dengan capaian kegiatan Data dana pusat dan provinsi sebanyak 1 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi untuk mensinkronkan data dana transfer pusat dan provinsi baik sifatnya dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak dan non pajak.
- aa. **Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**
Kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah yang semula dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun dirasionalisasi sebesar Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan ini di masa pandemi COVID-19.

- bb. **Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai**
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 65.185.600,- realisasi sebesar Rp.64.955.000,- atau 99,65% Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dengan capaian sebesar 100% dengan sasaran jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai Tahun 2019 dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.
- cc. **Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai**
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 20.733.600,- realisasi sebesar Rp. 16.633.600,- atau 80,23%. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah laporan keuangan semesteran kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Dumai Tahun 2020.
- dd. **Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai**
Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 118.799.350,- realisasi sebesar Rp. 105.769.350,- atau 89,03%. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100 % dengan capaian kegiatan jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan

Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR). Kegiatan TP-TGR dimaksudkan untuk penyelesaian kerugian negara.

- ee. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Keuangan Serta Aset Daerah.

Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,- realisasi sebesar Rp.24.600.000,- atau 95,35%. Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 500 dokumen.

- ff. Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.19.253.800,- realisasi sebesar Rp. 14.520.800,- atau 75,42%. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

- gg. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran dianggarkan sebesar Rp.107.106.000,- realisasi sebesar Rp.82.696.983,- atau 77,21%. Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

- hh. Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun kemudian dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan masih belum keluarnya aturan dari Pemerintah Pusat berkaitan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah.

ii. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.237.918.500,- realisasi sebesar Rp.228.573.500,- atau sekitar 96,07%. Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

jj. Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM

Kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM dianggarkan sebesar Rp.38.350.000,- realisasi sebesar Rp.32.348.900,- atau sekitar 84,35% kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian 2 (dua) Dokumen yaitu Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).

kk. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dianggarkan sebesar Rp. 345.410.774,- realisasi sebesar Rp.345.409.474,- atau 100%. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) sebesar 100%, dengan capaian kegiatan sistem informasi barang milik daerah (SIM-BMD) dan Entry SIMDA BMD sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang milik daerah Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

D.4. Urusan Keuangan, Oleh Badan Pendapatan Daerah

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 dengan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 dengan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, dapat dilihat pada tabel 3.65 sebagai berikut.

Tabel 3.65 Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian kondisi akhir2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan						
1.	Meningkatnyapenerimaan pajak dan retribusi daerah	Persentase pad terhadap pendapatan	Persen	20	26,52	132,60
		Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap pad	Persen	46	43,77	95,15
		Persentase peningkatan pajak daerah pada bapenda	Persen	90	99,97	111,08

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran di atas sebagai berikut:

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Target dari indikator sasaran Persentase PAD terhadap Pendapatan pada tahun 2020 sebesar 20%, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 26,52%. Dengan demikian pencapaian target kinerja sebesar 132,60% (melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020).

2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Target dari Indikator Kinerja Sasaran **Persentase Peningkatan**

Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2020 sebesar 46%, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 43,77% dengan demikian pencapaian target kinerja sebesar 95,15%. (kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2020).

3. Persentase Peningkatan Pajak Daerah pada Bapenda

Target dari indikator Kinerja Sasaran **Persentase Peningkatan Pajak Daerah pada Bapenda** pada tahun 2020 yaitu sebesar 90% dengan realisasi capaian 99,97% dengan Pencapaian Target Kinerja sebesar 111,08%. (melebihi target yang ditetapkan tahun 2020).

Keberhasilan dari 3 indikator Kinerja Sasaran diatas didukung dari beberapa kegiatan dengan **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**. Adapun Kegiatan pendukung program tersebut antara lain.

1. Pemeliharaan SIMPATDA dengan indikator keluaran kegiatan tersebut adalah tersedianya data wajib pajak daerah yang valid dengan target 90%, dengan realisasi sebesar 85%, dan pencapaian target kinerja sebesar 94,44% Dengan hasil terwujudnya peningkatan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah yg cepat, akurat dan tepat.
2. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu : jumlah sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak dengan target kinerja sebanyak 3 media dan terealisasi sebesar 100%, dengan tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak, yaitu :(1) iklan radio, (2) spanduk dan baleho yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; (3) pengumuman melalui media cetak lokal dengan total sebanyak 3 (tiga) media.
3. Monitoring Penyampaian SPPT PBB
Dengan indikator keluaran kegiatan yaitu : Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan target kinerja sebanyak 7 Kecamatan dan terealisasi 7 Kecamatan dengan hasil terlaksananya penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak

dengan capaian kinerja dari kegiatan sebesar 100%

4. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah

Dengan Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pendapatan daerah dengan target sebanyak 4 kali dan terealisasi 100% dengan hasil kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali dengan capaian kinerja dari kegiatan sebesar 100%.

5. Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak dengan target 400SKPD dan terealisasi 645 SKPD dengan capaian kinerja dari kegiatan sebesar 161,25% dengan hasil terpenuhinya target kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak.

6. Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : tersedianya jumlah Data Potensi Wajib Pajak Daerah dengan target sebanyak 3.000 WP/WR dan terealisasi sebanyak 2.658 WP/WR dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 88,60% dimana capaian kinerja keluaran Tersedianya Jumlah Data Wajib Pajak dan Objek Pajak.

7. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima PAD yang valid dengan target kinerja 4 laporan dan terealisasi 4 Laporan dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan sebesar 100% capaian indikator kinerja keluaran 100% Dimana Capaian Kinerja keluaran Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2020.

8. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : Sosialisai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat kota Dumai dengan target 7Kecamatan dan terealisasi sebanyak 7 Kecamatan dengan hasil capaian

kinerja keluaran dari kegiatan tersebut Meningkatnya kesadaran WP untuk membayar PBB-P2 di 7 Kecamatan sebesar 100%.

9. Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani dengan target kinerja sebanyak 35 berkas dan terealisasi sebanyak 38 berkas, Dengan hasil capaian kinerja keluaran sebesar 108,57% dengan terpenuhinya berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani.

10. Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak(SISMIOP)

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut adalah: tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunandengan target 100%, atau terealisasi sebesar 100% dengan hasil capaian kinerja keluaran dari kegiatan tersebut terpenuhinya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) oleh petugas Pelayanan Satu Tempat (PST) dan Terintegrasinya sistem pembayaran PBB-P2 dengan Bank Riau Kepri.

11. Verifikasi Penetapan Pajak

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : tercapainya verifikasi penetapan pajak daerahdengan target 200Wajib Pajak (WP) dan terealisasi sebanyak 202 Wajib Pajak (WP) dengan hasil capaian kinerja keluaran sebesar 101%

12. Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : persentase pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak yang telah dilaksanakan dengan target 5 Wajib Pajak dan terealisasi 6 Wajib Pajak dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan sebesar 120% dengan terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek sebanyak 6 WP dari target 5 WP.

13. Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : jumlah pemeriksaan Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan target 3 kali dan terealisasi 100% dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan terpenuhinya target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak sebanyak 3 kali pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (2) Pemeriksaan Pajak Hotel, (3) Pemeriksaan Restoran dan Rumah Makan, dan (4) Pemeriksaan Pajak Hiburan.

14. Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusundengan target 5 Perda/Perwa dan terealisasi sebesar 3 Perda/Perwa dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan tersebut sebesar 60% yaitu dengan tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan sebanyak 3 Draft Peraturan Daerah Kota Dumai dan 7 Draft Peraturan Walikota Dumai.

15. Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dengan target 1.000 SKPD/SKRD dan terealisasi 713 SKPD/SKRD dengan hasil capaian kinerja sebesar 71,30% yaitu terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak sebanyak 713 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 1.000 SKPD/SKRD.

16. Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : terlaksananya penilaian khusus Objek Pajak Non Standar dengan target 10 OP dan terealisasi 20 Objek Pajak dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan dengan Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standarsebanyak 20 Objek Pajak dari target awal sebanyak 10 OP. sebesar 200%.

17. Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : tersedianya sarana promosi dan

informasi dengan target 1 paket dan terealisasi 100% dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan tersedianya Sarana Promosi dan Informasi Pajak Daerah.

18. Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 3 Kelurahan dan terealisasi 100% dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan tersebut sebesar 100% dengan Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 3 kelurahan di Kota Dumai, yaitu: (1) Kelurahan Ratu Sima, (2) Kelurahan Bukit Datuk, (3) Kelurahan Jaya Mukti.

19. Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : terwujudnya penerapan transaksi secara online kepada wajib pajak dengan target 100 WP dan terealisasi 100% dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan yaitu Terwujudnya ketaatan WP dalam melakukan pembayaran pajak dengan kemudahan pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi berbasis Android.

20. Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumlah dokumen prediksi pendapatan yang disusun dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100% dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan sebesar 100% dengan tersusunnya dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Prediksi APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Prediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

21. Verifikasi BPHTB

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : tersedianya jumlah data verifikasi BPHTB yang valid dengan target 150 Objek Pajak dan terealisasi sebanyak 80 Objek Pajak dengan hasil capaian kinerja dari kegiatan sebesar 53,33%, yaitu tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid sebanyak 80 OP

Adapun kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja di atas disebabkan adanya dukungan dan kerja sama oleh seluruh sumber daya manusia yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23.772.911.604,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.594.527.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.630.616.522,- atau 93,82%, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.178.384.064,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.520.357.163,- atau 91,95%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui kegiatan:

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 5.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.998.000,- atau 99,96% dengan indikator kinerja keluarantercapainya ketersediaan kebutuhan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%.

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 405.970.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 354.210.743,- atau 87,25% dengan indikator kinerja keluaranterpenuhinya jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia selama 12 bulan.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 320.908.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp 286.576.735,- atau 89,30%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya persentase terpenuhinya biaya pemeliharaan, perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan atau 100%.

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 313.981.600,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 312.232.540,- atau 99,44%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah jasa dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia selama 12 bulan.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 170.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 110.328.000,- atau 64,86%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran terpenuhinya jumlah pemeliharaan dan pergantian suku cadang peralatan kantor yang tersedia selama 12 bulan.

f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 300.926.085,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 299.475.220,- atau 99,52%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran tercapainya 100% jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan.

g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 159.447.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 159.404.600,- atau 99,97%. Adapun tingkat nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebesar 100%.

h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 31.080.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp 29.931.000,- atau 96,30%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya persentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 100%.

- i) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 28.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 25.580.000,- atau 89,75%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah terpenuhinya surat kabar dan majalah dalam 1 tahun.

- j) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 55.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 36.125.000,- atau 65,12%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya persentase makanan dan minuman yang disediakan dalam rapat dan menjamu tamu bapenda kota Dumai sebesar 100%.

- k) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 679.440.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 670.238.596,- atau 98,65%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan sebesar 100%.

- l) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 233.052.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 231.600.000,- atau 99,38%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah tersedianya jasa tenaga keamanan, makan minum, dan pakaian petugas keamanan kantor selama 12 bulan.

- m) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 199.160.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 197.800.000,- atau 99,32%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah tersedianya jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 817.778.816,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 802.248.016,- atau 98,10 % dengan kegiatan sebagai berikut.

a) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 457.778.816,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 443.148.016,- atau 96,80%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya jumlah peralatan gedung kantor sebanyak 5 paket, yaitu: (1) mesin pompa air dan, (2) AC, (3) komputer, (4) laptop, dan (5) printer.

b) Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 110.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 109.700.000,- atau 99,73%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya meubeler kantor sebanyak 1 paket.

c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 99.700.000,- atau 98,70%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sebanyak 2 paket, yaitu pengecatan gedung kantor dan konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

d) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 149.700.000,- atau 99,80%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersedianya interior gedung kantor sebanyak 3 paket, yaitu berupa rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan:

a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 85.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 70.880.000,- atau 83,39%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 105% artinya terlaksananya peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal aparatur sebanyak 30 orang dari yang ditargetkan sebanyak 30 orang.

b) Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 12.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 12.250.000,- atau 96,08%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 83,33% artinya terpenuhinya pembinaan mental dan rohani aparatur yang telah dilaksanakan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali dari target awal sebanyak 12 kali.

3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, melalui kegiatan:

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 39.517.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 39.517.000,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya Laporan Kinerja Bapenda sebanyak 1 dokumen.

b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.293.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 71.443.900,- atau 98,82%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2020 Bapenda sebanyak 1 dokumen.

c) Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 63.470.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 63.470.000,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Bapenda yang disusun selama 1 tahun sebanyak 3 dokumen, yaitu Renja Tahun 2021, RKA Murni Tahun 2021 dan RKA Perubahan Tahun 2020.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan :

a) Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 510.124.775,- dan direalisasikan sebesar Rp 462.110.141,- atau 90,59%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 94,44% artinya tersedianya data wajib pajak daerah yang valid sebesar 85%.

b) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 276.259.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 198.971.000,- atau 72,02%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak, yaitu : (1) iklan radio, (2) spanduk dan baleho yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; (3) pengumuman melalui media cetak lokal dengan total sebanyak 3 (tiga) media.

c) Kegiatan Monitoring Penyampaian SPPT PBB

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 438.566.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp 403.136.200,- atau 91,92%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak pada 7 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

- d) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 103.041.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 73.671.000,- atau 71,50%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.
- e) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 276.460.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 214.780.000,- atau 77,69%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 164% artinya terpenuhinya target terlaksananya kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak sebanyak 645 SKPD dari target awal sebanyak 400 SKPD.
- f) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 236.772.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 235.237.548,- atau 99,35%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 88,60% artinya tersedianya data potensi wajib pajak daerah sebanyak 2.658 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR.
- g) Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 175.732.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 155.882.726,- atau 88,70%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima PAD yang valid sebanyak 4 Laporan, yaitu Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2020.

h) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB P2

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 125.459.538,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 125.459.538,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya Meningkatnya kesadaran WP untuk membayar PBB-P2 di 7 Kecamatan.

i) Kegiatan Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 88.824.050,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 54.300.000,- atau 61,13%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 103,33% artinya terpenuhinya berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani sebanyak 38 berkas dari target awal sebanyak 35 berkas.

j) Kegiatan Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 627.969.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 607.504.273,- atau 96,74%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak sebesar 100%.

k) Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 79.350.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 60.909.000,- atau 76,76%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 108,8% artinya tercapainya Verifikasi penetapan Pajak Daerah sebanyak 202 WP dari target awal sebanyak 200 WP.

l) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 146.740.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 138.264.800,- atau 94,22%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 120% artinya terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek sebanyak 6 WP dari target 5 WP.

m) Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 211.238.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 206.676.552,- atau 97,84%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pemeriksaan Wajib Pajak Daerah sebanyak 4 kali pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (2) Pemeriksaan Pajak Air Tanah, (3) Pemeriksaan Restoran dan Rumah Makan, dan (4) Pemeriksaan Pajak Hotel.

n) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 126.910.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 126.328.200,- atau 99,54%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 60% artinya tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan sebanyak 3 Draft Peraturan Daerah Kota Dumai dan 7 Draft Peraturan Walikota Dumai.

o) Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 15.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.400.000,- atau 74,12%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 71,30% artinya terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak sebanyak 713 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 1.000 SKPD/SKRD.

p) Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 306.040.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 295.565.874,- atau 96,58%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 200% artinya terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standarsebanyak 20 Objek Pajak dari target awal sebanyak 10 OP.

q) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 700.000,- atau 23,33%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan tersedianya Sarana Promosi dan Informasi sebanyak 1 paket.

r) Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 44.976.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 40.507.950,- atau 90%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 3 kelurahan di Kota Dumai, yaitu: (1) Kelurahan Ratu Sima, (2) Kelurahan Bukit Datuk, (3) Kelurahan Jaya Mukti.

s) Kegiatan Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 113.510.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 100.890.011,- atau 88,88%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terwujudnya ketaatan WP dalam melakukan pembayaran pajak dengan kemudahan pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi berbasis Android.

t) Kegiatan Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 90.990.000,- atau 90,99%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Prediksi APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Prediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

u) Kegiatan Verifikasi BPHTB

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.154.504.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp

141.433.000,- atau 91,54%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran sebesar 53,33% artinya tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid sebanyak 80 OP dari target awal sebanyak 100 OP.

v) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 12.750.000,- atau 100%. Adapun nilai capaian indikator kinerja keluaran tercapainya Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik atau 100%.

D.5. Urusan Kepegawaian, Oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 urusan pemerintahan fungsi penunjang, maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.66 Indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Capaian (%)
Persentase pelanggaran disiplin	%	0.2	0.10	50
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0	0	0
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32	25	78.1

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tahun 2020

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasarandiatas sebagai berikut :

1. Persentase pelanggaran disiplin

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebesar 0.2% dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 sebesar 0.10%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN” adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM aparatur melalui pembinaan disiplin dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin ASN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap permasalahan yang timbul baik di lingkungan perangkat daerah maupun

masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan produk hukum berupa keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020 kegiatan ini tidak memiliki anggaran sebagai dampak adanya refocusing anggaran. Meskipun begitu, kegiatan ini tetap terlaksana dengan adanya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 4 (empat) kasus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa Keputusan Walikota Dumai tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat sebanyak 2 (dua) kasus dan tingkat ringan sebanyak 2 (dua) kasus.

2. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebesar 62% tetapi dikarenakan adanya pandemik COVID-19, terjadi perubahan target kinerja menjadi 0% karena pagu anggaran kegiatan ini di refocusing.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan “Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan” adapun kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural yang akan berperan dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan peserta diklat mempunyai gaya kepemimpinan yang adaptif serta memiliki inovasi yang dapat meningkatkan kinerja di lingkungan kerjanya. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19.

3. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebanyak 32 orang dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 adalah 78.1%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan :

- a. Seleksi/Uji Kompetensi ASN kegiatan ini bertujuan untuk memprediksi kinerja dari assessee bila ia menduduki jabatan tertentu dengan cara menyusun profil tentang kekuatan dan kebutuhan pengembangan yang

diperlukannya sehingga dari hasil penilaian kompetensi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

- b. Penempatan ASN kegiatan ini bertujuan untuk mengalokasikan para pegawai pada posisi kerja tertentu yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya guna untuk mencapai tujuan instansi tersebut.

Pada tahun 2020, formasi jabatan pimpinan tinggi pratama berjumlah 34 formasi dengan penambahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan seleksi terbuka dan mutasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya larangan bagi Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena formasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi sampai dengan Desember 2020 sebanyak 25 jabatan.

Keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase Pelanggaran Disiplin” disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan ASN Kota Dumai semakin memahami serta mentaati aturan mengenai kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana peran serta Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat Daerah yang turut berperan aktif dalam penegakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Ketidakberhasilan dari indikator kinerja “Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural” disebabkan karena terjadi refocusing anggaran akibat pandemik COVID-19 sehingga pengiriman peserta diklat tidak dapat dilakukan.

Ketidakberhasilan dari indikator “Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah” disebabkan karena akan berakhir masa jabatan Kepala Daerah sehingga pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Belanja BKPSDM Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.168.202.780,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 3.862.823.280,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.305.379.500,- Adapun realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.476.673.107,- atau 90% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.637.807.320,- atau 79.80%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.417.521.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.372.282.160,- atau 96.81% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.495.300,- atau 83.25% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah materai dan benda pos lainnya target 500 lembar dan terealisasi 500 lembar atau 100%;

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.022.740,- atau 98.13% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemakaian jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%;

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.778.770,- atau 55.88% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak/STNK target 7 unit dan terealisasi 7 unit atau 100%;

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 147.425.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 147.120.000,- atau 99.79% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor target 8 orang dan terealisasi 8 orang atau 100%;

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.700.000,- atau 97.19% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja target 79 unit dan terealisasi 106 unit atau 134,18%;

f) Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.728.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.411.500,- atau 97.70% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan alat tulis kantor target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%;

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.705.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.928.500,- atau 98.16% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%;

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.362.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.294.600,- atau 91.15% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau 100%;

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 202.890.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.698.250,- atau 95.47% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor target 15 unit dan terealisasi 15 unit atau 100%;

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.240.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangantarget 10jenis korandan terealisasi 10 jenis koranatau 100%;

k) Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesarRp. 46.735.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.796.900,- atau 95.85% dengan indikator kinerja keluaran adalahjumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamutarget 9 bulan dan terealisasi 9 bulanatau 100%;

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesarRp. 453.729.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 436.145.600,- atau 96.12% dengan indikator kinerja keluaran adalahterselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah target 120 orangdan terealisasi128 orangatau 106,67%;

m) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesarRp. 96.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.000.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalahjumlah pembayaran jasa tenaga administrasi perkantoran target 5 orang dan terealisasi 5 orang atau 100 %;

n) Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesarRp. 146.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 146.650.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembayaran jasa tenaga keamanan kantor target 7 orang dan terealisasi 7 orang atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp.236.350.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 234.995.000,- atau 99.43% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.764.000,- atau 93.88%

dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin target 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%;

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 197.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 196.808.000,- atau 99.90% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional target 7 unit dan terealisasi 7 unit atau 100%;

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.423.000,- atau 98.18% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputertarget 61 unit dan terealisasi 50 unit atau 81,97%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp.4.160.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.160.000,- atau 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Aparatur Sipil Negara

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.160.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN Kota Dumai yang mengikuti asistensi LHKPN target 104 orang dan terealisasi 104 orang atau 100% dan jumlah ASN menyampaikan LHKPN target 193 orang dan terealisasi 192 orang atau 99.48%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp.19.368.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.368.000,- atau 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.368.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.368.000,- atau 100%

dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah aparatur yang mengikuti bimtek target 2 orang dan terealisasi 2 orang atau 100%.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.627.980.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.007.002.160,- atau 61.86% melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penempatan jabatan fungsional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.208.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.208.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SK penempatan jabatan fungsional target 80 SK dan terealisasi 136 SK atau 170%;

b) Pengelolaan pemberhentian ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.650.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SK pemberhentian ASN yang terselesaikan target 110 SK dan terealisasi 110 SK atau 100%;

c) Pembinaan Korps Profesi ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.700.000,- atau 6.76% dengan indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan HUT Korps Profesi ASN target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan atau 100%;

d) Seleksi penerimaan calon ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 424.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 384.385.500,- atau 90.53% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelamar calon ASN yang mengikuti seleksi target 4000 orang dan terealisasi 4000 orang atau 100%;

e) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.889.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.889.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat target 700 orang dan terealisasi 760

orang atau 108,57%;

f) Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 551.000,- atau 18.37% dengan indikator kinerja keluaran jumlah ASN yang menerima penghargaan target 200 orang dan terealisasi 374 orang atau 187%;

g) Pelaksanaan sumpah/janji ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.530.000,- atau 64.16% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang melaksanakan sumpah/janji target 180 orang dan terealisasi 188 orang atau 104,44%;

h) Seleksi/uji kompetensi ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 510.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.918.400,- atau 4.77% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan jasmani dan rohani target 5 orang dan terealisasi 4 orang atau 80%;

i) Pengelolaan kinerja ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.712.000,- atau 99.64% dengan indikator kinerja keluaran adalah terinventarisirnya penilaian prestasi kerja ASN Kota Dumai dengan target 4000 orang dan terealisasi 4000 orang atau 100% dan jumlah ASN yang mengikuti Bimtek target 80 orang dan terealisasi 80 orang atau 100%;

j) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.592.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.600.260,- atau 88.37% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi ASN Kota Dumai target 4000 orang dan terealisasi 4000 orang atau 100%;

k) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.000.000,- atau 46.99%

dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar target 1 orang dan terealisasi 1 orang atau 100%;

- l) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.766.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan target 0 orang dan terealisasi 0 orang atau 0%;
- m) Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.200.000,- atau 97.96% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersusun dan tertatanya arsip data ASN Kota Dumai target 4000 PNS dan terealisasi 4000 orang atau 100%;
- n) Pengembangan kompetensi aparatur
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.424.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.424.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan hasil analisis kebutuhan kompetensi target 0 orang dan terealisasi 0 orang atau 0%;
- o) Penempatan jabatan pimpinan tinggi dan administrasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.468.000,- atau 99.12% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SK penempatan jabatan pimpinan tinggi dan administrasi target 80 SK dan terealisasi 84 SK atau 105%.

Tabel 3.67 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Keputusan Walikota Dumai Nomor 840/Bappeda/2020	Penanganan Kawasan Kumuh
2	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU)	Keputusan Walikota Dumai Nomor 434/DPUPR/2018	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Keputusan Walikota Dumai Nomor 678/DPUPR/2017	
3	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Peraturan Walikota Dumai Nomor 273/Bappeda/2019	Menurunkan Tingkat Kemiskinan
4	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Keputusan Walikota Dumai Nomor 20/Dinsos/2020	Validasi data kemiskinan Kota Dumai.
5	Poskomando RT	Peraturan Walikota Dumai Nomor 27/Bappeda/2020	Upaya pencegahan dan <i>screening</i> lalu lintas warga

6	Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB)	Peraturan Walikota Dumai Nomor 34/ Bappeda/2020	Untuk menurunkan angka kasus konfirmasi covid
7	Penerapan disiplin dan sanksi hukum	Peraturan Walikota Dumai Nomor 65/ Bappeda/2020	Untuk menegakan disiplin masyarakat 3m
8	Posko perbatasan cek poin keluar masuk Kota Dumai	Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/Dinsos/2020	Untuk sek poin perbatasan warga Kota Dumai yang masuk Kota Dumai dan keluar dengan Rapid tes anti body.

Tabel 3.68

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya (karena persentase realisasi anggaran sebesar 50%), harus ditingkatkan	Penambahan Anggaran untuk Operasional UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai	Adanya penambahan jumlah Petugas Lapangan Kebencanaan sehingga yang awalnya hanya terdiri dari 2 (dua) regu menjadi 3 (tiga) regu dan setiap regu terdiri dari 8 (delapan) orang petugas, meskipun demikian dirasa tidak mampu untuk mencakup wilayah Kota Dumai yang luas. Namun demikian terjadi penurunan jumlah kejadian kebakaran pemukiman di Kota Dumai dari Tahun 2019 yakni 25 kasus kejadian di Tahun 2020 menjadi 14 kasus
2	Tingkat waktu tanggap darurat (response time rate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) harus lebih ditingkatkan capaiannya	Adanya dukungan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH - DR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemadaman.	Telah dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di 16 Kelurahan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai, mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang berada di Kelurahan Rawan Bencana dalam proses pemadaman serta penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti mesin pemadam kebakaran dan selang di Kecamatan di Kota Dumai, sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat segera ditangani terlebih dahulu oleh pihak Kecamatan.

**Tabel 3.69 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu Perhatian lebih dari pemerintah terkait penentuan target indikator kinerja utama (IKU) bidang kesehatan, antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kinerja Bidan Desa dimana setiap ibu hamil wajib di kunjungi dan di periksa kesehatannya secara berkala, 2. lebih memperhatikan ibu hamil dengan resiko tinggi, 3. memastikan setiap ibu hamil memiliki jaminan kesehatan (BPJS). 	Menurunnya angka kematian Ibu
2	Peningkatan upaya pemerintah dalam menanggulangi penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang melebihi target	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk, 2. pembentukan satu rumah satu jumentik. 	menurunkan angka kesakitan DBD

		3. penaburan bubuk abate, 4. meningkatkan peranserta masyarakat dalam melaksanakan gotong royong	
--	--	---	--

**Tabel 3.70 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS SOSIAL KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlu koordinasi yang lebih intens dengan kementerian yang bersangkutan, agar tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian dana daerah pada program yang sama, seperti pada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar	Melakukan evaluasi terhadap program tersebut dengan hasil perlu adanya pengalihan anggaran daerah terhadap program yang sama dan telah dianggarkan oleh Kementerian Sosial	Telah dilakukan penyusunan dan penyesuaian sehingga program PMKS yang memperoleh bantuan sosial tidak lagi memperoleh bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar dari anggaran daerah sejak tahun 2019
2	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat perlu ditingkatkan	Terdapat dua (2) kegiatan yang menunjang program tersebut yaitu : 1. Pendataan PMKS dan PSKS 2. Pengembangan pendampingan PKH Dua (2) kegiatan tersebut dititik beratkan kepada Verifikasi dan Validasi Data DTKS	Telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Data DTKS sekota dumai dengan Jumlah 18,812 RT dan DTKS usulan sebanyak 2,237 RT

Tabel 3.71 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN TERKAIT URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemerintah Kota Dumai (melalui dinas terkait), agar dapat meningkatkan persentase ketercukupan sarana dan prasarana penunjang layanan yang hanya terealisasi 46%. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah mengusulkan penganggaran untuk penambahan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi kependudukan pada dokumen Renja Tahun 2020.	Karena keterbatasan anggaran, penambahan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi kependudukan yang sudah direncanakan pada dokumen Renja Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan, sehingga permasalahan ini sampai dengan tahun 2020 tidak dapat diselesaikan. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah menganggarkan penambahan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi kependudukan pada DPA Tahun Anggaran 2021.
2	Perlu mempertahankan dan meningkatkan Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator kinerja utama terkait pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar - urusan administrasi	Pada tahun 2020, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebesar 104%, dengan tingkat

		<p>kependudukan dan capil adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kinerja unit pelayanan publik administrasi kependudukan secara berkala kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menetapkan target yang terus meningkat setiap tahunnya pada dokumen rencana terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun</p>	<p>realisasi sebesar 83,41. Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini diukur melalui survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap 2.332 responden (masyarakat yang dilayani). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 capaian indikator kinerja utama ini mengalami peningkatan sebesar 3%, dimana pada tahun 2019 tingkat capaiannya adalah sebesar 101%, dengan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 78.</p>
--	--	---	--

		2020 target Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebesar 80.	
--	--	--	--

**Tabel 3.72 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlunya peningkatan persentase pengembangan data/ informasi/ statistik daerah yang baru tercapai 60%.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai telah menganggarkan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik / Daerah pada tahun 2020. Program ini dalam rangka pengembangan data statistik kota Dumai, yang didukung oleh kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah dan Penyusunan data statistik Kota Dumai	Keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan data/informasi.statatistik daerah. Dokumen yang berkaitan dengan data statistik tahun 2020 tetap tersedia, namun dokumen tersebut masih perlu penambahan konten sehingga data statistik menjadi lebih sempurna.

2	Peningkatan kualitas aparatur daerah bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan	Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur bidang komunikasi dan informatika dianggarkan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Telah dilakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan dimaksud.	Karena keterbatasan anggaran sehingga jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informatika menjadi sedikit.
---	--	--	---

**Tabel 3.73 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemerintah Kota Dumai (melalui dinas terkait), agar dapat meningkatkan persentase pemuda yang aktif	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk pembinaan pemuda tetapi masih terdapat kekurangan karena anggaran yang diperoleh terlalu kecil dan kami telah mengusulkan pada dokumen Renja Tahun 2020 dan 2021.	Karena keterbatasan anggaran, penambahan anggaran kegiatan penunjang sarana pemuda yang sudah direncanakan pada dokumen Renja Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan, sehingga permasalahan ini sampai dengan tahun 2020 tidak dapat diselesaikan. Namun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah merencanakan anggaran penambahan kegiatan tersebut pada DPA Tahun Anggaran 2021.

2	Perlu mempertahankan dan meningkatkan Potensi Objek Wisata serta event dan festival kepariwisataan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk kegiatan kepariwisataan tetapi masih terdapat kekurangan karena anggaran yang diperoleh terlalu kecil dan kami telah mengusulkan pada dokumen Renja Tahun 2020 dan 2021.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah mempunyai event yang bersifat tahunan dan merupakan event provinsi yaitu lomba mancing, dan untuk kegiatan lainnya sudah direncanakan tetapi belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran yang diberikan.
---	--	---	--

**Tabel 3.74 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Koleksi dan bahan-bahan perpustakaan perlu pemutakhiran tujuannya agar semakin banyak anggota masyarakat yang mendatangi perpustakaan	Menambah koleksi bahan Perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka	Pada tahun 2020 penambahan koleksi bahan Perpustakaan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran namun pada tahun 2021 dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Dumai telah menganggarkan penambahan koleksi bahan perpustakaan melalui DPA 2021

2	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan	Melakukan Promosi perpustakaan baik melalui sosial media maupun secara langsung melalui perpustakaan keliling, perpustakaan tugu reformasi, perpustakaan kelurahan	Pada Tahun 2020 Terjadinya penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga proses pelayanan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal namun pada tahun 2021, bidang perpustakaan berupaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung sesuai target hal ini dikarenakan adanya penambahan sarana prasarana perpustakaan melalui bantuan DAK dari Perpustnas
3	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya kearsipan harus terus ditingkatkan, seiring dengan semakin banyaknya arsip yang diurus dari tahun ke tahun	Melakukan sosialisasi mengenai kearsipan dan mengupayakan tenaga fungsional arsiparis	Pada Tahun 2020 bidang kearsipan tidak bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi SDM kearsipan dikarenakan refocusing anggaran

**Tabel 3.75 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Mempertahankan capaian jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) dan meningkatkan nilainya	Meningkatkan promosi dan mempersentasekan kepada pihak investor	terjadi kenaikan nilai investasi yang pada tahun 2019 sebesar Rp. 5,937.390,800 menjadi Rp. 12.961.297.980.000 pada tahun 2020 atau terjadi kenaikan sebesar 218% dari tahun sebelumnya
2	Program koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal realisasinya 0% karena hanya dalam bentuk koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Untuk itu, program ini harus dikaji lagi untuk tahun-tahun berikutnya	melakukan evaluasi terhadap program tersebut dan dari hasil evaluasi tersebut didapat keterangan bahwa koordinasi dan konsultasi yang dilakukan tersebut dalam rangka untuk mengetahui langkah apa aja yang perlu dilakukan serta besaran biaya yang diperlukan dalam menyusun kajian perencanaan dan pengembangan modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kota Dumai	telah dilakukan penyusunan anggaran yang komprehensif dalam membuat dokumen RUPM Kota Dumai namun karena terganjal pembiayaan pada anggaran tahun 2020 maka batal untuk dilaksanakan

**Tabel 3.76 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Semua program yang sudah dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Terutama peran anggota kelompok masyarakat dalam hal mensosialisasikan Keluarga Berencana.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah mengusulkan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peran anggota masyarakat dalam hal mensosialisasikan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada dokumen Renja Tahun 2020.	Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peran anggota masyarakat dalam hal mensosialisasikan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang sudah direncanakan pada dokumen Renja Tahun 2020 tidak dapat disosialisasikan kemasyarakat secara maksimal.

**Tabel 3.77 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera harus lebih ditingkatkan dan merata disemua kecamatan di Kota Dumai, jangan hanya ada di 1 kecamatan saja	Melaksanakan penyuluhan bagi ibu rumah tangga sebagai kepala keluarga di 7 kecamatan Kota Dumai	Kegiatan tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2020 namun tidak bisa di realisasikan di semua kecamatan karena terjadi rasionalisasi anggaran
2	Sumber daya manusia yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya, mengingat sebagai sebuah kota yang tengah berkembang pesat, permasalahan perempuan dan anak juga meningkat secara drastis di Kota	Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kegiatan tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2020 namun tidak bisa di laksanakan karena terjadi rasionalisasi anggaran.

	Dumai		
3	Pengoptimalan dalam ketersediaan data terpilah gender dan anak sebagai input analisis gender pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan responsif gender dan sebagai pendukung Kota Dumai menjadi Kota Layak Anak dengan predikat yang lebih tinggi	<p>A. Kegiatan tersebut sudah dianggarkan pada APBD 2020 namun tidak bisa di realisasikan di semua kecamatan karena terjadi rasionalisasi anggaran</p> <p>Meningkatkan koordinasi antar OPD dan instansi Vertikal dalam ketersediaan Data Gender dan Anak</p> <p>b.Meningkatkan Monev ketersediaan Data Gender dan Anak pada OPD dan Instansi Vertikal Kota Dumai</p> <p>c.Mengolah dan menganalisa Data Gender dan Anak dalam rangka penyusunan profil gender dan anak Kota Dumai</p>	<p>A.Terkoordinasinya pengumpulan dan pengolahan data, informasi Gender dan Anak</p> <p>b.Tersusunnya profil Gender dan Anak Kota Dumai dalam mewujudkan Kota Layak Anak</p>

**Tabel 3.78 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI
TERKAIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dipandang belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Perencanaan setiap tahunnya yang tertuang dalam Renstra Satpol PP. Namun dikarenakan Keterbatasan Pagu Anggaran yang diberikan, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Program dan kegiatan tersebut.	Karena keterbatasan anggaran, Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal serta kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur tidak bisa dilaksanakan untuk tahun anggaran 2019. Untuk itu kami mengharapkan kedepannya untuk dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Satpol PP, sehingga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini dapat dilaksanakan.
2	Program Penigkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dipertahankan dan lebih baik jika ditingkatkan.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan berusaha mempertahankan Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan, karena	Keberhasilan pencapaian suatu Program sangat dipengaruhi dengan faktor-faktor pendukung dibelakangnya seperti ketersediaan anggaran, Jumlah personil yang cukup serta armada yang memadai dalam

		sudah merupakan Bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP itu sendiri. Serta akan berusaha meningkatkan capaian dari Program tersebut apabila di dukung oleh anggaran yang memadai.	pencapaian tersebut. Untuk itu diperlukan dukungan dari banyak pihak, terutama pengambil kebijakan sehingga program tersebut dapat tetap terlaksana dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.
3	Peningkatan Cakupan patroli petugas Satpol PP pada lokasi yang dianggap rawan dan tempat keramaian/ hiburan. Realisasi 2,25 patroli masih dipandang rendah jika dibandingkan dengan peluang terjadinya gangguan keamanan. Apalagi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan minimal 3 patroli / Kecamatan.	Realisasi Capaian Patroli pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,25 memang cukup rendah apabila di bandingkan target dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal itu dikarenakan keterbatasan jumlah Personil Satpol PP yang ada. Apabila merujuk rumus perhitungan berdasarkan Permendagri tersebut, sebenarnya capaian yang di capai akan semakin rendah karena capaian patroli belum bisa menjangkau Kecamatan yang jauh seperti Kec. Medang Kampai, Kec. Bukit Kapur, dan Kec. Sungai Sembilan.	Untuk mencapai sasaran sebanyak 3 patroli, maka jumlah kelompok patroli yang ada harus sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 7(tujuh) kecamatan di kota Dumai. Hal itu harus di dukung dengan jumlah personil yang memadai serta jumlah armada yang bisa mendukung pelaksanaan pemenuhan target Permendagri tersebut, yaitu sebanyak 7 kelompok patroli yang melaksanakan patroli yang terbagi di 7 kecamatan, dan masing-masing-masing melaksanakan patroli sebanyak 3 Kali dalam sehari.

4	<p>Program Kapasitas Sumber daya Aparatur, sangat perlu ditingkatkan, agar tercipta aparatur yang berkualitas baik sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal.</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Perencanaan setiap tahunnya yang tertuang dalam Renstra Satpol PP. Program ini memang cukup penting dalam menciptakan aparatur Satpol PP yang berkualitas baik. Namun dikarenakan Keterbatasan Pagu Anggaran yang diberikan, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Program dan kegiatan tersebut.</p>	<p>Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal serta kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan. Untuk itu kami mengharapkan kedepannya untuk dilakukan Penambahan Pagu Anggaran untuk Satpol PP, sehingga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini dapat dilaksanakan.</p>
---	--	---	---

Tabel 3.79 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemerintah Daerah Kota Dumai, harus meningkatkan pembangunan pasar tradisional yang sesuai standar. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan pedagang tradisional yang menggantungkan hidupnya dipasar tradisional.	Dinas Perdagangan Kota Dumai telah melakukan Pembinaan pasar tradisional yang dilakukan secara bertahap baik melalui revitalisasi pasar BSM dengan dana DAK kementerian perdagangan, pada tahun 2019 yg pekerjaannya tersebar di 4 los, dengan jumlah alokasi dana lebih kurang 1,4 m, namun belum mencakup keseluruhan dan harus didukung melalui dana APBD.	Karena keterbatasan anggaran, hal tersebut belum terwujud pada tahun 2020 dan 2021 karena terbatas pagu anggaran disperdag dan juga ada nya refocusing anggaran disperdag karena covid-19.

2	<p>Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya dari hari ke hari yang semakin meningkat secara signifikan perlu dikelola dengan baik dengan melakukan: penertiban, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan monitoring. Pengelolaan dengan baik PKL ini, akan merubah wajah Kota Dumai menjadi kota tertib dan bermartabat.</p>	<p>Dinas Perdagangan Kota Dumai telah mengupayakan secara bertahap pada masa pandemi covid-19 ini dengan berbagai cara, dengan meminta dukungan dari OPD Teknis yang menangani penertiban yakni bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Kecamatan, Kelurahan, dan Asosiasi PKL dan keluarga besar pedagang kota dumai dengan membina dan mengarahkan PKL untuk menempati los 2 yg ada dipasar BSM, Pasar Lepin dan Pasar Kelakap Tujuh maupun tempat-tempat yang dikelola pihak kelurahan dan LPMK,</p>	<p>Kedepannya pengelolaan pasar tradisional milik PEMKO Dumai dan PKL menggandeng pihak kadin, bumd, pengelola pasar pulau payung dan opd terkait lainnya, dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan secara bertahap, Sebaiknya opd terkait dengan penertiban mitra disperdag, lebih fokus pada penertiban pkl lebih pagi dan schduler yg terukur terutama pada pukul 6 atau 7 pagi sudah dilakukan penertiban, kemudian los dan lapak pasar tradisional milik Pemko siap menampung pedagang PKL hasil penertiban oleh TIM dan OPD terkait.</p>
---	--	---	---

		termasuk juga dengan upaya penempatan sebagian PKL di kawasan pasar pulau payung.	
--	--	---	--

**Tabel 3.80 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019**

TERKAIT URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Harus dibuat data base koperasi di seluruh Kota Dumai, sehingga dampak positif yang diberikannya dapat dihitung secara akurat	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai sudah memiliki data base koperasi diseluruh Kota Dumai dapat dilihat melalui sistem aplikasi yang bernama Online Data Sistem (ODS) yang dibangun oleh kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai sudah memiliki data base koperasi diseluruh Kota Dumai dapat dilihat melalui sistem aplikasi yang bernama Online Data Sistem (ODS) yang dibangun oleh kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia
2	Pemko Dumai harus mendukung secara optimal pengembangan kawasan industri sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk kegiatan keterkaitan industri hulu - hilir namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan telah mengusulkan kembali pada dokumen Renja Tahun 2020 dan 2021.	Karena keterbatasan anggaran, kegiatan keterkaitan industri hulu - hilir yang sudah direncanakan pada dokumen Renja Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan, sehingga permasalahan ini sampai dengan tahun 2020 tidak dapat diselesaikan. Namun Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai telah merencanakan anggaran penambahan

			kegiatan tersebut pada DPA Tahun Anggaran 2021.
3	Harus diperbanyak pelatihan kepada pelaku industri kecil, industri menengah, termasuk industri kreatif, agar sektor perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah ini mampu menjadi sektor penyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Dumai telah mengusulkan Anggaran untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan telah mengusulkan kembali pada dokumen Renja Tahun 2020 dan 2021.	Karena keterbatasan anggaran, kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri yang sudah direncanakan pada dokumen Renja Tahun 2020 tidak bisa direalisasikan, sehingga permasalahan ini sampai dengan tahun 2020 tidak dapat diselesaikan. Namun Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai telah merencanakan anggaran penambahan kegiatan tersebut pada DPA Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 3.81 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN PERIKANAN KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Harus mempertahankan nilai konsumsi ikan yang saat ini sudah baik capaiannya.	Nilai konsumsi ikan Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga baik capaiannya. Hal itu tak lepas dari gencarnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan Kota Dumai. Sosialisasi dilaksanakan untuk seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat anak usia PAUD sampai kader posyandu. Sasaran sosialisasi juga kepada ibu-ibu PKK Kota Dumai dengan pelaksanaan lomba masak menu serba ikan yang ditujukan untuk peningkatan konsumsi ikan Kota Dumai sehingga nilai angka konsumsi ikan bisa meningkat. Sebaiknya kegiatan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan dapat terus	pengecahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat kota dumai dengan melaksanakan sosialisasi gemarikan

		dilaksanakan sehingga masyarakat Kota Dumai menyadari pentingnya makan ikan untuk kesehatan masyarakat.	
2	<p>Pembinaan terhadap kelompok nelayan harus senantiasa dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.</p> <p>Tujuannya agar ketahanan pangan di Daerah terealisasi dengan baik.</p>	<p>Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yaitu berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota dengan dilandasi oleh keinginan bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota yang disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Dumai. KUB memberikan manfaat bagi pemerintah dan anggota KUB itu sendiri. Manfaat KUB bagi pemerintah adalah meningkatkan dan mempercepat proses komunikasi dan pembinaan usaha perikanan tangkap yang berada di wilayah kewenangannya. Sedangkan untuk anggota KUB, manfaatnya adalah</p>	<p>(1) pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan; (2) sharing ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi kelompok nelayan; (3) pengembangan SDM KUB</p>

	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menumbuhkan rasa kepentingan bersama2. Meningkatkan pengelolaan kemampuan usaha3. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses dan menghimpun modal4. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama5. Memperluas kesempatan kerja6. Meningkatkan pengembangan dan diversifikasi usaha di bidang perikanan tangkap7. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing8. Meningkatkan posisi tawar unit usaha skala kecil perikanan tangkap terhadap akses teknologi, informasi, pasar dan harga9. Mempermudah proses kemitraan usaha10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil/produk, sehingga memenuhi standar nasional maupun ekspor, dan11. Meningkatkan peran dalam upaya melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya.	
--	--	--

		<p>KUB sebagai salah satu unit usaha perikanan yang dibentuk secara partisipatif oleh sekelompok nelayan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam menjalankan usaha perikananannya.</p> <p>KUB memiliki peranan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menumbuhkan kesadaran kepada seluruh anggotanya akan pentingnya sumberdaya ikan sebagai aset ketahanan masyarakat.2. Melakukan kegiatan penangkapan yang lebih efektif sesuai dengan tuntutan pasar dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya ikan.3. Mendorong anggota kub dan nelayan sekitar menggunakan teknologi penangkapan ramah lingkungan, selektif, efektif dan efisien.4. Mempertahankan kualitas hasil tangkapan melalui cara penanganan ikan yang baik di atas kapal yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai hasil tangkapan5. Menjaga habitat ikan dan lingkungan	
--	--	--	--

		ekosistemnya secara langsung dalam upaya berkelanjutan usaha penangkapan ikan.	
--	--	--	--

3	Kedepannya peningkatan jumlah luas lahan pangan abadi guna tercapainya pangan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang.	Sesuai rencana tata ruang yang sudah direvisi kawasan perikanan yang semula 300 ha, sekarang di rubah menjadi 1.060 ha di daerah kelurahan basilam baru dan kelurahan batu teritip kecamatan sungai Sembilan. Memungkinkan akan berkembang dan meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya khususnya udang vaname. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan mengundang Ketua Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang juga merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri beserta beberapa Dirjen terkait yang diwakili Direktur direkturnya melihat kawasan tambak udang Geniut di Basilam Baru, sehingga kedepan aka nada MOU antara Pemerintah Kota Dumai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan kawasan tambak udang di Geniut (tambak estate), sehingga dana APBN lebih banyak masuk di sektor perikanan dan produksi perikanan meliputi khususnya udang vaname. Terhadap luas lahan, kawasan PT. Diamond Raya Timber, kita coba membentuk kawasan ketahanan pangan di sector perikanan budidaya 3500 – 4000 ha dengan kelompok kemitraan sosial antara masyarakat yang mendiami kawasan hutan dengan pengelola hutan (Perhutanan Sosial) sehingga akan lebih meningkatkan ketahanan pangan disektor perikanan dan meningkatkan masyarakat pelaku usaha perikanan yang juga masuk dalam kawasan kerjasama dengan KKP dan Pemko Dumai (tambak estate).
---	--	---

4	Peningkatan jumlah kelompok nelayan yang dibina.	<p>Proses penumbuhan dan peningkatan KUB melalui tiga tahapan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap persiapan, yaitu proses penyamaan visi dan misi anggota serta identifikasi peluang usaha 2. Tahap pembentukan, berupa penyusunan AD/ART; dan 3. Tahap pengukuhan, yaitu fasilitasi Pembina <p>Strategi pengelolaan KUB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Dasar, berupa penataan manajemen usaha serta penyediaan sarana dan prasarana manajemen usaha 2. Strategi operasional KUB, berupa strategi pengembangan usaha dan strategi pengembangan SDM 	<p>(1) pembentukan forum KUB se-kota dumai; (2) sharing ilmu dan teknologi; (3) pengembangan KUB; dan (4) monitoring dan evaluasi kelompok nelayan per 3 bulan</p>
---	--	--	--

5	<p>Kegiatan ekstensifikasi, instensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan, perlu dilaksanakan secara optimal.</p>	<p>Ekstensifikasi → lahan potensi budidaya ikan air payau 5000 ha baru termanfaatkan 200 ha, maka perlu dilakukan perluasan/pengembangan budidaya ikan air payau dengan cara cari pengembangan investor.</p> <p>Instensifikasi → untuk meningkatkan produksi/penghasilan perlu dilakukan pengembangan teknologi budidaya seperti menggunakan kincir. Pengelolaan lahan tambak dengan menggunakan sarana prasarana produksi yang tepat yang selama ini pengelolaan budidaya air payau secara tradisional dan semi intensif.</p> <p>Diversifikasi → melakukan budidaya ikan air payau tidak hanya tergantung satu komoditas saja seperti udang vaname tetapi dilakukan dengan keanekaragaman komoditas ikan air payau seperti bandeng, nila salin, kakap dan udang windu.</p>	<p>(1) penambahan perluasan lahan budidaya dengan keanekaragaman komoditas nila salin, bandeng, dan udang vaname dengan dilakukan teknik budidaya semi instensif dan tradisional</p>
---	---	---	--

Tabel 3.82 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan Dalam Angka Kecukupan Protein	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan Sosialisasi Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) 2 Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memberikan Pengetahuan Tentang Makanan yang Bergizi (Protein) 2 Memberikan Bantuan yang dapat di manfaatkan oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan (salah satunya kebutuhan Protein)
2	Peningkatan Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengusulkan penambahan personil penyuluh pertanian baik PNS maupun Penyuluh Kontrak 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Agar tidak terjadi satu penyuluh menangani dua atau tiga wilayah binaan sehingga

		<p>agar memenuhi polivalen satu kelurahan satu penyuluh</p> <p>2 Mengaktifkan balai penyuluhan pertanian kecamatan sebagai homebase untuk pertemuan antara petani dan penyuluh</p> <p>3 Mendorong memaksimalkan proses latihan dan kunjungan (LAKU) yang di lakukan oleh penyuluh pertanian</p>	<p>memaksimalkan kinerja penyuluh tersebut</p> <p>2 Sebagai tempat petani untuk bertanya dan menyelesaikan masalah yang di hadapi tentang pengembangan pertanian</p> <p>3 Sebagai upaya memaksimalkan pendampingan penyuluhan kepada petani di setiap wilayah kelurahan</p>
3	<p>Peningkatan Produksi Pertanian dan Populasi Ternak</p> <p>a. Peternakan</p>	<p>1 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)</p> <p>2 Redistribusi ternak ke kelompok</p>	<p>1 Peningkatan populasi dan peningkatan mutu genetik ternak</p> <p>2 Peningkatan populasi dan pertumbuhan</p>

	ternak baru	jumlah
	3 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas peternak dengan pelatihan	kelompok/ peternak baru 3 Peningkatan kualitas SDM Peternak
b. Perkebunan	1 Memberikan bantuan bibit unggul 2 Melakukan peremajaan tanaman tua 3 Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan bantuan peremajaan tanaman kelapa sawit	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
c. TPH	1 Memfasilitasi bantuan sarana produksi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 2 Memperluas areal tanam komoditi tanaman pangan hortikultura	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

		<p>3 Penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara maksimal</p> <p>4 Peningkatan penyediaan dan penggunaan alat mesin pertanian</p>	
4	Mempertahankan Menurunnya Kasus Hewan Menular	<p>1 Menyiapkan anggaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta vaksinasi</p> <p>2 Melakukan sharing program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi maupun APBN melalui Tugas perbantuan di Provinsi</p> <p>3 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait</p>	Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Zoonosis dan penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman sehat utuh dan halal (ASUH)

		seperti Balai Veteriner Kementan dalam rangka mitigasi penyakit hewan	
--	--	---	--

Tabel 3.83 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	<p>Penyerapan anggaran untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa pada Program Pendidikan Anak</p> <p>Usia Dini yang 0,00% harus lebih diperhatikan karena alat praktik merupakan sarana penunjang pendidikan</p>	<p>1 Dilakukan penganggaran untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud pada setiap tahun</p> <p>2 Pengadaan bantuan barang lebih ke alat peraga dalam ruangan (APE) dalam dalam ruangan APE.</p>	<p>1 Memenuhi Standar Pelayanan Minimal khusus Paud dimana siswa Paud lbh byk bermain sambil belajar</p> <p>2 Agar dapat memenuhi indikator setiap tema</p> <p>pelajaran yg akan disampaikan guru</p>

2	<p>Pengadaan perlengkapan Sekolah Tingkat SMP yang hanya 34,34% harus lebih ditingkatkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengusulkan kembali pada tahun berikutnya 2 Mengusulkan pada menu DAK 3 Merekapitulasi kebutuhan perlengkapan Sekolah Tingkat SMP 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah SMP 2 Menurunkan beban APBD terhadap kebutuhan alat/ perlengkapan kantor 3 Memenuhi kebutuhan perencanaan perlengkapan Sekolah SMP
3	<p>Adanya anggaran pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, agar kompetensi dan kualitas lulusan meningkat.</p>	<p>melaksanakan diseminasi modul 2 tahun 2020 untuk meningkatkan manajemen sekolah dan kurikulum bagi pendidik tingkat SMP</p> <p>Diseminasi Program di Kota Duma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelatihan difasilitasi oleh Fasda Tanoto dari sekolah mitra 2 MBS : Diseminasi MBS Modul 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membangun contoh praktik baik dalam pembelajaran, manajemen, dan kepemimpinan sekolah Mendukung pemerintah daerah dalam 2 menyebarluaskan praktik baik ke sekolah di daerah masing-masing. 3 Mendukung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam meningkatkan mutu

		untuk semua SMP/MTs	pendidikan calon guru
4	Kegiatan Pembangunan infrastruktur sekolah-sekolah di Kota Dumai sudah sangat baik, diharapkan kedepannya agar memperhatikan pembangunan Infrastruktur secara khusus didaerah pinggiran.	<p>3 Pembelajaran : Diseminasi Pembelajaran Modul 2 semua SMP/MTs</p> <p>Pemantauan : Pelatihan APS (Pemantauan Kualitas), semua Pengawas SMP/MTS</p> <p>1 Diusulkan melalui dana dari pusat BNPB (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)</p> <p>3 Diusukan melalui dana DAK Reguler Afirmasi</p>	<p>dan guru dalam jabatan, serta mengembangkan program penelitian.</p> <p>1 Membantu kekurangan anggaran dalam melakukan reha bilitasi sekolah.</p> <p>2 Meningkatkan pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan</p>

**Tabel 3.84 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019
TERKAIT URUSAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Sosialisai yang lebih massif agar capaian jumlah KIR angkutan umum dapat dilakukan secara keseluruhan.	Akan berupaya melakukan sosialisai untuk lebih banyak ke masyarakat pengguna jasa kir sehingga dapat motivasi atau pun meningkatkan minat untuk membawa kendaraannya untuk dapat di kiur tepat pada waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kenyamanan untuk pengguna kendaraan bermotor dan dapat mencegah kecelakaan di jalan raya yang berdampak pada diri sendiri dan juga pada orang lain. 2. Dengan adanya kesadaran masyarakat melakukan kiur secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat secara signifikan.
2	Perlu ditemukan cara agar rendahnya minat masyarakat untuk memakai sarana transportasi angkutan perkotaan akibat kurangnya peremajaan angkutan dapat di	faktor - faktor yang mempengaruhi penurunan minat pengguna angkutan perkotaan/ mikrolet di Kota Dumai, pengguna angkutan umum lebih mengutamakan angkutan alternatif seperti taksi	Faktor Dominan yang mempengaruhi penurunan minat pengguna angkutan perkotaan umum (oplet) di Kota Dumai adalah faktor dimana kebersihan, kenyamanan serta fasilitas angkutan umum yang nyaman selama dalam perjalanan

	tingkatkan.	online/ grab dan lain - lain.	masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
3	Seluruh angkutan kota harus didorong memiliki lain trayek.	Faktor semakin banyaknya angkutan online dan menurunnya peminat angkutan umum (oplet) sehingga tidak lagi pengurus oplet yang memperpanjang izin, dan semakin sulit untuk lulus uji kendaraan (kiur) karena oplet semakin tua.	Solusi perlu disatukan izin angkutan perkotaan dan dipermudah masalah izin laik jaln (kiur) oplet tersebut.
4	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Kedepannya akan ditingkatkan pemasangan rambu - rambu dengan cara mendata setiap ruas jalan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan kewenangan kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. 2. Bagi pengguna jalan raya dapat memberikan petunjuk maupun arah yang jelas.

**Tabel 3.85 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019
TERKAIT URUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N 1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.	Jumlah peserta bukan karena kurangnya sosialisasi, dengan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai tersebut hanya untuk 48 peserta, sehingga untuk kedepan mendapatkan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Dengan tindak lanjut tersebut dapat memecahkan kurangnya peserta pelatihan dan juga dapat ditingkatkan upaya sosialisasi di yengah masyarakat. Agar masyarakat mendapatkan informasi tentang pelatihan yang sesuai bakat dan minatnya, sehingga dengan keterbatasan kesempatan kerja disektor formal maka terbuka kesempatan informal melalui kegiatan kewirausahaan.

Tabel 3.86 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2020	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pemerintah Kota Dumai harus mampu meningkatkan kapasitas dalam menangani jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap hari, tanpa itu maka kota dumai tidak akan pernah bersih dari sampah, karena adanya selisih yang cukup besar antar sampah yang tertangani sebesar 61.320 M3/tahun. dengan sampah yang dihasilkan sebesar 109.956,25 M3/tahun. Untuk itu perlu	Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana agar pengelolaan sampah berjalan optimal namun karena keterbatasan anggaran peningkatan sarana dan prasarana belum dapat dilaksanakan secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelu Komitmen Pemerintah dalam Menuntaskan masalah Persampahan 2. Tindak Lanjut Program kegiatan persampahan yang berkelanjutan 3. Prioritas Anggaran dalam program Pengelolaan Sampah 4. Sosialisasi kepada seluruh stake Holder dan elemen masyarakat dalam pengentasan persampahan

<p>peningkatan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan sarana dan prsarana yang belum maksimal.</p>		<p>5. Penambahan sarana dan prasarana persampahan dalam penanggulangan Sampah di Kota Dumai</p>
---	--	---

Tabel 3.87 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Harusnya ditingkatkannya pembangunan infrastruktur dasar dan utilitas umum di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah mengusulkan penganggaran sesuai tupoksi pada dokumen Renstra dan Renja 2020 - Sesuai kewenangan yang telah disepakati bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya menangani Jalan lingkungan perumahan dan kawasan Permukiman dibawah 3 meter dan drainase lingkungan dibawah 0,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2019 Dinas Perkim telah mencapai target IKU sebesar dengan realiasi 3,95 % terhadap target 3,48% dengan realisasi capaian sebesar >100% dengan jumlah 61 paket pekerjaan infrastruktur - Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2020 menjelaskan bahwa target 2020 sebesar 3,5 % dengan realisasi 0,26 dengan capaian 7,4 % karena terjadi pengurangan paket pekerjaan akibat Refocusing Anggaran penanganan covid-19 Tahun 2020 dengan jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 4 paket

		<p>- Sedangkan utilitias umum belum dapat dilaksanakan disebabkan belum jelasnya aturan yang mengatur tentang kewenangan utilitas tersebut kecuali TPU yang telah dikelola oleh perkim.</p>	
--	--	---	--

Tabel 3.88 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA DUMAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 TERKAIT URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan dalam pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, air bersih dan drainase	Dalam Pelaksanaan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PUPR mendapatkan sumber pendanaan di luar APBD yaitu Dana Alokasi Khusus, yang menunjang peningkatan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan air bersih. Dinas PUPR juga melakukan upaya percepatan dalam pembangunan Air Bersih di Kota Dumai, yaitu Program SPAM Regional DUROLIS, Program Kerjasama Pemerintah Kota Dumai dengan Badan	Dengan adanya sumber pendanaan selain APBD, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), mengurangi beban daerah yang memiliki keterbatasan Anggaran. Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6. program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai. sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun

		<p>Usaha (KPBU) dan Program Bank Dunai melalui Kegiatan NUWSP (National Urban Water Supply)</p>	<p>2021. NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik. KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik. SPAM Regional Durolis naantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022</p>
2	<p>Tetap berkomitmen dalam pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu mendukung dan menganggarkan kegiatan Pemeliharaan Alat Berat dan Laboratorium, dan mengusulkan pengadaan Alat Berat Baru untuk menunjang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, serta menyeimbangkan jumlah operator dengan alat-alat berat maupun alat laboratorium</p>	<p>Karena Keterbatasannya Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 hanya dapat mengadakan 1 unit alat berat yaitu excavator mini, diharapkan dengan adanya pengadaan alat berat baru dapat menunjang pelaksanaan program sarana dan prasarana kebinamargaan.</p>

3	Meningkatkan realisasi program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang penyerapan anggarannya pada tahun 2019 hanya mencapai 30,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan Kegiatan serta Penganggaran untuk Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Karena keterbatasan Anggaran Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tidak dapat dilaksanakan secara optimal, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat kegiatan-kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan, sehingga Program ini dapat menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
---	--	--	--



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tugas pembantuan dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan. Adapun rincian Program dan kegiatan tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.04.4.099315/2020 (revisi 5) tanggal 22 Juli 2020. Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

- Pengembangan Cabe Merah 20 Ha.
- Pengembangan Cabe Rawit 5 ha, dan
- Pengembangan Bawang Merah 10 Ha

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat sebesar Rp.493.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp.461.801.440,- atau 93,51%.

2. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Propinsi Riau, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.03.099314/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Propinsi Riau Nomor : 180/ DISPTPH-PANGAN/85 tanggal 06 Februari

2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran APBN Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun Anggaran 2020. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 1.022.171.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.019.771.500,- atau 99,77%.

3. Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas pembantuan ini merupakan Tugas Pembantuan Mandiri Propinsi dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaana dan sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-018.08.4.099322/2020 tanggal 03 Februari 2020. Jumlah alokasi anggaran untuk Dumai Rp. 312.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.278.596.000,- atau 89,17%. Dasar pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor 188/DISPTPH-PSP/88 tanggal 06 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan meliputi PPK, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah membayar dan bendahara pengeluaran serta bendahara penerimaan anggaran APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Tugas Pembantuan Dari Badan Ketahanan Pangan

Tugas pembantuan ini dengan Nomor : SP-DIPA-018.11.14.099426/2020 tanggal 12 Desember 2019, merupakan dana tugas pembantuan yang dititipkan melalui kegiatan dekosentrasi Badan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau yang kegiatannya dialokasikan untuk Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau Nomor :

OT.210/13/SATKER-DPTPH/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Teknis / Kegiatan dekonsentrasi satuan kerja Dinas Pangan, Tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau di Kota Dumai. Tugas pembantuan ini terdiri dari 1 program yakni ; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 591.295.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 591.295.000,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a) Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.564.285.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.564.285.000,- Atau 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu ; (1) Pendampingan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) dengan target 12 kelompok yang terdiri dari 7 (tujuh) kelompok tahap penumbuhan dan 5 (lima) kelompok tahap pengembangan dan terealisasi sebanyak 12 kelompok (7 kelompok penumbuhan dan 5 kelompok pengembangan).

2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.8.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.200.000,- Atau 100% dari anggaran.

b) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.18.810.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.18.810.000,- Atau 100,00% dari anggaran.



BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2020 disampaikan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan amanah pembangunan dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Akhirnya disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai untuk dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 ini untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

 **WALI KOTA DUMAI**
H. PAISAL, SKM, MARS





PEMERINTAH KOTA DUMAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882

DUMAI – RIAU

e-mail : inspektoratkotadumai@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Dumai untuk tahun anggaran 2020 sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Subtansi informasi yang dimuat dalam LKPJ menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Dumai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas LKPJ yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, perlu dilakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi yang diberikan sehingga tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam LKPJ ini.

Dumai, 25 Maret 2020

INSPEKTUR DAERAH,

SYAHRUL RIZAL, SH
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19641218 199303 1 003